

2024



DINAS PERTANIAN DAN PANGAN  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



## KATA PENGANTAR



2019-2024.

Laporan Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun anggaran 2024. Laporan Kinerja ini merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Tahun

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem AKuntabilitas Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan, dan wujud transparansi/pertanggungjawaban kepada masyarakat, serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan. Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target karena ketahanan pangan dan peningkatan pertumbuhan produksi pertanian sangat ditentukan oleh komitmen keterlibatan dan

dukungan aktif segenap komponen satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian integral dari pencapaian ketahanan pangan.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Dinas Pertanian dan Pangan secara keseluruhan dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Polewali Mandar.

Polewali 10 Februari 2025

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan  
Kabupaten Polewali Mandar

ANDI AFANDI RAHMAN, ST, M.Si

Pangkat: Pembina Tk. I

NIP: 197804241998031003



## DAFTAR ISI

<b>Kata Pangantar</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Tabel</b>	<b>iii</b>
<b>Ringkasan Eksekutif</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A. Latar Belakang	<b>1</b>
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar	<b>4</b>
C. Isu Strategis dan Permasalahan Dinas Pertanian dan Pangan	<b>16</b>
<b>BAB II</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA</b>
A. Rencana Strategis	<b>21</b>
B. Perjanjian Kinerja	<b>31</b>
<b>AKUNTABILITAS KINERJA dan KEUANGAN</b>	
<b>BAB III</b>	<b>A. Akuntabilitas Kinerja</b>
	<b>40</b>
	<b>B. Akuntabilitas Keuangan</b>
	<b>131</b>
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>
A. Kesimpulan	<b>138</b>
B. Saran	<b>138</b>

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
2. Pengukuran Kinerja Tahun 2024
3. Realisasi Anggaran Tahun 2024
4. Pohon Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024
5. Laporan Monev Rencana Aksi tahun 2024
6. Evaluasi Internal Tahun 2024

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Sarana Penunjang Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar	<b>8</b>
Tabel 2	Prasarana Penunjang Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar	<b>10</b>
Tabel 3	Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024	<b>25</b>
Tabel 4	Penjelasan singkat Indikator Kinerja Sasaran Pertama Dinas Pertanian dan Pangan	<b>27</b>
Tabel 5	Penjelasan singkat Indikator Kinerja Sasaran Kedua Dinas Pertanian dan Pangan	<b>28</b>
Tabel 6	Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024	<b>31</b>
Tabel 7	Anggaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024	<b>32</b>
Tabel 8	Capaian Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2024 Berdasarkan Perjanjian Kinerja	<b>40</b>
Tabel 9	Target dan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2024	<b>43</b>
Tabel 10	Bobot Indikator Kabupaten dalam Penyusunan Indeks Ketahanan Pangan	<b>44</b>
Tabel 11	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Menunjang Ketahanan Pangan	<b>53</b>
Tabel 12	Target dan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2024	<b>57</b>
Tabel 13	Realisasi Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Sawah menurut Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar	<b>59</b>
Tabel 14	Realisasi Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Ladang Menurut Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar	<b>60</b>
Tabel 15	Realisasi Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Jagung Menurut Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar	<b>64</b>
Tabel 16	Realisasi Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Kedelai Menurut Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar	<b>67</b>

Tabel 17 Produksi Buah-Buahan Tahun 2019-2024 di Kabupaten Polewali Mandar	<b>71</b>
Tabel 18 Produksi Sayuran Tahun 2019-2024 di Kabupaten Polewali Mandar	<b>75</b>
Tabel 19 Luas Areal, Jumlah Produksi, dan Produktivitas Kakao menurut Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar	<b>78</b>
Tabel 20 Produksi Kelapa Dalam Tahun 2019-2024 di Kabupaten Polewali Mandar	<b>80</b>
Tabel 21 Produksi Kelapa Hybrida Tahun 2019-2024 di Kabupaten Polewali Mandar	<b>81</b>
Tabel 22 Produksi Kopi Robusta Tahun 2019-2024 di Kabupaten Polewali Mandar	<b>83</b>
Tabel 23 Produksi Kopi Arabika Tahun 2019-2024 di Kabupaten Polewali Mandar	<b>84</b>
Tabel 24 Populasi Sapi Tahun 2022-2024 di Kabupaten Polewali Mandar	<b>88</b>
Tabel 25 Populasi Kambing Tahun 2022-2024 di Kabupaten Polewali Mandar	<b>91</b>
Populasi Unggas Tahun 2022-2024 di Kabupaten Polewali Mandar	
Tabel 26 Target dan Realisasi Vaksinasi Rabies Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024	<b>93</b>
Tabel 27 Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Menunjang Pencapaian Sasaran 2	<b>104</b>
Tabel 28 Target dan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2024	<b>110</b>
Hasil Evaluasi LAKIP Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023	
Tabel 30 Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Menunjang Indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah	<b>116</b>
Tabel 31 Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Menunjang Administrasi Keuangan	<b>121</b>
Tabel 32 Jenis Layanan pada Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2024	<b>123</b>
Tabel 33 Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM	<b>126</b>
Tabel 34 Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Menunjang Manajemen Perkantoran	<b>129</b>
Tabel 35 Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Menunjang Manajemen Perkantoran	<b>130</b>

Tabel 36 Nilai Efisiensi pada Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2024

134

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar	5
Gambar 2	Komposisi Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanian dan Pangan Menurut Tingkat Pendidikan, Tahun 2024	6
Gambar 3	Komposisi Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanian dan Pangan Menurut Golongan, Tahun 2024	6
Gambar 4	Komposisi Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanian dan Pangan Menurut Eselon, Tahun 2024	7
Gambar 5	Komposisi Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanian dan Pangan Menurut Jabatan, Tahun 2024	7
Gambar 6	Struktur Belanja APBD Perubahan Distanpan Tahun 2024	13
Gambar 7	Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2019-2024	15
Gambar 8	Perbandingan Capaian Nilai Indeks Ketahanan Pangan dalam Kurung Waktu Lima Tahun Terakhir dibandingkan Target Capaian Renstra	28
Gambar 9	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan di Kabupaten Polewali Mandar	31
Gambar 10	Kerangka Intervensi untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan	33
Gambar 11	Capaian Persentase Pertumbuhan Produksi Padi dalam Kurung Waktu Lima Tahun Terakhir dibandingkan Target Capaian Renstra	40
Gambar 12	Capaian Persentase Pertumbuhan Produksi Jagung dalam Kurung Waktu Lima Tahun Terakhir dibandingkan Target Capaian Renstra	45
Gambar 13	Capaian Persentase Pertumbuhan Produksi Kedelai dalam Kurung Waktu Lima Tahun Terakhir dibandingkan Target Capaian Renstra	48
Gambar 14	Capaian Persentase Pertumbuhan Produksi Buah-Buahan dalam Kurung Waktu Lima Tahun Terakhir dibandingkan Target Capaian Renstra	52

Gambar 15	Capaian Persentase Pertumbuhan Produksi Sayuran dalam Kurung Waktu Lima Tahun Terakhir dibandingkan Target Capaian Akhir Renstra	55
Gambar 16	Capaian Persentase Pertumbuhan Produksi Kakao dalam Kurung Waktu Lima Tahun Terakhir dibandingkan Target Capaian Akhir Renstra	58
Gambar 17	Capaian Persentase Pertumbuhan Produksi Kelapa Dalam Kurung Waktu Lima Tahun Terakhir dibandingkan Target Capaian Akhir Renstra	79
Gambar 18	Capaian Persentase Pertumbuhan Produksi Kopi Dalam Kurung Waktu Lima Tahun Terakhir dibandingkan Target Capaian Akhir Renstra	82
Gambar 19	Capaian Persentase Pertumbuhan Populasi Sapi Dalam Kurung Waktu Lima Tahun Terakhir dibandingkan Target Capaian Akhir Renstra	87
Gambar 20	Capaian Persentase Pertumbuhan Populasi Kambing Dalam Kurung Waktu Lima Tahun Terakhir dibandingkan Target Capaian Akhir Renstra	89
Gambar 21	Capaian Persentase Pertumbuhan Populasi Unggas Dalam Kurung Waktu Lima Tahun Terakhir dibandingkan Target Capaian Akhir Renstra	92
Gambar 22	Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis Tahun 2024	96
Gambar 23	Jumlah Kasus Penyakit Hewan Strategis Tahun 2024	97
Gambar 24	Cakupan Vaksinasi dan Pengobatan Antraks Tahun 2016-2024	98
Gambar 25	Realisasi Vaksinasi dan Pengobatan PMK Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022-2024	100
Gambar 26	Distribusi Penyakit ASF, Jembrana dan PMK Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2024	102
Gambar 27	Cakupan Layanan Kesehatan Hewan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024	103
Gambar 28	Realisasi Vaksinasi Rabies Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024	105
Gambar 29	Jumlah Ternak Masuk dan Keluar Wilayah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2024	106
Gambar 30	Ragam Ternak yang Masuk Wilayah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024	107

Gambar 31	Ragam Ternak yang Keluar Wilayah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024	107
Gambar 32	Perbandingan Capaian LAKIP dalam Kurung Waktu Tiga Tahun Terakhir dibandingkan Target Capaian Akhir Renstra	119
Gambar 33	Perbandingan Capaian IKM dalam Kurung Waktu Tiga Tahun Terakhir dibandingkan Target Capaian Akhir Renstra	125
Gambar 34	Alokasi Anggaran dan Realisasi Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2024	132

## RINGKASAN EKSEKUTIF

LAKIP merupakan wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, sebagai bentuk pertanggungjawabkan atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan didalam Rencana Kinerja, pengukuran kinerja dan evaluasi OPD. LAKIP juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, sebagai bahan evaluasi dan penilaian terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja organisasi, sehingga kedepannya dapat dilakukan perbaikan kebijakan, strategi dan aksi untuk hasil yang lebih optimal.

Perencanaan Kinerja Tahun 2024 Dinas Pertanian dan Pangan memiliki 3 (tiga) sasaran strategis dan 15 indikator dengan target dan capaian sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2024	REALISASI 2024	%
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks ketahanan pangan	73.87	75.87	103
2	Meningkatnya kapasitas produksi sektor pertanian	Persentase pertumbuhan produksi padi	0.1%	-1%	(1,000)
		Persentase pertumbuhan produksi jagung	0.1%	-42%	(42,000)
		Persentase pertumbuhan produksi kedelai	0.1%	1797%	1,797,000

	Persentase pertumbuhan produksi buah-buahan	0.1%	3%	3,000
	Persentase pertumbuhan produksi sayuran	50%	-36%	(72)
	Persentase pertumbuhan produksi Kakao	1.5%	0.04%	3
	Persentase pertumbuhan produksi Kelapa	1%	0.12%	12
	Persentase pertumbuhan Produksi Kopi	3%	3.29%	110
	Persentase pertumbuhan Populasi Sapi	0.1%	0.50%	500
	Persentase pertumbuhan Populasi Kambing	1%	0.69%	69
	Persentase pertumbuhan Populasi Unggas	1%	0.08%	8
3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Predikat SAKIP perangkat daerah	BB	BB
		Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	100%	100%
		Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Sangat Baik	Sangat Baik
	<b>KINERJA RATA-RATA</b>		<b>346.39</b>	<b>361.62</b>
				<b>104</b>

Untuk pencapaian sasaran tersebut telah dialokasikan anggaran tahun 2024 **sebesar Rp 31.079.610.901,-** dan terealisasi **Rp 27.923.512.117,-** atau persentase realisasi keuangan **89.85%**, dengan rata-rata pencapaian kinerja **104%**. Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja ada Tabel T-E-1 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Dinas Pertanian dan Pangan berada pada kategori realisasi kinerja **Tinggi** yaitu berada pada interval nilai realisasi kinerja  $76\% \leq 90\%$ . Sedangkan dari segi efisiensi penggunaan anggaran Dinas Pertanian dan Pangan mampu melakukan efisiensi sebesar **15%**. Efisiensi tersebut terdapat pada pelaksanaan program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dan penyuluhan pertanian.

## BAB I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

#### Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pertanian dan Pangan selaku unsur pelaksana urusan Pangan dan Pertanian yang menjadi kewenangan Daerah, dituntut selalu melakukan pemberian kinerja. Pemberian kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Pertanian dan Pangan sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Polewali Mandar, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga memperhatikan

tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan telah berakhirnya tahun anggaran 2024 dan sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar sebagai entitas SAKIP wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dalam Penyusunan Laporan ini, diungkapkan capaian kinerja organisasi yang membandingkan antara target dengan realisasi, realisasi kinerja tahun berkenaan dengan tahun-tahun sebelumnya.

## **1. Dasar Hukum Penyusunan LAKIP**

Dasar Hukum penyusunan LAKIP Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2024, sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas pelaporan kinerja instansi pemerintah;
- e. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
- f. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

## **2. Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP**

Maksud penyusunan LAKIP Dinas Pertanian dan Pangan yakni menyediakan dan memberikan informasi terkait pencapaian kinerja secara terukur dengan memberikan perbandingan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya, perbandingan dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya, keberhasilan dan kegagalan, serta efisiensi sumber daya dan akuntabilitas keuangan.

Tujuan penyusunan LAKIP yakni sebagai wujud pertanggungjawaban dan alat ukur untuk mengetahui kemampuan OPD dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi serta sebagai bahan dalam melakukan perbaikan secara berkesinambungan dalam pencapaian kinerja organisasi yang telah ditetapkan.

## B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12) dan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- **Kedudukan**

Dinas Pertanian dan Pangan merupakan unsur pelaksana urusan Pertanian dan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.

- **Tugas Pokok**

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar mempunyai Tugas Pokok untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pertanian dan Pangan yang menjadi kewenangan Daerah.

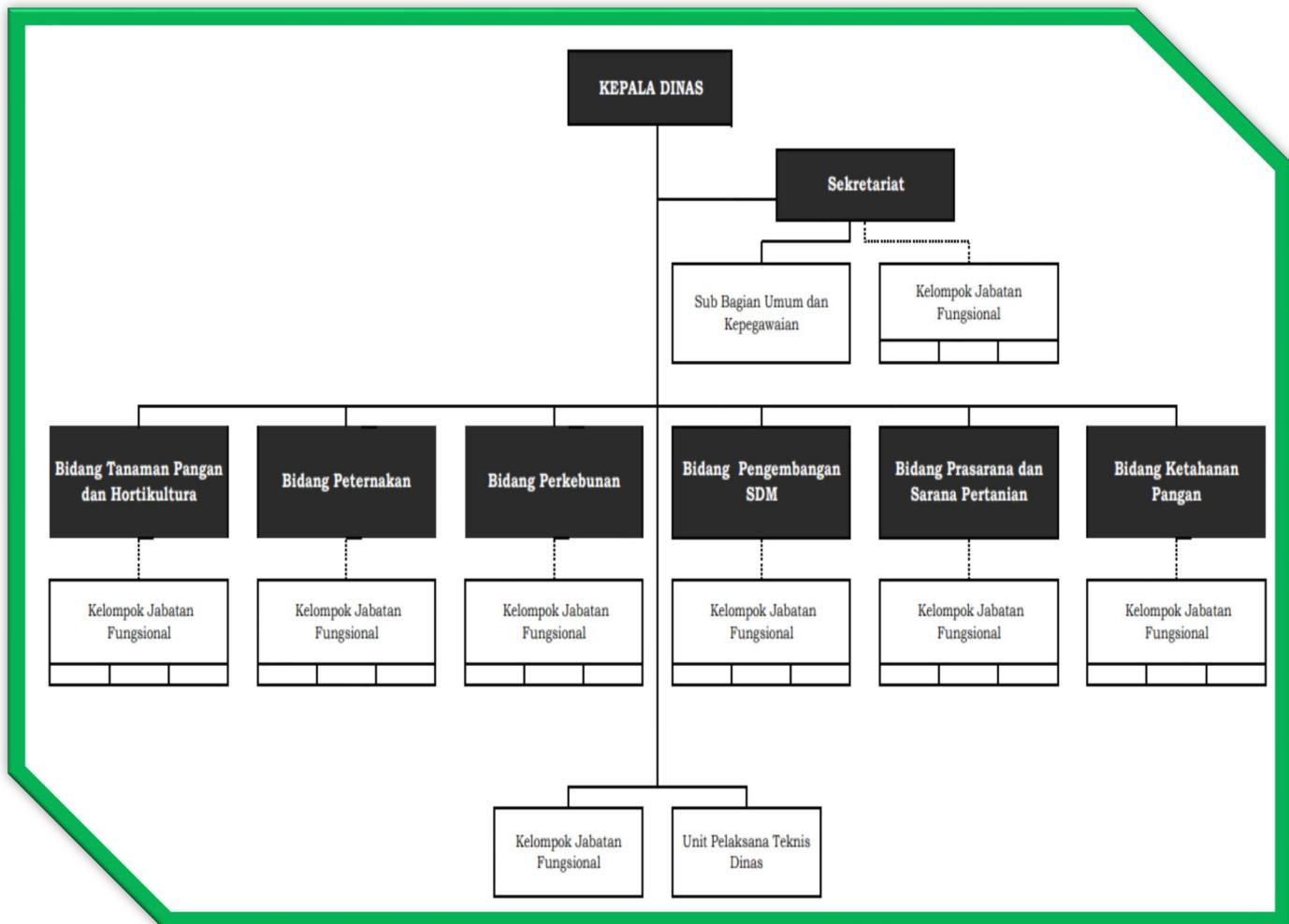
- **Fungsi**

Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut diatas, Dinas Pertanian dan Pangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan Pertanian dan Pangan;
- Pelaksanaan kebijakan Pertanian dan Pangan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Pertanian dan Pangan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

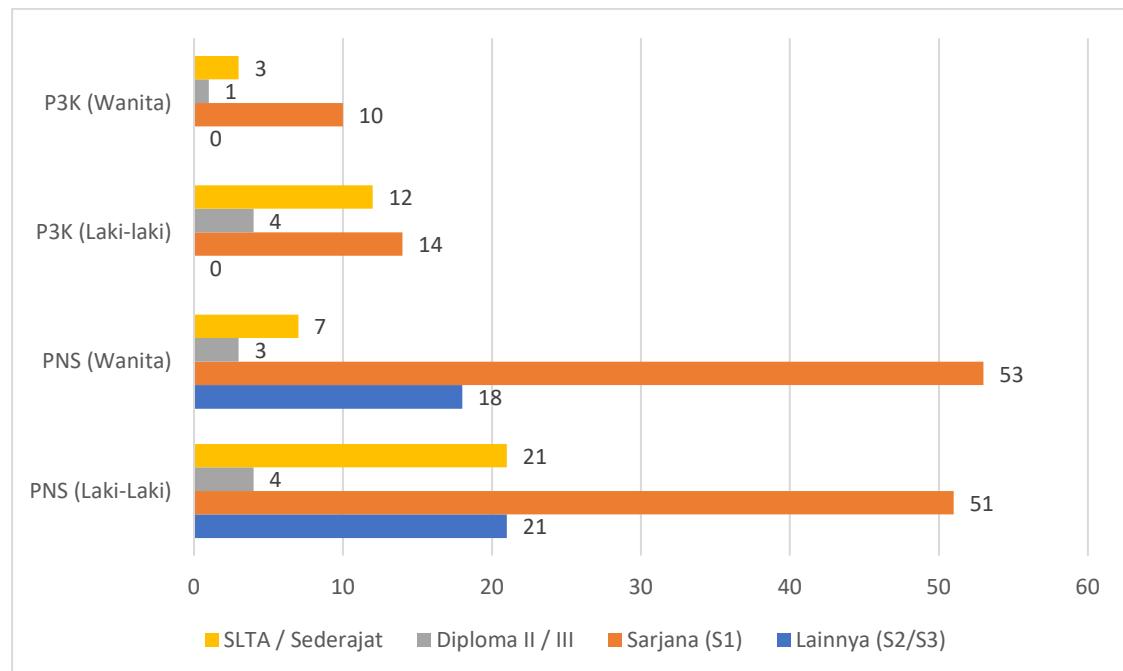
Mengenai Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar dapat dilihat pada gambar 1 berikut :

**Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar**

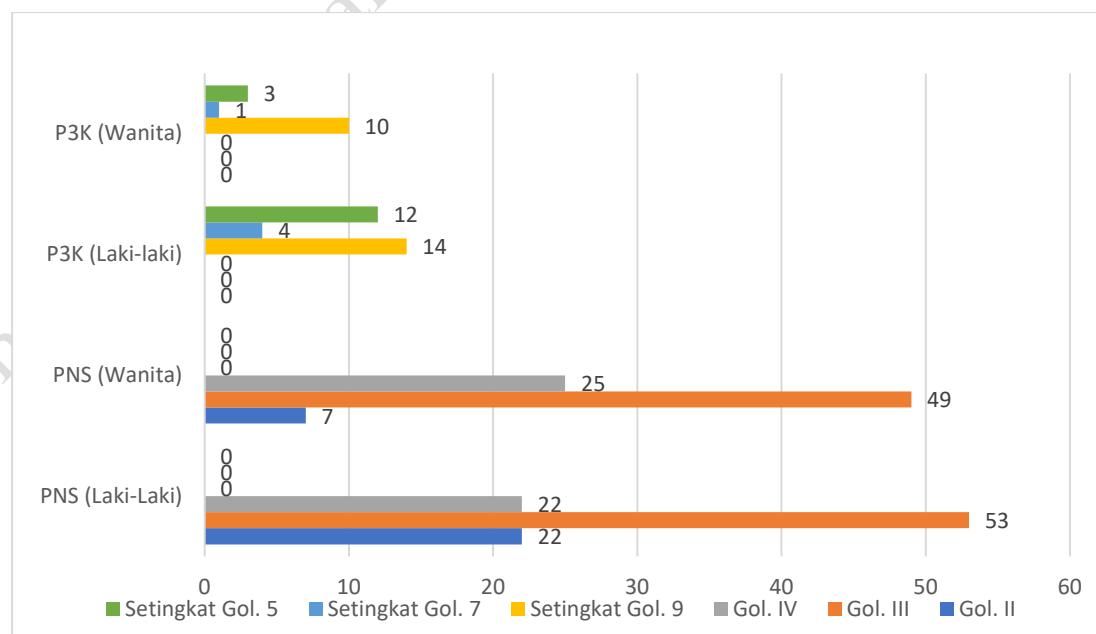


Banyaknya Aparatur Sipil Pegawai Negeri Sipil dirinci menurut Pendidikan, Golongan dan Eselon keadaan Desember Tahun 2024, sebagai berikut :

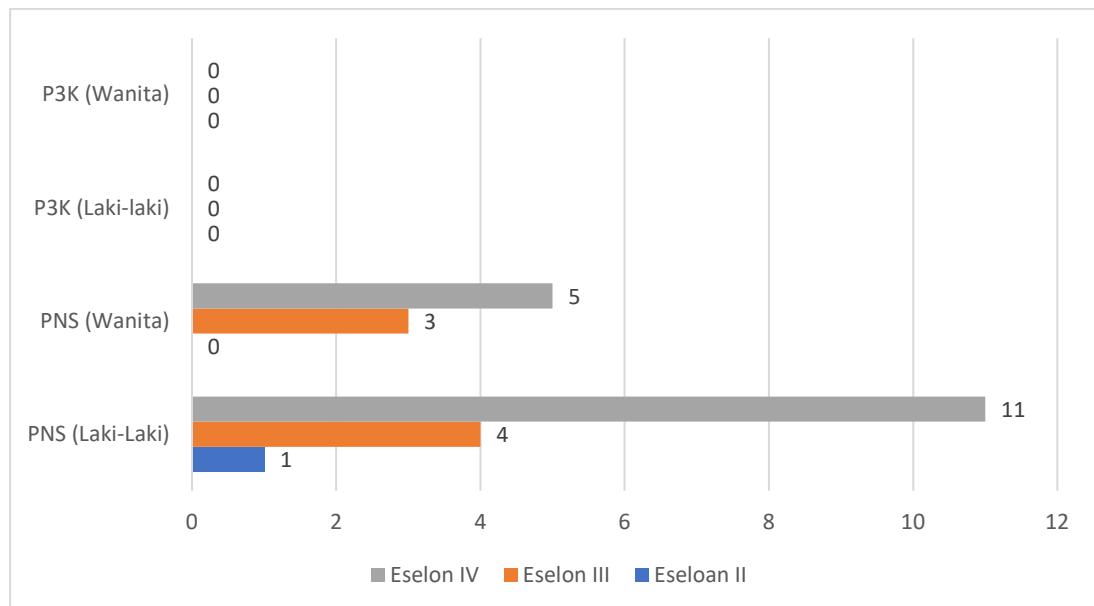
**Gambar 2.**  
**Komposisi Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanian dan Pangan**  
**Menurut Tingkat Pendidikan, Tahun 2024**



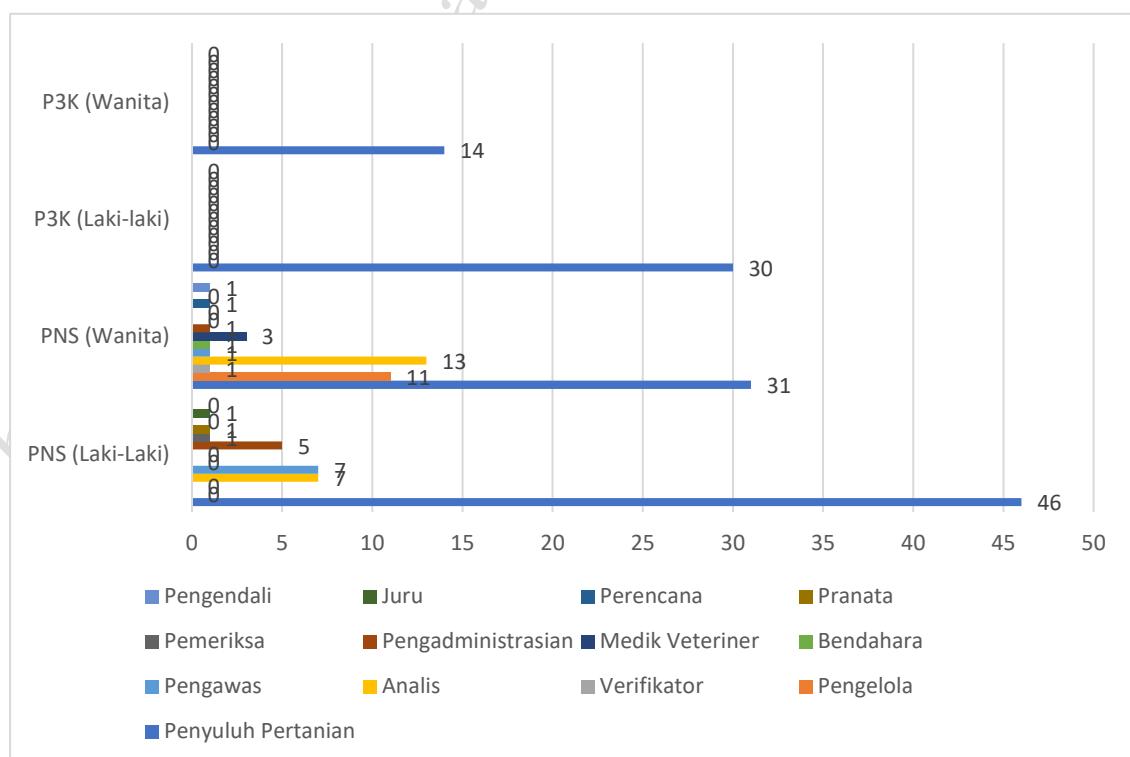
**Gambar 3.**  
**Komposisi Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanian dan Pangan**  
**Menurut Golongan, Tahun 2024**



**Gambar 4.**  
**Komposisi Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanian dan Pangan**  
**Menurut Eselon, Tahun 2024**



**Gambar 5.**  
**Komposisi Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanian dan Pangan**  
**Menurut Jabatan, Tahun 2024**



## Sarana dan Prasarana

Keadaan Sarana dan Prasarana Penunjang pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar, keadaan Tahun 2024 pada tabel berikut :

**Tabel 1. Sarana Penunjang Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar**

No	Sarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak
1	2	3	4	5	6
1	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	1		
2	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	1		
3	Kursi Tamu	4	3	1	
4	Meja Pejabat Eselon III	7	7		
5	Kursi Kerja Esselon III	7	7		
6	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	21	21		
7	Meja Kerja Kayu	88	73		15
8	Meja Kerja Besi/Metal	3			3
9	Meja Kerja Rapat lainnya	25			
10	Kursi Kerja Pejabat Esselon IV	21	21		
11	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	188	188		
12	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	299	250	40	9
13	Kursi T Tamu Biasa	80	80		
14	Kursi Fiber Glas/Plastik	200	200		
15	Kursi Pejabat Lainnya	12	12		
16	Kursi Rapat	385	300		85
17	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	60	60		
18	Kursi Tamu	1	1		
19	Lemari Buku Arsip untuk Arsip Dinamis	35	35		
20	Lemari Buku untuk perpustakaan	1	1		
21	Lemari Kaca	19	19		
22	Lemari Kayu	16	8		8
23	Lemari Penyimpanan	8	8		

<b>24</b>	Papan Visual/Papan Nama	2	2			
<b>25</b>	Papan Nama Instansi	4	4			
<b>26</b>	Rak Kayu	3	3			
<b>27</b>	Rak Besi	1	1			
<b>28</b>	Wireles	15	15			
<b>29</b>	Lemari Buku Pejabat Eselon II	1	1			
<b>30</b>	Televisi	5	2	1		2
<b>31</b>	Air Conditioner (AC) Split	28	12			16
<b>32</b>	Kaca Hias	3	3			
<b>33</b>	Wireless Microphone	15	15			
<b>34</b>	Lcd Proyektor	10	10			
<b>35</b>	Filling Kabinet	1	1			
<b>36</b>	Papan Tulis White Board	20	20			
<b>37</b>	Dispenser + Rak Dispenser	3	3			
<b>38</b>	Lemari Arsip Kaca	28	28			
<b>39</b>	Lemari Besi / Metal	29	29			
<b>40</b>	Mesin Telpon / Faximile	1				1
<b>41</b>	Absen Elektronik	1				1
<b>42</b>	Personal Computer ( PC )	5	3			2
<b>43</b>	Lemari Arsip Kayu	30	30			
<b>44</b>	Wireless	17	17			
<b>45</b>	Papan Struktur Organisasi	29	29			
<b>46</b>	Sound Sistem	20	20			
<b>47</b>	Hardisk External	1	1			
<b>48</b>	Kipas Angin	32	32			
<b>49</b>	Jam Dinding	20	20			
<b>50</b>	Kamera Digital	3	2			1
<b>51</b>	Layar Lcd Proyektor	10	10			
<b>52</b>	Kursi Rapat	140	120	20		
<b>53</b>	Laptop / Notebook	31	11	10		10
<b>54</b>	Printer Canon IP 2770	95	36			59
<b>55</b>	Meja Rapat	28	26	2		
<b>56</b>	Motor	141	131	10		0
<b>57</b>	Motor 3 Roda	3	1	2		
<b>58</b>	Mobil	6	2	3		1
<b>59</b>	Printer	57	37	10		10

*Sumber : Buku Inventaris Barang Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Polman, 2023*

**Tabel 2. Prasarana Penunjang Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar**

No	PRASARANA	ALAMAT/ UPDATE LOKASI	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Mr. Muh. Yamin No. 177 Manding Kel. Madatte ( samping klinik manding)	Baik		
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Mr. Muh. Yamin No. 177 Manding Kel. Madatte ( samping klinik manding)	Baik		
3	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Jl. Mr. Muh. Yamin No. 177 Manding Kel. Madatte ( samping klinik manding)	Baik		
4	Rumah Negara Golongan III Tipe C Permanen	Pekkabata Kel. Darma (	Baik		
5	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Wonomulyo Prapatan 4 lampu merah Belok Kanan	Baik		
6	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Gatot Subroto Ling.Koppe Kel. Darma samping kantor PLN	Baik		
7	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Kel. Darma	Baik		
8	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Monginsidi Kel. Sidodadi	Baik		
9	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Wonomulyo	Baik		
10	Bangunan Untuk Kandang	Desa Landikanusuang, Mapilli (Andau)	Baik		
11	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Desa Landikanusuang, Mapilli (Andau)	Baik		
12	Bangunan Untuk Kandang	Desa Landikanusuang, Mapilli (Andau)	Baik		
13	Bangunan Untuk Kandang	Desa Landikanusuang, Mapilli (Andau)	Baik		
14	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Desa Lampa, Mapilli	Baik		
15	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Desa Lampa, Mapilli (luasnya : 51,36 m2)	Baik		

<b>16</b>	Gedung Pemotong Hewan Permanen	Sidodadi, Wonomulyo		Rusak Ringan	
<b>17</b>	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Rea Barat, Madatte			RUSAK BERAT
<b>18</b>	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Desa Darma	Baik		
<b>19</b>	Bangunan Untuk Kandang	Desa Laliko	Baik		
<b>20</b>	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Kec. Wonomulyo	Baik		
<b>21</b>	Gedung Pos Jaga Permanen	Kec. Binuang	Baik		
<b>22</b>	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	UPTD Breeding Centre Desa Landikanusuang Kec. Mapilli	Baik		
<b>23</b>	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Desa Nepo Kec. Wonomulyo	Baik		
<b>24</b>	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	Desa Beroangin Kec. Mapilli	Baik		
<b>25</b>	Bangunan Gedung Kantor Permanen		Baik		
<b>26</b>	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Campalagian	Baik		
<b>27</b>	Rumah Negara Gol II Lain-lain	Campalagian	Baik		
<b>28</b>	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Wonomulyo	Baik		
<b>29</b>	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Binuang	Baik		
<b>30</b>	Rumah Negara Gol II Lain-lain	Binuang	Baik		
<b>31</b>	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Luyo	Baik		
<b>32</b>	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Anreapi	Baik		
<b>33</b>	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Tinambung	Baik		
<b>34</b>	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Balanipa	Baik		
<b>35</b>	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	Alu	Baik		
<b>36</b>	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	Bulo	Baik		
<b>37</b>	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	Tutar	Baik		

<b>38</b>	Bangunan Gedung Kantor Permanen	ALU	Baik		
<b>39</b>	Bangunan Gedung Kantor Permanen	BULO	Baik		
<b>40</b>	Bangunan Gedung Kantor Permanen	MATANGNGA	Baik		
<b>41</b>	Bangunan Gedung Kantor Permanen	MATAKALI	Baik		
<b>42</b>	Bangunan Gedung Laboratorium Lain-lain (dst)	Jl. Kartini No. 2 Polewali	Baik		
<b>43</b>	Bangunan Gedung Laboratorium Lain-lain (dst)	Binuang	Baik		
<b>44</b>	Bangunan Gedung Laboratorium Lain-lain (dst)	Matakali	Baik		
<b>45</b>	Bangunan Gedung Laboratorium Lain-lain (dst)	Anreapi	Baik		
<b>46</b>	Bangunan Gedung Laboratorium Lain-lain (dst)	Tapango	Baik		
<b>47</b>	Bangunan Gedung Laboratorium Lain-lain (dst)	Wonomulyo	Baik		
<b>48</b>	Bangunan Gedung Laboratorium Lain-lain (dst)	Mapilli	Baik		
<b>49</b>	Bangunan Gedung Laboratorium Lain-lain (dst)	Luyo	Baik		
<b>50</b>	Bangunan Gedung Laboratorium Lain-lain (dst)	Campalagian	Baik		
<b>51</b>	Bangunan Gedung Laboratorium Lain-lain (dst)	Balanipa	Baik		
<b>52</b>	Bangunan Gedung Laboratorium Lain-lain (dst)	Tinambung	Baik		
<b>53</b>	Bangunan Gedung Laboratorium Lain-lain (dst)	Alu	Baik		
<b>54</b>	Bangunan Gedung Laboratorium Lain-lain (dst)	Limboro	Baik		
<b>55</b>	Bangunan Gudang	Limboro	Baik		

	Tertutup Permanen			
<b>56</b>	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Polewali	Baik	
<b>57</b>	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Tapango ( 528,32 M2)	Baik	
<b>58</b>	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Mapilli	Baik	
<b>59</b>	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Tutar	Baik	
<b>60</b>	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Limboro	Baik	

Perlengkapan dan Peralatan Kantor Dinas Pertanian dan Pangan sudah cukup memadai, namun seiring dengan semakin tingginya volume pekerjaan yang ada maka perlu mendapatkan penambahan perlengkapan dan peralatan sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada dikarenakan terdapat beberapa peralatan yang mengalami kerusakan.

Selain dukungan SDM, sarana dan prasarana untuk pencapaian target Dinas Pertanian dan Pangan terdapat pula dukungan aspek keuangan sebagaimana berikut :



**Gambar 6. Struktur Belanja APBD Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2024**

Alokasi anggaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2024 sebanyak Rp. 31.079.610.901,- untuk mendukung pencapaian target Indikator Kinerja Utama Distanpan, dengan struktur belanja seperti pada Gambar di atas.

## SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PERANGKAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang (Memuat penjelasan singkat tentang pentingnya akuntabilitas, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan laporan)
- B. Kedudukan tugas, pokok dan fungsi (memuat penjelasan umum tentang perangkat daerah, dengan penekanan pada aspek strategis dan permasalahan utama organisasi meliputi isu strategis tugas dan fungsi organisasi, kondisi sumber daya pegawai dan sarana prasarana penunjang kinerja organisasi, aspek keuangan dan sistematika LAKIP).

### BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis (memuat penjelasan singkat tentang Renstra, meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran serta Indikator Kinerja Utama/Sasaran)
- B. Penetapan Kinerja Tahun 2024 (Memuat Target Kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2024)
- C. INSTRUMEN PENDUKUNG TAHUN 2024 (Memuat penjelasan tentang instrumen yang mendukung kemudahan pelaksanaan kinerja selama tahun 2024, seperti penggunaan system yang berbasis elektronik)

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

- A. Akuntabilitas Kinerja
  1. Diuraikan per tujuan, per sasaran dan per indikator sasaran

2. Untuk setiap indikator sasaran dijelaskan dengan 5 syarat minimal data kinerja berupa table atau grafik dan penjelasan memadai, yaitu :
  - Membandingkan target dan realisasi kinerja tahun ini;
  - Membandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya;
  - Uraikan keberhasilan/kegagalan serta solusi yang dilakukan;
  - Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan;
  - Analisis efisiensi sumber daya (Anggaran).

B. Akuntabilitas keuangan

Menguraikan informasi secara detail terkait akuntabilitas keuangan Perangkat Daerah

#### BAB IV PENUTUP

Kesimpulan umum atas capaian kinerja, serta langkah-langkah dimasa datang organisasi

### C. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau bisa juga tidak dimanfaatkan, sehingga akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis Dinas Pertanian dan Pangan yang juga merupakan isu strategis dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar 2019-2024 terbagi atas dua urusan yaitu urusan pangan dan Pertanian sebagai berikut :

## 1. Urusan Pangan

- a) Masih tingginya persentase daerah terkategorikan waspada pangan;
- b) Masih rendahnya tingkat konsumsi masyarakat terhadap pangan local dan keanekaragaman konsumsi pangan;
- c) Terbatasnya lahan pertanian tanaman pangan khusus pertanian organik;
- d) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi pangan yang berpengaruh terhadap gizi.

## 2. Urusan Pertanian

- a) Masih terdapat lahan sawah yang belum beririgasi teknis dan tanam hanya sekali dalam setahun;
- b) Masih terdapat wilayah yang produktivitas padinya berada di bawah standar;
- c) Rendahnya produktivitas jagung;
- d) Rendahnya produktivitas kedelai;
- e) Rendahnya pemanfaatan lahan pertanian non sawah untuk pengembangan palawija;
- f) Belum optimalnya aktivitas ekonomi pertanian dari hulu ke hilir;
- g) Menurunnya luas lahan pertanian;
- h) Rendahnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi budidaya pertanian;
- i) Tingginya gangguan hama dan penyakit tanaman pertanian dan perkebunan, serta peternakan;
- j) Rendahnya penerapan sertifikasi jaminan mutu hulu-hilir pertanian.

Dalam menangani permasalahan tersebut ditemukan beberapa faktor penghambat sebagai berikut :

1. Urusan Pangan

- a) Rendahnya sinergi antar OPD terkait, dalam penanganan indikator daerah rawan pangan
- b) Pemahaman masyarakat mengenai konsumsi B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman)
- c) Petani fokus pada kuantitas belum fokus untuk peningkatan kualitas dikarenakan harga hasil pertanian organik dan non organik tidak ada perbedaan di pasaran.
- d) Dalam mengkonsumsi makanan, masyarakat tidak mencermati kandungan gizinya, yang penting dapat mengenyangkan.

2. Urusan Pertanian

- a) Minimnya kesadaran petani dalam melakukan pemeliharaan prasarana yang telah terbangun di lokasi pertanamannya.
- b) Penerapan *Good Agriculture Practice (GAP)* dikalangan petani masih minim dikarenakan keterbatasan penguasaan teknologi dan SDM Petani
- c) Penegakan Perda LP2B belum maksimal untuk menjaga lahan pertanian berkelanjutan.
- d) Pada tanaman pangan padi dengan luas baku sawah 16.919,5 Ha sawah irigassi teknis seluas 15.564 Ha, ketika kuota pupuk bersubsidi kurang dari kebutuhan maka akan berdampak pada produksi
- e) Hasil produksi durian Kec. Bulo di beli oleh Sulawesi Tengah dan di ekspor atas nama Sulteng, sehingga perlu keterlibatan pemerintah agar durian tersebut bisa terjual atas nama

Kabupaten Polewali Mandar sehingga dapat menarik investor ke Polewali Mandar dan menjadi salah satu sumber PAD begitupun dengan hasil produksi Perkebunan

- f) Untuk mencegah resiko kembalinya penyakit menular hewan strategis, maka diperlukan anggaran vaksinasi secara rutin.
- g) Tenaga penyuluhan pertanian kurang dikarenakan pensiun dan perlunya dana diklat untuk penjenjangan jabatan fungsional penyuluhan
- h) Tanaman Perkebunan yang tua membutuhkan peremajaan yaitu : (1) Kakao : 5.618,57 Ha, (2) Kopi Robusta : 409,65 Ha, (3) Kopi Arabika : 219,42, (4) Kelapa Dalam : 160,18 Ha, (5) Kelapa Hibrida : 954,99 Ha, (6) Kelapa Sawit : 421,50 Ha.
- i) Perlunya rehabilitasi bangunan sumber-sumber air (embung, irigasi air tanah dalam/dangkal, irigasi tersier) yang rusak berat/tidak berfungsi
- j) Perlunya peningkatan optimalisasi lahan khususnya lahan kering
- k) Kontinuitas produksi pertanian yang tidak terjamin dan banyak petani yang terikat kontrak dengan tengkulak sehingga sulit untuk melakukan pemasaran ke tempat lain;
- l) Rasio SDM petugas terhadap jumlah ternak masih rendah;
- m) Tingginya biaya produksi akibat sarana produksi yang belum sepenuhnya bersubsidi menghambat petani untuk menerapkan teknologi yang memerlukan tambahan biaya yang cukup tinggi;

Selain itu ada juga faktor pendorong yang menjadi penunjang keberhasilan dalam penanganan masalah sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar No. 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian berkelanjutan;
3. Perda No. 6 Tahun 2016 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak;
4. Peningkatan Produksi ternak merupakan sasaran Nasional RPJMN 2020-2024;
5. Infrastruktur pertanian di Kabupaten Polewali Mandar sangat memungkinkan untuk pengembangan penangkaran benih;
6. Kebutuhan masyarakat akan hasil pertanian cukup tinggi sehingga permintaan akan hasil pertanian juga cukup tinggi
7. Dukungan pemerintah pusat terhadap peningkatan infrastruktur pertanian cukup tinggi malalui dana APBN (TP, Dekon, DAK)
8. Potensi Pakan yang tersedia khususnya limbah pertanian dan perkebunan serta tingginya minat masyarakat di Kab. Polewali Mandar untuk beternak merupakan faktor pendorong pengembangan peternakan;
9. Animo masyarakat untuk beternak cukup tinggi
10. Degradasi lahan pertanian menuntut untuk penerapan teknologi pertanian yang tepat guna sehingga motivasi ini merupakan faktor pendorong bagi petani untuk menerapkan teknologi pertanian tepat guna;
11. Peningkatan pengetahuan dan bimbingan teknis petani dalam menangani kasus penyakit pada lahan perkebunan masyarakat ;
12. Peningkatan jumlah kegiatan sosialisasi pemanfaatan pangan lokal ;
13. Peningkatan penerapan pemanfaatan lahan pangan masyarakat secara berkelanjutan;

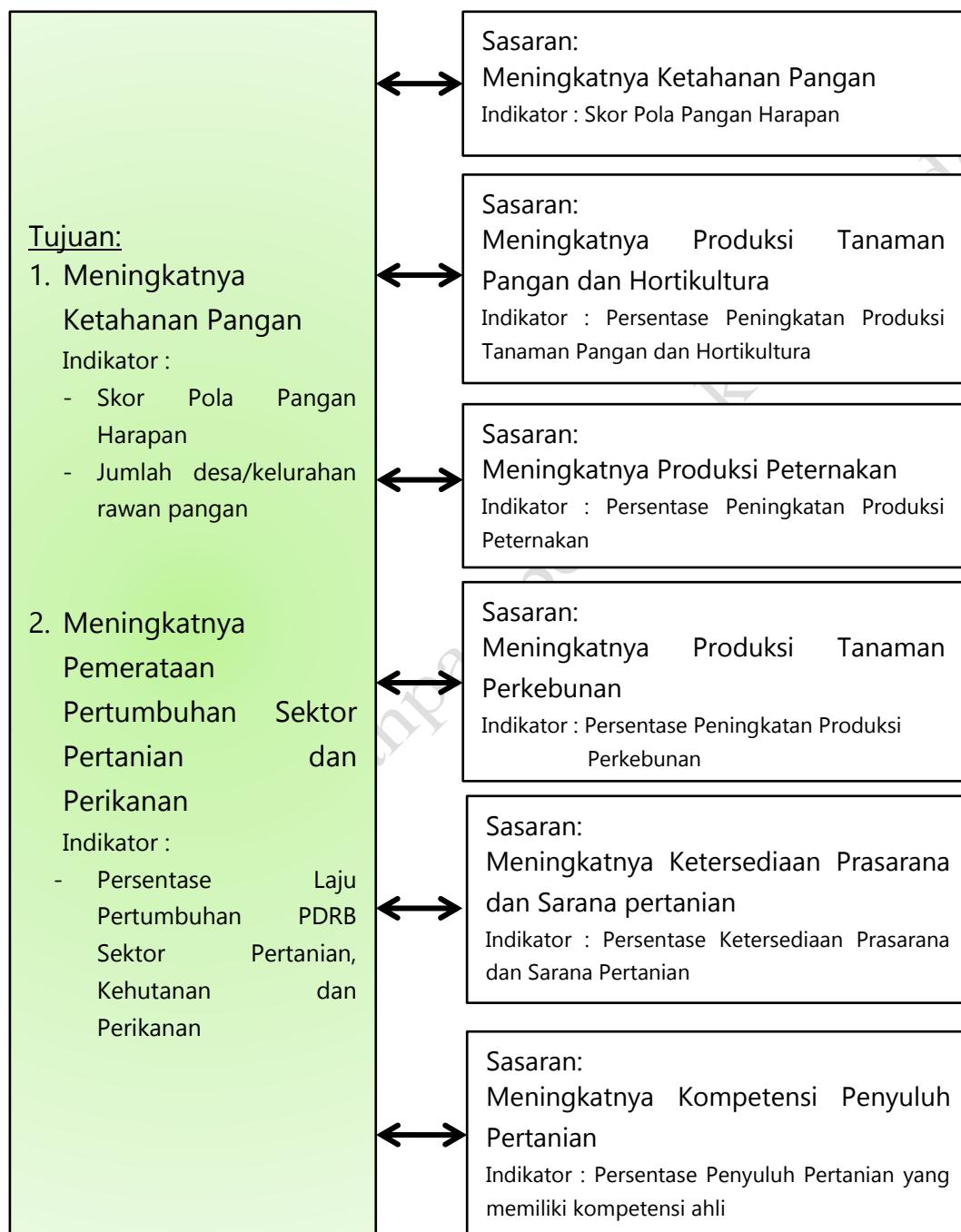
## BAB II. PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024, maka Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024. Renstra dimaksud berkedudukan sebagai dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari RPJMD di tingkat Perangkat Daerah untuk periode 5 (Lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan serta pendanaan indikatif dan dilengkapi dengan tolok ukur pencapaiannya yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan, sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Berpedoman pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 serta memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta faktor penghambat dan pendorong, maka Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2019-2024, dirumuskan sebagai berikut :

**Gambar 7.**  
**Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pertanian dan Pangan,  
Tahun 2019-2024**



Untuk mengetahui dan mengukur capaian Tujuan dan Sasaran Strategis dimaksud, maka perlu menentukan indikator kinerja Tujuan dan Sasaran. Penentuan indikator kinerja tersebut menggunakan kriteria **SMART-C** yaitu : *specific* (jelas), *measureable* (dapat diukur), *agreeable* (dapat disetujui), *realistic* (dapat dicapai), *time bounded* (memiliki batas waktu pencapaian) dan *continuously improved* (perbaikan berkelanjutan). Indikator kinerja tujuan dan sasaran merupakan indikator di level *outcome* (hasil). Indikator Sasaran Strategis dimaksud selanjutnya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Di samping IKU dimaksud, disusun pula indikator sasaran strategis penunjang pencapaian IKU.

### **1. Visi dan Misi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar**

Visi Dinas Pertanian dan Pangan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (renstra) Dinas adalah "**Terwujudnya Pertanian Yang Mandiri, Inovatif, Efisien dan Berkelanjutan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani**".

Untuk mewujudkan misi yang ditetapkan maka Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar merumuskan misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Swasembada Pangan dan Usaha Agribisnis Hortikultura yang Ramah Lingkungan dan Berbasis Potensi Lokal;
- 2) Meningkatkan usaha agribisnis peternakan yang inovatif, berwawasan lingkungan dan sinergitas dengan usaha pertanian lainnya.
- 3) Meningkatkan mutu dan daya saing hasil produksi pertanian dan peternakan

## 2. Tujuan dan Sasaran

### ▪ Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pemerataan Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan;
2. Meningkatnya Ketahanan Pangan;

### ▪ Sasaran

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran tentunya memperhatikan indikator kinerja sesuai Tupoksi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Untuk periode 2019-2024, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar menetapkan Tujuan dan Sasaran Untuk mengukur sejauh mana Dinas Pertanian dan Pangan telah mencapai tujuan strategis, maka ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun kelima (2024). Indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja utama Dinas Pertanian dan Pangan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3. Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN KE-					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Ketahanan Pangan		Skor Pola Pangan Harapan Pengeluaran Konsumsi rata-rata perkapita Jumlah desa/kelurahan rawan pangan	81,21 683.935 30 Desa/Kel	83,41 788.935 35 Desa/Kel	85,61 808.659 30 Desa/Kel	87,8 828.875 24 Desa/Kel	90 849.597 20 Desa/Kel	92,2 870.597 15 Desa/Kel
	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	81,21	83,41	85,61	87,8	90	92,2
Meningkatnya Pemerataan Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan		Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	9,40	10,80	12,20	13,60	15,00	16,40
	Meningkatnya Kualitas Prasarana dan Sarana Pertanian	Persentase pertumbuhan Produksi Pertanian	30	40	50	60	70	80
	Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5
	Meningkatnya produksi peternakan	Persentase peningkatan produksi peternakan	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5
	Meningkatnya produksi Tanaman Perkebunan	Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5
	Meningkatnya kompetensi Penyuluh Pertanian	Persentase Penyuluh Pertanian yang memiliki kompetensi Ahli	67,5	70,0	72,5	74,2	76,7	80,0

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan		Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	Predikat SAKIP perangkat daerah	BB	BB	BB	A	A	A
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

## Berikut penjelasan singkat Indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan

Meningkatnya Ketahanan Pangan yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan tujuan kedua dalam pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals - SDGs).

**Tabel 4. Penjelasan singkat Indikator Kinerja Sasaran Pertama Dinas Pertanian dan Pangan**

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Nilai IKP dapat menunjukkan capaian ketahanan pangan dan gizi Kabupaten dan peringkat (ranking) relatif antara satu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya.	<p>Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan z-score dan distance to scale (0 – 100)</p> <p>Menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator, dengan rumus:</p> $Y(j) = \sum_{i=1}^9 a_i X_{ij}$ <p>Dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i : Indikator ke-1, 2, 3, ... 7, 8, dan 9</li> <li>j : Kabupaten ke-1, 2, 3, ... 414, 415, dan 416; kota ke-1, 2, 3, ... 96, 97, dan 98</li> <li>Y<sub>j</sub> : Indeks Ketahanan Pangan kabupaten/kota ke-j</li> <li>a<sub>i</sub> : Bobot masing-masing indikator ke-i</li> <li>X<sub>ij</sub> : Nilai standarisasi masing-masing indikator ke-i pada kabupaten/kota ke-j</li> </ul> <p>Wilayah yang memiliki nilai IKP paling besar merupakan wilayah yang paling tahan pangan, sebaliknya nilai IKP paling kecil menunjukkan wilayah yang rentan terhadap kerawanan pangan</p>	Badan Ketahanan Pangan Nasional

Meningkatnya Kapasitas Produksi Sektor Pertanian yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah kondisi dimana tercapainya produksi optimum dalam satuan lahan dan waktu tertentu dengan menggunakan sumber daya yang tersedia saat itu dari komoditi pertanian strategis di Kabupaten Polewali Mandar. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman, dan tujuan kedua dalam pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals - SDGs).

**Tabel 5. Penjelasan singkat Indikator Kinerja Sasaran Kedua Dinas Pertanian dan Pangan**

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase pertumbuhan produksi padi	Nilai persentase pertumbuhan produksi padi menunjukkan kapasitas produksi padi	Jumlah produksi padi (sawah dan ladang) tahun berjalan dibagi jumlah produksi tahun lalu dibagi jumlah produksi tahun lalu dikali 100%	Hasil pendataan Petugas Lapang
2	Persentase pertumbuhan produksi jagung	Nilai persentase pertumbuhan produksi jagung menunjukkan kapasitas produksi jagung	Jumlah produksi jagung tahun berjalan dibagi jumlah produksi tahun lalu dibagi jumlah produksi tahun lalu dikali 100%	Hasil pendataan Petugas Lapang
3	Persentase pertumbuhan produksi kedelai	Nilai persentase pertumbuhan produksi kedelai menunjukkan kapasitas produksi kedelai	Jumlah produksi kedelai tahun berjalan dibagi jumlah produksi tahun lalu dibagi jumlah	Hasil pendataan Petugas Lapang

			produksi tahun lalu dikali 100%	
4	Persentase pertumbuhan produksi buah-buahan	Nilai persentase pertumbuhan produksi buah-buahan menunjukkan kapasitas produksi buah-buahan	Jumlah produksi buah-buahan tahun berjalan dibagi jumlah produksi tahun lalu dibagi jumlah produksi tahun lalu dikali 100%	Hasil pendataan Petugas Lapang
5	Persentase pertumbuhan produksi sayuran	Nilai persentase pertumbuhan produksi sayuran menunjukkan kapasitas produksi sayuran	Jumlah produksi sayuran tahun berjalan dibagi jumlah produksi tahun lalu dibagi jumlah produksi tahun lalu dikali 100%	Hasil pendataan Petugas Lapang
6	Persentase pertumbuhan produksi kakao	Nilai persentase pertumbuhan produksi kakao menunjukkan kapasitas produksi kakao	Jumlah produksi kelapa tahun berjalan dibagi jumlah produksi tahun lalu dibagi jumlah produksi tahun lalu dikali 100%	Hasil pendataan Petugas Lapang
7	Persentase pertumbuhan produksi kelapa	Nilai persentase pertumbuhan produksi kelapa menunjukkan kapasitas produksi kelapa	Jumlah produksi kopi tahun berjalan dibagi jumlah produksi tahun lalu dibagi jumlah produksi tahun lalu dikali 100%	Hasil pendataan Petugas Lapang
8	Persentase pertumbuhan produksi kopi	Nilai persentase pertumbuhan produksi kopi menunjukkan kapasitas produksi kopi	Jumlah produksi kakao tahun berjalan dibagi jumlah produksi tahun lalu dibagi	Hasil pendataan Petugas Lapang

			jumlah produksi tahun lalu dikali 100%	
9	Persentase pertumbuhan populasi sapi	Nilai persentase pertumbuhan produksi sapi menunjukkan kapasitas produksi sapi	Jumlah produksi sapi tahun berjalan dibagi jumlah produksi tahun lalu dibagi jumlah produksi tahun lalu dikali 100%	Hasil pendataan Petugas Lapang
10	Persentase pertumbuhan populasi kambing	Nilai persentase pertumbuhan produksi kambing menunjukkan kapasitas produksi kambing	Jumlah produksi kambing tahun berjalan dibagi jumlah produksi tahun lalu dibagi jumlah produksi tahun lalu dikali 100%	Hasil pendataan Petugas Lapang
11	Persentase pertumbuhan populasi unggas	Nilai persentase pertumbuhan produksi unggas menunjukkan kapasitas produksi unggas	Jumlah produksi unggas tahun berjalan dibagi jumlah produksi tahun lalu dibagi jumlah produksi tahun lalu dikali 100%	Hasil pendataan Petugas Lapang

## B. Penetapan Kinerja Tahun 2024

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis 2019-2024, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Rencana Strategis dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya, sebagai berikut :

**Tabel 6**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	TARGET 2024
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks ketahanan pangan	74.59	73.87
2	Meningkatnya kapasitas produksi sektor pertanian	Persentase pertumbuhan produksi padi	-12%	0.1%
		Persentase pertumbuhan produksi jagung	-19%	0.1%
		Persentase pertumbuhan produksi kedelai	-82%	0.1%
		Persentase pertumbuhan produksi buah-buahan	-2%	0.1%
		Persentase pertumbuhan produksi sayuran	41%	50%
		Persentase pertumbuhan produksi Kakao	0.20%	1.5%
		Persentase pertumbuhan produksi Kelapa	0.08%	1%
		Persentase pertumbuhan Produksi Kopi	1.60%	3%

		Persentase pertumbuhan Populasi Sapi	-4.22%	0.1%
		Persentase pertumbuhan Populasi Kambing	-1.18%	1%
		Persentase pertumbuhan Populasi Unggas	0.16%	1%
3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Predikat SAKIP perangkat daerah	BB	BB
		Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	100%	100%
		Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Sangat Baik	Sangat Baik

Untuk mencapai sasaran tersebut, Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2023 menyusun Program dan Kegiatan dengan alokasi Pagu Anggaran masing-masing program sebagai berikut :

**Tabel 7**  
**Anggaran Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2024**

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 18,269,672,637	PAD, DAU
2	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 78,508,899	DAU
3	Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 5,000,342	DAU

4	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 2,556,211,452	DAU, DBH, DAKNF
5	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 134,325,006	DAU
6	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp 32,791,196	DAU
7	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp 10,611,770	DAU
8	Perizinan Usaha Pertanian	Rp 21,680,008	DAU
9	Penyuluhan Pertanian	Rp 9,970,809,591	DAU SG
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 31,079,610,901</b>	

### C. INSTRUMEN PENDUKUNG TAHUN 2024

Instrument pendukung membantu OPD dalam meningkatkan transparansi dengan menyediakan data dan informasi yang akurat dan terkini kepada publik. Instrument pendukung dalam pencapaian indikator kinerja OPD (Organisasi Perangkat Daerah) memiliki beberapa manfaat, antara lain:

#### 1. Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas

Membantu OPD dalam mengukur dan memantau kinerja, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam mencapai tujuan.

#### 2. Meningkatkan Akuntabilitas

Membantu OPD dalam meningkatkan akuntabilitas dengan menyediakan data dan informasi yang akurat dan terkini.

#### 3. Meningkatkan Kualitas Pengambilan Keputusan

Membantu OPD dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menyediakan data dan informasi yang relevan dan terkini.

#### 4. Meningkatkan Kemampuan Monitoring dan Evaluasi

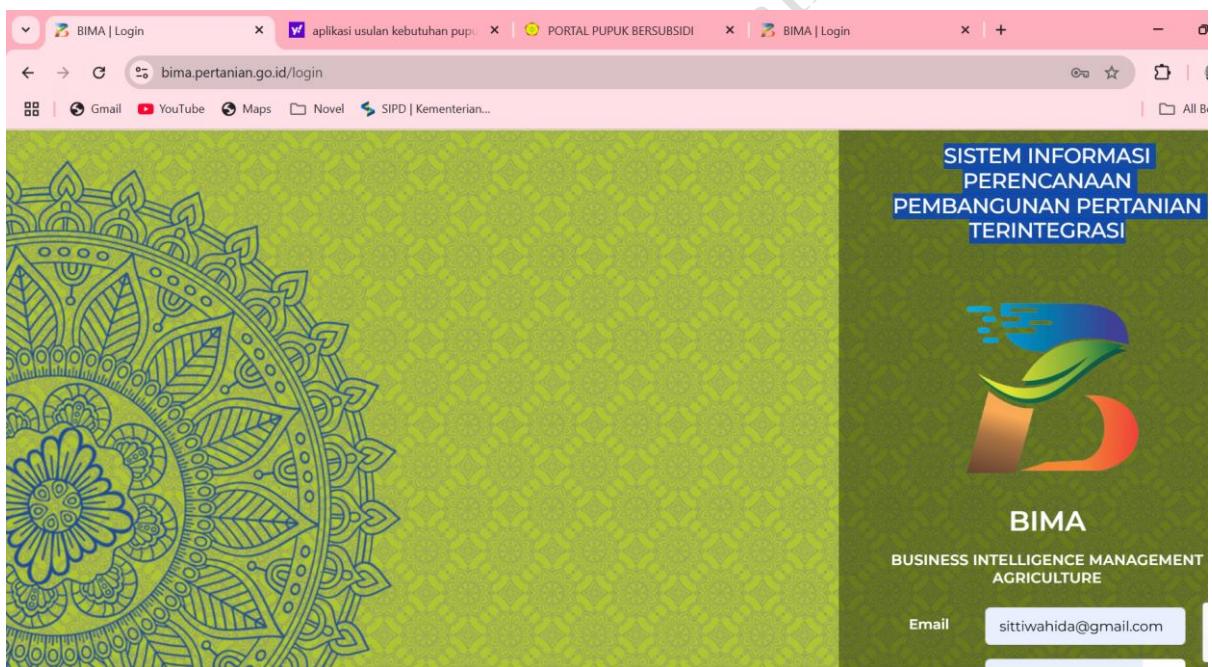
Membantu OPD dalam meningkatkan kemampuan monitoring dan evaluasi dengan menyediakan data dan informasi yang akurat dan terkini.

#### 5. Meningkatkan Transparansi

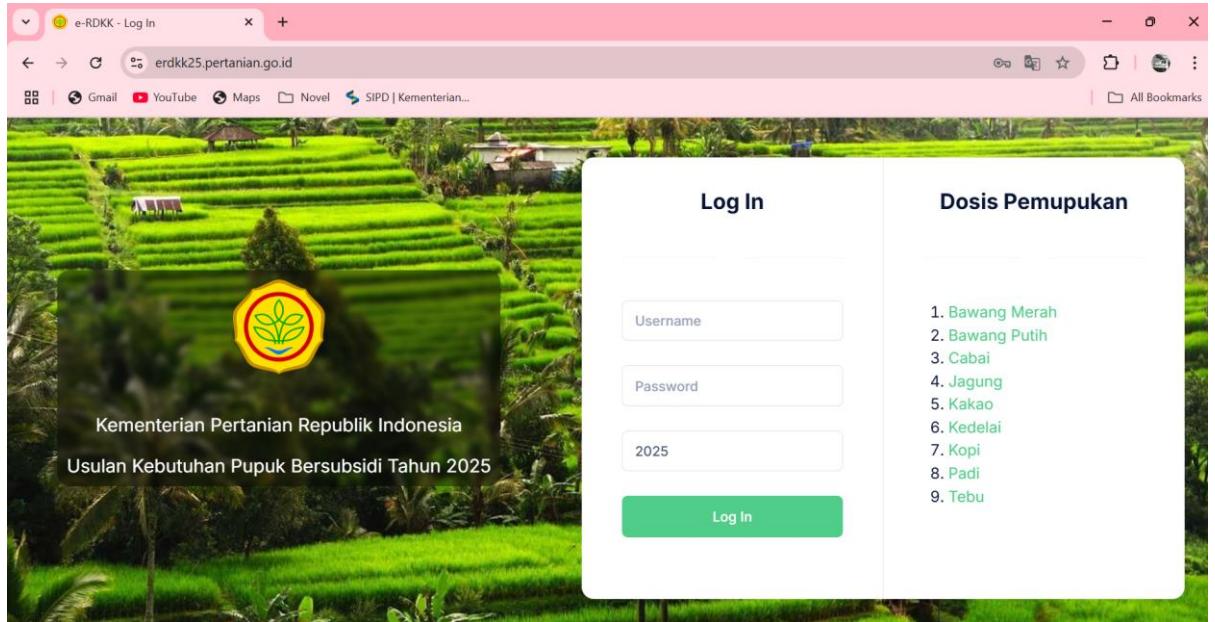
Membantu OPD dalam meningkatkan transparansi dengan menyediakan data dan informasi yang akurat dan terkini kepada publik.

Pada Dinas Pertanian dan Pangan dalam mendukung pencapaian target Indikator Kinerja Utama di gunakan beberapa instrumen pendukung sebagai berikut :

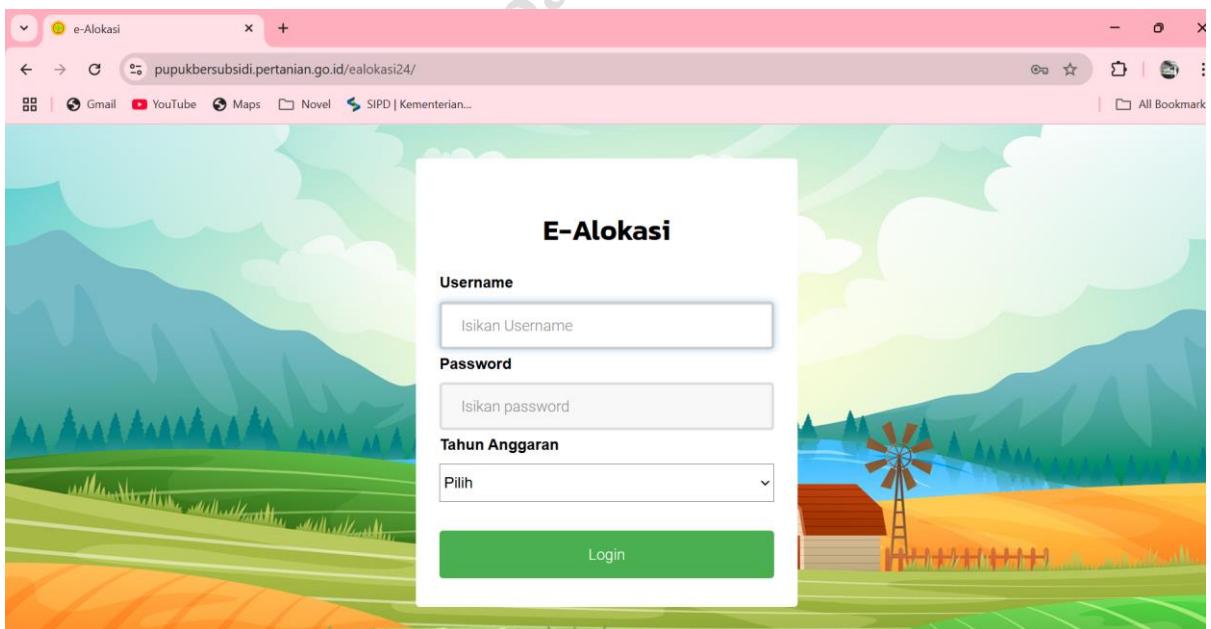
- a. Aplikasi BIMA (Business Intelligence Management Agriculture) atau Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Pertanian Terintegrasi yang digunakan untuk menginput usulan proposal bantuan dari kelompok tani setiap tahun.



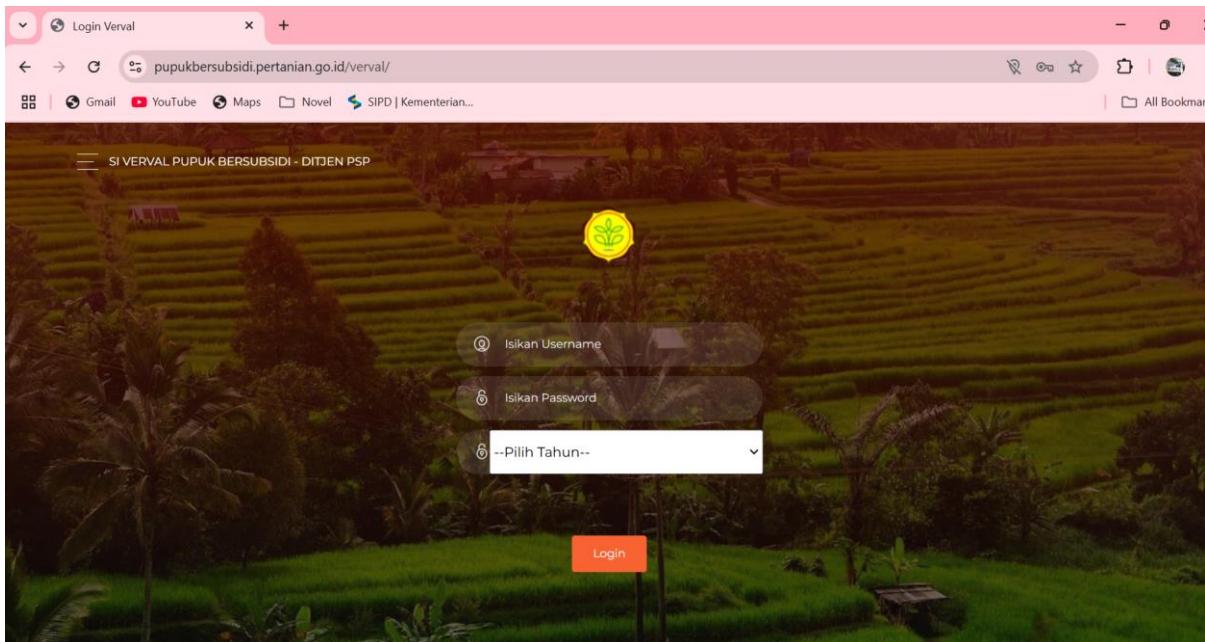
- b. Aplikasi E-RDKK (Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) Pupuk Bersubsidi adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk mengelola rencana kebutuhan pupuk bersubsidi bagi petani.



- c. Aplikasi E-Alokasi Pupuk Bersubsidi adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk mengelola alokasi pupuk bersubsidi kepada petani.



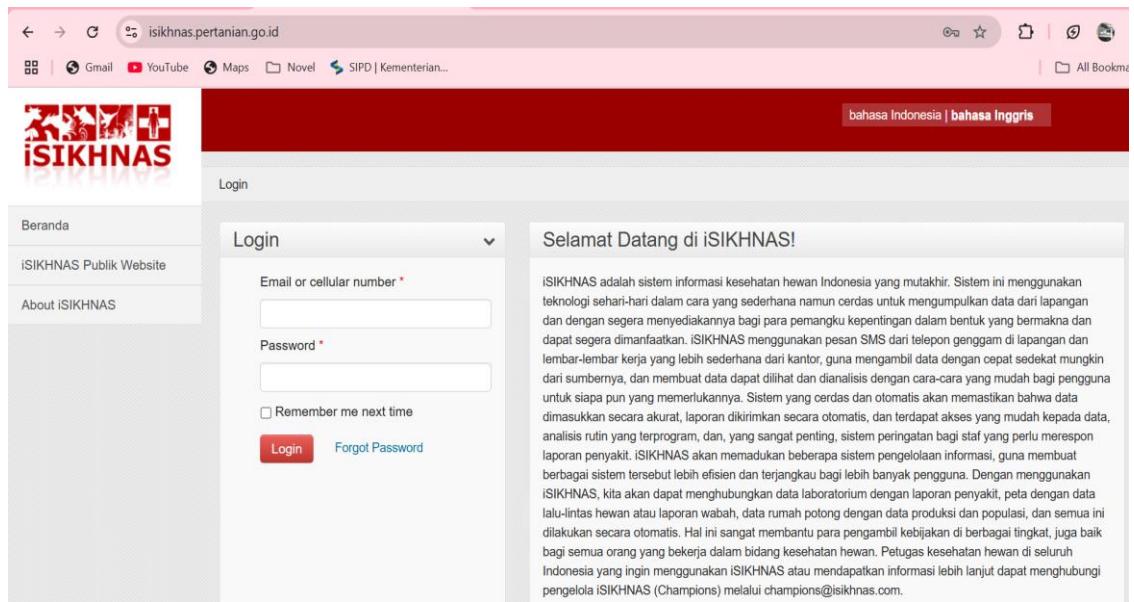
- d. Aplikasi Aplikasi SI Verval Pupuk Bersubsidi adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk melakukan verifikasi dan validasi (verval) data petani dan kebutuhan pupuk bersubsidi.



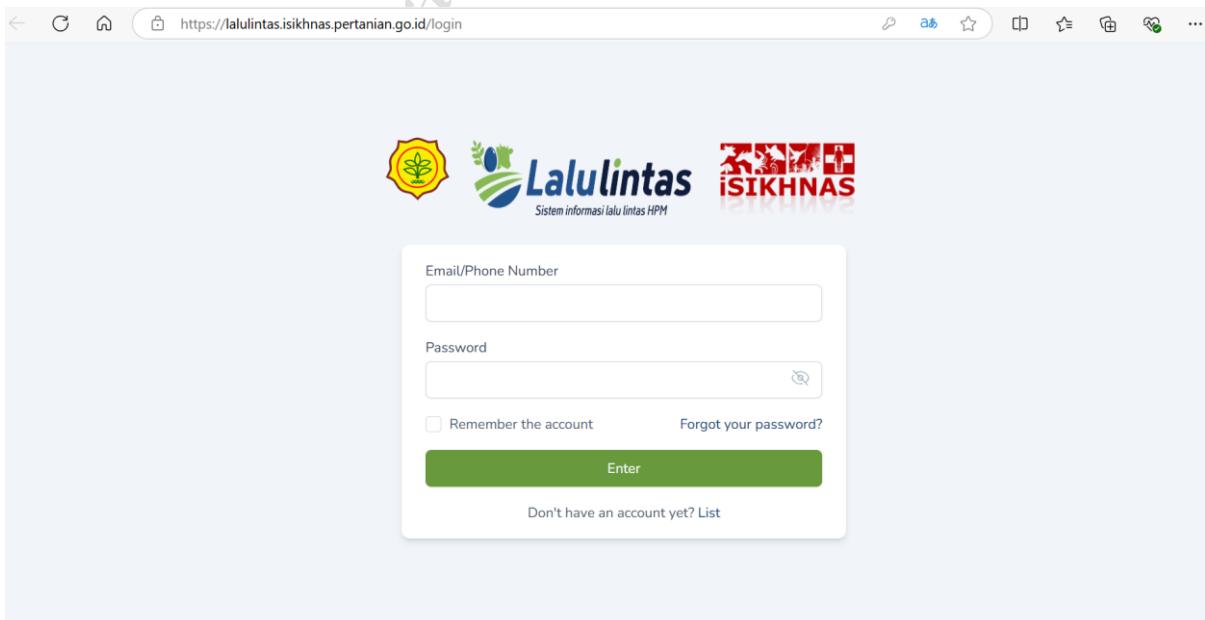
- e. Aplikasi Si Tampan (Sistem Informasi Tanaman Pangan dan Hortikultura) Kementerian Pertanian adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian (Kementerian) Republik Indonesia untuk mengelola data dan informasi tentang tanaman pangan dan hortikultura.



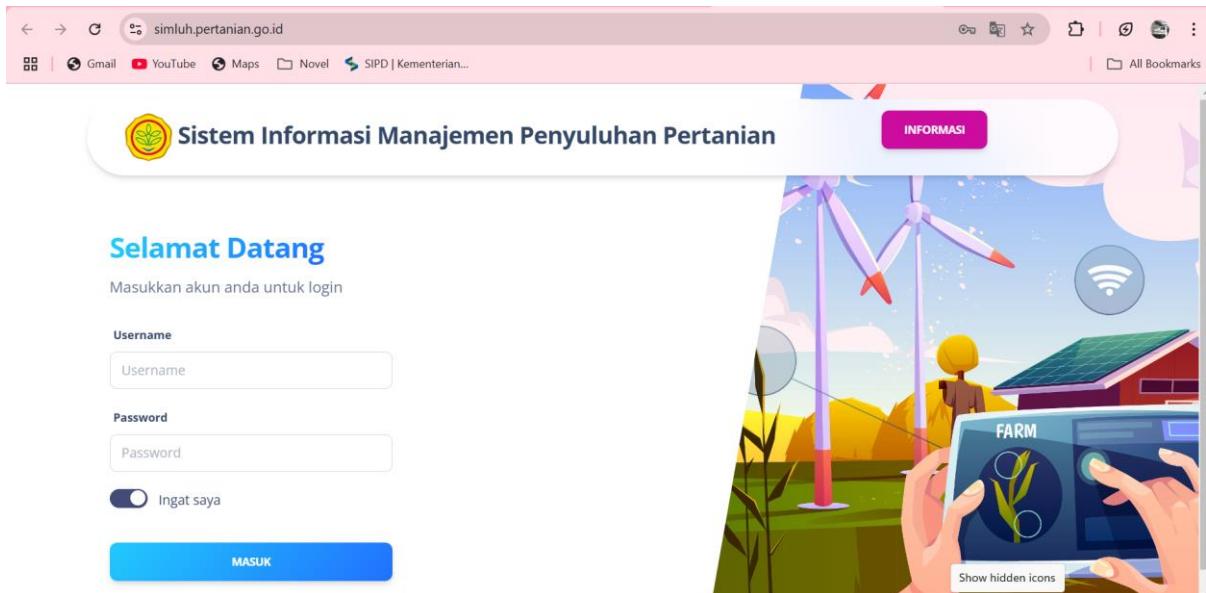
- f. Aplikasi iSIKHNAS (Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional) adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk mengelola data dan informasi tentang kesehatan hewan di Indonesia.



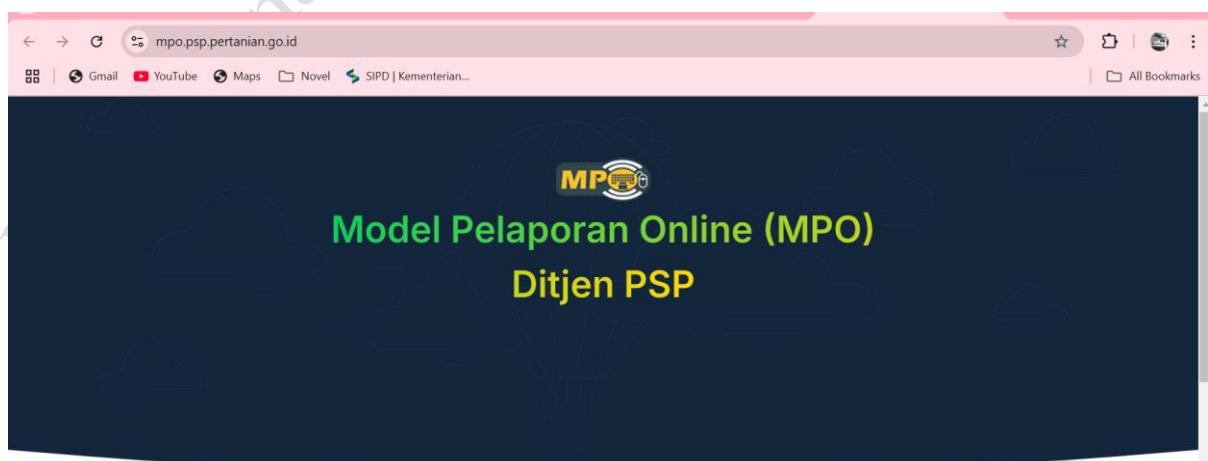
- g. Aplikasi Sistem Informasi Lalu Lintas HPM Kementerian Pertanian adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk memantau dan mengawasi lalu lintas hewan dan produknya di Indonesia.



- h. Aplikasi SIMLUHTAN (Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian) adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk mengelola dan memantau kegiatan penyuluhan pertanian di Indonesia.

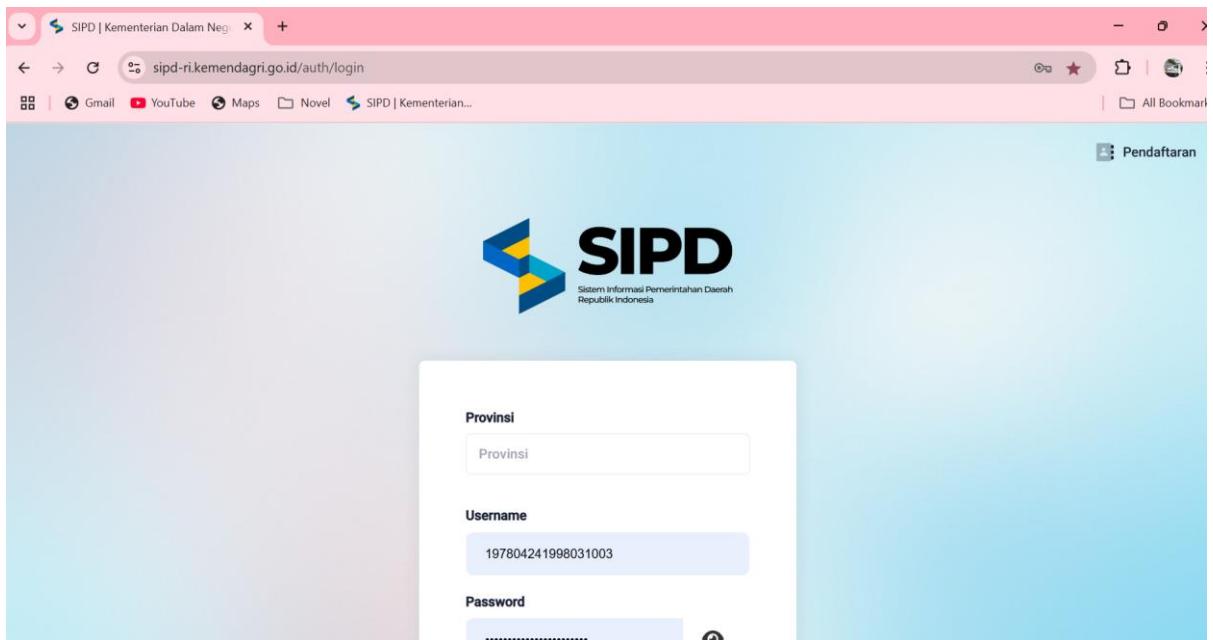


- i. Aplikasi MPO (Monitoring dan Pengawasan Online) Ditjen PSP (Direktorat Jenderal Perlindungan Tanaman dan Peternakan) Kementerian Pertanian Republik Indonesia adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk Melaporkan kelengkapan berkas administrasi berupa : proposal poktan, KTP, LPJ, Foto 0 50 100%, Spek teknis, SK.

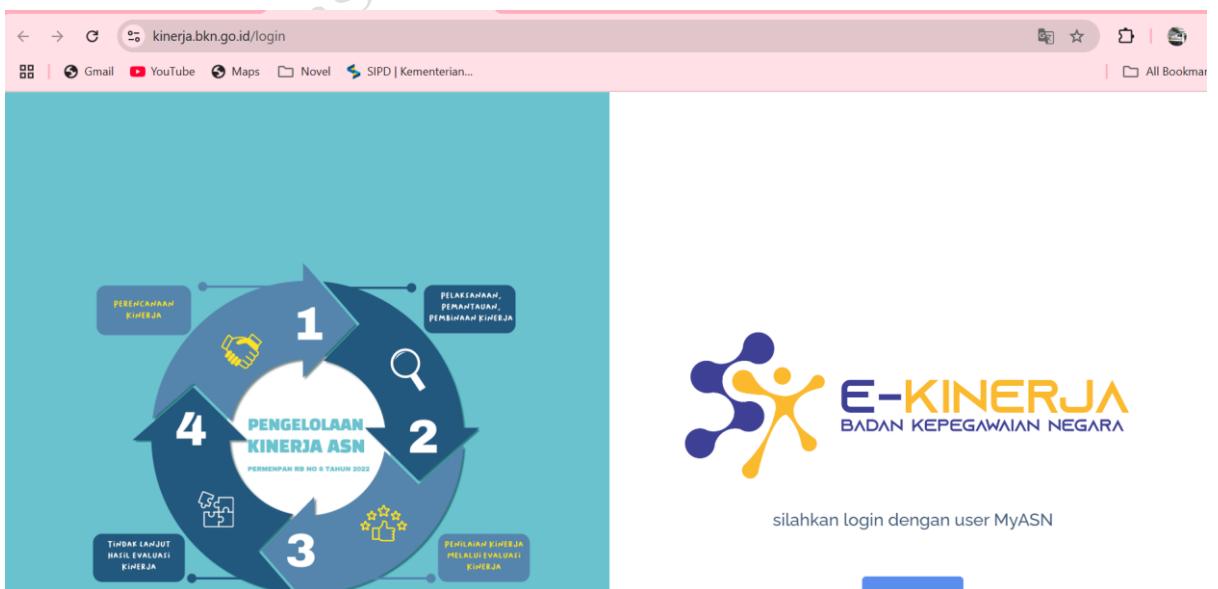


**Perhatian**

- j. Aplikasi SIPD adalah Aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk mengelola dan memantau pembangunan daerah di Indonesia.



- k. Aplikasi e-Kinerja BKN (Badan Kepegawaian Negara) adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia untuk mengelola dan memantau kinerja pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia.



## BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

### A. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian dan Pangan tahun 2024 diukur dari pencapaian indikator kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2024 pada seluruh sasaran strategis. Kinerja tahun 2024 merupakan kinerja tahun ke lima Renstra Dinas Pertanian dan Pangan 2019-2024. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar 99% yang dihitung dari rata-rata capaian dari seluruh sasaran kinerja. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 8. Capaian Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2024 Berdasarkan Perjanjian Kinerja**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2024	REALISASI 2024	%
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks ketahanan pangan	73.87	75.87	103
2	Meningkatnya kapasitas produksi sektor pertanian	Persentase pertumbuhan produksi padi	0.1%	-1%	(1,000)
		Persentase pertumbuhan produksi jagung	0.1%	-42%	(42,000)
		Persentase pertumbuhan produksi kedelai	0.1%	1797%	1,797,000
		Persentase pertumbuhan produksi buah-buahan	0.1%	3%	3,000
		Persentase pertumbuhan produksi sayuran	50%	-36%	(72)

		Persentase pertumbuhan produksi Kakao	1.5%	0.04%	3
		Persentase pertumbuhan produksi Kelapa	1%	0.12%	12
		Persentase pertumbuhan Produksi Kopi	3%	3.29%	110
		Persentase pertumbuhan Populasi Sapi	0.1%	0.50%	500
		Persentase pertumbuhan Populasi Kambing	1%	0.69%	69
		Persentase pertumbuhan Populasi Unggas	1%	0.08%	8
3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Predikat SAKIP perangkat daerah	BB	BB	100%
		Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	100%	100%	100%
		Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Sangat Baik	Sangat Baik	100%
	<b>KINERJA RATA-RATA</b>		<b>272.52</b>	<b>361.62</b>	<b>133</b>

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja Dinas Pertanian dan Pangan tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :



## SASARAN STRATEGIS 1

### MENINGKATNYA KETAHANAN PANGAN

-3°23'13", 119°11'42", 64.0m, 66°  
13/12/2023 07:37:28

Meningkatnya Ketahanan Pangan yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan tujuan kedua (tanpa kelaparan) dalam pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals - SDGs*).

Sasaran kinerja ini memiliki satu indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan yaitu Indeks Ketahanan Pangan.

IKP Nasional memiliki peran yang sangat strategis dalam mengukur capaian pembangunan ketahanan pangan di suatu wilayah, mengukur kinerja daerah dalam memenuhi urusan wajib pemerintah, dan merupakan salah satu alat dalam menentukan prioritas pembangunan daerah dan prioritas intervensi program. Secara khusus, penyusunan IKP Nasional dilakukan dengan tujuan mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah

kabupaten/kota dan provinsi, serta memberikan gambaran peringkat (ranking) pencapaian ketahanan pangan wilayah kabupaten/kota dan provinsi dibandingkan dengan wilayah kabupaten/kota dan provinsi lain. IKP yang disusun diharapkan dapat digunakan sebagai dasar saat melakukan intervensi program sehingga lebih fokus dan tepat sasaran.

Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2024 berdasarkan publikasi hasil analisis Badan Ketahanan Pangan Nasional, sebagaimana disajikan pada realisasi pencapaian indikator sasaran strategis 1.

#### **a. Realisasi capaian indikator kinerja terhadap Target**

Capaian Sasaran Strategis 1, diukur menggunakan indikator **Indeks Ketahanan Pangan** dengan pencapaian indikator sebagai berikut :

**Tabel 9. Target dan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2024	REALISASI 2024	%
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks ketahanan pangan	73.87	75.87	103

Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan dengan bobot indikator sebagai berikut :

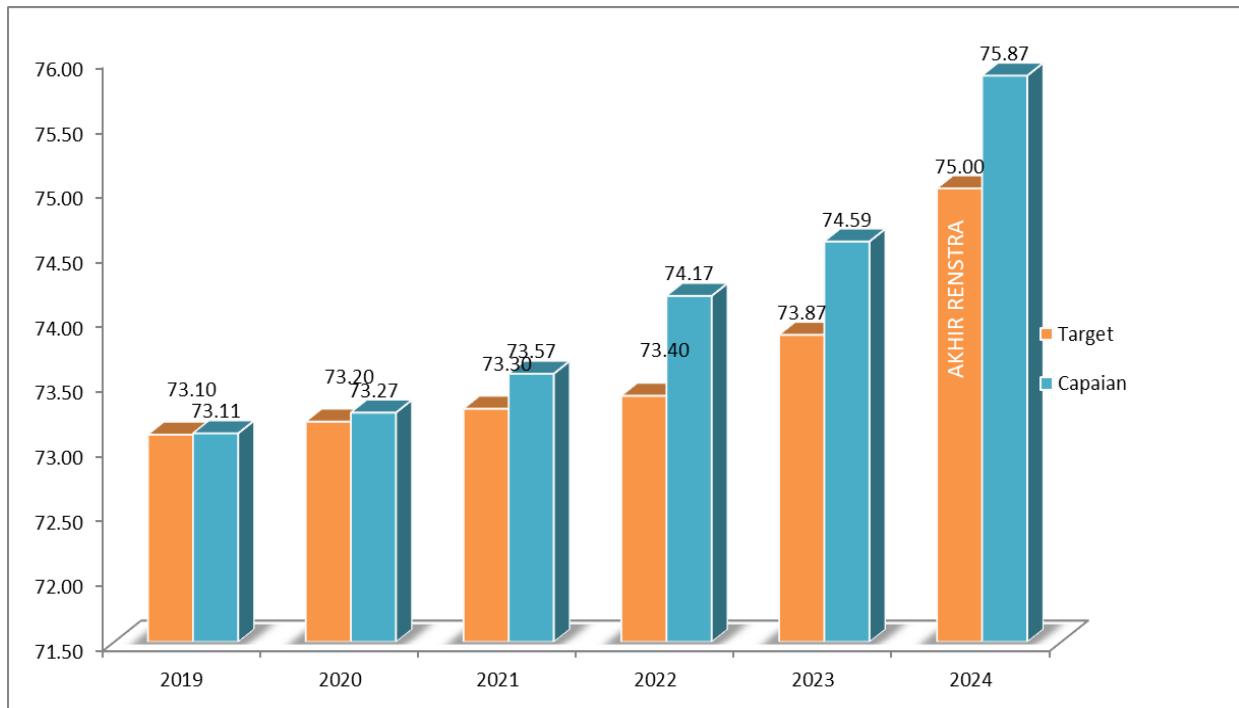
**Tabel 10. Bobot Indikator Kabupaten dalam Penyusunan IKP**

<b>Bobot Indikator Kabupaten dan Provinsi Berdasarkan <i>Expert Judgement</i></b>		
No	Indikator	Bobot
<b>ASPEK KETERSEDIAAN PANGAN</b>		
1.	Rasio kosumsi normatif terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, ubi kayu, dan sagu, serta stok beras pemerintah daerah	0,30
		<b>Sub Total</b> <b>0,30</b>
<b>ASPEK KETERJANGKAUAN PANGAN</b>		
2.	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	0,15
3.	Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran	0,075
4.	Persentase rumah tangga tanpa akses listrik	0,075
		<b>Sub Total</b> <b>0,30</b>
<b>ASPEK PEMANFAATAN PANGAN</b>		
5.	Rata-rata lama sekolah perempuan berusia di atas 15 tahun	0,05
6.	Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih	0,15
7.	Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk	0,05
8.	Persentase balita <i>stunting</i>	0,05
9.	Angka harapan hidup pada saat lahir	0,10
		<b>Sub Total</b> <b>0,40</b>

**Perbandingan realisasi terhadap tahun-tahun sebelumnya dan Akhir Renstra**

Perbandingan Capaian Nilai Indeks Ketahanan Pangan dalam kurung waktu 5 (lima) tahun terakhir serta dibandingkan dengan target yang dapat dicapai sampai dengan akhir periode Renstra 2019-2024, dapat dilihat pada Gambar 3. berikut ini :

**Gambar 8**  
**Perbandingan Capaian Nilai Indeks Ketahanan Pangan Dalam Kurung Waktu Lima Tahun Terakhir dibandingkan Target Capaian akhir Renstra**



Polewali Mandar mengalami kenaikan IKP dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024. Nilai IKP Polewali Mandar selama lima tahun berturut-turut mengalami nilai realisasi yang melebihi target dan pada akhir periode renstra tahun 2024 diperoleh nilai IKP 75,87 dari target 75, sehingga realisasi nilai IKP diperoleh sebesar 103 persen.

Berdasarkan nilai Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang diperoleh sebesar 75,87, Kabupaten Polewali Mandar dapat dikategorikan sebagai kabupaten yang memiliki ketahanan pangan yang "Cukup".

IKP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur ketahanan pangan suatu daerah. Indeks ini dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu:

- Sangat Baik: 90-100
- Baik: 80-89
- Cukup: 70-79

- Kurang: 60-69
- Sangat Kurang: < 60

Dengan nilai IKP sebesar 75,87, Kabupaten Polewali Mandar berada di kategori "Cukup", yang berarti bahwa kabupaten ini memiliki ketahanan pangan yang relatif baik, namun masih perlu melakukan upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.

IKP ini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas - FSVA*), karena indikator yang digunakan dalam IKP merupakan indikator yang juga digunakan dalam penyusunan FSVA Nasional.

Kabupaten Polewali Mandar saat ini masih memiliki keterbatasan dalam mendukung kinerja subsistem distribusi pangan daerah. Dimana umumnya masih terdapat kekurangan pada fasilitas prasarana jalan dan sarana angkutan, sehingga mahalnya biaya distribusi dari sentra produksi ke sentra konsumsi. Hal ini terutama terdapat di kecamatan Tubbi Taramanu, Limboro, Bulo dan Alu. Minimnya sarana dan prasarana ini menyebabkan daerah-daerah tertentu menjadi sangat terisolir dan sulit mengakses pangan. Oleh karena itu, dalam perencanaan kedepannya Kabupaten Polewali Mandar diperlukan perubahan dan alokasi anggaran yang cukup untuk sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran distribusi pangan ke seluruh wilayah.

Pertambahan penduduk yang cepat merupakan isu sentral yang dihadapi dunia, terlebih di negara berkembang termasuk Indonesia. Konsekuensi dari hal tersebut adalah peningkatan kebutuhan pangan untuk mengimbangi pertambahan jumlah penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat maka akan terjadi kompetisi pemanfaatan lahan yang dapat mengancam keberadaan lahan pertanian menjadi lahan perumahan. Konversi

lahan pertanian tersebut dapat mengancam pemantapan ketahanan pangan, namun disisi lain luas areal tanaman pangan juga semakin sempit.

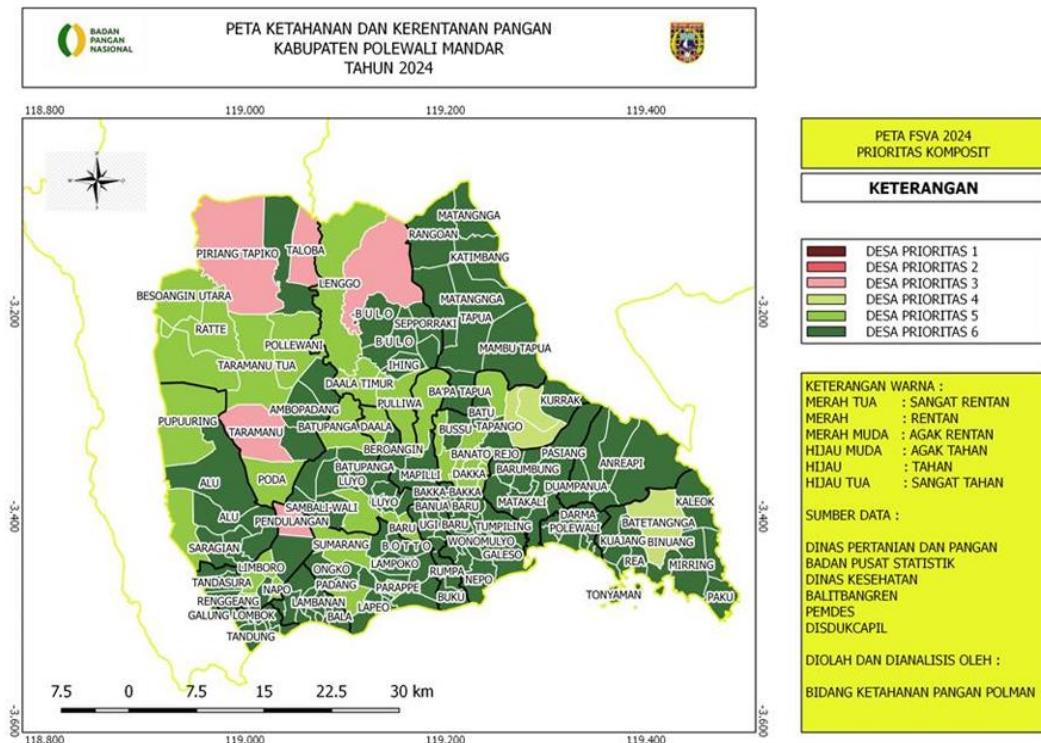
Berdasarkan data Kabupaten Polewali Mandar Dalam Angka 2024, laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Polewali Mandar yaitu mencapai 1,36 % per tahun. Laju pertumbuhan penduduk Kab. Polman menurun dari tahun ke tahun. Namun hal ini tetap berdampak pada konversi lahan potensial pertanian ke lahan non pertanian seperti perumahan, daerah perkebunan, industri dan lainnya.

### **Jumlah Desa/Kelurahan Rawan Pangan**

Peta komposit menjelaskan kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan suatu wilayah (kecamatan) yang disebabkan oleh kombinasi dari berbagai dimensi kerawanan pangan

Berdasarkan hasil pembobotan, desa-desa dikelompokkan ke dalam 6 prioritas. Prioritas 1 merupakan prioritas utama yang menggambarkan tingkat kerentanan yang paling tinggi, sedangkan prioritas 6 merupakan prioritas yang relatif lebih tahan pangan. Dengan kata lain, wilayah (desa) prioritas 1 memiliki tingkat resiko kerentanan terhadap kerawanan pangan yang lebih besar dibandingkan wilayah (desa) lainnya sehingga memerlukan perhatian segera. Meskipun demikian, wilayah (desa) yang berada pada prioritas 1 tidak berarti semua penduduknya berada dalam kondisi rawan pangan, juga sebaliknya wilayah (desa) pada prioritas 6 tidak berarti semua penduduknya tahan pangan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dari 167 desa yang ada di Kabupaten Polewali Mandar maka tidak ada desa (0) yang tergolong (Prioritas 1), 2 desa (Prioritas 2), 7 desa (Prioritas 3), 16 desa (Prioritas 4), 60 desa (Prioritas 5) dan 82 desa (Prioritas 6).



**Gambar 9**  
**Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Di Kabupaten Polewali Mandar**

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dari 167 desa yang ada di Kabupaten Polewali Mandar maka tidak ada desa (0) yang tergolong (Prioritas 1) dan (Prioritas 2), 5 desa (Prioritas 3), 3 desa (Prioritas 4), 32 desa (Prioritas 5) dan 127 desa (Prioritas 6).

Desa agak tahan terhadap kerawanan pangan prioritas 3 terdapat di wilayah Kecamatan Limboro (1 desa) yaitu Desa Pendulangan, kecamatan Bulo (1 desa) yaitu Desa Patambanua dan (3 desa) di Kecamatan Tubbi Taramanu yaitu Desa Taramanu, Piriang Tapiko dan Taloba.

Desa agak rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 4 terdapat di wilayah Kecamatan Tapango (2 desa) yaitu desa Riso dan desa Kalimbua, serta Kecamatan Binuang (1 desa) yaitu desa Batetangnga

Berdasarkan hasil Analisis Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kerawanan pangan dan Kerentanan Pangan berdasarkan prioritas yaitu :

1. Desa Rentan terhadap Kerawanan Pangan prioritas 3 secara umum disebabkan :
  - Jumlah tenaga kesehatan yang ada di desa tersebut tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang akan dilayani
  - Sarana dan prasarana transportasi yang kurang memadai
  - Jumlah penduduk kurang mampu masih tinggi (penduduk tidak sejahtera)
  - Jumlah sarana penyedia pangan (warung, toko, kedai) masih sangat kurang
2. Desa Agak Tahan terhadap Kerawanan Pangan Prioritas 4 secara umum disebabkan :
  - Jumlah sarana penyedia pangan (warung, toko, kedai) masih sangat kurang
  - Jumlah tenaga kesehatan juga masih tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang akan dilayani

Penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan pada suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya, dengan demikian cara penyelesaiannya juga berbeda. Peta ini membantu memahami keadaan diantara wilayah (desa), dan dengan demikian akan membantu para pengambil kebijakan untuk dapat menentukan langkah-langkah yang tepat dalam menangani isu-isu ketahanan pangan yang relevan di wilayahnya.

Kabupaten Polewali Mandar untuk tahun Tahun 2024 Fokus lokasi penanganan kerentanan pangan di wilayah desa diprioritaskan pada :

- a. Desa-desa prioritas 3 dan 4 yang tersebar di Kecamatan Tubbi Taramanu, Limboro, Bulo, Tapango dan binuang
- b. Desa-desa yang lokasinya jauh dari ibu kota kabupaten atau di wilayah yang berbatasan dengan kabupaten lain
- c. Desa-desa di Kepulauan yang menghadapi kendala akses fisik terhadap sumber pangan.
- d. Desa-desa pemekaran yang fasilitas, infrastruktur dan kapasitas SDMnya masih terbatas.

Upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan ditekankan pada penyebab utama kerentanan pangan di desa seperti digambarkan pada diagram di bawah ini.



**Gambar 10**  
**Kerangka Intervensi Untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan**

Program-program peningkatan ketahanan pangan dan penanganan kerentanan pangan wilayah kabupaten diarahkan pada kegiatan :

- a. Peningkatan penyediaan pangan di daerah non sentra produksi dengan mengoptimalkan sumberdaya pangan lokal.
- b. Pembukaan lahan pertanian baru dari lahan yang kurang produktif (lahan tidur).
- c. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, air bersih), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk mengerakkan ekonomi wilayah.
- d. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih; sosialisasi dan penyuluhan.
- e. Distribusi tenaga kesehatan ke desa yang masuk dalam prioritas 1-3.

#### **Analisis Penyebab Capaian/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang dilakukan**

Keberhasilan dan Kegagalan Capaian Indikator disebabkan oleh tiga Faktor yakni :

##### **Faktor Penunjang :**

1. Perda No. 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian berkelanjutan;
3. Program dan Kegiatan dari Pusat dan Propinsi;

##### **Faktor Penghambat :**

1. Luas Lahan Sawah Pertanian yang mengalami penurunan;
2. Daya beli masyarakat terbatas karena kemiskinan;

3. Terbatasnya akses terhadap air bersih;
4. Distribusi tenaga kesehatan yang belum terdistribusi secara merata;
5. OPD yang terkait dalam pencapaian ketahanan pangan belum menjadikan Lokasi rawan pangan sebagai lokasi prioritas dalam penyusunan Program dan Kegiatan;
6. Koordinasi antara OPD terkait belum maksimal;

**Solusi :**

1. Membuka lahan pertanian baru, meningkatkan kapasitas produksi dan mengembangkan potensi pangan lokal;
2. Penyediaan lapangan kerja, mempermudah akses pangan, dan jaring pengaman sosial;
3. Pembangunan Infrastruktur Dasar (air Bersih);
4. Penyediaan Tenaga Kesehatan;
5. Masing – masing OPD yang terkait dalam pencapaian Ketahanan Pangan agar menjadikan lokasi prioritas pelaksanaan Program dan Kegiatan sesuai dengan Peta FSVA.
6. Memaksimalkan Koordinasi antar OPD yang terkait;

**Program dan Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Ketahanan Pangan**

Adapun sejumlah Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan yang diselenggarakan untuk memastikan tercapainya target indikator sasaran meningkatnya ketahanan pangan, sebagai berikut:

**Tabel 11. Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Menunjang Ketahanan Pangan**

NO	PROGRAM/KEGIATAN /SUB.KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSEN	SISA ANGGARAN
1	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	<b>78,508,899</b>	<b>48,227,445</b>	<b>61</b>	<b>30,281,454</b>
1.1	<b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>	<b>38,516,541</b>	<b>38,328,377</b>	<b>100</b>	<b>188,164</b>
1.1.1	Stabilisasi Pasokan dan harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	33,000,141	33,000,141	100	-
1.1.2	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	5,516,400	5,328,236	97	188,164
2.2	<b>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</b>	<b>29,992,200</b>	-	-	<b>29,992,200</b>
2.2.1	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	29,992,200	-	-	29,992,200
2.3	<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>	<b>10,000,158</b>	<b>9,899,068</b>	<b>99</b>	<b>101,090</b>
2.3.1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	10,000,158	9,899,068	99	101,090
2	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	<b>5,000,342</b>	<b>4,965,802</b>	<b>99</b>	<b>34,540</b>

<b>2.1</b>	<b>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</b>	<b>5,000,342</b>	<b>4,965,802</b>	<b>99</b>	<b>34,540</b>
2.1.1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	5,000,342	4,965,802	99	34,540
<b>TOTAL</b>		<b>83,509,241</b>	<b>53,193,247</b>	<b>64</b>	<b>30,315,994</b>

Untuk menunjang pencapaian Sasaran Strategis 1, terdapat Program dan Kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten, APBD Propinsi, dan APBN karena pencapaian Ketahanan Pangan merupakan Program Nasional dan merupakan salah satu Indikator dalam SDGs yakni mengakhiri kelaparan. Pembiayaan yang dilakukan pada APBD yaitu dengan melakukan pengisian lumbung pangan masyarakat, pencatatan harga pangan strategis, penyusunan peta kerentanan dan kerawanan pangan, survey konsumsi masyarakat, penyaluran benih sayuran, mulsa plastik dan pupuk kandang, pelatihan pemanfaatan pangan lokal, dan pelaksanaan operasi pasar murah. Beberapa Program Pusat dan Propinsi yang menunjang pencapaian Sasaran Startegis 1 yakni Program Ketersediaan, Akses Dan Konsumsi Pangan Yang Berkualitas dengan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Polewali Mandar Yakni : Penguatan Keamanan dan Mutu Pangan Segar; Gerakan Pangan Murah (GPM); Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Nasional dan Wilayah; Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA); Gerakan Edukasi dan Pemberian Pangan Bergizi bagi Siswa (GENIUS); Pemberlakuan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), dan Desa B2SA.

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk kedepannya, jika memungkinkan untuk melaksanakan pencetakan sawah guna meningkatkan produksi tanaman pangan. Upaya perluasan areal sawah sangat penting untuk mendukung ketahanan pangan karena kebutuhan produksi tanaman pangan

khususnya padi terus meningkat sedangkan alih fungsi lahan cukup luas setiap tahunnya. Untuk mendukung Polewali Mandar sebagai salah satu lumbung pangan Propinsi.

Salah satu upaya dalam mendorong produksi dan produktivitas pangan adalah tersedianya infrastruktur pertanian yang memadai. Pembangunan infrastruktur yang saat ini diperlukan antara lain berupa perbaikan dan pembangunan infrastruktur pengairan, seperti waduk dan saluran irigasi, serta pembangunan jalan yang menghubungkan sentra produksi kepada konsumen akhir.

Untuk mewujudkan ketersediaan infrastruktur tersebut, dukungan dan koordinasi antara instansi yang membidangi pembangunan fisik serta pemerintah daerah melalui dukungan kebijakan yang mempermudah implementasi pembangunan tersebut, mutlak diperlukan. Selain pembangunan infrastruktur, peningkatan produksi dan produktivitas pertanian juga memerlukan dukungan penyediaan teknologi dan sarana produksi, serta sumber daya manusia yang baik.





## SASARAN STRATEGIS 2

### MENINGKATNYA

### KAPASITAS PRODUKSI PERTANIAN

Capaian indikator kinerja sasaran strategis 2 berdasarkan hasil pengukuran terhadap pencapaian target indikator kinerja dapat dilihat pada Tabel 12 berikut :

**Tabel 12. Target dan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2024	REALISASI 2024	%
2	Meningkatnya kapasitas produksi sektor pertanian	Persentase pertumbuhan produksi padi	0.1%	-1%	(1,000)
		Persentase pertumbuhan produksi jagung	0.1%	-42%	(42,000)
		Persentase pertumbuhan produksi kedelai	0.1%	1797%	1,797,000
		Persentase pertumbuhan produksi buah-buahan	0.1%	3%	3,000
		Persentase pertumbuhan produksi sayuran	50%	-36%	(72)
		Persentase pertumbuhan produksi Kakao	1.5%	0.04%	3

	Persentase pertumbuhan produksi Kelapa	1%	0.12%	12
	Persentase pertumbuhan Produksi Kopi	3%	3.29%	110
	Persentase pertumbuhan Populasi Sapi	0.1%	0.50%	500
	Persentase pertumbuhan Populasi Kambing	1%	0.69%	69
	Persentase pertumbuhan Populasi Unggas	1%	0.08%	8

## INDIKATOR PERSENTASE PERTUMBUHAN PADI

Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan produksi padi maka diperoleh grafik perbandingan dari tahun 2019 sampai akhir periode Renstra 2024 sebagai berikut :

**Gambar 11**  
**Capaian Persentase Pertumbuhan Produksi Padi dalam Kurung Waktu Lima Tahun Terakhir dibandingkan dengan target**



Untuk indikator pertumbuhan produksi padi yang dihitung adalah total produksi padi sawah dan padi ladang. Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan produksi padi tahun 2024 menunjukkan bahwa realisasi pertumbuhan produksi padi diperoleh angka (-1%) yang menandakan realisasi tidak mencapai target yang telah diperjanjikan pada dokumen perjanjian kinerja Dinas Pertanian dan Pangan yaitu 0,1%. Jika dibandingkan pada tahun 2022 realisasi melampaui target yang ditentukan begitupun pada tahun 2020, sedangkan tahun 2019, 2021, 2023 dan 2024 sebaliknya.

Berikut disajikan data tabulasi luas tanam, luas panen, luas gagal panen, jumlah produksi dan produktivitas tanaman padi dari enam belas kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar.

**Tabel 13**  
**Realisasi Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Sawah**  
**menurut Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar**

No	Kecamatan	Luas Tanam (ha)	Rusak/Tidak Berhasil (ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Rata-Rata Produktivitas (ton/ha)
1	Tinambung	9.82	-	34.37	218.25	6.35
2	Balanipa	-	-	-	-	
3	Limboro	26.51	-	26.51	174.97	6.60
4	Tubbi Taramanu	591.11	-	457.57	2,905.57	6.35
5	Alu	0.98	85.00	2.95	18.88	6.40
6	Campalagian	4,746.40	-	4,998.75	37,390.65	7.48
7	Luyo	2,580.69	1.96	2,839.67	21,269.13	7.49
8	Wonomulyo	7,180.27	229.27	7,248.56	54,291.71	7.49
9	Mapilli	4,609.75	20.62	4,735.43	35,278.95	7.45
10	Tapango	3,094.35	-	2,164.50	16,017.30	7.40
11	Matakali	3,712.50	172.77	4,080.38	30,154.01	7.39
12	B U L O	51.29	-	52.05	327.92	6.30
13	Polewali	2,932.53	-	2,023.30	14,770.09	7.30
14	Binuang	2,858.27	9.82	1,709.35	12,307.32	7.20
15	Anreapi	825.49	-	593.28	4,152.96	7.00
16	Matangnga	227.60	-	286.51	1,819.34	6.35
<b>Jumlah Total 2024</b>		<b>33,447.56</b>	<b>519.44</b>	<b>31,253.18</b>	<b>231,097.04</b>	<b>7.39</b>
<b>Rata-Rata Produktivitas Ton Per Ha Tahun 2024</b>						<b>6.97</b>
<b>Tahun 2023</b>		<b>33,361.22</b>	<b>53.90</b>	<b>31,134.09</b>	<b>230,381.34</b>	<b>7.40</b>

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar

Pada Tabel diatas menunjukkan bahwa penurunan persentase pertumbuhan produksi padi di akibatkan luas tanam yang lebih rendah dari tahun sebelumnya sehingga mempengaruhi luas panen dan jumlah produksi padi. Selain luas tanam yang mengalami penurunan, luas tanaman yang mengalami kerusakan atau gagal panen lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, hal tersebut diakibatkan terjadinya cuaca ekstrem pada tahun 2024 yang mengakibatkan tanaman mengalami kekeringan sehingga mengakibatkan penurunan luas panen. Namun meskipun luas panen dan produksi mengalami penurunan tapi dari segi produktivitas mengalami peningkatan dari tahun 2022 yaitu dari 6.95 ton/ha menjadi 6.98 ton/ha.

Begitupun luas tanam komoditi padi ladang mengalami penurunan dari tahun 2022 yang mengakibatkan penurunan luas panen dan jumlah produksi, namun pada tahun 2024 tidak terdapat tanaman yang rusak, hal tersebut dikarenakan padi ladang lebih toleran terhadap serangan OPT dan cuaca ekstrem. Selain itu untuk produktivitas padi ladang tahun 2024 mengalami peningkatan yang tidak signifikan yaitu dari 3.95 menjadi 3.96, sebagaimana dalam tabel berikut :

**Tabel 14**  
**Realisasi Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Ladang**  
**Menurut Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar**

No	Kecamatan	Luas Tanam (ha)	Rusak/Tidak Berhasil (ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
1	Tinambung	-	-	-	-	
2	Balanipa	-	-	-	-	
3	Limboro	-	-	-	-	
4	Tubbi Taramanu	675.00	-	1,200.00	4,764.00	3.97
5	Alu	440.00	-	465.00	1,836.75	3.95
6	Campalagian	-	-	-	-	
7	Luyo	13.15	-	-	-	
8	Wonomulyo	-	-	-	-	
9	Mapilli	-	-	-	-	
10	Tapango	-	-	-	-	
11	Matakali	-	-	-	-	
12	B U L O	163.00	-	679.00	2,682.05	3.95
13	Polewali	-	-	-	-	
14	Binuang	-	-	-	-	
15	Anreapi	-	-	50.00	175.00	3.50
16	Matangnga	272.95	-	600.00	2,370.00	3.95
<b>Jumlah Total 2024</b>		<b>1,564.10</b>	<b>-</b>	<b>2,994.00</b>	<b>11,827.80</b>	<b>3.95</b>
<b>Rata-Rata Produktivitas Ton Per Ha Tahun 2024</b>						<b>3.86</b>
<b>Tahun 2023</b>		<b>3,904.00</b>	<b>5.00</b>	<b>4,046.00</b>	<b>15,980.35</b>	<b>3.95</b>

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target di pengaruhi oleh beberapa faktor penghambat dan pendukung sebagai berikut :

**Faktor Penghambat :**

- Kondisi Perubahan Iklim (ElNino) yang menyebabkan musim kemarau berkepanjangan sehingga musim tanam mengalami kemunduran dari jadwal tanam yang sudah disepakati begitupun untuk pertanaman padi ladang
- Pelaksanaan verifikasi dan validasi lahan sawah dibeberapa kecamatan melalui polygonisasi yang dilakukan bidang PSP sehingga luas lahan baku sawah mengalami penurunan dari 17.990 ha menjadi 16.919,50 ha kondisi saat ini.
- Terdapat serangan hama tikus dibeberapa titik pertanaman sehingga mengakibatkan berkurangnya produksi sampai mengalami gagal panen (puso), hal tersebut mengakibatkan penurunan luas tanam, panen, produksi dan produktivitas padi sawah.
- Saluran irigasi yang ada belum sepenuhnya telah di lining sehingga pelaksanaan IP 300 belum dapat dilaksanakan secara keseluruhan.
- Masih terdapat lahan yang tidak dimanfaatkan secara maksimal.

**Faktor Pendukung :**

- Luas lahan baku sawah di Kabupaten Polewali Mandar tertinggi di Sulawesi Barat
- Pelaksanaan Fasilitasi pengusulan RDKK Kelompok tani untuk mendapatkan kuota pupuk bersubsidi
- Penggunaan bibit padi yang bersertifikat
- Tersedianya Asuransi Usaha Pertanian
- Tersedianya pembiayaan KUR

### **Solusi :**

Dengan memperhatikan kendala yang dihadapi pada tahun 2024, pada 2024 direncanakan akan dilakukan perbaikan sebagai berikut :

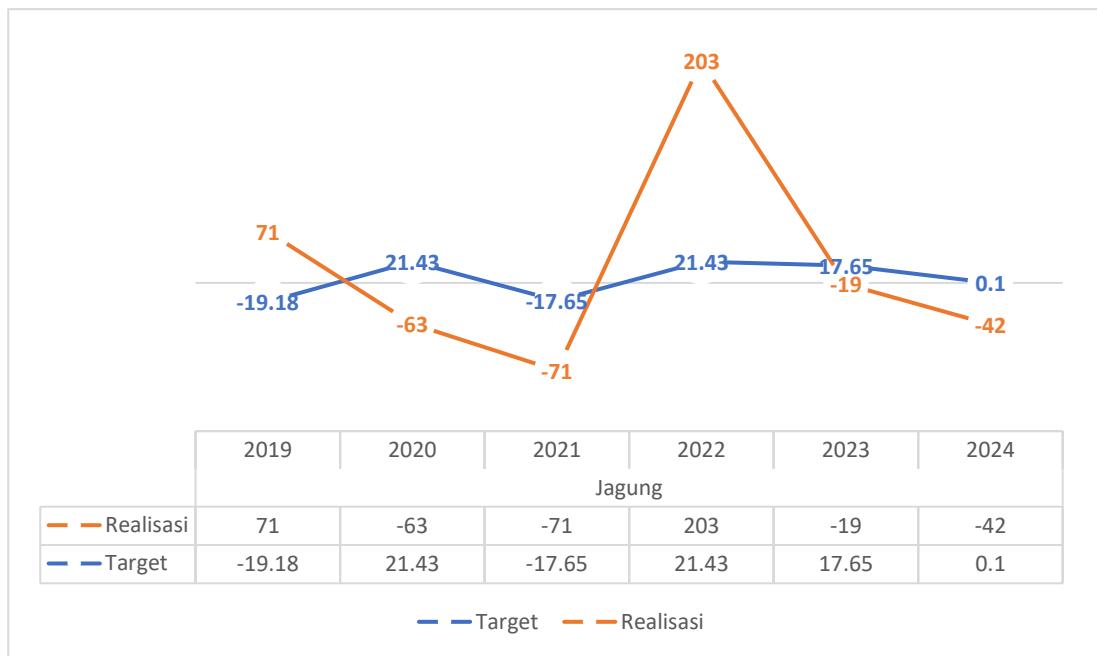
- Melakukan Sekolah Lapang Iklim (SLI) yaitu Sekolah Lapang di alam terbuka agar petani mampu membaca kondisi iklim untuk budidaya pertanian spesifik lokasi sehingga dapat meminimalisir penurunan produksi dari kemungkinan dampak iklim ekstrem seperti banjir atau kekeringan.
- Merampungkan pemetaan lahan baku sawah di Kabupaten Polewali Mandar sehingga diperoleh perhitungan yang akurat untuk data produksi padi.
- Melakukan pelatihan pemberantasan hama tikus kepada kelompok tani yang berada di wilayah serangan tikus tinggi.
- Melakukan perbaikan irigasi tersier sehingga dapat dilakukan IP 300
- Memaksimalkan pemanfaatan lahan sawah tahan hujan dan lahan rawa

### **INDIKATOR PERSENTASE PERTUMBUHAN JAGUNG**



Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan produksi jagung tahun 2024 menunjukkan bahwa realisasi pertumbuhan produksi jagung diperoleh angka (-19%) yang menandakan realisasi tidak mencapai target yang telah diperjanjikan pada dokumen perjanjian kinerja Dinas Pertanian dan Pangan yaitu 17.65%. Jika dibandingkan pada tahun 2022 realisasi melampaui target yang ditentukan begitupun pada tahun 2019, sedangkan tahun 2020, 2021 dan 2024 sebaliknya. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik perbandingan dari tahun 2019 – 2024 yang dibandingkan dengan target akhir renstra sebagai berikut :

**Gambar 12**  
**Capaian Persentase Pertumbuhan Produksi Jagung dalam Kurung Waktu Lima Tahun Terakhir dibandingkan Target Capaian Akhir Renstra**



Pada Tabel 12. disajikan data tabulasi luas tanam, luas panen, luas gagal panen, jumlah produksi dan produktivitas tanaman jagung dari enam belas kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar yang menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terjadi penurunan jumlah produksi jagung dari tahun 2023 yang cukup signifikan yaitu dari 28 ton menjadi 16 ton, hal tersebut dikarenakan terdapat penurunan luas tanam di beberapa wilayah bagian pegunungan dikarenakan sulitnya air di saat musim kemarau dan beralihnya petani menanam nilam yang hasilnya lebih menjanjikan.



**Tabel 15**  
**Realisasi Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Jagung Menurut Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar**

No	Kecamatan	Luas Tanam (ha)	Rusak/Tidak Berhasil (ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
1	Tinambung	18.00	-	46.00	211.60	4.60
2	Balanipa	13.00	1.00	9.00	40.50	4.50
3	Limboro	77.25	2.25	71.00	333.70	4.70
4	Tubbi Taramanu	109.00	-	644.00	3,026.80	4.70
5	Alu	93.80	36.00	298.00	1,385.70	4.65
6	Campalagian	95.00	-	206.00	988.80	4.80
7	Luyo	619.75	-	874.00	4,238.90	4.85
8	Wonomulyo	-	-	-	-	-
9	Mapilli	198.20	-	224.50	1,055.15	4.70
10	Tapango	21.40	0.50	129.40	595.24	4.60
11	Matakali	105.65	-	3.65	16.43	4.50
12	B U L O	188.75	-	257.00	1,220.75	4.75
13	Polewali	5.00	-	5.00	23.25	4.65
14	Binuang	105.95	-	469.50	2,253.60	4.80
15	Anreapi	129.50	-	125.00	593.75	4.75
16	Matangnga	106.70	-	95.70	456.49	4.77
<b>Jumlah Total 2024</b>		<b>1,886.95</b>	<b>39.75</b>	<b>3,457.75</b>	<b>16,440.65</b>	<b>4.75</b>
<b>Rata-Rata Produktivitas Ton Per Ha Tahun 2024</b>						<b>4.69</b>
<b>Tahun 2023</b>		<b>4,929.50</b>	<b>6.00</b>	<b>6,027.10</b>	<b>28,505.80</b>	<b>4.73</b>

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target di pengaruhi oleh beberapa faktor penghambat dan pendukung sebagai berikut :

**Faktor Penghambat :**

- Kondisi perubahan iklim (ElNino) yang menyebabkan musim kemarau berkepanjangan menyebabkan lahan-lahan lokasi jagung mengalami

kekeringan sehingga musim tanam mengalami kemunduran menunggu musim penghujan tiba.

- Berkurangnya alokasi jumlah bantuan jagung di tahun 2024 yaitu 2.026 ha jika dibandingkan dengan jumlah alokasi bantuan jagung tahun 2022 seluas 5.970 ha sehingga berpengaruh pada luas pertanaman jagung di tahun 2024. sebab tidak semua petani mampu membeli dengan cash harga benih jagung hibrida yang harganya tinggi.

#### **Faktor Pendukung :**

- Tersedia luasan lahan yang dapat ditanami jagung
- Pelaksanaan Fasilitasi pengusulan RDKK Kelompok tani untuk mendapatkan kuota pupuk bersubsidi
- Penggunaan bibit padi yang bersertifikat

#### **Solusi :**

Dengan memperhatikan kendala yang dihadapi pada tahun 2024, pada 2024 direncanakan akan dilakukan perbaikan sebagai berikut :

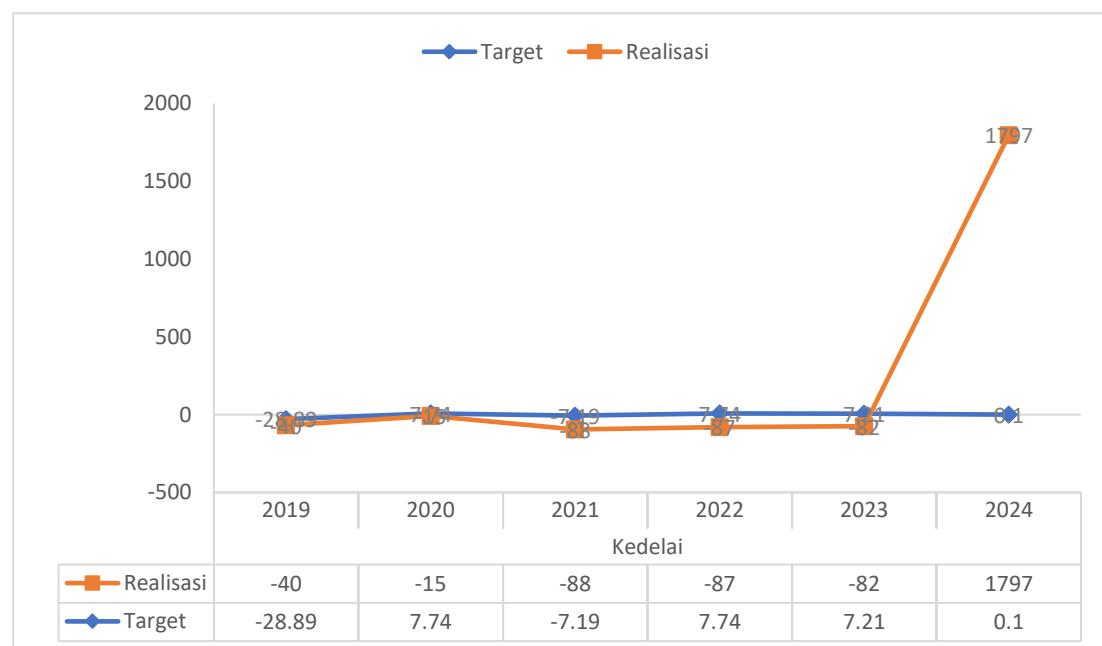
- Melakukan pembangunan embung atau irigasi air tanah dalam/dangkal pada area pertanaman yang sering mengalami kekeringan.
- Melakukan IP 300 (Padi-Padi-Jagung)
- Memaksimalkan pemanfaatan lahan sawah tada hujan



## INDIKATOR PERSENTASE PERTUMBUHAN KEDELAI

Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan produksi kedelai maka diperoleh grafik perbandingan dari tahun 2019 – 2024 dibandingkan dengan target akhir renstra sebagai berikut :

**Gambar 13**  
**Capaian Persentase Pertumbuhan Produksi Kedelai dalam Kurung Waktu Lima Tahun Terakhir dibandingkan Target Capaian Akhir Renstra**



Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan produksi kedelai tahun 2024 menunjukkan bahwa realisasi pertumbuhan produksi kedelai diperoleh angka (1.797%) yang menandakan realisasi jauh melampaui target yang telah diperjanjikan pada dokumen perjanjian kinerja Dinas Pertanian dan Pangan yaitu 0,1%, untuk komoditi kedelai mulai tahun 2019 sampai dengan 2023 realisasi tidak pernah mencapai target dan diakhir periode renstra ini capaian pertumbuhan kedelai jauh melampaui target, hal tersebut dikarenakan

terjadinya peningkatan produksi dari 9 ton menjadi 172 ton yaituterdapat peninkatan 163 ton dalam satu tahun.

Berikut disajikan data tabulasi luas tanam, luas panen, luas gagal panen, jumlah produksi dan produktivitas tanaman kedelai dari enam belas kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar.

**Tabel 16**  
**Realisasi Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Kedelai**  
**Menurut Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar**

No	Kecamatan	Luas Tanam (ha)	Kusak/ Rokak Berhasil (ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
1	Tinambung				-	
2	Balanipa				-	
3	Limboro				-	
4	Tubbi Taramanu				-	
5	Alu				-	
6	Campalagian				-	
7	Luyo				-	
8	Wonomulyo	82.30		82.30	172.83	2.10
9	Mapilli				-	
10	Tapango				-	
11	Matakali				-	
12	B U L O				-	
13	Polewali				-	
14	Binuang				-	
15	Anreapi				-	
16	Matangnga				-	
<b>Jumlah Total 2024</b>		<b>82.30</b>	<b>-</b>	<b>82.30</b>	<b>172.83</b>	<b>2.10</b>
<b>Rata-Rata Produktivitas Ton Per Ha Tahun 2024</b>						<b>2.10</b>
<b>Tahun 2023</b>		<b>5.75</b>	<b>-</b>	<b>5.25</b>	<b>9.11</b>	<b>1.74</b>

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar

Pada Tabel 13 menunjukkan penurunan jumlah produksi kedelai yang signifikan dari tahun 2022 ke tahun 2024 yaitu 49.58 ton menjadi 9.11 ton, penyebab utama hal tersebut sama pada tanaman padi dan jagung yaitu musim kemarau yang panjang dan faktor penghambat yang lain seperti diuraikan hasil analisis oleh Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagai berikut :

**Faktor Penghambat :**

- Program kegiatan pengembangan kedelai di Kabupaten Polewali Mandar yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan juli 2024 di Kecamatan Wonomulyo (Desa Kebunsari, Desa Sidorejo, Desa Bumiayu, Desa Arjosari, Desa Bumimulyo, Desa Nepo) seluas 584 ha. Terkait dengan hal tersebut karena adanya perbaikan saluran irigasi primer pada titik rompong Wonomulyo sehingga terjadi pergeseran waktu tanam padi dari bulan april menjadi bulan juni 2024. Menyangkut program pengembangan kedelai tidak dapat dilaksanakan karena kondisi pertanaman padi saat bulan juli baru berumur ± 35 hari, sehingga petani tidak bersedia lagi untuk melakukan penanaman kedelai setelah selesai panen padi dengan alasan telah lewat waktu untuk melakukan tanam palawija dilahan sawah.

**Faktor Pendukung :**

- Tersedia luasan lahan yang dapat ditanami kedelai
- Pelaksanaan Fasilitasi pengusulan RDKK Kelompok tani untuk mendapatkan kuota pupuk bersubsidi
- Penggunaan bibit kedelai yang bersertifikat

### **Solusi :**

Dengan memperhatikan kendala yang dihadapi pada tahun 2024, pada 2024 direncanakan akan dilakukan perbaikan sebagai berikut :

- Melakukan pembangunan embung atau irigasi air tanah dalam/dangkal pada area pertanaman yang sering mengalami kekeringan.
- Melakukan IP 300 (Padi-Padi-Kedelai)
- Memaksimalkan pemanfaatan lahan sawah tada hujan

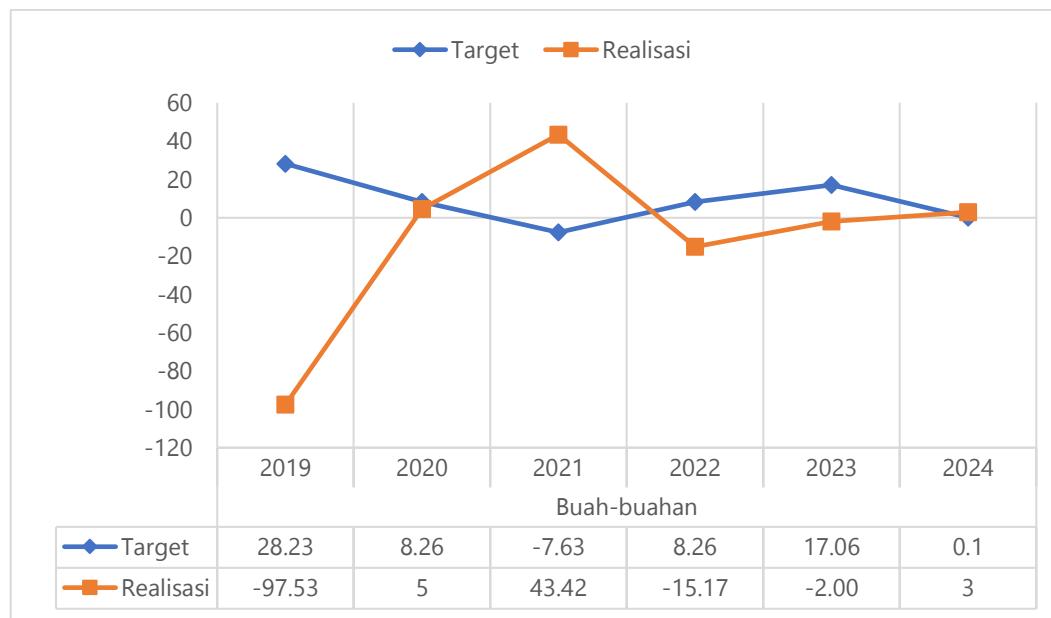
Secara umum komoditi tanaman pangan yaitu padi, jagung dan kedelai pada tahun 2024 tidak mencapai target yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan. Faktor yang memiliki pengaruh besar dalam menghambat pertumbuhan produksi tersebut adalah adanya Kondisi perubahan iklim (ElNino) yang menyebabkan musim kemarau berkepanjangan menyebabkan lahan-lahan lokasi tanaman pangan mengalami kekeringan.

Untuk mendukung peningkatan pertumbuhan produksi padi, jagung dan kedelai Dinas Pertanian dan Pangan pada APBD tahun 2024 melaksanakan program dan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana antara lain pembangunan Jaringan irigasi tersier, pembangunan jalan usaha tani, pengadaan alat dan pasca panen, dan bantuan benih padi.

### **INDIKATOR PERSENTASE PERTUMBUHAN BUAH-BUAHAN**

Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan produksi buah-buahan maka diperoleh grafik perbandingan dari tahun 2019 – 2024 dibandingkan dengan target akhir renstra sebagai berikut :

**Gambar 14**  
**Capaian Persentase Pertumbuhan Produksi Buah-Buahan dalam Kurung Waktu Lima Tahun Terakhir dibandingkan Target Capaian Akhir Renstra**



Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan produksi buah-buahan tahun 2024 menunjukkan bahwa realisasi pertumbuhan produksi buah diperoleh angka (3) yang menandakan realisasi jauh melampaui target yang telah diperjanjikan pada dokumen perjanjian kinerja Dinas Pertanian dan Pangan yaitu 0.1%, Pada akhir periode renstra terjadi peningkatan produksi buah-buahan jika dibandingkan dengan tahun 2023, 2022, 2020 dan 2019. Hal tersebut dikarenakan

Berikut disajikan data tabulasi produksi tanaman buah yang tersebar di Kabupaten Polewali Mandar.

**Tabel 17**  
**Produksi Buah-Buahan Tahun 2019-2024 di Kabupaten Polewali Mandar**

<b>Komoditi (Ton)</b>	<b>TAHUN</b>					
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>BUAH-BUAHAN</b>						
Belimbing/ <i>Star Fuit</i>	0	26.6	0	1,181.6	1,889.4	93.9
Duku/ Langsat/ Kokosan	104.131	18,530.40	2,882.9	3,059.1	2,740.3	4,730.4
Durian/ <i>Durian</i>	36.203	5005.3	25,270.8	35,993.8	16,465.6	6,919.1
Jambu Biji/ <i>Guava</i>	443	544.4	282.0	158.6	538.3	75.6
Jambu Air/ <i>Rose Apple</i>	0	3.2	-	526.5	900.3	24.7
Jeruk siam/ <i>Orange</i>	120	2	288.6	52.0	42.8	25.0
Jeruk lemon	0	0	-		4.1	
Mangga/ <i>Mango</i>	7.944	3273.6	37,191.0	5,103.2	4,518.0	4,701.3
Nangka/ <i>Jack Fruit</i>	2.412	2622.4	318.9	856.2	2,899.5	356.5
Nanas/ <i>Pineapple</i>	1.314	882.5	48.6	348.3	727.4	32.0
Pepaya/ <i>Papaya</i>	5.168	2488.2	398.7	2,031.6	3,635.1	12,512.0
Pisang/ <i>Banana</i>	79.75	12,391	3,438.7	9,263.4	10,017.6	29,254.0
Rambutan/ <i>Rambutan</i>	152.006	3,545	612.4	1,369.2	10,352.5	708.3
Salak/ <i>Salacca</i>	95	3	0.3	56.7	521.3	8.8
Sawo	0	0	0	0	48.4	
Sirsak	0	0	0	0	50.9	301.0
Sukun	0	0	0	0	1,917.7	386.0
Lengkeng	0	0	0	0	99.2	37.0

Manggis	0	0	0	0	249.0	7.5
melon						1.9
Buah Naga	0	0	0	0	974.7	83.6
Apel	0	0	0	0	4.9	
Alpukat	0	0	0	0	147.0	56.6
<b>TOTAL</b>	<b>1,047</b>	<b>49,317</b>	<b>70,733</b>	<b>60,000</b>	<b>58,744</b>	<b>60,315</b>
<b>PERTUMBUHAN</b>	<b>-98</b>	<b>4,611</b>	<b>43</b>	<b>-15</b>	<b>-2</b>	<b>3</b>

*Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Polewali Mandar*

Pada Tabel di atas terlihat bahwa produksi buah yang mengalami peningkatan yang signifikan adalah buah pepaya dan pisang, sedangkan yang lain mengalami penurunan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target di pengaruhi oleh beberapa faktor penghambat dan pendukung sebagai berikut :

#### **Faktor Penghambat :**

- Lahan pertanaman buah-buahan belum optimal sepenuhnya yaitu kebutuhan sumber-sumber air dan akses jalan untuk pengangkutan hasil panen ke pasar.
- Bunga buah-buahan rontok saat musim kemarau
- Terdapat pohon buah-buahan yang sudah tua sehingga memerlukan peremajaan
- Penggunaan pupuk secara rasional dan berimbang merupakan faktor kunci dalam peningkatan produksi tanaman. Sedangkan rekomendasi pupuk yang berlaku saat ini masih bersifat umum dan belum mempertimbangkan kandungan atau status hara tanah sehingga penggunaan pupuk tidak efisien.

#### **Faktor Pendukung :**

- Pelaksanaan program pengadaan bibit buah-buahan

- Pemberian perangkap hama babi untuk mencegah serangan terhadap tanaman buah-buahan

### **Solusi :**

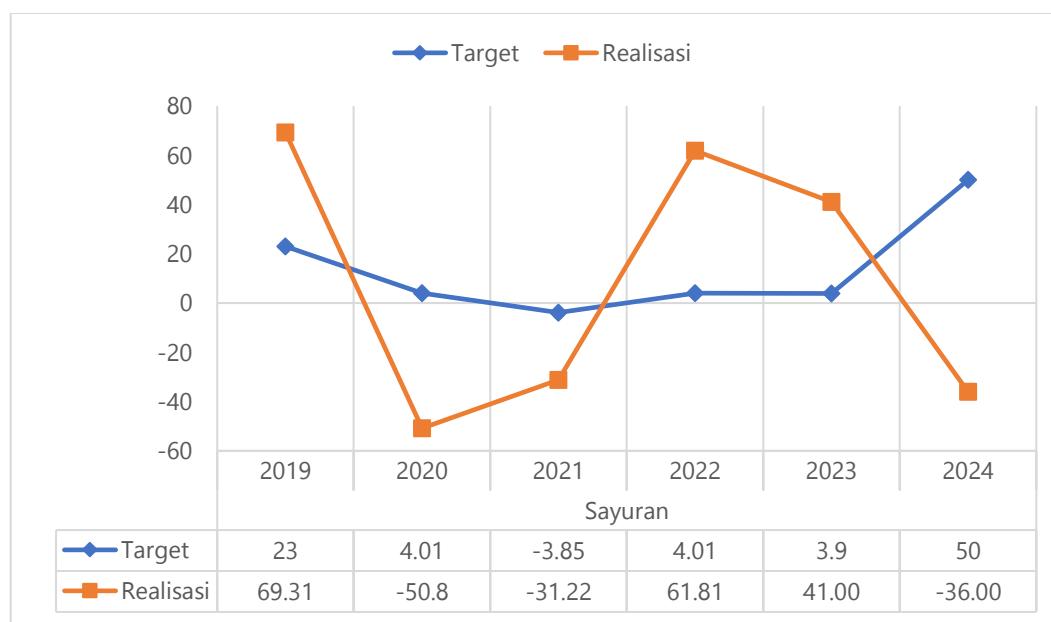
Dengan memperhatikan kendala yang dihadapi pada tahun 2024, pada 2024 direncanakan akan dilakukan perbaikan sebagai berikut :

- Pengadaan bibit buah-buahan strategis sehingga memiliki nilai jual yang tinggi.
- Pembangunan sumber-sumber air dan jalan usaha tani untuk mempermudah pengangkutan hasil panen petani.

## **INDIKATOR PERSENTASE PERTUMBUHAN SAYURAN**

Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan produksi sayuran maka diperoleh grafik perbandingan dari tahun 2019 – 2024 dibandingkan dengan target akhir renstra sebagai berikut :

**Gambar 15**  
**Capaian Persentase Pertumbuhan Produksi Sayuran dalam Kurung Waktu Lima Tahun Terakhir dibandingkan Target Capaian Akhir Renstra**



Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan produksi sayuran tahun 2024 menunjukkan bahwa realisasi pertumbuhan produksi sayuran diperoleh angka -36 yang menandakan target yang telah diperjanjikan pada dokumen perjanjian kinerja Dinas Pertanian dan Pangan yaitu 50% tidak tercapai, dibandingkan pada tahun 2022 dan 2019 capaian realisasi melebihi dari target. Hal tersebut dikarenakan budidaya sayuran hanya sebagai penghasilan tambahan dan belum fokus dikembangkan secara serius oleh petani dikarenakan lebih fokus pada tanaman pokok yaitu perkebunan dan tanaman pangan serta petani terkadang latah dengan sayuran yang memiliki harga tinggi, maka akan banyak yang menanam begitu harga anjlok maka tidak ada lagi yang menanam, sehingga pertumbuhan produksi sayuran kadang terlalu tinggi dan begitupun sebaliknya.

Salah satu faktor yang mempengaruhi pengembangan sayuran di Kabupaten Polewali Mandar tidak dapat berkembang pesat dikarenakan secara psikologis petani belum siap untuk budidaya sayuran karena tingkat resiko gagal panen yang lebih tinggi di bandingkan dengan tanaman lainnya. Hal tersebut di buktikan dengan beberapa kali pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan untuk mendorong pengembangan tanaman sayuran pada daerah daerah yang berpotensi untuk pengembangan sayuran, namun setelah pelaksanaan kegiatan selesai petani tidak melanjutkannya dan kembali fokus mengelola kebunnya, sehingga untuk saat ini program dan kegiatan hanya ditujukan untuk mengembangkan lokasi sayuran eksisting seperti di Kecamatan Limboro, Tinambung dan Balanipa.

Berikut disajikan data tabulasi produksi sayuran berdasarkan komoditi yang tersebar di Kabupaten Polewali Mandar.

**Tabel 18**  
**Produksi Sayuran Tahun 2019-2024 di Kabupaten Polewali Mandar**

<b>Komoditi (Ton)</b>	<b>TAHUN</b>					
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>SAYURAN</b>						
Bawang Merah/ <i>Shallot</i>	1.156	402.9	213.5	225.6	919.0	194.4
Bawang Daun/ <i>Welch</i>	162	0	13.1	5.0	4.0	7.7
Sawi/ <i>Collards</i>	507	16.9	27.3	88.5	79.8	31.7
Kacang Panjang	1.085	342.3		200.1	187.0	171.0
Kubis					7.0	-
Cabe	2.979	191.4	189.7	585.1	681.1	580.1
Buncis					5.0	5.0
Tomat	957	50.1	82.8	102.5	74.0	121.5
Terong	602	67.7	56.6	148.2	73.5	73.9
Ketimun	717	214	150.4	92.6	65.9	84.6
Kangkung	2.278	127.2	99.4	91.5	95.4	101.4
Bayam	1.54	40.9	70.2	78.4	77.4	81.4
Labu siam					16.2	14.1
<b>TOTAL</b>	2,954	1,453	1,000	1,618	2,285	1,467
<b>PERTUMBUHAN</b>		-51	-31	62	41	-36

*Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Polewali Mandar*

Pencapaian target produksi sayuran tersebut di dukung dengan semakin membaiknya kualitas prasarana dan sarana diwilayah sentra

pertanaman bawang dan cabe yaitu Kecamatan Limboro, Tinambung dan Balanipa. Untuk tahun 2024 intervensi dari Dinas Pertanian dan Pangan pada sub. Sektor hortikultura berupa pengadaan benih sayuran dan buah-buahan, pengadaan penghalau hama babi, Sprayer punggung, dan pengadaan cultivator untuk mempercepat proses pengolahan lahan sehingga penanaman kembali segera dapat dilakukan setelah panen sehingga akan meningkatkan indeks penanaman hortikultura.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target di pengaruhi oleh beberapa faktor penghambat dan pendukung sebagai berikut :

#### **Faktor Penghambat :**

- Serangan Hama dan Penyakit Tanaman serta kondisi cuaca yang ekstrem menyebabkan gagal panen
- Lahan pertanaman sayuran belum optimal sepenuhnya yaitu kebutuhan sumber-sumber air dan akses jalan untuk pengangkutan hasil panen ke pasar.
- Kuota pupuk bersubsidi yang terbatas.

#### **Faktor Pendukung :**

- Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura merupakan sasaran Nasional RPJMN 2020-2024;
- Adanya Inovasi Pengembangan Kawasan Hortikultura;
- Adanya dukungan dana APBD dan APBN
- Tenaga Penyuluh yang tersebar di 16 Kecamatan;

#### **Solusi :**

Dengan memperhatikan kendala yang dihadapi pada tahun 2024, pada 2024 direncanakan akan dilakukan perbaikan sebagai berikut :

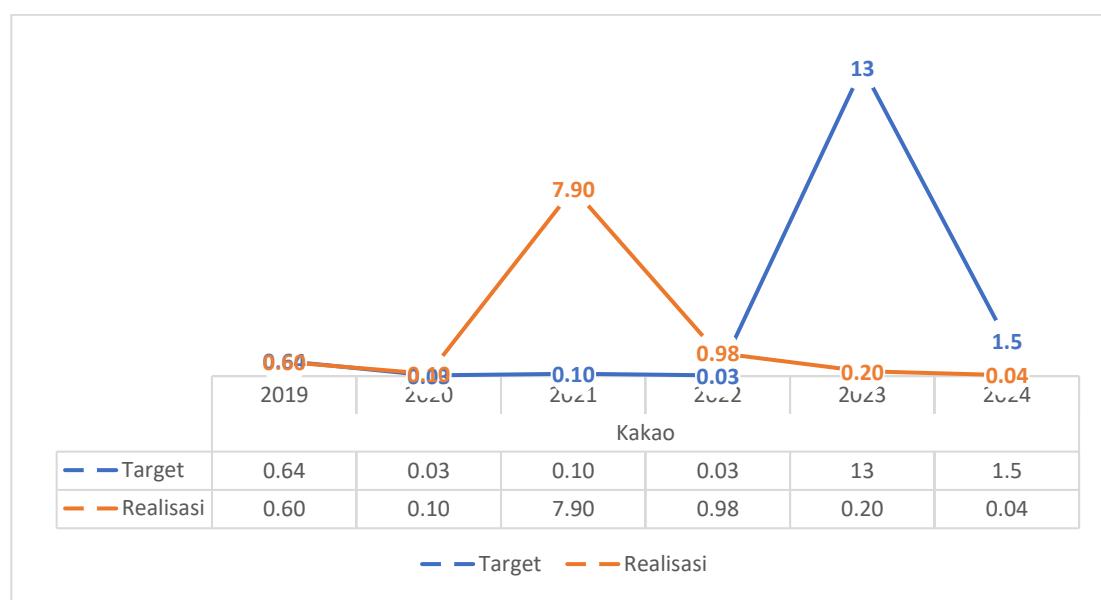
- Pengadaan varietas bibit sayuran yang tahan terhadap hama dan penyakit
- Pembangunan sumber-sumber air dan jalan usaha tani untuk mempermudah pengangkutan hasil panen petani.

- Pelatihan pembuatan pupuk kompos dan pupuk kandang untuk mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi

## INDIKATOR PERSENTASE PERTUMBUHAN KAKAO

Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan produksi kakao maka diperoleh grafik perbandingan dari tahun 2019 – 2024 dibandingkan dengan target akhir renstra sebagai berikut :

**Gambar 16**  
**Capaian Persentase Pertumbuhan Produksi Kakao dalam Kurung Waktu Lima Tahun Terakhir dibandingkan Target Capaian Akhir Renstra**



Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan produksi kakao tahun 2024 menunjukkan bahwa realisasi pertumbuhan produksi kakao diperoleh angka 0.04 persen yang menandakan realisasi tidak mencapai target yang telah diperjanjikan pada perjanjian kinerja Dinas Pertanian dan Pangan yaitu 1.5%, begitupun pada tahun 2019. Jika dibandingkan pada tahun 2020, 2021 dan 2023 realisasi mencapai target yang ditentukan. Meskipun tidak mencapai

target pada tahun 2024 tapi terdapat peningkatan produksi dari tahun sebelumnya.

Berikut disajikan data tabulasi produksi kakao berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar.

**Tabel 19**  
**Luas Areal, Jumlah Produksi, dan Produktivitas Kakao menurut Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar**

No	KECAMATAN	LUAS AREAL			JUMLAH (Ha)	JUMLAH PRODUKSI (Ton)	PRODUKTIVITAS (Kg/Ha)
		TBM (Ha)	TM (Ha)	TR/TT (Ha)			
1	Polewali	63.00	671.00	59.10	793.10	435.70	649.33
2	Binuang	125.77	2,793.19	444.99	3,363.95	2,732.86	978.40
3	Anreapi	175.09	4,645.87	121.82	4,942.78	2,872.54	618.30
4	Matakali	97.52	1,493.75	215.50	1,806.77	781.77	523.36
5	Wonomulyo	1.00	121.00	267.40	389.40	98.01	810.00
6	Tapango	161.57	4,825.99	527.97	5,515.53	4,765.18	987.40
7	Matangnga	94.40	3,332.73	857.49	4,284.62	3,057.05	917.28
8	Bulo	95.19	4,861.46	214.00	5,170.65	4,647.46	955.98
9	Mapilli	127.00	3,767.00	673.00	4,567.00	3,460.29	918.58
10	Luyo	185.16	4,979.59	418.40	5,583.15	4,600.29	923.83
11	Tutar	133.00	5,735.30	734.00	6,602.30	5,562.67	969.90
12	Campalagian	82.10	1,507.40	564.50	2,154.00	1,071.52	710.84
13	Balanipa	28.00	256.37	32.13	316.50	148.68	579.95
14	Tinambung	20.00	238.30	32.40	290.70	203.35	853.33
15	Limboro	93.99	1,247.99	123.47	1,465.45	1,125.08	901.51
16	Allu	250.20	1,166.00	267.40	1,683.60	1,016.60	871.87
<b>JUMLAH</b>		<b>1,732.99</b>	<b>41,642.94</b>	<b>5,553.57</b>	<b>48,929.50</b>	<b>36,579.04</b>	<b>878.40</b>

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar

Keterangan :

TBM : Tanaman Belum Menghasilkan

TM : Tanaman Menghasilkan

TR/TT : Tanaman rusak/Tanaman Tua

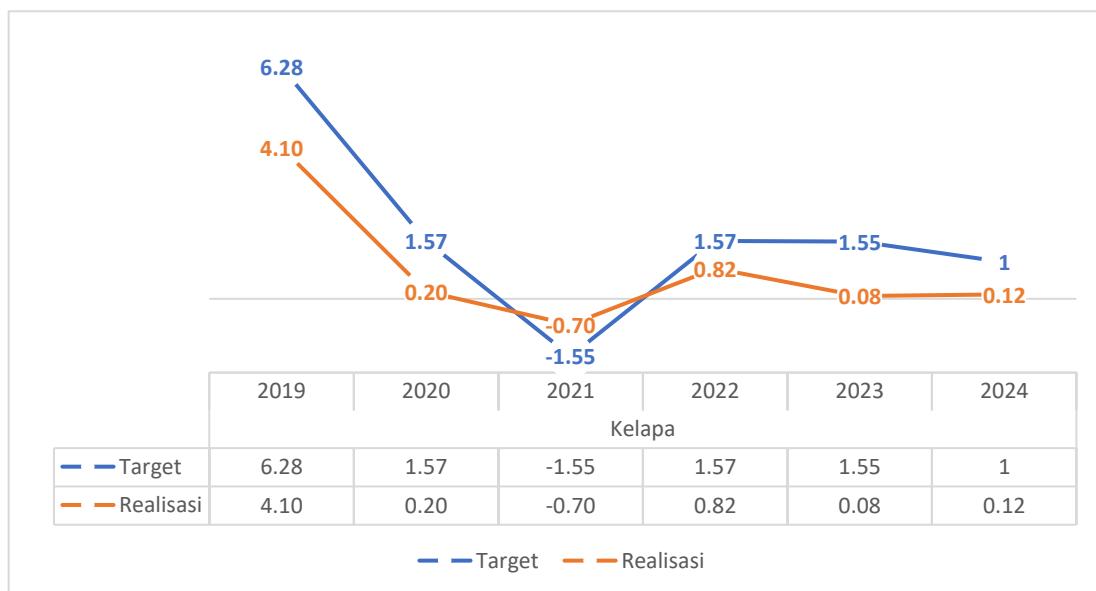
Produksi kakao selama tiga tahun terakhir terjadi peningkatan produksi dari tahun sebelumnya. Persentase pertumbuhan kakao dari tahun 2022 ke 2024 sebesar 0,98 % atau sebesar 36.482,11 ton. Peningkatan jumlah produksi kakao ini dikarenakan setiap tahunnya terdapat kegiatan pengembangan kakao dari dana APBN berupa bantuan bibit kakao dan pupuk. Dari segi pencapaian target produksi yang telah ditentukan, pada tahun 2024 produksi kakao mencapai target hal tersebut dikarenakan pengendalian serangan OPT terus dilakukan dan peremajaan tanaman tua yang sudah tidak produktif.

Berdasarkan data pada Gambar 15 diatas dapat dilihat bahwa peningkatan produksi kakao selama Lima tahun terakhir mengalami peningkatan dengan peningkatan persentase pertumbuhan produksi dari tahun ke tahun.

### INDIKATOR PERSENTASE PERTUMBUHAN KELAPA

Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan produksi kelapa dalam dan hybrida maka diperoleh grafik perbandingan dari tahun 2019 – 2024 dibandingkan dengan target akhir renstra sebagai berikut :

**Gambar 17**  
**Capaian Persentase Pertumbuhan Produksi Kelapa Kurung Waktu Lima Tahun Terakhir dibandingkan Target Capaian Akhir Renstra**



Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan produksi kelapa tahun 2024 menunjukkan bahwa realisasi pertumbuhan produksi kelapa diperoleh angka 0.12% yang menandakan bahwa terdapat peningkatan pertumbuhan produksi kelapa walaupun dari segi pencapaian taget tidak tercapai sesuai yang telah diperjanjikan pada perjanjian kinerja Dinas Pertanian dan Pangan yaitu 1%,

begitupun data empat tahun terakhir 2019-2023. Hal tersebut dikarenakan target yang ditentukan tidak sebanding dengan intervensi anggaran yang dialokasikan untuk komoditi tanaman kelapa.

Berikut disajikan data tabulasi produksi kelapa dalam dan hybrida berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar.

**Tabel 20**  
**Produksi Kelapa Dalam Tahun 2019-2024 di Kabupaten Polewali Mandar**

No	KECAMATAN	LUAS AREAL			JUMLAH (Ha)	JUMLAH PRODUKSI (Ton)	PRODUKTI VITAS (Kg/Ha)
		TBM (Ha)	TM (Ha)	TR/TT (Ha)			
1	Polewali	1.00	136.20	15.50	152.70	128.04	940.09
2	Binuang	78.00	1,690.40	404.30	2,172.70	1,470.09	869.67
3	Anreapi	61.50	339.45	210.63	611.58	162.85	479.76
4	Matakali	14.20	786.60	166.70	967.50	939.55	1,194.44
5	Wonomulyo	19.05	341.70	81.50	442.25	376.07	1,100.58
6	Tapango	312.72	2,055.30	144.70	2,512.72	2,735.09	1,330.75
7	Matangnga	43.80	37.50	11.60	92.90	6.15	163.87
8	Bulo	86.50	77.53	65.73	229.76	65.68	847.16
9	Mapilli	125.00	2,893.80	211.86	3,230.66	3,527.51	1,218.99
10	Luyo	90.50	362.35	70.50	523.35	374.56	1,033.69
11	Tutar	55.75	57.75	48.42	161.92	53.47	925.82
12	Campalagian	297.00	2,182.01	1,143.49	3,622.50	2,613.98	1,197.97
13	Balanipa	172.25	879.00	98.25	1,149.50	615.28	699.98
14	Tinambung	54.00	1,820.00	238.20	2,112.20	2,202.00	1,209.89
15	Limboro	235.00	1,404.40	85.30	1,724.70	1,693.20	1,205.64
16	Allu	198.00	555.50	16.50	770.00	736.99	1,326.72
<b>JUMLAH</b>		<b>1,844.27</b>	<b>15,619.49</b>	<b>3,013.18</b>	<b>20,476.94</b>	<b>17,700.51</b>	<b>1,133.23</b>

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar

Keterangan :

TBM : Tanaman Belum Menghasilkan

TM : Tanaman Menghasilkan

TR/TT : Tanaman rusak/Tanaman Tua

Pada Tabel 17 dan Gambar 16 menunjukkan bahwa jumlah produksi kelapa dalam dari tahun 2022 ke 2024 mengalami peningkatan, meskipun tidak signifikan, hal tersebut dikarenakan masih terdapat tanaman kelapa yang belum menghasilkan seluas 1.719,27 Ha dan tanaman tua seluas 3.160,18. Dari data tersebut diketahui bahwa masih terdapat tanaman tua yang memerlukan

peremajaan. Sehingga ke depannya diperlukan pengadaan bibit tanaman kelapa dalam melalui dana APBD dikarenakan dari Pusat pengadaan bibit yang ada yaitu hanya kakao dan kopi. Kasus yang sama juga terjadi pada tanaman kelapa hybrida yaitu terdapat tanaman rusak seluas 954,99 Ha yang memerlukan peremajaan, dan selama ini untuk kelapa hybrida tidak pernah dilakukan peremajaan, hal tersebut dapat kita lihat pada Tabel 18 dibawah tidak terdapat luasan tanaman belum menghasilkan.

**Tabel 21**  
**Produksi Kelapa Hybrida Tahun 2019-2024 di Kabupaten Polewali Mandar**

No	KECAMATAN	LUAS AREAL			JUMLAH (Ha)	JUMLAH PRODUKSI (Ton)	PRODUKTI VITAS (Kg/Ha)
		TBM (Ha)	TM (Ha)	TR/TT (Ha)			
1	Polewali	-	-	19.90	19.90	12.05	101.50
2	Binuang	-	265.54	146.93	412.47	371.65	1,400
3	Anreapi	-	112.43	137.36	249.79	48.12	428
4	Matakali	-	363.17	98.52	461.69	155.80	429
5	Wonomulyo	-	-	-	-	#REF!	#REF!
6	Tapango	-	516.50	100.00	616.50	41.41	80.17
7	Matangnga	-	-	-	-	#REF!	#REF!
8	Bulo	-	30.02	35.32	65.34	7.63	254
9	Mapilli	-	57.50	45.50	103.00	442.45	7,695
10	Luyo	-	21.75	19.25	41.00	38.95	1,791
11	Tutar	-	-	-	-	-	-
12	Campalagian	-	210.50	210.50	421.00	734.86	3,491
13	Balanipa	-	11.20	18.45	29.65	48.74	4,352
14	Tinambung	-	42.40	41.51	83.91	212.59	5,014
15	Limboro	-	71.50	65.45	136.95	236.09	3,302
16	Allu	-	7.65	16.30	23.95	48.27	6,310
<b>JUMLAH</b>		<b>-</b>	<b>1,710.16</b>	<b>954.99</b>	<b>2,665.15</b>	<b>2,398.61</b>	<b>1,402.57</b>

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar

Keterangan :

TBM : Tanaman Belum Menghasilkan

TM : Tanaman Menghasilkan

TR/TT : Tanaman rusak/Tanamn Tua

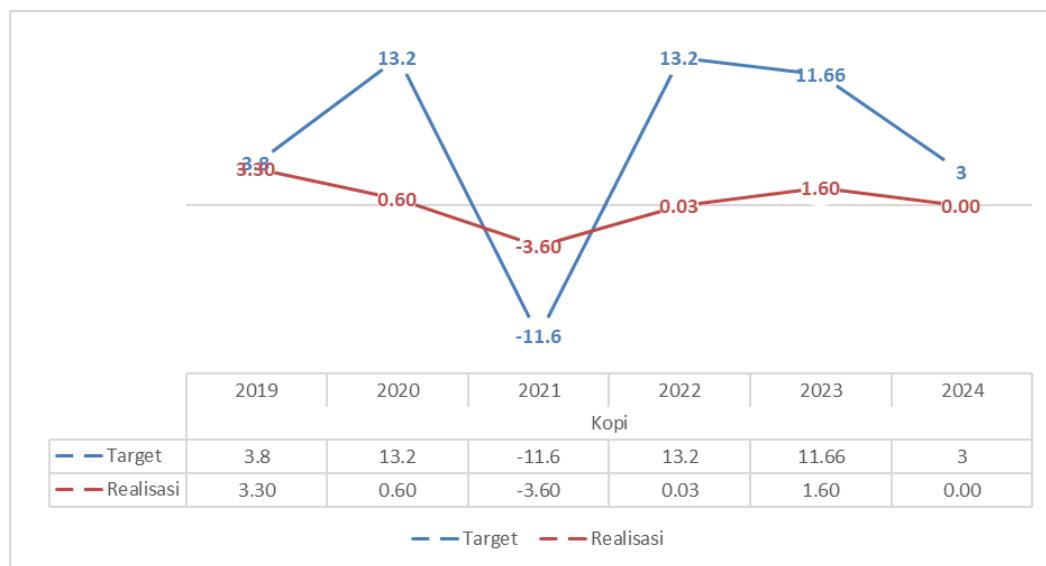
Sumbangsih produksi kelapa hybrida terhadap total produksi kelapa di Kabupaten Polewali Mandar terlihat sedikit dikarenakan kurang maksimalnya produksi kelapa hybrida dikarenakan Pohon kelapa hybrida yang ada pada kebun masyarakat rata-rata berumur tua dan belum pernah dilakukan

peremajaan karena selama ini bantuan bibit yang bersumber dari APBN hanya jenis kelapa dalam, sehingga ke depannya perlu dilakukan peremajaan kelapa hybrida dengan memberikan bantuan bibit kelapa hybrida kepada masyarakat, selain itu tingginya alih fungsi lahan pada perkebunan kelapa ikut andil dalam menekan total produksi kelapa. Jika hal ini tidak di kendalikan, maka beberapa tahun kemudian akan untuk komoditas kelapa hybrida akan punah di Kabupaten Polewali Mandar.

### INDIKATOR PERSENTASE PERTUMBUHAN KOPI

Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan produksi kopi robusta dan arabika maka diperoleh grafik perbandingan dari tahun 2019 – 2024 dibandingkan dengan target akhir renstra sebagai berikut :

**Gambar 19**  
**Capaian Persentase Pertumbuhan Produksi Kopi Kurung Waktu Lima Tahun Terakhir dibandingkan Target Capaian Akhir Renstra**



Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan produksi kopi tahun 2024 menunjukkan bahwa realisasi pertumbuhan produksi kopi diperoleh angka 1.60% yang menandakan bahwa terdapat peningkatan pertumbuhan produksi

kopi walaupun dari segi pencapaian taget tidak tercapai sesuai yang telah diperjanjikan pada perjanjian kinerja Dinas Pertanian dan Pangan yaitu 11.66%, begitupun data empat tahun terakhir 2019-2022. Hal tersebut dikarenakan target yang ditentukan tidak sebanding dengan intervensi anggaran yang dialokasikan untuk komoditi tanaman kopi.

Berikut disajikan data tabulasi produksi kopi robusta dan arabika berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar.

**Tabel 22  
Produksi Kopi Robusta Tahun 2019-2024 di Kabupaten Polewali Mandar**

No	KECAMATAN	LUAS AREAL			JUMLAH (Ha)	JUMLAH PRODUKSI (Ton)	PRODUKTI VITAS (Kg/Ha)
		TBM (Ha)	TM (Ha)	TR/TT (Ha)			
1	Polewali	-	-	-	-	-	-
2	Binuang	65.74	26.26	-	92.00	10.76	409.91
3	Anreapi	-	60.31	114.20	174.51	53.61	888.98
4	Matakali	-	-	-	-	-	-
5	Wonomulyo	-	-	-	-	-	-
6	Tapango	50.00	185.65	10.50	246.15	137.35	739.84
7	Matangnga	95.00	123.45	38.30	256.75	100.94	817.69
8	Bulo	42.39	114.61	20.00	177.00	94.78	826.98
9	Mapilli	0.40	15.10	7.00	22.50	2.85	188.72
10	Luyo	-	42.25	20.50	62.75	34.86	825.19
11	Tutar	345.05	235.90	60.75	641.70	222.65	943.85
12	Campalagian	-	9.50	2.00	11.50	6.75	710.96
13	Balanipa	-	1.70	2.00	3.70	-	-
14	Tinambung	-	-	-	-	-	-
15	Limboro	3.70	28.80	15.90	48.40	2.74	95.14
16	Allu	14.50	67.00	56.50	138.00	37.54	560.25
<b>JUMLAH</b>		<b>616.78</b>	<b>910.53</b>	<b>347.65</b>	<b>1,874.96</b>	<b>704.85</b>	<b>774.11</b>

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar

Keterangan :

TBM : Tanaman Belum Menghasilkan

TM : Tanaman Menghasilkan

TR/TT : Tanaman rusak/Tanaman Tua

Pada Tabel 18 dan Gambar 19 menunjukkan bahwa jumlah produksi kopi robusta dalam dari tahun 2022 ke 2024 mengalami peningkatan,

meskipun tidak signifikan, hal tersebut dikarenakan masih terdapat tanaman kopi yang belum menghasilkan seluas 558,78 Ha dan tanaman tua seluas 409,65 Ha. Dari data tersebut diketahui bahwa masih terdapat tanaman tua yang memerlukan peremajaan. Sehingga ke depannya diperlukan pengadaan bibit tanaman kopi dalam melalui dana APBD meskipun setiap tahunnya terdapat bantuan bibit kopi malalui dana APBN. Kasus yang sama juga terjadi pada tanaman kopi arabika yaitu terdapat tanaman rusak seluas 219,42 Ha yang memerlukan peremajaan, dan selama ini untuk kopi arabika peremajaan yang dilakukan belum maksimal, hal tersebut dapat kita lihat pada Tabel 19 dibawah luasan tanaman belum menghasilkan hanya 25,90 Ha jika dibandingkan dengan tanaman kopi yang tua/rusak.

**Tabel 23**  
**Produksi Kopi Arabika Tahun 2019-2024 di Kabupaten Polewali Mandar**

No	KECAMATAN	LUAS AREAL			JUMLAH (Ha)	JUMLAH PRODUKSI (Ton)	PRODUKTI VITAS (Kg/Ha)
		TBM (Ha)	TM (Ha)	TR/TT (Ha)			
1	Polewali	-	-	-	-	-	-
2	Binuang	-	55.90	143.50	199.40	38.74	692.98
3	Anreapi	3.50	59.00	67.52	130.02	62.95	1,067
4	Matakali	-	-	-	-	-	-
5	Wonomulyo	-	-	-	-	-	-
6	Tapango	4.15	12.30	2.25	18.70	9.59	779.67
7	Matangnga	-	-	-	-	-	-
8	Bulo	-	-	-	-	-	-
9	Mapilli	-	-	-	-	-	-
10	Luyo	-	-	-	-	-	-
11	Tutar	18.25	22.40	6.15	46.80	17.06	761.61
12	Campalagian	-	-	-	-	-	-
13	Balanipa	-	-	-	-	-	-
14	Tinambung	-	-	-	-	-	-
15	Limboro	-	-	-	-	-	-
16	Allu	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>25.90</b>	<b>149.60</b>	<b>219.42</b>	<b>394.92</b>	<b>128.34</b>	<b>857.87</b>

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar

Keterangan :

TBM : Tanaman Belum Menghasilkan

TM : Tanaman Menghasilkan

TR/TT : Tanaman rusak/Tanaman Tua

Berdasarkan gambar dan tabel diatas, dapat dilihat tren pertumbuhan masing-masing komoditi perkebunan, bahwa salah satu yang menyebabkan tidak signifikannya pertumbuhan produksi

komoditi perkebunan adalah jumlah tanaman tua perkebunan yang semakin meningkat, tanaman muda yang belum menghasilkan serta tingkat serangan OPT yang cukup tinggi dan kurangnya pemberian pupuk pada tanaman perkebunan, khususnya komoditi kelapa.

Dinas Pertanian dan Pangan pada Tahun 2024 telah melakukan intervensi pada sub sektor perkebunan berupa pengadaan bibit kakao 2.482 Pohon dan bibit kelapa dalam 600 pohon yang bersumber dana APBD. Sedangkan untuk prasarana dilakukan pembangunan jalan produksi 11 unit untuk memudahkan pengangkutan sarana produksi dan hasil panen, bantuan sarana pasca panen perkebunan untuk hilirisasi sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk perkebunan yaitu mesin penepung kopi, mesin pengupas kopi basah dan kopi kering, mesin pengurai sabut kelapa, para-para penegering serta gerobak dorong. Selain itu dilakukan fasilitasi untuk izin usaha produk perkebunan bagi kelompok tani.

### **Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Capaian Indikator**

Dalam pencapaian target indikator produksi tanaman perkebunan faktor yang mempengaruhi, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

#### **Faktor Penunjang**

1. Peningkatan Produksi Komoditas Kakao, Kopi dan Kelapa merupakan Prioritas Nasional;
2. Ketersediaan dana KUR;
3. Tenaga Penyuluhan yang tersebar di 16 Kecamatan;

## Faktor Penghambat

1. Bencana alam dan Serangan Hama dan Penyakit pada tanaman Perkebunan;
2. Alih fungsi lahan perkebunan;
3. Luasan Tanaman perkebunan yang tua semakin meningkat;
4. Penggunaan pupuk secara rasional dan berimbang merupakan faktor kunci dalam peningkatan produksi tanaman. Sedangkan rekomendasi pupuk yang berlaku saat ini masih bersifat umum dan belum mempertimbangkan kandungan atau status hara tanah sehingga penggunaan pupuk tidak efisien;
5. Infrastruktur jalan untuk mengangkut hasil panen tidak tersedia pada semua wilayah sentra perkebunan;

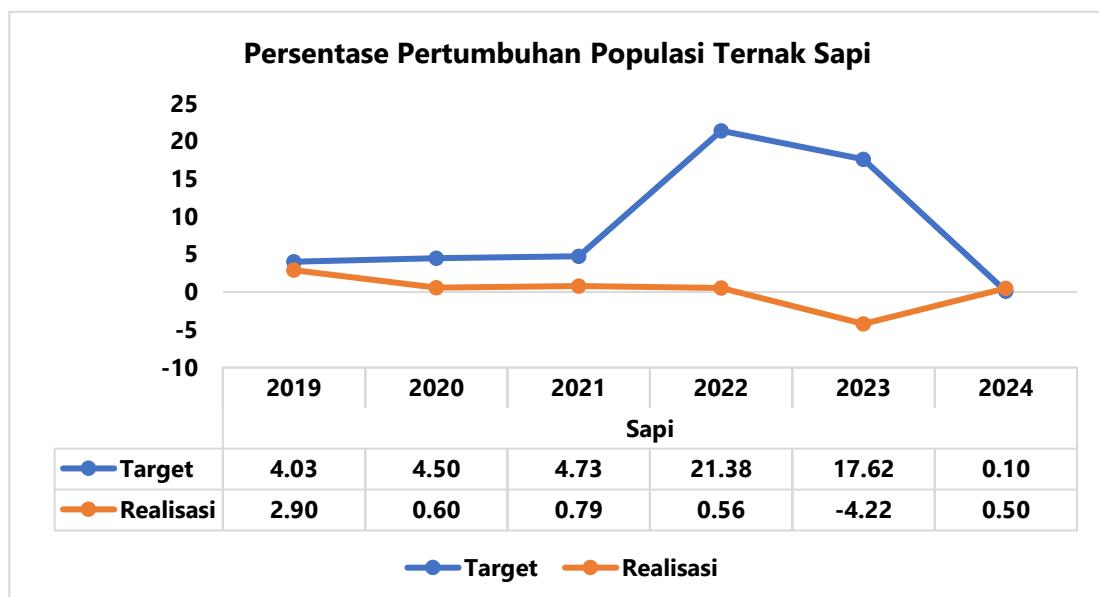
## Solusi

1. Pelatihan Mitigasi Bencana Pertanian;
2. Penyusunan Peta ramalan Hama dan Penyakit dan Pembentukan Brigade Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan;
3. Pemerintah fokus peningkatan produktivitas dan perluasan areal tanam;
4. Pelaksanaan Peremajaan tanaman perkebunan;
5. Penguatan akses petani ke input produksi dan lembaga keuangan;

## INDIKATOR PERSENTASE PERTUMBUHAN POPULASI SAPI

Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan populasi sapi maka diperoleh grafik perbandingan dari tahun 2019 – 2024 dibandingkan dengan target akhir renstra sebagai berikut :

**Gambar 19**  
**Capaian Persentase Pertumbuhan Populasi Sapi dalam Kurung Waktu Lima Tahun Terakhir dibandingkan Target Capaian Akhir Renstra**



Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan populasi sapi tahun 2024 menunjukkan bahwa realisasi pertumbuhan populasi sapi diperoleh angka (0.50) % yang menandakan bahwa terjadi peningkatan pertumbuhan populasi sapi yang berarti melebihi target yang telah diperjanjikan pada perjanjian kinerja Dinas Pertanian dan Pangan yaitu 0.10%, begitupun data empat tahun terakhir setiap tahunnya terdapat peningkatan populasi sapi. Namun pada tahun 2023 mengalami penurunan yang signifikan yaitu -4.22%. Faktor utama yang menyebabkan penurunan populasi pada tahun 2023 terjadi wabah PMK

(Penyakit Mulut dan Kuku) secara Nasional dan penyakit tersebut juga muncul di Kabupaten Polewali Mandar, meskipun telah dilakukan vaksinasi dan pembatasan keluar masuk ternak serta mengambil kebijakan lock down. Hal tersebut tidak dapat mencegah masuknya PMK ke Kabupaten Polewali Mandar, yang mengakibatkan tingginya kematian ternak sapi. Berdasarkan data tersebut maka pada tahun 2024 dilaksanakan kegiatan pengadaan ternak sapi serta pelaksanaan vaksinasi sehingga dapat menaikkan kembali populasi sapi. Data populasi ternak berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada Tabel 21 sebagai berikut :

**Tabel 24**  
**Populasi Sapi Tahun 2022-2024 di Kabupaten Polewali Mandar**

<b>Kecamatan</b>	<b>Sapi (Ekor)</b>		
	<b>Jantan</b>	<b>Betina</b>	<b>Jumlah</b>
1. Tinambung	600	1,185	1,785
2. Balanipa	405	739	1,144
3. Limboro	534	776	1,310
4. Tubbi Taramanu	1,053	2,315	3,368
5. Alu	697	1,246	1,943
6. Campalagian	1,171	2,716	3,887
7. Luyo	748	1,733	2,481
8. Wonomulyo	1,421	1,670	3,091
9. Mapilli	3,688	4,598	8,286
10. Tapango	389	904	1,293
11. Matakali	529	818	1,347
12. Bulo	331	760	1,091
13. Polewali	272	517	789
14. Binuang	292	717	1,009
15. Anreapi	174	432	606
16. Matangnga	307	804	1,111
<b>2024</b>	<b>12,611</b>	<b>21,930</b>	<b>34,541</b>
<b>2023</b>	<b>12,395</b>	<b>21,974</b>	<b>34,369</b>
<b>2022</b>	<b>13,160</b>	<b>22,722</b>	<b>35,882</b>

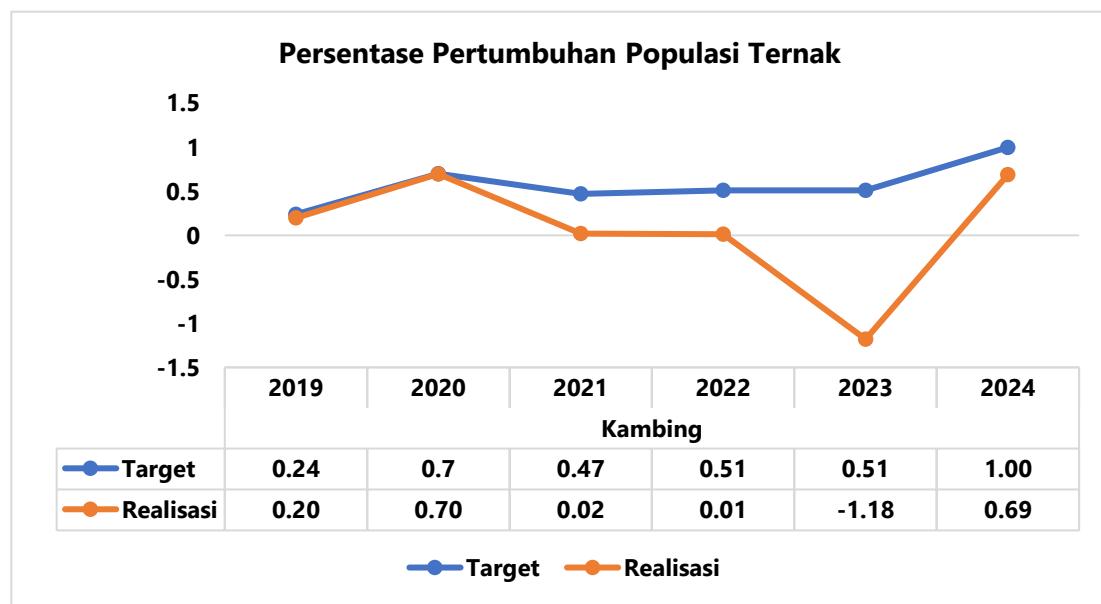
Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar

Selain penyakit PMK juga terdapat penyakit Jembarana yang memperparah kasus kematian ternak sapi pada tahun 2023. Realisasi vaksinasi dan pengobatan penyakit hewan menular strategis lebih lanjut akan dibahas pada sub. Bagian pembahasan Kesehatan Hewan pada Laporan ini.

### INDIKATOR PERSENTASE PERTUMBUHAN POPULASI KAMBING

Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan populasi kambing maka diperoleh grafik perbandingan dari tahun 2019 – 2024 dibandingkan dengan target akhir renstra sebagai berikut :

**Gambar 20**  
**Capaian Persentase Pertumbuhan Populasi Kambing dalam Kurung Waktu Lima Tahun Terakhir dibandingkan Target Capaian Akhir Renstra**



Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan populasi kambing tahun 2024 menunjukkan bahwa realisasi pertumbuhan populasi kambing diperoleh angka (0.69)% yang menandakan bahwa terjadi peningkatan pertumbuhan populasi

kambing namun belum mencapai target sesuai yang telah diperjanjikan pada perjanjian kinerja Dinas Pertanian dan Pangan yaitu 1%, berbeda dengan data empat tahun terakhir setiap tahunnya terdapat peningkatan populasi kambing. Faktor utama yang menyebabkan penurunan populasi yaitu pada tahun 2023 terjadi wabah PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) secara Nasional dan penyakit tersebut juga muncul di Kabupaten Polewali Mandar, meskipun telah dilakukan vaksinasi dan pembatasan keluar masuk ternak serta mengambil kebijakan lock down.

Hal tersebut tidak dapat mencegah masuknya PMK ke Kabupaten Polewali Mandar, yang mengakibatkan tingginya kematian ternak kambing. Data populasi ternak berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada Tabel 22 yang menunjukkan penurunan populasi kambing dari tahun 2022 sebanyak 94.999 ekor dan pada tahun 2023 populasi kambing menurun menjadi 93.881 ekor, selisih penurunan sebanyak 1.118 ekor kambing, namun di tahun 2024 populasi kambing mulai mengalami peningkatan sebesar 0.49% dari tahun 2023. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2024 dilakukan intervensi dengan pelaksanaan pengadaan kambing sebanyak 760 ekor yang bersumber dari dana DAU Spesifik Grant dan Insentif Fiskal sebanyak 154 ekor sehingga total pengadaan tahun 2024 sebesar 914 ekor.

Seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar berpotensi dilakukan pengembangan kambing, namun daerah yang paling cocok dan memiliki populasi paling tinggi yaitu Kecamatan Campalagian, Balanipa, Limboro, Luyo dan Mapilli.



**Tabel 25**  
**Populasi Kambing Tahun 2022-2024 di Kabupaten Polewali Mandar**

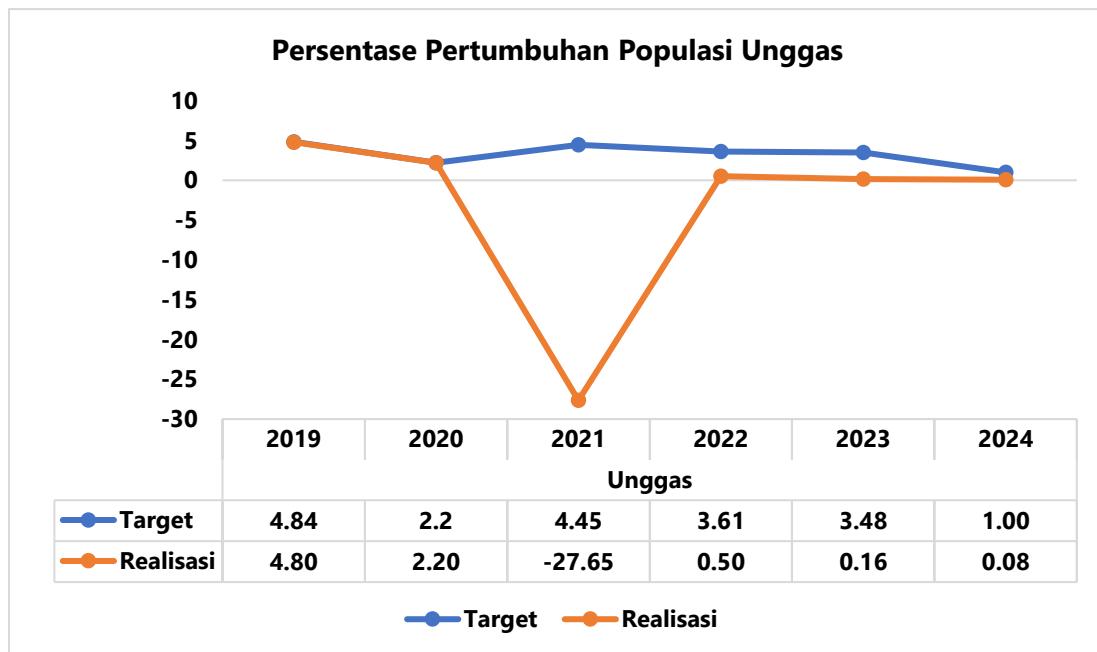
<b>Kecamatan</b>	<b>Kambing (Ekor)</b>		
	<b>Jantan</b>	<b>Betina</b>	<b>Jumlah</b>
1. Tinambung	2,492	3,884	6,376
2. Balanipa	5,586	5,701	11,287
3. Limboro	3,966	6,609	10,575
4. Tubbi Taramanu	1,902	3,107	5,009
5. Alu	2,586	3,894	6,480
6. Campalagian	4,903	7,450	12,353
7. Luyo	3,031	5,224	8,255
8. Wonomulyo	1,898	2,430	4,328
9. Mapilli	3,077	4,082	7,159
10. Tapango	2,186	3,042	5,228
11. Matakali	2,519	2,169	4,688
12. Bulo	1,037	1,274	2,311
13. Polewali	1,214	1,549	2,763
14. Binuang	1,344	1,878	3,222
15. Anreapi	1,187	1,272	2,459
16. Matangnga	604	1,434	2,038
<b>2024</b>	<b>39,532</b>	<b>54,999</b>	<b>94,531</b>
<b>2023</b>	<b>39,199</b>	<b>54,682</b>	<b>93,881</b>
<b>2022</b>	<b>39,748</b>	<b>55,251</b>	<b>94,999</b>

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar

### INDIKATOR PERSENTASE PERTUMBUHAN POPULASI UNGGAS

Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan populasi unggas maka diperoleh grafik perbandingan dari tahun 2022 – 2024 dibandingkan dengan target akhir renstra sebagai berikut :

**Gambar 21**  
**Capaian Persentase Pertumbuhan Populasi Unggas**  
**dalam Kurung Waktu Lima Tahun Terakhir dibandingkan Target**  
**Capaian Akhir Renstra**



Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan populasi unggas tahun 2024 menunjukkan bahwa realisasi pertumbuhan populasi unggas diperoleh angka 0.08% yang menandakan bahwa terdapat peningkatan pertumbuhan populasi unggas walaupun dari segi pencapaian taget tidak tercapai sesuai yang telah diperjanjikan pada perjanjian kinerja Dinas Pertanian dan Pangan yaitu 1%, begitupun data 2019, 2020 dan 2022. Tidak tercapainya target di tahun 2024 dikarenakan target yang ditentukan tidak sebanding dengan intervensi anggaran yang dialokasikan untuk ternak unggas.

Berikut disajikan data tabulasi populasi unggas berdasarkan jenisnya di Kabupaten Polewali Mandar.

**Tabel 26**  
**Populasi Unggas Tahun 2022-2024 di Kabupaten**  
**Polewali Mandar**

Kecamatan	Ayam Buras / Ayam Kampung (Ekor)	Ayam Ras Petelur (Ekor)	Ayam Ras Pedaging (Ekor)	Itik (Ekor)
1. Tinambung	95,066.00	1326	24390	452
2. Balanipa	92,840.00	1304	143052	98
3. Limboro	109,771.00	2230	148602	416
4. Tubbi Taramanu	102,800.00	0	359	75
5. Alu	90,621.00	9014	12897	26
6. Campalagian	113,503.00	4295	53611	4274
7. Luyo	97,333.00	1898	0	3101
8. Wonomulyo	106,972.00	12024	30484	25742
9. Mapilli	120,360.00	2798	19035	8882
10. Tapango	102,414.00	11124	18424	4165
11. Matakali	87,764.00	2029	1741	12940
12. Bulo	92,895.00	0	0	2975
13. Polewali	102,222.00	42078	79428	1357
14. Binuang	107,372.00	18230	74805	2577
15. Anreapi	90,958.00	1225	0	701
16. Matangnga	90,563.00	0	0	51
<b>2024</b>	<b>1,603,454.00</b>	<b>109,575</b>	<b>606,828</b>	<b>67,832</b>
<b>2023</b>	<b>1,603,230</b>	<b>108,145</b>	<b>605,812</b>	<b>55,000</b>
<b>2022</b>	<b>1,603,230</b>	<b>108,145</b>	<b>602,812</b>	<b>55,000</b>

Berdasarkan Tabel 22 diatas dijelaskan bahwa peningkatan populasi dan produksi daging unggas selama tiga tahun terakhir 2019-2024 mengalami penurunan populasi dan produksi pada tahun 2021 hal tersebut dikarenakan saat memasuki tahun 2024 sebagian masyarakat beralih ke konsumsi daging Sapi, namun memasuki tahun 2024 mulai terjadi peningkatan populasi yang diikuti dengan jumlah produksi dan telur.

Berbeda dengan daging sapi dan daging kambing, daging unggas tahun 2024 permintaan daging unggas cukup meningkat khususnya di

Kabupaten Polewali Mandar hal ini disebabkan antara lain harga daging unggas jauh lebih murah dibandingkan harga daging ternak besar dan ternak kecil selain itu populasi ternak unggas juga mengalami kenaikan yang signifikan, hal ini disebabkan minat masyarakat memelihara ternak unggas meningkat di tahun ini. Salah satu alasan karena waktu pemeliharaan ternak unggas juga lebih singkat dibanding ternak besar dan ternak kecil. Salah satu penyebab meningkatnya produksi telur unggas karena tingkat permintaan masyarakat juga semakin meningkat.

Pencapaian kinerja di bidang Peternakan berupa jumlah populasi dan produksi ternak dapat terus dipertahankan dari tahun ke tahun dengan dukungan dari segi kesehatan hewan dan optimalisasi reproduksi, kegiatan pelaksanaan tersebut dibahas lebih lanjut sebagai berikut :

### **1. Pelaksanaan Inseminasi Buatan**

Kegiatan penyediaan layanan Inseminasi Buatan (IB) merupakan kegiatan untuk mengembangkan ternak melalui Program Inseminasi Buatan (IB) untuk ternak sapi, kegiatan tersebut didukung melalui dana APBN, APBD Propinsi dan Kabupaten. Pendanaan melalui APBN dengan penyediaan semen beku, N2 Cair dan honor petugas IB, sedangkan dari APBD mendukung dengan melakukan penambahan dosis N2 cair sebanyak 635 Liter, dari pengadaan tersebut untuk tahun 2024 menghasilkan jumlah kelahiran hasil IB sebanyak 1.576 ekor yang menambah jumlah populasi ternak sapi.

### **1. Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak.**

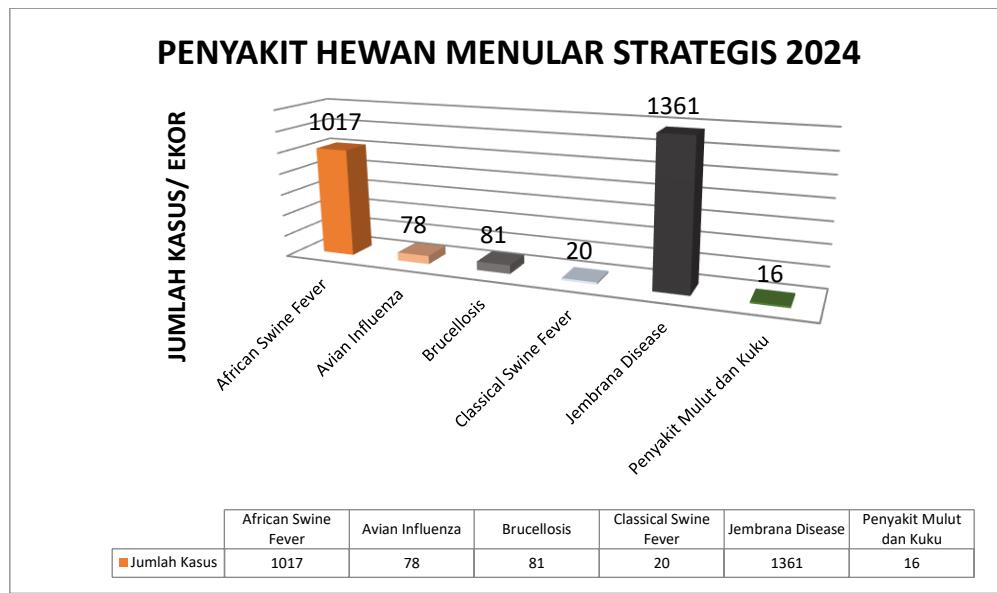
Pelaksanaan kegiatan ini mencakup pelaksanaan penyehatan hewan yang meliputi tindakan preventif, kuratif, suportif, rehabilitatif, medik reproduksi, kesehatan masyarakat veteriner, pelaksaaan epidemiologik dan

pengamatan penyakit hewan menular strategis, dan pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah serta Pemberian jasa veteriner Dokter Hewan sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/Ot.140/9/2007 Tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan.

Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, dijabarkan bahwa Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) merupakan penyakit hewan yang menginfeksi hewan/ternak yang dapat menimbulkan kerugian secara ekonomis bagi peternak khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, menimbulkan keresahan masyarakat serta menimbulkan kematian hewan yang tinggi. Sedangkan Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.

Dalam Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 121/KPTS/PK.320/M/03/2024 Tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS), telah di tetapkan Penyakit Lumpy Skin Disease dan Penyakit Mulut dan Kuku sebagai penyakit hewan menular stategis yang baru muncul kembali di Indonesia, termasuk di wilayah kabupaten Polewali Mandar yang menimbulkan kerugian ekonomi serta keresahan dan kematian ternak. Dari 25 daftar PHMS tersebut, terdapat 13 jenis penyakit yang telah ada di kabupaten Polewali Mandar, di antaranya adalah Anthrax, Rabies, Salmonellosis(unggas), Brucellosis, Avian Influenza, Septicaemia Epizootica, Jembrana, Trypanosomiasis, Hog Cholera/ Classical Swine Fever, Penyakit Mulut dan Kuku, African Surine Fever (ASF), Bovine Viral Diarhea, Helminthiasis, sesuai gambar berikut :

**Gambar 22**  
**Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis Tahun 2024**

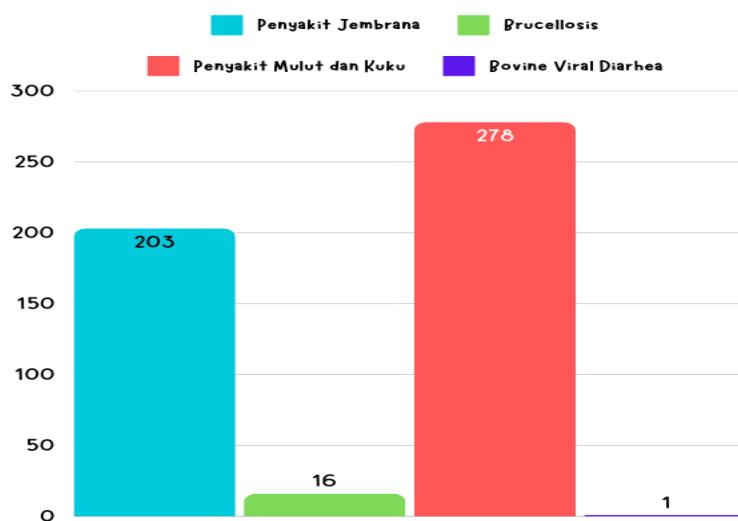


Upaya pengendalian dan pemberantasan PHMS dilaksanakan sesuai petunjuk pengendalian penyakit hewan menular dengan memberdayakan sumber daya petugas kesehatan hewan didukung dengan sarana dan prasarana kelengkapan kesehatan hewan. Kegiatan ini berupa pengobatan ternak, vaksinasi, desinfeksi, isolasi dan penerapan biosecurity dan biosafety.

Data pelayanan kesehatan hewan pada UPTD Kesehatan Hewan tahun 2012 sampai dengan tahun 2024, bersumber dari data i-SIKHNAS (integrated-Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional) yang memiliki server pada Subdit Pengamatan Penyakit Hewan (P2H) Direktorat Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian RI, menggambarkan bahwa kabupaten Polewali Mandar merupakan wilayah endemik penyakit Brucellosis pada ternak sapi, HPAI pada ternak unggas, Rabies pada hewan penular Rabies, serta 14 Maret 2016 dinyatakan sebagai daerah tertular antraks yang mana wabah ini menyerang ternak sapi sebanyak 35 ekor dan kambing sebanyak 20 ekor di desa Gattungan dan desa Lagi Agi,

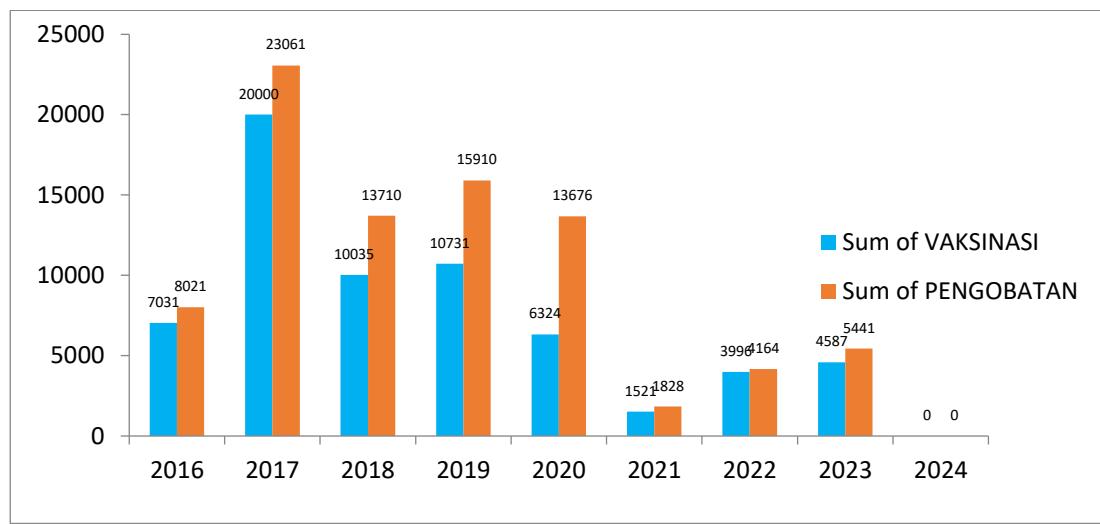
Kecamatan Campalagian serta desa Bumiayu, Kecamatan Wonomulyo. Pelaksanaan pengobatan dan vaksinasi antraks yang telah berlangsung sejak tahun 2016 hingga 2023 terbukti mampu menurunkan kasus hingga nol kasus yang diketahui dari hasil surveilans tahunan Balai Besar Veteriner Maros dan investigasi aktif dari UPTD Puskeswan dalam menanggapi setiap kasus kejadian penyakit hewan yang menyerupai antraks. Efisiensi anggarana tahun 2024 menyebabkan vaksinasi Antraks tahun 2024 tidak dapat dilaksanakan.

**Gambar 23**  
**Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis Tahun 2024**



Berikut ditampilkan data program pengendalian dan pemberantasan penyakit Antraks di kabupaten Polewali Mandar tahun 2016 hingga tahun 2024:

**Gambar 24**  
**Cakupan Vaksinasi dan pengobatan Antraks tahun 2016-2024**



Sumber Data: i-SIKHNAS tahun 2024

Kegiatan penanggulangan PHMS merupakan salah satu bagian dari Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Ternak melalui pengadaan vaksinasi yang terdiri dari vaksinasi rabies, biaya operasional vaksinasi serta obat-obatan ternak yang digunakan dalam pencegahan dan penanggulangan PHMS yang juga merupakan subsidi dari APBN dan APBD Propinsi dan kabupaten setiap tahunnya meskipun mengalami penurunan target diakibatkan oleh pandemi Covid-19 yang berdampak pada menurunnya jumlah layanan vaksinasi ternak.

Data tahun 2023 menunjukkan peningkatan jumlah ternak yang divaksinasi dibandingkan tahun 2021 yaitu 1.521 ekor menjadi 3.996 ekor sedangkan untuk pengobatan antraks juga mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yaitu 1.828 ekor menjadi 4.164 ekor. Hal ini dikarenakan keadaan yang mulai kondusif dari kasus covid 19 dibandingkan pada tahun

2021, sehingga petugas lapang leluasa melaksanakan vaksinasi dan pengobatan.

Penyakit Mulut dan Kuku yang telah kembali masuk ke Indonesia di mana secara historis telah dinyatakan bebas 32 tahun silam dan menyandang status bebas PMK tanpa vaksinasi, namun outbreak PMK kembali terjadi di Indonesia pada 28 April 2022 di Gresik Jawa Timur dan kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. *Outbreak* PMK awalnya menyerang 402 ekor sapi potong di Gresik, yang kemudian menyebar di banyak wilayah lain di Indonesia.

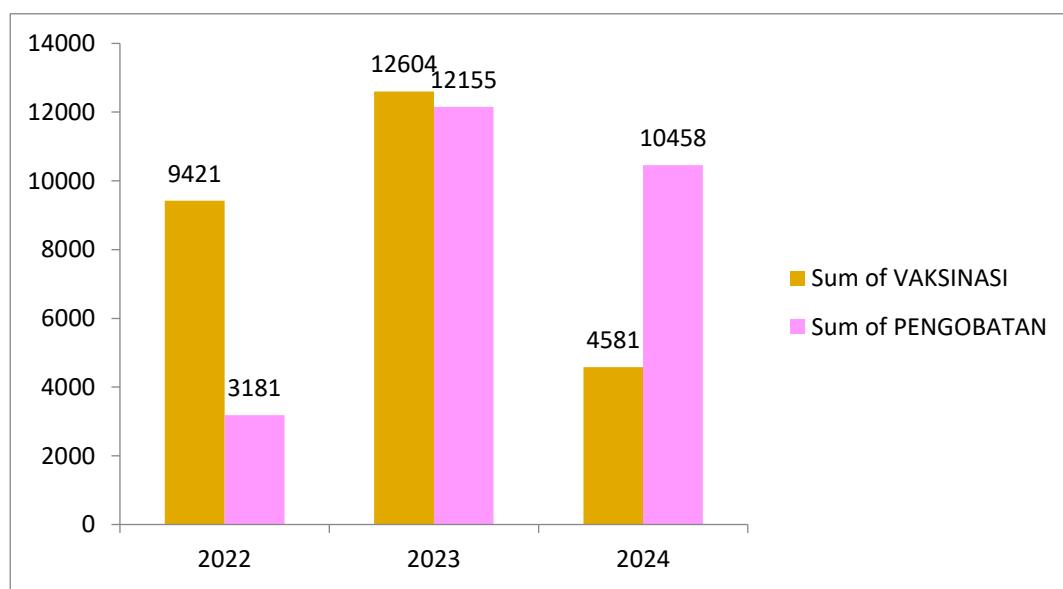
Potensi ragam ternak serta tingginya laju perpindahan ternak antar daerah bahkan antar pulau cukup meningkatkan resiko masuknya penyakit menular strategis ke kabupaten Polewali Mandar. PMK juga akhirnya masuk ke kabupaten Polewali Mandar yang pertama kali terdeteksi dari ternak sapi dengan tanda klinis menyerupai demam tiga hari (Bovine Ephemeral Fever) namun segera dikendalikan dengan pengobatan dan vaksinasi serentak di zoa atau area yang belum terdapat laporan PMK.

African Swine Fever (ASF) muncul pertama kali di Kenya, Afrika Timur pada tahun 1909 setelah adanya impor babi domestik dari Eropa. Pada tahun 1957, ASF menyebar ke Portugal dan berbagai negara di Eropa (Italia, 1967; Spanyol 1969; Perancis 1977; Malta, 1978; Belgia, 1985; dan Belanda, 1986). Kemudian ASF meluas ke Karibia (Kuba, 1971 dan 1980; Republik Dominika, 1978; serta Haiti, 1979) dan Brasil (1978). Di Asia, ASFV ditemukan pada babi liar di Iran pada tahun 2010. Lalu pada tahun 2018, Tiongkok melaporkan adanya wabah ASF di Provinsi Liaoning. Pada Februari 2019, untuk pertama kalinya ASF dikonfirmasi di kawasan Asia Tenggara, yaitu di Vietnam. Selanjutnya, infeksi ASF meluas hingga ke Kamboja, Laos, Filipina, Myanmar dan Timor Leste. Pada Desember 2019, terdapat tujuh negara di Asia Tenggara yang telah mengkonfirmasi adanya kasus ASF termasuk Indonesia. Kasus ASF

di Indonesia diumumkan secara resmi melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 820/KPTS/PK.320/M/12/2019 tentang Pernyataan Wabah Penyakit Demam Babi Afrika (*African Swine Fever*) pada Beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Jumlah kematian babi pada wabah ini mencapai 47.559 ekor dari total 1.277.741 ekor babi di Sumatera Utara (3,7%). Virus ASF juga dikonfirmasi telah menyebar ke 21 dari 33 kabupaten di Sumatera Utara (64%). Daerah dengan populasi dan lalu lintas babi yang tinggi memiliki risiko yang tinggi pula dalam penularan virus ini. Beberapa daerah di Indonesia yang rawan menjadi daerah penularan tersebut antara lain NTT, Papua, Sulawesi Selatan, Bali, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah dan Jawa Tengah.

Berikut data capaian kegiatan pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) tahun 2022 sampai dengan tahun 2024:

**Gambar 25**  
**Realisasi Vaksinasi dan Pengobatan PMK Kabupaten Polewali Mandar**  
**Tahun 2022-2024**



Sumber Data: i-SIKHNAS tahun 2024

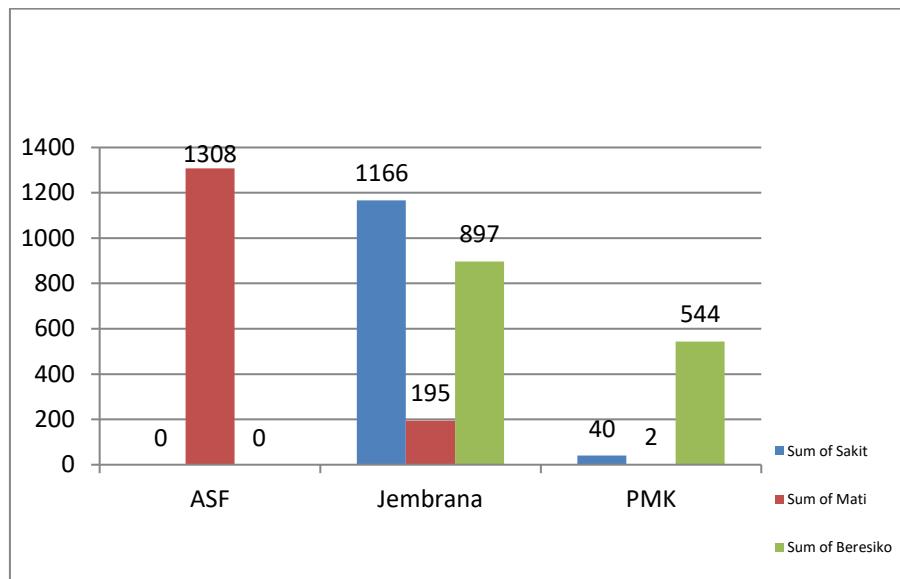
Hingga bulan April 2023, ASF telah terdeteksi di kelurahan Sulewatang, Kecamatan Polewali yang menyerang kurang lebih 800 ekor ternak babi milik warga desa setempat dan penyebaran telah sampai pada kelurahan Darma yang juga terjadi secara sporadis sehingga populasi 1038 ekor ternak babi musnah dalam hitungan tiga bulan dan *cross infection* dengan CSF (*Classical Swine Fever*). Tindakan pengendalian berupa pengobatan dan desinfeksi kandang telah dilaksanakan oleh dinas pertanian dan pangan kabupaten Polewali Mandar, Dinas Tanaman Pangan dan holtikultura Propinsi Sulawesi Barat dan Bbvet Maros namun penyebaran yang begitu cepat tidak dapat dikendalikan.

Penyakit Jembrana yang secara historis belum pernah ditemukan di pulau Sulawesi juga telah ditemukan di kabupaten Pasang Kayu Sulawesi Barat yang segera menyebar ke wilayah lain termasuk Polewali Mandar dengan media penyebaran dari perpindahan ternak yang tidak terkontrol akibat peternak yang melakukan penjualan secara tiba tiba akibat kuatir dengan penyakit tersebut (*panic selling*). Ternak yang dijual murah akhirnya masuk wilayah Polewali Mandar pada 16 Agustus 2022 dan pada 18 Agustus 2022 mati secara tiba tiba dengan tanda klinis mengarah ke Jembrana, hasil konfirmasi Laboratorium BBVet Maros menguatkan positif Jembrana.

Upaya pengendalian pun dilaksanakan melalui Pengobatan massal, vaksinasi, desinfeksi yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat dan pemberian media Kie berupa brosur dan poster.

Gambaran kasus penyakit Jembrana, PMK dan ASF di kabupaten Polewali Mandar disajikan pada grafik berikut ini :

**Gambar 26**  
**Distribusi Penyakit ASF, Jembrana dan PMK Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2023**



Sumber Data: i-SIKHNAS tahun 2023

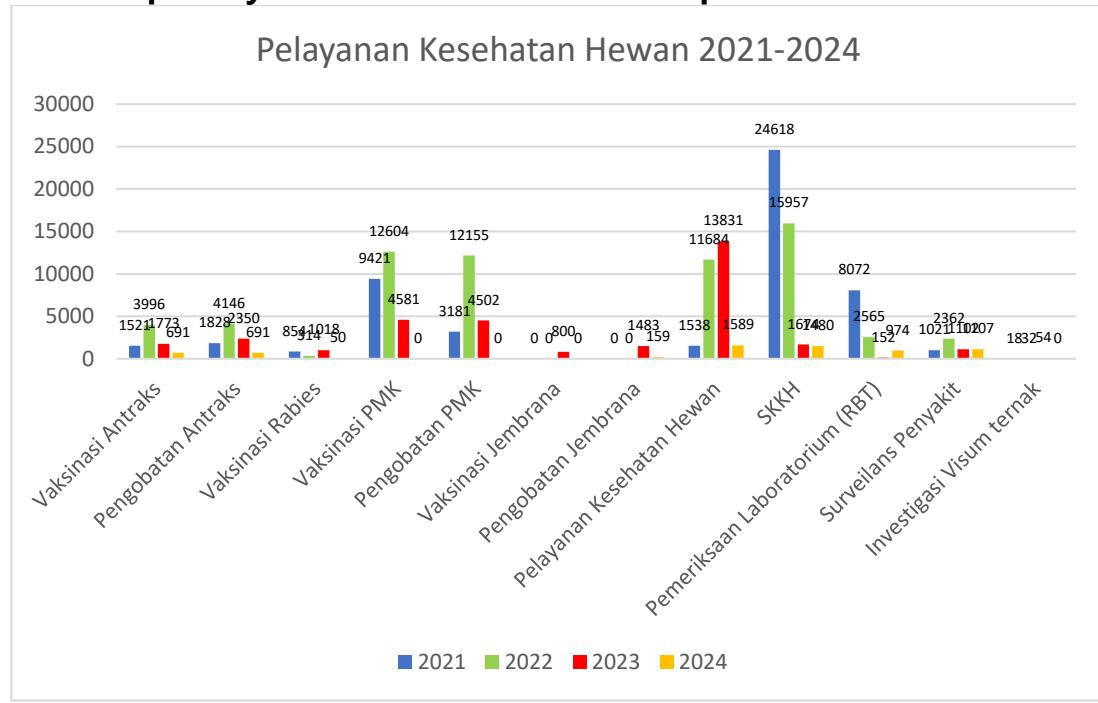
Program pengendalian telah dilaksanakan dengan dukungan pemerintah pusat, propinsi dan pemerintah daerah dalam rangka mitigasi dan mencegah transmisi penyebaran penyakit hewan ini. Kegiatan pengendalian dan pencegahan yang telah dilaksanakan meliputi kegiatan pengobatan massal, pencegahan penyebaran vektor penyakit dan memutus mata rantai virus dengan desinfeksi massal kandang ternak milik warga, komunikasi, edukasi dan informasi (KIE) melalui media massa, media on line dan peningkatan kewaspadaan dengan menyebarkan leaflet dan media informasi berupa poster atau flyer pada fasilitas umum dan juga sarana ibadah.

Realisasi cakupan layanan kesehatan hewan yang dilakukan Dinas Pertanian dan Pangan melalui UPTD Kesehatan Hewan melalui program pengendalian penyakit hewan menular, salah satunya adalah kegiatan vaksinasi dan pengobatan antraks pada ternak sapi, kambing dan kuda untuk

mencegah munculnya kembali wabah penyakit Antraks yang telah terkendali pada tahun 2016 silam. Dukungan pelaksanaan vaksinasi di peroleh melalui dana APBN dan APBD Propinsi dan Kabupaten. APBN menyiapkan vaksin dan biaya operasional serta APBD menunjang dari penyediaan alat kesehatan dan obat – obatan hewan yang mendukung program vaksinasi yang dilaksanakan pada 41 desa/kelurahan pada 5 kecamatan yang merupakan daerah beresiko sampai 60 tahun ke depan.

Adapun untuk cakupan layanan kesehatan hewan UPTD Puskeswan, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 tersaji dalam grafik berikut :

**Gambar 27**  
**Cakupan Layanan Kesehatan Hewan Kabupaten Polewali Mandar**



Sumber Data: i-SIKHNAS Tahun 2024

Layanan kesehatan hewan di Uptd Puskeswan ini mendapat dukungan dan dari DAK Non Fisik tahun 2022 dan tahun 2023 sehingga dapat dilihat pada grafik mengalami peningkatan jumlah layanan secara signifikan pada tahun tersebut. Dengan luas wilayah kerja sebanyak 16 kecamatan dan akses

beberapa kecamatan yang cukup sulit dijangkau juga menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Data pelaksanaan vaksinasi Rabies pada Hewan Penular Rabies pada tahun 2019- 2024 di Kabupaten Polewali Mandar, dapat dilihat pada Tabel 24 berikut ini :

**Tabel 27**  
**Target dan Realisasi Vaksinasi Rabies Kabupaten Polewali Mandar**  
**Tahun 2019-2024**

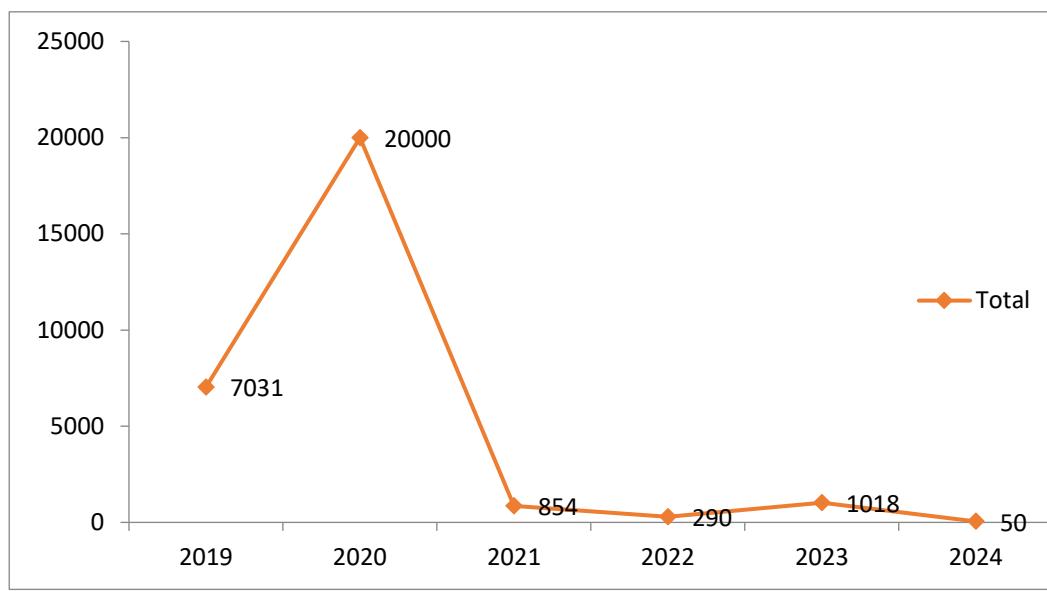
TAHUN	TARGET	REALISASI	SUMBER DANA
	VAKSINASI	VAKSINASI	
2019	2,000	7,031	APBN
2020	500	20,000	APBN
2021	700	854	APBN
2022	200	290	APBN
2023	1000	1018	APBN
2024	50	50	APBN

Sumber Data : i-SIKHNAS 2024

Jumlah HPR yang dapat divaksin pada tahun 2021, juga mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19, dari tahun sebelumnya 2020 dapat tervaksin sebanyak 20.000 ekor HPR, namun pada tahun 2021 hanya bisa tervaksin 854 ekor dikarenakan keterbatasan vaksin dan biaya operasional. Demikian pula pada tahun 2022 hanya mampu mencover sekitar 314 ekor HPR yang tervaksin. Tahun 2023 melalui kegiatan World Rabies Day pada bulan November dapat tervaksin sekitar 318 ekor dan telah tercatat pada rekor dunia MURI 2023 di mana vaksinasi massal ini dilaksanakan serentak seluruh Indonesia secara bersamaan dukungan dana DAK Non Fisik tahun 2023 dan pada awal tahun sebanyak 800 ekor juga telah divaksin. Efisiensi anggaran juga berdampak pada ketersediaan vaksin Rabies dan biaya operasional, sehingga pada tahun 2024 hanya diberikan pada 50 ekor HPR atau sebesar 50

dosis yang dilaksanakan pada UPTD PUSKESWAN MAPILLI dan PUSKESWAN BINUANG. Berikut grafik perbandingan target dan realisasi capaian program pemberantasan penyakit Rabies Tahun 2019-2024:

**Gambar 28**  
**Realisasi Vaksinasi Rabies Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024**



Sumber Data: i-SIKHNAS 2024

### Pengawasan Lalu Lintas Ternak

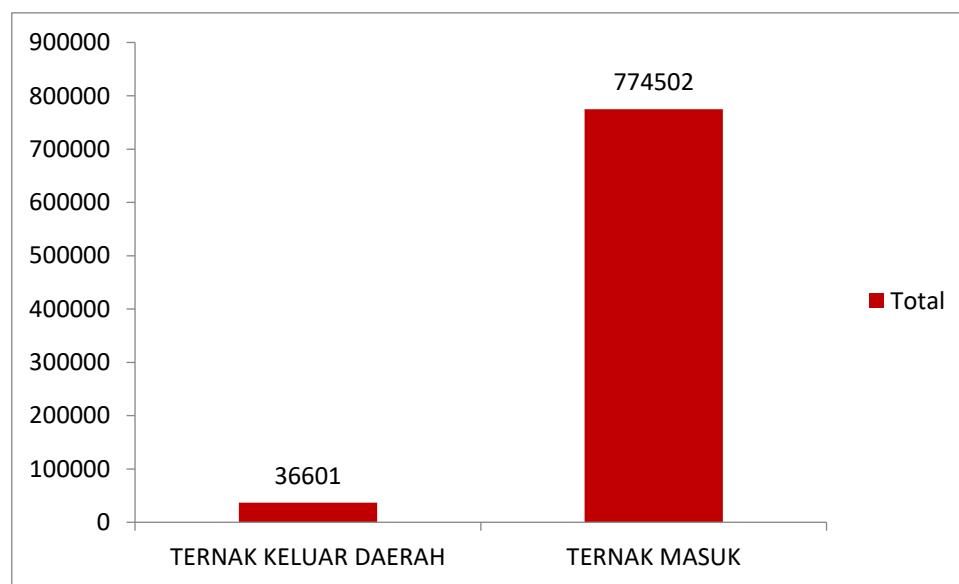
Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan pada Pasal 17 ayat 3 mengatur tentang pembatasan dan pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya yang berkaitan dengan wabah penyakit hewan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang bersangkutan. Kabupaten Polewali Mandar merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Propinsi Sulawesi Selatan , sehingga perlu diupayakan Pengawasan lalu lintas ternak setiap hari di Pos Jaga perbatasan daerah Pinrang-Polman, untuk mencegah

penularan penyakit ternak antar daerah atau antar pulau yang berpotensi dibawa oleh hewan/ternak yang diangkut.

Petugas lalu lintas ternak Dinas Pertanian dan Pangan sejumlah 7 orang petugas, diharapkan dapat melakukan pengawasan ternak yang masuk keluar dan melintas di wilayah Kabupaten Polewali Mandar, pemeriksaan dokumen sertifikat veteriner (SKKH) ternak yang masuk, keluar dan melintas, pencatatan jumlah dan jenis komoditas ternak yang disuplai (masuk, keluar dan melintas) serta desinfeksi kendaraan pengangkut ternak.

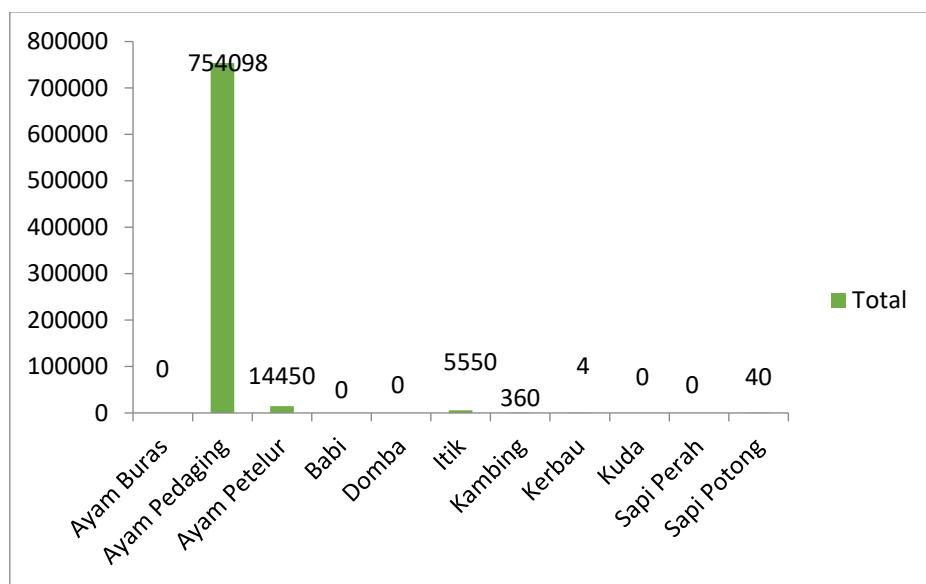
Berikut data jumlah ternak yang masuk dan keluar wilayah Polewali Mandar, tersaji pada Gambar di bawah ini :

**Gambar 29**  
**Jumlah Ternak Masuk dan Keluar Wilayah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023**

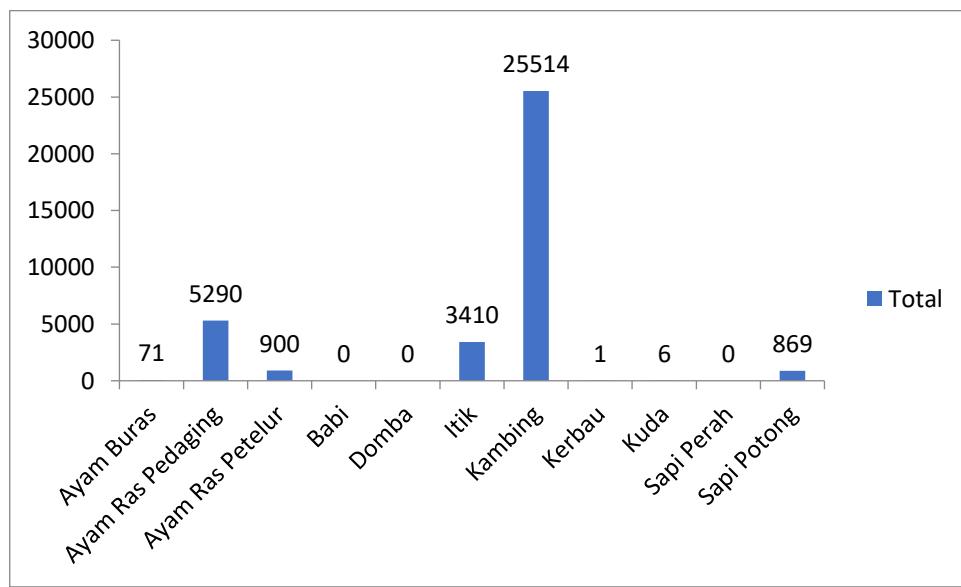


Ragam ternak yang masuk masuk ke wilayah kabupaten Polewali Mandar di dominasi oleh komoditi ternak yang dikonsumsi masyarakat untuk kebutuhan daging harian. Grafik rgaam ternak tersaji pada grafik berikut ini :

**Gambar 30**  
**Ragam Ternak yang Masuk Wilayah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023**



**Gambar 31**  
**Ragam Ternak yang Keluar Wilayah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023**



## **1. Pengawasan Pemotongan Ternak dan Pemasaran Pangan Asal Hewan (PAH)**

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang mencakup pemotongan hewan serta pemasaran pangan asal hewan di Kabupaten Polewali Mandar. Untuk mengetahui perbandingan capaian jumlah pemotongan hewan baik yang dilakukan di RPH maupun diluar RPH, selama 3 (tiga) tahun.

Secara keseluruhan pemotongan ternak yang dilakukan diluar rumah potong hewan (DRPH) jauh lebih banyak dibanding jumlah pemotongan ternak yang dilakukan di RPH. Pemotongan ternak yang dilakukan di RPH setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Jumlah pemotongan ternak yang dilakukan RPH tahun 2020 yakni 1.028 Ekor meningkat dibanding dua tahun terakhir dengan persentase penurunan 44,99%.

Selain kegiatan pengawasan terhadap pemotongan ternak pihak UPTD RPH juga melakukan kegiatan pengawasan dan pembinaan di bidang pemasaran pangan asal hewan (PAH). Ada beberapa pelaku usaha di Kabupaten Polewali Mandar yang berkecimpung di bidang peternakan khususnya yang menyangkut sektor pengolahan pangan asal hewan (PAH). Kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan pihak UPTD RPH berupa sosialisasi maupun kunjungan langsung ke lokasi pelaku usaha terkait mengenai pengolahan pangan asal hewan (PAH).

Meningkatannya indikator kinerja populasi ternak dari tahun ke tahun di Kabupaten Polewali Mandar tidak terlepas dari dukungan berbagai program kegiatan baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pemerintah Daerah.

## 2. Pengadaan Bibit Hijauan Ternak

Untuk mendukung kualitas pakan ternak di Kab. Polewali mandar dilakukan pengadaan varietas pakan ternak untuk dibudidayakan oleh kelompok-kelompok tani yang bergerak pada usaha budidaya ternak dan pembangunan bank pakan silase melalui dana APBD.

Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran 2 telah dilakukan intervensi di sub. Sektor peternakan dengan pengadaan irigasi air tanah dangkal 3 unit, jalan usaha tani 7 unit, pengembangan bank pakan silase 5 unit, pengadaan sapi bali 70 ekor, pengadaan kambing 50 ekor, pengadaan obat-obatan, dan penyelamatan sapi betina produktif dalam upaya peningkatan populasi ternak.

### Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Capaian Indikator

Dalam pencapaian indikator persentase pertumbuhan populasi sapi, kambing dan unggas terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

#### Faktor Penunjang

- Peningkatan Produksi ternak merupakan sasaran Nasional RPJMN 2020-2024;
- Perda No. 6 Tahun 2016 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak;
- Tersedianya Asuransi Usaha Tani khusus Ternak Sapi;
- Tersedianya Pembiayaan KUR;
- Tenaga Penyuluhan yang tersebar di 16 Kecamatan;

### Faktor Penghambat

- Munculnya Penyakit Mulut dan Kuku;
- Munculnya penyakit jembrana;
- Pengadaan dosis dan operasional vaksinasi yang tidak mencukupi.
- Keterbatasan tenaga kesehatan hewan untuk menangani 16 Kecamatan;

### Solusi

- Melakukan vaksinasi secara rutin untuk mengurangi resiko munculnya kembali PHMS.
- Menjadikan vaksinasi salah satu kegiatan prioritas;
- Penerimaan tenaga kesehatan hewan untuk memenuhi kebutuhan per Kecamatan terutama wilayah dengan populasi ternak yang tinggi;

#### a. Program dan Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian

Adapun sejumlah Program dan Kegiatan yang diselenggarakan untuk memastikan tercapainya target indikator sasaran meningkatnya persentase ketersediaan prasarana dan sarana pertanian, sebagai berikut:

**Tabel 28  
Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Menunjang Pencapaian Sasaran 2**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB.KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSEN	SISA ANGGARAN
4	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>2,556,211,452</b>	<b>2,140,409,331</b>	<b>84</b>	<b>415,802,121</b>
4.1	<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	<b>1,121,531,800</b>	<b>1,121,204,500</b>	<b>100</b>	<b>327,300</b>

4.1.1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1,113,015,000	1,112,822,100	100	192,900
4.1.2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	8,516,800	8,382,400	98	134,400
<b>4.2</b>	<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>748,057,611</b>	<b>334,263,678</b>	<b>45</b>	<b>413,793,933</b>
4.2.1	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	700,965,000	307,500,000	44	393,465,000
4.2.2	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	21,565,791	2,576,858	12	18,988,933
4.2.3	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	25,526,820	24,186,820	95	1,340,000
<b>4.3</b>	<b>Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>56,572,041</b>	<b>54,891,153</b>	<b>97</b>	<b>1,680,888</b>
4.3.1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	56,572,041	54,891,153	97	1,680,888
<b>4.4</b>	<b>Penyediaan Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain</b>	<b>630,050,000</b>	<b>630,050,000</b>	<b>100</b>	<b>-</b>

4.4.1	Pengadaan bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	630,050,000	630,050,000	100	-
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>134,325,006</b>	<b>134,316,725</b>	<b>100</b>	<b>8,281</b>
<b>5.1</b>	<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>34,324,201</b>	<b>34,315,920</b>	<b>100</b>	<b>8,281</b>
5.1.1	Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	10,850,000	10,850,000	100	-
5.1.2	Penyusunan Peta Kawasan, Lahandan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	23,474,201	23,465,920	100	8,281
<b>5.2</b>	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	<b>70,000,000</b>	<b>70,000,000</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
5.2.1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	70,000,000	70,000,000	100	-
<b>5.3</b>	<b>Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>30,000,805</b>	<b>30,000,805</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
5.3.1	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	30,000,805	30,000,805	100	-
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>32,791,196</b>	<b>31,552,834</b>	<b>96</b>	<b>1,238,362</b>

<b>6.1</b>	<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>18,516,903</b>	<b>18,516,903</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
6.1.1	Pemberantasan Penyakit HewanMenular dan Zoonosis dalam 1 (satu)Daerah Kabupaten/Kota	18,516,903	18,516,903	100	-
<b>6.2</b>	<b>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>14,274,293</b>	<b>13,035,931</b>	<b>91</b>	<b>1,238,362</b>
6.2.1	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	14,274,293	13,035,931	91	1,238,362
<b>7</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>10,611,770</b>	<b>8,121,726</b>	<b>77</b>	<b>2,490,044</b>
<b>7.1</b>	<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	<b>10,611,770</b>	<b>8,121,726</b>	<b>77</b>	<b>2,490,044</b>
7.1.1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	10,611,770	8,121,726	77	2,490,044
<b>8</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	<b>21,680,008</b>	<b>21,430,242</b>	<b>99</b>	<b>249,766</b>
<b>8.1</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>6,781,256</b>	<b>6,541,610</b>	<b>96</b>	<b>239,646</b>

8.1.3	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	6,781,256	6,541,610	96	239,646
8.2	<b>Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan</b>	<b>14,898,752</b>	<b>14,888,632</b>	<b>100</b>	<b>10,120</b>
8.2.1	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	14,898,752	14,888,632	100	10,120
9	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>9,970,809,591</b>	<b>7,532,807,830</b>	<b>76</b>	<b>2,438,001,761</b>
9.1	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>9,970,809,591</b>	<b>7,532,807,830</b>	<b>76</b>	<b>2,438,001,761</b>
9.1.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatandan Desa	36,004,123	26,142,040	73	9,862,083
9.1.2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	245,174,450	245,174,450	100	-
9.1.3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	391,749,018	271,643,880	69	120,105,138
9.1.4	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	9,297,882,000	6,989,847,460	75	2,308,034,540

Program dan kegiatan yang diselenggarakan melalui dana APBD untuk tahun 2024 telah dilakukan pengadaan ternak, bibit perkebunan, hortikultura dan sekolah lapang kelompok tani.

Permintaan usulan kelompok tani berupa pengajuan proposal ke Dinas Pertanian dan Pangan terhadap pengadaan Prasarana dan sarana pertanian sangat tinggi dan tidak dapat diakomodir secara langsung melalui dana APBD dikarenakan terbatasnya alokasi anggaran. Sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut Dinas Pertanian dan Pangan aktif berkoordinasi ke Propinsi dan Pusat untuk mendapatkan APBD Propinsi dan APBN, dengan menyiapkan persyaratan dari pusat dan rutin mengusulkan proposal kelompok tani melalui aplikasi e-proposal untuk dana APBN, aplikasi Krisna untuk dana yang bersumber dari DAK Fisik. Sedangkan untuk APBD Propinsi mengikuti Forum OPD dan Musrembang yang dilaksanakan oleh Propinsi setiap tahunnya.



### SASARAN STRATEGIS 3

### MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN PERANGKAT DAERAH

**Tabel 29**  
**Target dan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2024	REALISASI 2024	%
3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Predikat SAKIP perangkat daerah	BB	BB	100%
		Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	100%	100%	100%
		Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Sangat Baik	Sangat Baik	100%

Pencapaian sasaran strategis Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah menandakan bahwa (a) Pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, (b) Pemerintahan perangkat daerah dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan lebih efektif dan efisien, (c) Peningkatan kualitas layanan publik: Pemerintahan perangkat daerah dapat menyediakan layanan publik yang lebih baik dan memuaskan kebutuhan masyarakat, (d) Pengurangan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan: Pemerintahan perangkat daerah dapat mengurangi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas., (e) Peningkatan partisipasi masyarakat: Pemerintahan perangkat daerah dapat meningkatkan

partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, (f) Pengembangan kapasitas dan kompetensi aparatur: Pemerintahan perangkat daerah dapat mengembangkan kapasitas dan kompetensi aparatur untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dengan demikian, pencapaian sasaran strategis ini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.

**Indikator 1 :  
Predikat SAKIP Perangkat Daerah**



Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Di tingkat Perangkat Daerah, juga diimplementasikan Perencanaan Kinerja berupa penyusunan Renstra, Renja, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi. Perencanaan Kinerja dilakukan secara berjenjang. Demikian pula halnya dengan pengukuran kinerja, dilakukan secara berjenjang berdasarkan sasaran, indikator sasaran, dan target yang diperjanjikan. Selanjutnya pada akhir tahun dilakukan penyusunan Laporan Kinerja berupa LAKIP dan diakhiri dengan review oleh Inspektorat. Hasil evaluasi bahwa Dinas Pertanian dan pangan, memperoleh nilai 72,38 atau predikat rating "BB". Rincian hasil penilaian adalah sebagai berikut :

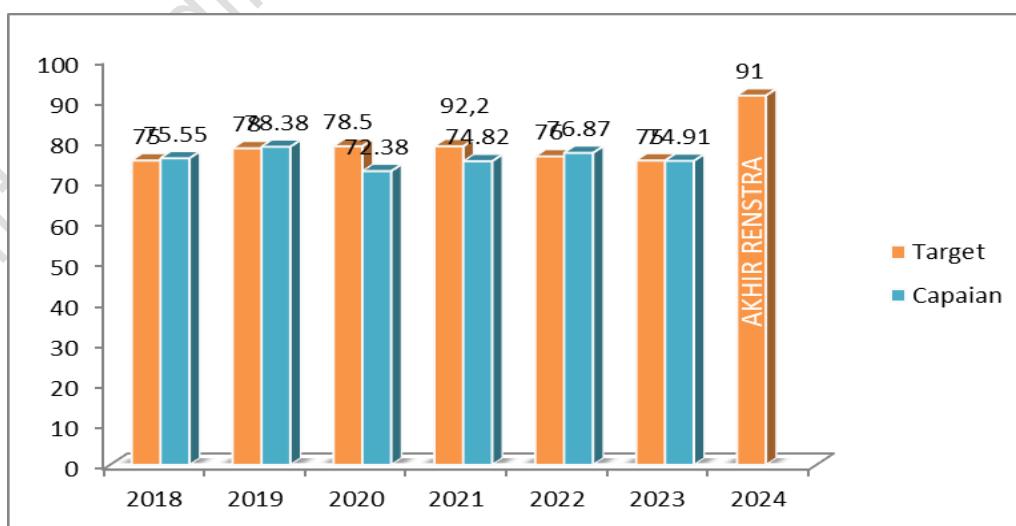
**Tabel 30**  
**Hasil Evaluasi LAKIP Dinas Pertanian dan Pangan**  
**Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Komponen Yang Dinilai</b>	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>		<b>2023</b>	
		<b>Bo bot</b>	<b>Nilai</b>	<b>Bo bot</b>	<b>Nilai</b>	<b>Bo bot</b>	<b>Nilai</b>	<b>Bo bot</b>	<b>Nilai</b>	<b>Bo bot</b>	<b>Ni lai</b>
1	Perencanaan Kinerja	30	29.15	30	29.15	30	29.15	30	29.45	30	26.85
2	Pengukuran Kinerja	25	22.19	25	22.19	25	22.19	25	22.19	25	21.25
3	Pelaporan Kinerja	15	10.34	15	10.34	15	10.61	15	10.61	15	13.56
4	Evaluasi Internal	10	5.2	10	5.2	10	5.62	10	6.37	10	5.5
5	Capaian Kinerja	20	11.5	20	5.5	20	7.25	20	8.25	20	7.75
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>78.38</b>	<b>100</b>	<b>72.38</b>	<b>100</b>	<b>74.82</b>	<b>100</b>	<b>76.87</b>	<b>100</b>	<b>74.91</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>	<b>BB</b>									

Mencermati perkembangan capaian implementasi SAKIP Dinas Pertanian dan Pangan sebagaimana tersaji pada tabel tersebut di atas, maka kualitas penerapan SAKIP Dinas Pertanian dan Pangan dari tahun Tahun 2022 ke 2023 terdapat kenaikan pada komponen pelaporan kinerja dan penurunan pada komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja dengan total nilai keseluruhan 74.91. Sedangkan pada tahun 2019 sampai 2021 dengan predikat yang sama yakni BB, namun terdapat peningkatan nilai yakni dari 72,38 menjadi 74,82, terdapat peningkatan nilai sebesar 2,44 poin pada tiga komponen yaitu pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2021

predikat kinerja Dinas Pertanian dan Pangan sangat baik dan mampu melakukan efisiensi anggaran sebesar 5% dan pada tahun 2022 Dinas Pertanian dan Pangan mampu melakukan efisiensi sebesar **40%**. Efisiensi tersebut terdapat pada pelaksanaan pengadaan bank pakan, pengadaan sarana UPH Perkebunan serta pelaksanaan operasi pasar murah, Pada tahun 2023 Dinas Pertanian dan Pangan mampu melakukan efisiensi sebesar **9%**. Efisiensi tersebut terdapat pada pelaksanaan penyediaan gaji dan tunjangan ASN, pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan atau kendaraan dinas jabatan, peningkatan kualitas SDG hewan/tanaman dan pemanfaatan SDG hewan/tanaman. untuk kedepannya capaian kinerja organisasi harus terus ditingkatkan dengan dukungan masing-masing bidang agar hasil evaluasi LAKIP dapat mencapai predikat A. Perbandingan pencapaian target dan realisasi tahun 2023 serta tahun sebelumnya serta pencapaian terhadap akhir Renstra digambarkan pada Gambar 28 berikut :

**Gambar 31**  
**Perbandingan Capaian LAKIP Dalam Kurung Waktu Lima Tahun Terakhir dibandingkan Target Capaian Akhir Renstra**



## **Analisis keberhasilan dan kegagalan**

### **Faktor Penunjang :**

1. Optimalnya pendampingan dan penguatan SAKIP oleh Bagian Organisasi, Bappeda, dan Inspektorat.
2. Tersedianya aplikasi e-SAKIP

### **Faktor Penghambat :**

1. Belum optimalnya evaluasi pencapaian target kinerja per triwulan pada masing-masing Unit Organisasi intern Dinas Pertanian dan pangan, sehingga tidak terdapat langkah-langkah percepatan pencapaian target kinerja tahun yang bersangkutan.

### **Solusi :**

1. Peningkatan pelaksanaan FGD untuk percepatan pencapaian target kinerja.
2. Penyusunan standar kelengkapan data-data kinerja organisasi

Sejumlah Program dan Kegiatan untuk menjamin pencapaian indikator predikat SAKIP perangkat daerah ini, sebagai berikut :

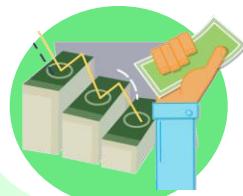
**Tabel 31**  
**Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Menunjang**  
**Indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB.KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSEN	SISA ANGGARAN
3.1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>10,000,456</b>	<b>10,000,456</b>	<b>100</b>	-

3.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,720,277	2,720,277	100	-
3.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4,280,371	4,280,371	100	-
3.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1,999,565	1,999,565	100	-
3.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,000,243	1,000,243	100	-

Pelaksanaan penganggaran Program, kegiatan dan Sub. Kegiatan untuk mendukung pencapaian indikator sasaran **kualitas akuntabilitas kinerja** telah memprioritaskan untuk mengatasi faktor penghambat pencapaian kinerja organisasi yakni pada rincian kode rekening kegiatan, yang selama ini hanya berisi belanja cetak dan penggandaan, saat ini telah ditambahkan biaya penunjang pelaksanaan pertemuan intern Dinas untuk membahas penyusunan Renstra, Renja RKA/DPA sampai pada penyusunan LAKIP agar masing-masing unit kerja mengetahui alur dan Proses implementasi SAKIP, sehingga penyusunan dokumen terkait perencanaan tidak terkesan merupakan tanggung jawab Jabatan fungsional Perencana saja.

**Indikator 2 :**  
**Persentase tertib pengelolaan  
keuangan dan aset perangkat daerah**



Pada aspek sasaran strategis ini, diharapkan Dinas Pertanian dan Pangan turut menjadi bagian pencapaian Opini Pengelolaan Keuangan BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Memperhatikan capaian Opini BPK dimaksud dalam 2 tahun terakhir yang selalu mencapai WTP, maka diharapkan pencapaian WTP untuk tahun anggaran 2024 ini dapat kembali mencapai WTP. Hasil opini BPK terhadap Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar masih dalam proses pemeriksaan BPK, namun dalam hal ini Dinas Pertanian dan Pangan turut menjadi Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pencapaian Opini WTP.

**Analisis keberhasilan dan kegagalan**

**Faktor Penunjang :**

1. Tingginya komitmen seluruh jajaran pegawai Dinas Pertanian dan Pangan untuk mencapai WTP atau tidak adanya temuan kerugian negara dan penyimpangan administrasi dan sistem prosedur.
2. Tersedianya aplikasi SIMDA dan SIPD yang memudahkan tertib pengelolaan keuangan daerah.

**Faktor Penghambat :**

1. Belum optimalnya pemahaman akuntansi berbasis akrual SDM Pengelola Keuangan.
2. Belum optimalnya tertib administrasi asset.

**Solusi :**

1. Mengoptimalkan koordinasi dan konsultasi dengan Badan Keuangan dalam rangka penguatan akuntansi dan asset.
2. Peningkatan tertib administrasi keuangan dan tertib pengarsipan.
3. Penempatan SDM dengan latar belakang pendidikan Akuntansi pada masing-masing OPD sebagai Pejabat Pelaksana Akuntansi dan Pelaporan.
4. Mengikutsertakan pelatihan penyusunan Laporan Keuangan Pejabat Pelaksana Akuntansi dan Pelaporan.

Sejumlah Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan untuk menjamin pencapaian sasaran opini pengelolaan keuangan daerah ini, sebagai berikut :

**Tabel 32**  
**Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Menunjang Administrasi Keuangan**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB.KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSEN	SISA ANGGARAN
3.2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>16,019,121,601</b>	<b>15,804,680,519</b>	<b>99</b>	<b>214,441,082</b>
3.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16,014,157,642	15,799,716,560	99	214,441,082
3.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,237,333	2,237,333	100	-
3.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	2,726,626	2,726,626	100	-

Pelaksanaan penganggaran Program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian indikator sasaran **opini pengelolaan keuangan daerah** belum memprioritaskan untuk mengatasi faktor penghambat pencapaian kinerja organisasi yakni pada rincian kode rekening kegiatan, hanya berisi belanja cetak dan penggandaan, yang seharusnya terdapat biaya pelatihan bagi Pejabat Pelaksana Akuntansi dan Pelaporan, untuk meningkatkan sumber daya manusia, sehingga diperoleh kualitas pelaporan keuangan yang baik.

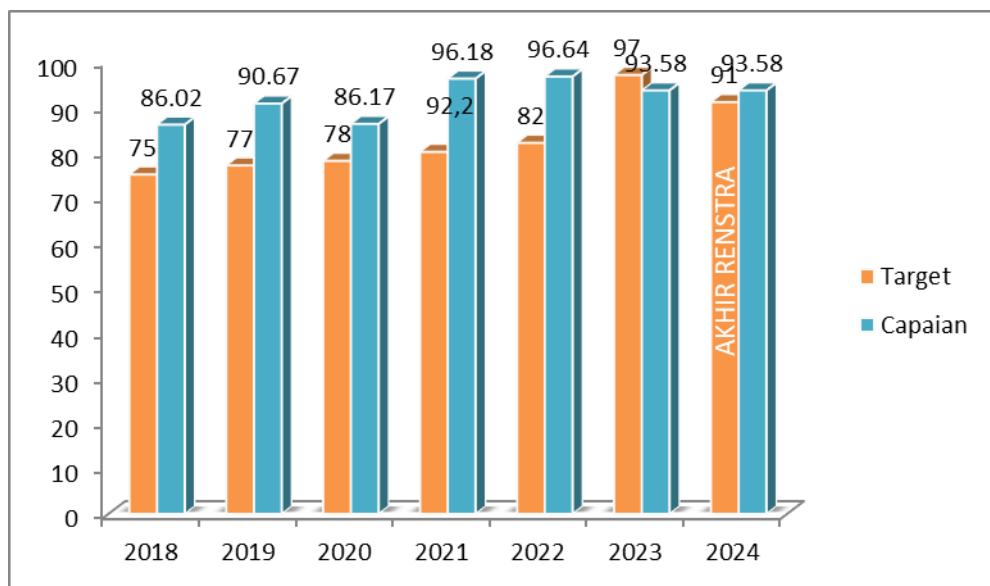
**Indikator 3 :**  
**Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah**



Dalam upaya memastikan tercapainya sasaran strategis Dinas Pertanian dan Pangan, maka diperlukan pula pencapaian sasaran strategis pada aspek manajemen perkantoran, sehingga kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan fungsi-fungsi pelayanan publik Dinas Pertanian dan Pangan semakin membaik. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Brokrasi nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Adapun capaian kinerja sasaran strategis Indeks Kepuasan Masyarakat tahun berkenaan, yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya serta target pencapaian diakhir renstra digambarkan dalam grafik berikut :

**Gambar 32**  
**Perbandingan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Kurung Waktu Lima Tahun Terakhir dibandingkan Target Capaian Akhir Renstra**



Mencermati Grafik terkait survei kepuasan layanan pada Dinas Pertanian dan Pangan, maka dapat diketahui bahwa tingkat kepuasan masyarakat/stakeholders tahun 2024 mencapai indeks 93.58 atau predikat kinerja layanan ‘Sangat Baik’. Capaian ini tidak mencapai dari target yang ditetapkan untuk tahun 2024 yaitu 97, selain itu meskipun predikat kinerjanya sangat baik tapi terjadi penurunan angka IKM dari tahun 2022 yaitu 96.18 menjadi 93.58, hal tersebut disebabkan terdapat dua unsur layanan yang mengalami penurunan dari total Sembilan unsur yaitu persyaratan dan waktu penyelesaian. Selanjutnya, capaian tahun 2024 menjadi bahan evaluasi untuk kedepannya agar target kinerja jangka menengah yang tertuang dalam Renstra Dinas Pertanian dan Pangan tahun 2019-2024 dapat tercapai.

Pencapaian tersebut diperoleh dari hasil survey terhadap 6 (enam) layanan Dinas Pertanian dan Pangan yang digambarkan dalam tabel, sebagai berikut :

**Tabel 33**  
**Jenis Layanan Dinas Pertanian dan Pangan**

NO.	NAMA IZIN DAN NON IZIN	PERSYARATAN PERMOHONAN	LAMA WAKTU PENYELESAIAN	KET. REKOMENDASI
1	Rekomendasi Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Alih Fungsi Lahan Perkebunan.	1 Permohonan Alih Fungsi Lahan	1-2 Hari Kerja	
		2 Surat Persetujuan Tetangga diketahui Desa/Kelurahan	(Disesuaikan dengan kelengkapan dan status berkas yang masuk)	
		3 Fotocopy KTP		
		4 Fotocopy Sertifikat Kepemilikan Tanah/Sporadik		
		5 Fotocopy PBB		
		6 Fotocopy NPWP (Bagi Badan Usaha)		NON IZIN
		7 Rekomendasi RTRW dari PUPR		
		8 Surat Keterangan Lahan dari Desa/Kelurahan		
		Denah Lokasi		
2	Rekomendasi Usaha Penggilingan Padi	1 Mengisi Formulir Permohonan	1 - 2 Hari Kerja	
		2 Surat Persetujuan Tetangga diketahui Desa/Kelurahan	(Disesuaikan dengan kelengkapan dan status berkas yang masuk)	
		3 Fotocopy KTP		
		4 Fotocopy NPWP		
		5 Pas Foto Ukuran 3 x 4 cm (Hitam Putih)		IZIN

		6	Gambar Lokasi Tempat Usaha		
		7	Fotocopy SITU/SIUP (Khusus Perpanjangan)		
		8	Izin Lingkungan Hidup		
<b>3</b>	Rekomendasi Teknis Usaha Bidang Pertanian	1	Mengisi Formulir Permohonan	1 - 2 Hari Kerja	
		2	Surat Persetujuan Tetangga diketahui Desa/Kelurahan	(Disesuaikan dengan kelengkapan dan status berkas yang masuk)	IZIN
	1. Sarana Produksi Pertanian	3	Fotocopy KTP		
	2. Alat dan Mesin Pertanian	4	Fotocopy NPWP		
	3. Benih/Bibit Pertanian	5	Gambar Lokasi Tempat Usaha		
		6	Fotocopy SITU/SIUP (Khusus Perpanjangan)		
<b>4</b>	Rekomendasi Teknis Usaha Bidang Peternakan	1	Mengisi Formulir Permohonan	1 - 2 Hari Kerja	
		2	Surat Persetujuan Tetangga diketahui Desa/Kelurahan	(Disesuaikan dengan kelengkapan dan status berkas yang masuk)	IZIN
	1. Usaha Ternak/Unggas	3	Fotocopy KTP		
	2. Pengeluaran Ternak	4	Fotocopy NPWP		
	3. Pemotongan Ternak/Unggas	5	Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)		
		6	Gambar Lokasi Tempat Usaha		
		7	Fotocopy SITU/SIUP dan TDP (Khusus Perpanjangan)		
		8	Izin Lingkungan Hidup		
<b>5</b>	Rekomendasi Teknis Usaha Bidang Perkebunan	1	Mengisi Formulir Permohonan	1 - 2 Hari Kerja	
		2	Surat Persetujuan Tetangga diketahui Desa/Kelurahan	(Disesuaikan dengan kelengkapan dan status berkas yang masuk)	IZIN
	1. Benih/Bibit Perkebunan	3	Fotocopy KTP		

	2. Alat dan Mesin Perkebunan	4	Fotocopy NPWP		
		5	Gambar Lokasi Tempat Usaha		
		6	Fotocopy SITU/SIUP (Khusus Perpanjangan)		
<b>6</b>	Rekomendasi Pembelian BBM jenis tertentu Sektor Pertanian	1	Fotocopy KTP	1 - 2 Hari Kerja	
		2	Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan yang diketahui oleh Camat		NON IZIN

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- "Syarat pelayanan diperketat agar tepat sasaran".
- "Pelayanan ditingkatkan, pelayanan tepat waktu".

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Persyaratan yang harus dipenuhi masih sering diabaikan oleh sebagian pengguna layanan dan syarat yang ditentukan sudah sesuai SOP namun sebagian masyarakat/petani mengaku belum tahu atau lupa.
- Petugas layanan belum pernah diberikan pelatihan khusus terkait *service excellent* serta belum ada penerapan pemberian penghargaan kepada petugas yang berprestasi.

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh

karena itu hasil analisa ini dibuat dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

**Tabel 34**  
**Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM**

No.	Prioritas Unsur	Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			Tr. I	Tr. II	Tr. III	Tr. IV	
1	<b>Persyaratan Pelayanan</b>	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Persyaratan Pelayanan	✓	✓	✓	✓	<b>Bagian Sekretariat</b>
2	<b>Waktu Penyelesaian</b>	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Waktu Penyelesaian	✓	✓	✓	✓	<b>Bagian Sekretariat</b>

### **Analisis keberhasilan dan kegagalan**

#### **Faktor Penunjang :**

1. Tingginya motivasi kerja Pegawai;
2. Adanya perkembangan teknologi dan informasi;
3. Meningkatnya perhatian perangkat daerah terhadap layanan yang disediakan Dinas Pertanian dan Pangan;

#### **Faktor Penghambat :**

1. Kondisi Bangunan Gedung Kantor yang sebagian dalam kondisi kurang layak;
2. Terbatasnya kelengkapan sarana prasarana pelayanan;
3. Terbatasnya kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan;

#### **Solusi :**

1. Penataan ruang front office dan ruang kerja pegawai;
2. Optimalisasi pemeliharaan dan penyediaan sarana prasarana kerja.

3. Pengembangan sistem pembelajaran mandiri dan mentoring antar pegawai;

Sejumlah Program dan Kegiatan untuk menjamin pencapaian sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat perangkat daerah ini, sebagai berikut :

**Tabel 35**  
**Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Menunjang Manajemen Perkantoran**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB.KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSEN	SISA ANGGARAN
3.3	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>165,715,927</b>	<b>155,734,177</b>	<b>94</b>	<b>9,981,750</b>
3.3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27,750,573	17,768,991	64	9,981,582
3.3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13,515,000	13,515,000	100	-
3.3.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7,817,754	7,817,586	100	168
3.3.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1,440,000	1,440,000	100	-
3.3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115,192,600	115,192,600	100	-
4.4	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	-	-		-
4.4.1	Pengadaan Mebel		-		-
4.4.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-

<b>4.5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1,957,381,373</b>	<b>1,924,299,310</b>	<b>98</b>	<b>33,082,063</b>
4.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	126,975,713	93,893,650	74	33,082,063
4.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,830,405,660	1,830,405,660	100	-
<b>4.6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>117,453,280</b>	<b>106,965,720</b>	<b>91</b>	<b>10,487,560</b>
4.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100,647,000	90,159,440	90	10,487,560
4.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11,650,000	11,650,000	100	-
4.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5,156,280	5,156,280	100	-

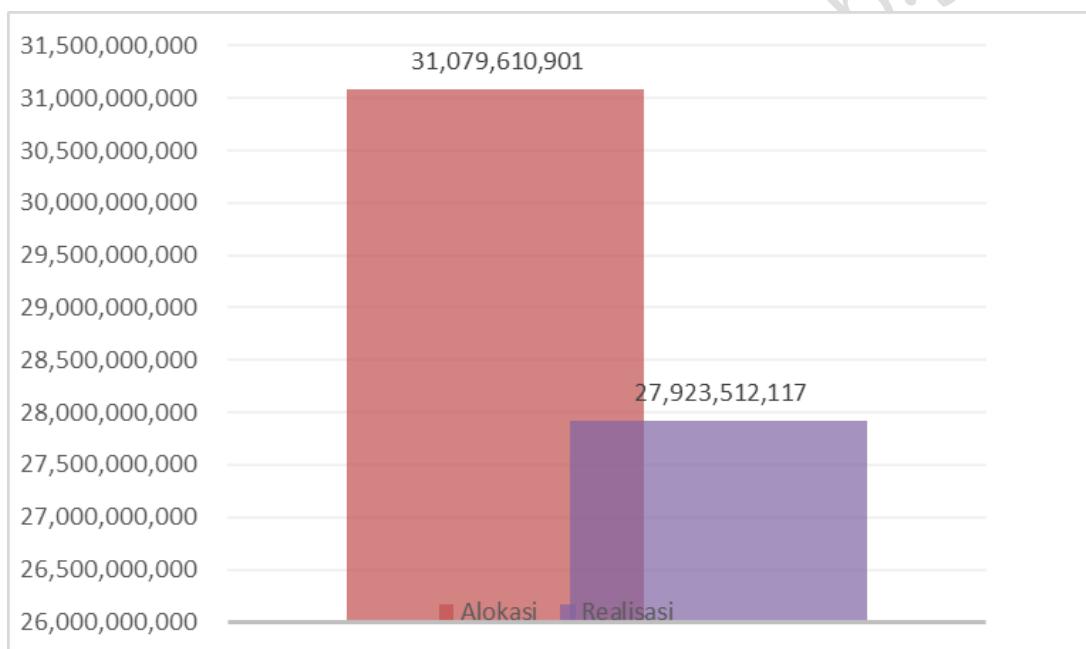
Pelaksanaan penganggaran Program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian indikator sasaran **Indeks Kepuasan Masyarakat** belum memprioritaskan untuk mengatasi faktor penghambat pencapaian kinerja organisasi, hal tersebut dapat dilihat dari rasio anggaran yang kecil untuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pelayanan publik.

## B. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundungan dalam

penggunaan sumber daya finansial. Laporan akuntabilitas kinerja yang baik harus disertai pula laporan akuntabilitas keuangan, sehingga efisiensi dan efektifitas penganggaran dapat diukur serta dapat diketahui nilai manfaat dari hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan. Adapun alokasi dan Realisasi Belanja Dinas Pertanian dan pangan, dapat disajikan sebagai berikut :

**Gambar 33**  
**Alokasi Anggaran dan Realisasi Dinas Pertanian dan Pangan**  
**Tahun 2024**



Untuk pencapaian sasaran Dinas Pertanian dan Pangan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp 31.079.610.901,-** dan terealisasi **Rp 27.923.512.117,-** atau persentase realisasi **89.85%**. Capaian realisasi keuangan tidak mencapai 100% dikarenakan terdapat sisa pagu pada pelaksanaan program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dan penyuluhan pertanian.

Sedangkan jika ditinjau dari segi pencapaian kinerja diperoleh angka **104.40%**. Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Tabel T-E-1

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Dinas Pertanian dan Pangan berada pada kategori realisasi kinerja **Sangat Tinggi** yaitu interval nilai realisasi kinerja  $91\% \leq 100\%$ . Sedangkan dari segi efisiensi penggunaan anggaran Dinas Pertanian dan Pangan mampu melakukan efisiensi sebesar **15%**. Efisiensi tersebut terdapat pada pelaksanaan program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dan penyuluhan pertanian.

**Tabel 36. Nilai Efisiensi pada Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR	KINERJA			KEUANGAN			PROGRAM
		TARGET 2024	REALISASI	PERSEN TASE	ALOKASI	REALISASI	PERSEN TASE	
1	<b>Meningkatnya Ketahanan Pangan</b>							
	Indeks ketahanan pangan	73.87	75.87	103	78,508,899	48,227,445	61	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
					5,000,342	4,965,802	99	Penanganan Kerawanan Pangan
2	<b>Meningkatnya kapasitas produksi sektor pertanian</b>							
	Persentase pertumbuhan produksi padi	0.10%	-1%	(1,000)	2,556,211,452	2,140,409,331	84	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

	Persentase pertumbuhan produksi jagung	0.10%	-42%	(42,000)	134,325,006	134,316,725	100	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
	Persentase pertumbuhan produksi kedelai	0.10%	1797%	1,797,000	32,791,196	31,552,834	96	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
	Persentase pertumbuhan produksi buah-buahan	0.10%	3%	3,000	10,611,770	8,121,726	77	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
	Persentase pertumbuhan produksi sayuran	50.00%	-36%	(72)	21,680,008	21,430,242	99	Perizinan Usaha Pertanian
	Persentase pertumbuhan produksi Kakao	1.50%	0.04%	3	9,970,809,591	7,532,807,830	76	Penyuluhan Pertanian
	Persentase pertumbuhan produksi Kelapa	1%	0.12%	12				

	Persentase pertumbuhan Produksi Kopi	3%	3.29%	110				
	Persentase pertumbuhan Populasi Sapi	0.1%	0.50%	500				
	Persentase pertumbuhan Populasi Kambing	1%	0.69%	69				
	Persentase pertumbuhan Populasi Unggas	1%	0.08%	8				
<b>3</b>	<b>Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah</b>				18,269,672,637	18,001,680,182	99	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Predikat SAKIP perangkat daerah	BB (75)	BB (74.91)	100				
	Persentase tertib pengelolaan keuangan dan	100.00%	100.00%	100				

	aset perangkat daerah							
	Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Sangat Baik (97)	Sangat Baik (93.58)	100				
	<b>TOTAL REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>346.39</b>	<b>361.62</b>	<b>104.40</b>	<b>31,079,610,901</b>	<b>27,923,512,117</b>	<b>89.85</b>	
	<b>EFESIENSI ANGGARAN</b>	<b>(Total Realisasi Kinerja - Total Realisasi Keuangan)</b>				<b>(15)</b>		

## BAB IV. PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar menyajikan capaian sasaran strategis Dinas Tahun 2024. Di dalam penyajian ini diuraikan realisasi kinerja yang dibandingkan dengan target yang telah diperjanjikan, dibandingkan dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya serta perbandingan dengan target jangka menengah (tahun 2024) yang tertuang di dalam dokumen Renstra 2019-2024. Selanjutnya diuraikan pula faktor penunjang keberhasilan, kendala yang masih dihadapi serta alternatif solusi yang telah diupayakan. Laporan ini tentu dilengkapi pula dengan uraian akuntabilitas keuangan dan nilai efisiensi yang mampu dicapai atas kinerja yang dicapai.

Untuk pencapaian sasaran tersebut telah dialokasikan anggaran tahun 2024 **sebesar Rp 31.079.610.901,-** dan terealisasi **Rp 27.923.512.117,-** atau persentase realisasi keuangan **89.85%**, dengan rata-rata pencapaian kinerja **104%**. Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja ada Tabel T-E-1 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Dinas Pertanian dan Pangan berada pada kategori realisasi kinerja **Tinggi** yaitu berada pada interval nilai realisasi kinerja  $76\% \leq 90\%$ . Sedangkan dari segi efisiensi penggunaan anggaran Dinas Pertanian dan Pangan mampu melakukan efisiensi sebesar **15%**. Efisiensi tersebut terdapat pada pelaksanaan program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dan penyuluhan pertanian.

Sejumlah kendala yang perlu menjadi perhatian utama pada kinerja tahun-tahun selanjutnya yaitu, pada :

1. Peningkatan koordinasi lintas sektor untuk mencapai Ketahanan Pangan Daerah.

2. Pengawalan dan Pendampingan intensif dari hulu hingga hilir untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan dan Fasilitasi akses permodalan (KUR), mekanisasi, pengairan, kelembagaan, dan pemasaran.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 ini disusun, untuk bahan evaluasi dan perbaikan kinerja selanjutnya.

Polewali Mandar, 10 Februari 2025





## PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Jl. Mr. Muh. Yamin Nomor 177 Kode Pos 91315  
Telepon : (0428) 21013 Faks : (0428) 21013  
e-mail : distanpan.polewalimandar@gmail.com

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ANDI AFANDI RAHMAN, ST, M.Si**  
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian dan Pangan

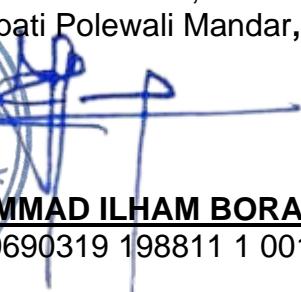
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA**  
Jabatan : Pj. Bupati Polewali Mandar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua,  
Pj. Bupati Polewali Mandar,  
  
**Drs. MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA**  
NIP. 19690319 198811 1 001

Pihak Pertama,  
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan,  
  
**ANDI AFANDI RAHMAN, ST, M.Si**  
NIP. 19780424 199803 1 003

**PERJANJIAN KINERJA**  
**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**  
**KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**TABEL KINERJA**  
**TAHUN 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	TARGET 2024
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks ketahanan pangan	74.59	73.87
2	Meningkatnya kapasitas produksi sektor pertanian	Persentase pertumbuhan produksi padi	-12%	0.1%
		Persentase pertumbuhan produksi jagung	-19%	0.1%
		Persentase pertumbuhan produksi kedelai	-82%	0.1%
		Persentase pertumbuhan produksi buah-buahan	-2%	0.1%
		Persentase pertumbuhan produksi sayuran	41%	50%
		Persentase pertumbuhan produksi Kakao	0.20%	1.5%
		Persentase pertumbuhan produksi Kelapa	0.08%	1%
		Persentase pertumbuhan Produksi Kopi	1.60%	3%
		Persentase pertumbuhan Populasi Sapi	-4.22%	0.1%
		Persentase pertumbuhan Populasi Kambing	-1.18%	1%
3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Predikat SAKIP perangkat daerah	BB	BB
		Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	100%	100%
		Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Sangat Baik	Sangat Baik

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 22,424,110,798	PAD, DAU
2	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 109,999,839	DAU
3	Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 5,000,342	DAU
4	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 1,052,657,046	DAU, DAK NON FISIK
5	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 74,201,206	DAU
6	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp 34,274,396	DAU
7	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp 11,611,770	DAU
8	Perizinan Usaha Pertanian	Rp 60,000,438	DAU
9	Penyuluhan Pertanian	Rp 9,247,767,293	DAU SG
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 33,019,623,128</b>	<b>PAD, DAU, DAK NON FISIK dan DAK FISIK</b>

Polewali, 23 Februari 2024



**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA  
PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN DAN PANGAN  
PENJELASAN KINERJA  
TAHUN 2024**

**Penjelasan Kinerja 1**

Uraian Sasaran

Meningkatnya Ketahanan Pangan yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan tujuan kedua dalam pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals - SDGs).

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki satu indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Nilai IKP dapat menunjukkan capaian ketahanan pangan dan gizi Kabupaten dan peringkat (ranking) relatif antara satu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya.	<p>Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan z-score dan distance to scale (0 – 100)</p> <p>Menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator, dengan rumus:</p> $Y(j) = \sum_{i=1}^9 a_i X_{ij}$ <p>Dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i : Indikator ke-1, 2, 3, ..., 7, 8, dan 9</li> <li>j : Kabupaten ke-1, 2, 3, ..., 414, 415, dan 416; kota ke-1, 2, 3, ..., 96, 97, dan 98</li> <li>Y<sub>j</sub> : Indeks Ketahanan Pangan kabupaten/kota ke-j</li> <li>a<sub>i</sub> : Bobot masing-masing indikator ke-i</li> <li>X<sub>ij</sub> : Nilai standarisasi masing-masing indikator ke-i pada kabupaten/kota ke-j</li> </ul> <p>Wilayah yang memiliki nilai IKP paling besar merupakan wilayah yang paling tahan pangan, sebaliknya nilai IKP paling kecil menunjukkan wilayah yang rentan terhadap kerawanan pangan</p>	Badan Ketahanan Pangan Nasional

### Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Kinerja Indikator	Target	Penjelasan
Indeks Ketahanan Pangan	73,87	Penetapan target berdasarkan tren IKP selama lima tahun terakhir yaitu (2018 - 2023)

### **Penjelasan Kinerja 2**

#### Uraian Sasaran

Meningkatnya Kapasitas Produksi Sektor Pertanian yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah kondisi dimana tercapainya produksi optimum dalam satuan lahan dan waktu tertentu dengan menggunakan sumber daya yang tersedia saat itu dari komoditi pertanian strategis di Kabupaten Polewali Mandar. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman, dan tujuan kedua dalam pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals - SDGs).

#### Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki sebelas indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase pertumbuhan produksi padi	Nilai persentase pertumbuhan produksi padi menunjukkan kapasitas produksi padi	Jumlah produksi padi (sawah dan ladang) tahun berjalan dibagi jumlah produksi tahun lalu dibagi jumlah produksi tahun lalu dikali 100%	Hasil pendataan Petugas Lapang
2	Persentase pertumbuhan produksi jagung	Nilai persentase pertumbuhan produksi jagung menunjukkan kapasitas produksi jagung	Jumlah produksi jagung tahun berjalan dibagi jumlah produksi tahun lalu dibagi jumlah produksi tahun lalu dikali 100%	Hasil pendataan Petugas Lapang

3	Persentase pertumbuhan produksi kedelai	Nilai persentase pertumbuhan produksi kedelai menunjukkan kapasitas produksi kedelai	Jumlah produksi kedelai tahun berjalan dibagi jumlah produksi tahun lalu dibagi jumlah produksi tahun lalu dikali 100%	Hasil pendataan Petugas Lapang
4	Persentase pertumbuhan produksi buah-buahan	Nilai persentase pertumbuhan produksi buah-buahan menunjukkan kapasitas produksi buah-buahan	Jumlah produksi buah-buahan tahun berjalan dibagi jumlah produksi tahun lalu dibagi jumlah produksi tahun lalu dikali 100%	Hasil pendataan Petugas Lapang
5	Persentase pertumbuhan produksi sayuran	Nilai persentase pertumbuhan produksi sayuran menunjukkan kapasitas produksi sayuran	Jumlah produksi sayuran tahun berjalan dibagi jumlah produksi tahun lalu dibagi jumlah produksi tahun lalu dikali 100%	Hasil pendataan Petugas Lapang
6	Persentase pertumbuhan produksi kakao	Nilai persentase pertumbuhan produksi kakao menunjukkan kapasitas produksi kakao	Jumlah produksi kelapa tahun berjalan dibagi jumlah produksi tahun lalu dibagi jumlah produksi tahun lalu dikali 100%	Hasil pendataan Petugas Lapang
7	Persentase pertumbuhan produksi kelapa	Nilai persentase pertumbuhan produksi kelapa menunjukkan kapasitas produksi kelapa	Jumlah produksi kopi tahun berjalan dibagi jumlah produksi tahun lalu dibagi jumlah produksi tahun lalu dikali 100%	Hasil pendataan Petugas Lapang
8	Persentase pertumbuhan produksi kopi	Nilai persentase pertumbuhan produksi kopi menunjukkan kapasitas produksi kopi	Jumlah produksi kakao tahun berjalan dibagi jumlah produksi tahun lalu dibagi jumlah	Hasil pendataan Petugas Lapang

			produksi tahun lalu dikali 100%	
9	Persentase pertumbuhan populasi sapi	Nilai persentase pertumbuhan produksi sapi menunjukkan kapasitas produksi sapi	Jumlah produksi sapi tahun berjalan dibagi jumlah produksi tahun lalu dibagi jumlah produksi tahun lalu dikali 100%	Hasil pendataan Petugas Lapang
10	Persentase pertumbuhan populasi kambing	Nilai persentase pertumbuhan produksi kambing menunjukkan kapasitas produksi kambing	Jumlah produksi kambing tahun berjalan dibagi jumlah produksi tahun lalu dibagi jumlah produksi tahun lalu dikali 100%	Hasil pendataan Petugas Lapang
11	Persentase pertumbuhan populasi unggas	Nilai persentase pertumbuhan produksi unggas menunjukkan kapasitas produksi unggas	Jumlah produksi unggas tahun berjalan dibagi jumlah produksi tahun lalu dibagi jumlah produksi tahun lalu dikali 100%	Hasil pendataan Petugas Lapang

#### Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Kinerja Indikator	Target	Penjelasan
Persentase pertumbuhan produksi padi	9%	Penetapan target berdasarkan tren pertumbuhan produksi padi selama lima tahun terakhir yaitu (2018 -2023) dan capaian realisasi target tahun terakhir
Persentase pertumbuhan produksi jagung	17.65%	Penetapan target berdasarkan tren pertumbuhan produksi padi selama lima tahun terakhir yaitu (2018 -2023) dan capaian realisasi target tahun terakhir
Persentase pertumbuhan produksi kedelai	7.21%	Penetapan target berdasarkan tren pertumbuhan produksi padi selama lima tahun terakhir yaitu (2018 -2023) dan capaian realisasi target tahun terakhir
Persentase pertumbuhan produksi buah-buahan	17.06%	Penetapan target berdasarkan tren pertumbuhan produksi padi selama lima tahun terakhir yaitu (2018 -2023) dan capaian realisasi target tahun terakhir

Persentase pertumbuhan produksi sayuran	3.90%	Penetapan target berdasarkan tren pertumbuhan produksi padi selama lima tahun terakhir yaitu (2018 -2023) dan capaian realisasi target tahun terakhir
Persentase pertumbuhan produksi kakao	13%	Penetapan target berdasarkan tren pertumbuhan produksi padi selama lima tahun terakhir yaitu (2018 -2023) dan capaian realisasi target tahun terakhir
Persentase pertumbuhan produksi kelapa	1.55%	Penetapan target berdasarkan tren pertumbuhan produksi padi selama lima tahun terakhir yaitu (2018 -2023) dan capaian realisasi target tahun terakhir
Persentase pertumbuhan produksi kopi	11.66%	Penetapan target berdasarkan tren pertumbuhan produksi padi selama lima tahun terakhir yaitu (2018 -2023) dan capaian realisasi target tahun terakhir
Persentase pertumbuhan populasi sapi	17.62%	Penetapan target berdasarkan tren pertumbuhan produksi padi selama lima tahun terakhir yaitu (2018 -2023) dan capaian realisasi target tahun terakhir
Persentase pertumbuhan populasi kambing	0.51%	Penetapan target berdasarkan tren pertumbuhan produksi padi selama lima tahun terakhir yaitu (2018 -2023) dan capaian realisasi target tahun terakhir
Persentase pertumbuhan populasi unggas	3.48%	Penetapan target berdasarkan tren pertumbuhan produksi padi selama lima tahun terakhir yaitu (2018 -2023) dan capaian realisasi target tahun terakhir

### Penjelasan Kinerja 3

#### Uraian Sasaran

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah merupakan suatu konsep pemerintahan yang membangun serta menerapkan prinsip profesionalitas, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan pelayanan publik. Dasar hukum Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas pelaporan kinerja instansi pemerintah.

### Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki tiga indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Predikat SAKIP perangkat daerah	SAKIP mendukung terciptanya good governance untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Predikat AA : 90 - 100 Predikat A : 80 - 90 Predikat BB : 70 - 80 Predikat B : 60 - 70 Predikat CC : 50 - 60 Predikat C : 30 - 50	Bagian Organiasi Setda
2	Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset Perangkat Daerah	Pengelolaan aset dan keuangan Perangkat Daerah yang diwujudkan dalam penyusunan laporan keuangan yang valid, sesuai standar dan dapat dipertanggungjawabkan sejalan dengan prinsip good governance untuk meningkatkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Diperoleh dengan mereviu kinerja pengelolaan aset dan keuangan serta tersusunnya dokumen terkait aset dan laporan keuangan pada akhir tahun sesuai standar dan tepat waktu	Sekertariat Dinas Pertanian dan Pangan
3	Indeks kepuasan masyarakat/stakeholder	Nilai-nilai efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi merupakan merupakan syarat utama dalam pelayanan publik untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Jumlah seluruh IKP layanan x 100 Jumlah layanan publik Dinas yang dilakukan survey kepuasan	Sekertariat Dinas Pertanian dan Pangan

### Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Kinerja Indikator	Target	Penjelasan
Predikat SAKIP perangkat daerah	BB	Target SAKIP predikat BB (78,00) tahun 2024 optimis diraih Dinas Pertanian dan Pangan, dengan melihat Capaian SAKIP dari tahun ke tahun menunjukkan tren positif, ditandai capaian SAKIP 2020 (Predikat BB; 72,38), tahun 2021

		(Predikat BB;74,82), tahun 2022 (Predikat BB: 76,87)
Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset Perangkat Daerah	100%	Target 100% pengelolaan keuangan dan aset Dinas Pertanian dan Pangan menjadi target 2024. Penentuan target dipengaruhi capaian pengelolaan keuangan dan aset menunjukkan tren positif setiap tahunnya. Capaian 2020 (98,87%), 2021 (100%), 2022 (100%) dan 2023 (100%)
Indeks kepuasan masyarakat/stakeholder	Sangat Baik	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) Dinas Pertanian dan Pangan yang menyediakan 9 (sembilan) unsur layanan, juga mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya. Capaian IKM 2020 (Predikat Sangat Baik; 86,17), 2021 (Predikat Sangat Baik;96,18), 2022 (Predikat Sangat Baik; 96,64) dan 2023 (Predikat Sangat Baik: 93.58). Dengan tren positif setiap tahunnya, IKM optimis ditargetkan predikat sangat baik tahun 2024



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Jl. Mr. Muh. Yamin No. 177 Polewali, Kode Pos 91315

www.distanpan.polmankab.go.id

email : distanpan.polewalimandar@gmail.com

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **KAHARUDDIN, S.Pt.,M.Si**  
Jabatan : Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

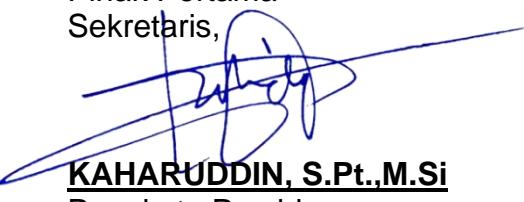
Nama : **ANDI AFANDI RAHMAN, ST, M.Si**  
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian dan Pangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua  
Plt. Kepala Dinas,  
  
**ANDI AFANDI RAHMAN, ST, M.Si**  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP. : 19780424 199803 1 003

Pihak Pertama  
Sekretaris,  
  
**KAHARUDDIN, S.Pt.,M.Si**  
Pangkat : Pembina  
NIP. : 19681231 200212 1 069

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**SEKRETARIAT DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022	TARGET 2023
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran	Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	100%	100%
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	96%	100%
		Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	97.78%	98.00%
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100%	100%
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	97.78%	100%
		Persentase tertib ketatausahaan kantor	85%	90%
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	80%	85%
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	85%	90%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>		
1.1	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 37,504,800	PAD
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 16,789,061,587	PAD, DAU
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 328,138,700	PAD
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	Rp 9,674,000	PAD
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	Rp 199,461,098	PAD
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Rp 151,558,600	PAD
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 17,515,398,785</b>	

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua  
**Kepala Dinas Pertanian dan Pangan**  
  
ANDI AFANDI RAHMAN, ST, M.Si  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP : 19780424 199803 1 003

Pihak Pertama  
**Sekretaris**  
  
KAHARUDDIN, S.Pt.,M.Si  
Pangkat : Pembina  
NIP : 19681231 200212 1 069

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA  
PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN DAN PANGAN  
PENJELASAN KINERJA  
TAHUN 2023**

**Penjelasan Kinerja 1**

**Uraian Sasaran**

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah merupakan suatu konsep pemerintahan yang membangun serta menerapkan prinsip profesionalitas, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan pelayanan publik. Dasar hukum Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas pelaporan kinerja instansi pemerintah.

**Indikator Kinerja**

Sasaran kinerja ini memiliki dua indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah merupakan salah satu penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun dalam tahun berkenaan	Sekertariat Dinas Pertanian dan Pangan
2	Persentase SPJ Fungsional	SPJ Fungsional merupakan salah satu dokumen pertanggungjawaban secara periodik yang merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan	Jumlah keseluruhan SPJ belanja-belanja pengeluaran berdasarkan kwitansi dan lampirannya pertanggung jawaban yang telah difungsionalkan terhadap keseluruhan SPJ yang difungsionalkan dan SPJ yang belum difungsionalkan kali 100	Sekertariat Dinas Pertanian dan Pangan

## Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Kinerja Indikator	Target	Penjelasan
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	Target 3 Dokumen yang menjadi target tahun 2023 berdasarkan dokumen yang harus disusun setiap tahunnya.
Persentase Fungsional SPJ	100 Persen	Target 100% SPJ Fungsional Dinas Pertanian dan Pangan menjadi target 2023. Penentuan target dipengaruhi capaian pengelolaan keuangan Distanpan menunjukkan tren positif setiap tahunnya. Capaian 2021 (100%) serta 2022 (100%)

## **Penjelasan Kinerja 2**

### Uraian Sasaran

Meningkatnya pelayanan administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah sebagai pelayanan Administrasi Kepegawaian dengan prinsip profesionalitas, efisiensi, akuntabilitas dan pelayanan publik. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang – Undang No. 5 Tahun 2014 tentang perwujudan pelayanan prima terkait dengan pengurusan administrasi kepegawaian (Absensi, Karis/Karsu, Karpeg, Cuti, SPTKG, Sumpah Janji) di lingkungan Pemerintah Daerah.

### Indikator Kinerja.

Sasaran kinerja ini memiliki 4 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Umum yang merupakan salah satu peningkatan pemenuhan administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang tersusun dalam tahun berkenaan	Sekertariat Dinas Pertanian dan Pangan

2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah merupakan salah satu penunjang mobilitas segala urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	Sekertariat Dinas Pertanian dan Pangan
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah merupakan penyedia bahan pendukung dalam melaksanakan pelayanan di bidang Sekretariat sehingga pelayanan dapat dilakukan sebagaimana mestinya.	Jumlah dokumlah Pengiriman Surat Menyurat terfasilitasi, Jumlah dokumen jasa layanan Komunikasi, Sumber Daya Air an Listrik yang dibayarkan, dan Jumlah dokumen kontrak /SPK jasa Pelayanan umum Kantor	Sekertariat Dinas Pertanian dan Pangan
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah merupakan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Jabatan terpelihara	Sekertariat Dinas Pertanian dan Pangan

#### Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Kinerja Indikator	Target	Penjelasan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Dokumen	Target 5 Dokumen yang menjadi target tahun 2023 berdasarkan dokumen yang harus disusun setiap tahunnya.
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	Target 100% Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Dinas Pertanian dan Pangan menjadi target 2023. Penentuan target dipengaruhi capaian pengelolaan keuangan Distanpan menunjukkan tren positif setiap tahunnya. Capaian 2021 (100%) serta 2022 (100%)

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Dokumen	Target 3 Dokumen yang menjadi target tahun 2023 berdasarkan dokumen yang harus disusun setiap tahunnya.
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	Target 100% Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Dinas Pertanian dan Pangan menjadi target 2023.



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Jl. Mr. Muh. Yamin No. 177 Polewali, Kode Pos 91315

www.distanpan.polmankab.go.id

email : distanpan.polewalimandar@gmail.com

---

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FITRIANI, SP. MP.**  
Jabatan : Kepala Bidang Ketahanan Pangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ANDI AFANDI RAHMAN, ST. M.Si.**  
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian dan Pangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua  
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan



**ANDI AFANDI RAHMAN, ST. M.Si.**  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP. : 19780424 199803 1 003

Pihak Pertama  
Kepala Bidang Ketahanan Pangan

  
**FITRIANI, SP. MP.**  
Pangkat : Pembina  
NIP. : 197006102007012039

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**BIDANG KETAHANAN PANGAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	TARGET 2024
1	2	3	4	5
1	<b>Meningkatnya Ketahanan Pangan</b>	Jumlah Pangan Pokok yang tersedia dan terdistribusi	54 Ton	55 Ton
		Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	12 Laporan	12 Laporan
		Jumlah Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	-	1 Laporan
		<b>Jumlah Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah</b>	6 Ton	7 Ton
		Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	20 Ton	3,8 Ton
		<b>Jumlah Dokumen Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</b>	1 Dokumen	1 Dokumen
		Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen	1 Dokumen
		<b>Jumlah Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun</b>	2.100 g/kapita/hari	396.572,5 g/kapita/hari
		Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen

NO	KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	<b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>		
1.1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Rp 6,999,600	DAU
1.2	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Rp 33,000,141	DAU
2	<b>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota</b>		
2.1	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Rp 59,999,940	DAU

NO	KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
3	<b>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</b>		
3.1	Penyusunan , Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Rp 5,000,342	DAU
4	<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>		
4.1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Rp 10,000,158	DAU
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 115,000,181</b>	

Polewali, 23 Februari 2024



Pihak Kedua  
**Kepala Dinas Pertanian dan Pangan**

**ANDI AFANDI RAHMAN, ST. M.Si.**  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP : 19780424 199803 1 003

Pihak Pertama  
**Kepala Bidang Ketahanan Pangan**

**FITRIANI, SP. MP.**  
Pangkat : Pembina  
NIP. : 19700610 200701 2 039

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA  
PERANGKAT DAERAH/BAGIAN/BIDANG/SUB BAGIAN/SEKSI  
PENJELASAN KINERJA  
TAHUN 2024**

**Penjelasan Kinerja 1**

**Uraian Sasaran**

Meningkatnya Ketahanan Pangan yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan tujuan kedua dalam pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals - SDGs).

**Indikator Kinerja**

Sasaran kinerja ini memiliki 9 (Sembilan) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah Pangan Pokok yang Tersedia atau Terdistribusi	Jumlah pangan pokok yang tersedia atau terdistribusi di ukur dengan	Jumlah pangan pokok tersedia atau terdistribusi = $\sum$ total pangan pokok dalam 1 tahun	Laporan Panel Harga Dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Pangan Murah

2	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi harga pangan dan neraca bahan pangan di gunakan sebagai bahan kebijakan dalam mengatasi masalah distribusi pangan	Informasi harga pangan dan neraca bahan makanan berupa data rata-rata 16 (enam belas) komoditi harga pangan setiap bulan dalam 1 (satu) Tahun	Laporan Panel Harga
3	Jumlah Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Stabilisasi pasokan dan harga pangan digunakan untuk mengatasi inflasi pangan atau kenaikan harga pangan pada waktu-waktu tertentu seperti menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan saat terjadi kenaikan harga akibat kurangnya pasokan	Stabilisasi pasokan dan harga pangan tingkat produsen dan konsumen berupa data total komoditi pangan yang telah tersalurkan ke masyarakat pada periode yang telah ditentukan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Pangan Murah
4	Jumlah ketersediaan cadangan pangan pemerintah	Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan di kelola oleh pemerintah Kabupaten	Jumlah Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah = $\sum$ total pengadaan beras yang disimpan di gudang Bulog dalam kurun waktu 1 (Satu) Tahun	Data Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten

5	Jumlah cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah berupa Beras	Jumlah Stok Beras yang disimpan di gudang Bulog = $\sum$ total pengadaan beras yang disimpan di gudang Bulog dalam kurun waktu 1 (Satu) Tahun	Data Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten
6	Jumlah dokumen peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan	Jumlah dokumen peta menyediakan informasi ketahanan pangan di setiap kecamatan	Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) sebagai instrumen untuk memonitoring Ketahanan Pangan di stiap wilayah Kecamatan	Buku FSVA 2023
7	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	Peta Kerentanan Pangan Menjelaskan kondisi kerentanan pangan satu wilayah	Buku Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) di susun dengan mengelompokkan dan menganalisis 6 prioritas daerah yang rentan pangan	Buku Peta FSVA 2023
8	Jumlah Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun	Nilai Konsumsi Pangan dapat menunjukkan kondisi konsumsi pangan pada suatu wilayah, baik jenis maupun jumlah pangan yang dikonsumsi seseorang atau sekelompok orang. Hasil analisis konsumsi pangan dapat dijadikan sebagai capaian	Mutu konsumsi pangan penduduk dapat dinilai dari skor pangan ( <i>dietary score</i> ) atau skor PPH. Berikut ini tahapan dalam menghitung skor PPH konsumsi : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengelompokkan bahan pangan ke dalam 9 kelompok pangan</li><li>2. Mengkonversi berat bahan pangan ke dalam satuan gram</li><li>3. Menghitung kandungan energi dari masing-masing kelompok pangan. Perhitungan ini menggunakan rumus:</li></ol>	Badan Pangan Nasional

		<p>ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat suatu daerah/wilayah</p>	<p><math>Energi = \frac{\text{Berat bahan makanan (gr)}}{100 \text{ gram}} \times \text{Kandungan energi} \times \% \text{BDD}</math></p> <p>4. Menghitung total energi aktual dari seluruh kelompok pangan        5. Menghitung persentase kontribusi energi dari masing-masing kelompok pangan terhadap AKE dengan rumus :</p> $\% \text{AKE} = \frac{\text{Energi kelompok pangan}}{\text{AKE konsumsi}} \times 100\%$ <p>6. Menghitung skor AKE dengan rumus :  <math>\text{Skor aktual} = \% \text{AKE setiap kelompok pangan} \times \text{Bobot}</math></p> <p>7. Menghitung skor PPH        8. Menghitung total skor PPH</p> <p>Pada penghitungan konsumsi energi dan protein standar angka kecukupan berdasarkan <i>Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) XI Tahun 2018</i>, AKE = 2.100 kkal/kap/hari dan AKP = 57 gram/kap/hari.</p> <p>Skor PPH maksimal adalah 100. Semakin tinggi skor PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk</p>	
9	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	<p>Target konsumsi pangan per kapita per tahun disusun dan ditetapkan untuk mengetahui gambaran situasi konsumsi pangan dan gizi masyarakat di Kabupaten</p>	<p>Untuk mengukur tercapainya indikator kinerja penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun, maka dibuat dokumen analisis capaian PPH konsumsi</p> <p>Penyusunan dokumen analisis PPH konsumsi dilakukan dengan cara sebagai berikut :</p>	Bidang Ketahanan Pangan

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghitung nilai konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun</li> <li>2. Menghitung nilai tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun</li> <li>3. Menghitung Pola Pangan Harapan (PPH) tingkat konsumsi</li> <li>4. Membuat laporan analisis PPH konsumsi pangan</li> </ol>	
--	--	--	--

### Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Kinerja Indikator	Target	Penjelasan
Jumlah Pangan Pokok yang Tersedia atau Terdistribusi	55 Ton	Penetapan target berdasarkan hasil survey dan analisis petugas panel harga pangan serta pelaksanaan kegiatan gerakan pangan murah (GPM) sebagai langkah stabilisasi pasokan dan harga pangan
Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	12 Laporan	Penetapan target bersadarkan hasil pendataan harga pangan dan neraca bahan makanan petugas panel harga pangan tahun sebelumnya
Jumlah Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	1 Laporan	Penetapan target bersadarkan hasil pelaksanaan kegiatan gerakan pangan murah (GPM) sebagai langkah stabilisasi pasokan dan harga pangan
Jumlah ketersediaan cadangan pangan pemerintah	7 Ton	Penetapan target berdasarkan jumlah total stok yang disimpan di gudang Bulog

Jumlah cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota	3,8 Ton	Penetapan target berdasarkan jumlah total stok yang disimpan di gudang Bulog
Jumlah dokumen peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan	1 Dokumen	Penetapan target berdasarkan hasil penyusunan Buku Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Tahun 2023
Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen	Penetapan target berdasarkan hasil analisis dan penyusunan Buku Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Tahun 2023
Jumlah Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun	396.572,5 g/kapita/hari	Penetapan target berdasarkan tren Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) XI Tahun 2018 selama lima tahun terakhir yaitu (2020 -2024)
Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	Penetapan target berdasarkan laporan Bidang Ketahanan Pangan



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Jl. Mr. Muh. Yamin No. 177 Polewali, Kode Pos 91315

www.distanpan.polmankab.go.id

email : distanpan.polewalimandar@gmail.com

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SAMIO, SP.,M.Si**  
Jabatan : Kepala Bidang Peternakan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ANDI AFANDI RAHMAN,ST,M.Si**  
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian dan Pangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

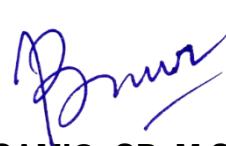
Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua  
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan

Pihak Pertama  
Kepala Bidang Peternakan,



ANDI AFANDI RAHMAN,ST,M.Si  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP. : 19780424 199803 1 003

  
SAMIO, SP.,M.Si  
Pangkat : Pembina  
NIP. : 19760101 200502 1 012

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**BIDANG PETERNAKAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	TARGET 2024
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Produksi Peternakan	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit menular dan zoonosis dalam 1 (satu) kabupaten/kota	<b>4.500 Ekor</b>	<b>4.500 Ekor</b>

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		
1.1	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 20,000,103	DAU
JUMLAH		<b>Rp 20,000,103</b>	

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua

**Kepala Dinas Pertanian dan Pangan**



**ANDI AFANDI RAHMAN, ST.,M.Si**

Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP. 19780424 199803 1 003

Pihak Pertama

**Kepala Bidang Peternakan**

**SAMIO, SP.,M.Si**

Pangkat : Pembina  
NIP. : 19760101 200502 1012

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA  
PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN DAN PANGAN  
KEPALA BIDANG PETERNAKAN  
KESWAN DAN KESMAVET  
PENJELASAN KINERJA  
TAHUN 2024**

**Penjelasan Kinerja 1**

**Uraian Sasaran**

Meningkatnya produksi peternakan dengan terlayani pelayanan kesehatan hewan pada sejumlah ternak sehingga tercapai penurunan jumlah wilayah kasus penyakit dengan melakukan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular dan zoonosis. Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah terlayani pelayanan kesehatan hewan, penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dan zoonosis sehingga mengalami penurunan kasus penyakit, mencegah berkurangnya ternak ruminansia betina produktif, meningkatkan populasi, produksi dan produktivitas ternak, menambah pendapatan masyarakat sebagai pelaku usaha peternakan.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Undang-Undang No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 41 tahun 2014. (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
2. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Serta Aturan Turunannya;
3. Peraturan Pemerintah Pertanian Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
4. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

**Indikator Kinerja**

Sasaran kinerja ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase peningkatan pelayanan Kesehatan hewan	Nilai persentase peningkatan layanan Keswan menunjukkan kapasitas penurunan jumlah kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) daerah Kabupaten	Jumlah layanan kasus penyakit yang terlayani kesehatan hewan tahun berjalan dibagi jumlah layanan kasus penyakit yang terlayani tahun lalu lalu dikali 100%	Hasil pendataan Petugas Lapang langsung UPTD-UPTD Peternakan
2	Persentase peningkatan pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Nilai persentase peningkatan layanan Kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet) menunjukkan kapasitas Layanan ketersediaan Pangan Asal Hewan (PAH) terhadap masyarakat terlayani dengan baik	Jumlah Layanan Kesmavet PAH tahun berjalan dibagi jumlah layanan PAH dibagi tahun lalu dikali 100%	Hasil pendataan Petugas Lapang langsung

#### Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Kinerja Indikator	Target	Penjelasan
Jumlah ternak yang terlayani kesehatannya	4.500 ekor	
Penurunan jumlah kasus penyakit hewan	15 %	
Penurunan Jumlah wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Peyakit Hewan menular dan Zoonosis	15 %	Penetapan target berdasarkan tren IKP selama lima tahun terakhir yaitu dan berdasarkan Rentra.



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Jl. Mr. Muh. Yamin No. 177 Polewali, Kode Pos 91315

www.distanpan.polmankab.go.id

email : distanpan.polewalimandar@gmail.com

---

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NAMRI IZZUDDIN, SP, MM**  
Jabatan : Kepala Bidang Perkebunan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ANDI AFANDI RAHMAN, ST, M.Si**  
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian dan Pangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 23 Februari 2024



Pihak Kedua  
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan,  
  
**ANDI AFANDI RAHMAN, ST, M.Si**  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP. 19780424 199803 1 003

Pihak Pertama  
Kepala Bidang Perkebunan  
  
  
**NAMRI IZZUDDIN, SP, MM**  
Pangkat : Penata Tk. I  
NIP. 19771021 200801 2 009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**BIDANG PERKEBUNAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	TARGET 2024
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pertanian	Luas panen tanaman perkebunan; Luas panen tanaman hortikultura	82.071 Ha	82.171 Ha
2	Meningkatnya kualitas pengendalian bencana pertanian	Luas lahan bencana pertanian yang tertangani	63 Ha	64 Ha
3	Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan	60 Dokumen	70 Dokumen

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	<b>Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</b> Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota (2024)	Rp 330,000,000	DAU
JUMLAH		<b>Rp 330,000,000</b>	

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua

**Kepala Dinas Pertanian dan Pangan**



**ANDI AFANDI RAHMAN, ST, M.Si**

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19780424 199803 1 003

Pihak Pertama

**Kepala Bidang Perkebunan**

**NAMRI IZZUDDIN, SP, MM**

Pangkat : Penata Tk. I

NIP. 19771021 200801 2 009

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA  
PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN DAN PANGAN  
PENJELASAN KINERJA  
TAHUN 2024**

**Penjelasan Kinerja 1**

Uraian Sasaran

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pertanian (perkebunan) yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah terpenuhinya sarana dan prasarana pertanian (perkebunan) yang memadai untuk meningkatkan produksi. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki dua indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Luas panen tanaman perkebunan; Luas panen tanaman hortikultura	Luas panen tanaman perkebunan menggambarkan bahwa kualitas sarana dan prasarana pertanian baik	Produksi = $\frac{\text{Luas TM} \times \text{Produktivitas}}{1.000}$	Hasil pengambilan data petugas statistik perkebunan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Kinerja Indikator	Target	Penjelasan
Luas panen tanaman perkebunan; Luas panen tanaman hortikultura	82.171 Ha	Penetapan target berdasarkan luas komoditi tanaman perkebunan selama empat tahun terakhir yaitu (2019 - 2023) dan capaian realisasi target tahun terakhir

## **Penjelasan Kinerja 2**

### **Uraian Sasaran**

Meningkatnya kualitas pengendalian bencana pertanian (perkebunan) dalam sasaran kinerja ini adalah kondisi dimana jumlah lahan yang dikendalikan meningkat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan jumlah produksi tanaman pertanian (perkebunan). Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman.

### **Indikator Kinerja**

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Luas lahan bencana pertanian (perkebunan) yang tertangani	Jumlah lahan pertanian (perkebunan) yang dikendalikan	Jumlah luas areal yang terserang dikurang jumlah luas areal yang tertangani	Hasil pengamatan OPT petugas perkebunan

### **Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Kinerja Indikator	Target	Penjelasan
Luas lahan bencana pertanian (perkebunan) yang tertangani	64 Ha	Penetapan target berdasarkan laporan hasil pengamatan OPT tanaman pertanian (perkebunan) selama empat tahun terakhir yaitu (2019 - 2023) dan capaian realisasi target tahun terakhir

## **Penjelasan Kinerja 3**

### **Uraian Sasaran**

Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah kondisi dimana terfasilitasinya kelompok usaha/pelaku usaha yang bergerak pada usaha-usaha terkait dengan komoditi perkebunan dan turunannya. Dalam hal ini melakukan pendampingan dan menfasilitasi kelompok usaha/pelaku usaha untuk kelengkapan dokumen usaha dan kelengkapan sarana prasarana pasca panen dan pengolahan hasil komoditi perkebunan. Standar pelayanan penerbitan SPP-IRT, Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang

Perizinan Usaha Perkebunan, Peraturan Badan POM Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Peraturan Badan POM Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan dan Produk pada Penyelenggaraan Berusaha Beresiko di Sektor Obat dan Makanan.

#### Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki satu indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan	Jumlah dokumen persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi izin usaha perkebunan yang diterbitkan	Jumlah kelompok/pelaku usaha yang difasilitasi mendapatkan izin usaha perkebunan x Jumlah dokumen persyaratan pengajuan izin usaha perkebunan	Hasil pendataan Petugas Perkebunan

#### Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Kinerja Indikator	Target	Penjelasan
Jumlah rekomendasi Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan	70 Dokumen	Penetapan target berdasarkan tren jumlah rekomendasi izin usaha perkebunan yang diterbitkan selama empat tahun terakhir yaitu (2019 - 2023) dan capaian realisasi target tahun terakhir



## PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Jl. Mr. Muh. Yamin No. 177 Madatte Polewali, Kode Pos 91315  
Telepon. 0428-21013 Faks. 0428-21013

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUHAMMAD YUNUS, SP, MP.**  
Jabatan : Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ANDI AFANDI RAHMAN, ST, M.Si.**  
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian dan Pangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

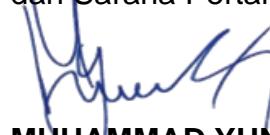
Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua  
Kepala Dinas Pertanian dan  
Pangan,

  
**ANDI AFANDI RAHMAN, ST, M.Si.**  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP : 19780424 199803 1 003

Pihak Pertama  
Kepala Bidang Prasarana  
dan Sarana Pertanian,

  
**MUHAMMAD YUNUS, SP, MP.**  
Pangkat : Pembina  
NIP : 19771116 200801 1 010

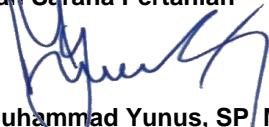
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	TARGET 2024
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	4 jenis	1 jenis
2	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pertanian	Luas panen tanaman pangan	89.862 Ha	94.960 Ha

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	<b>Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>		
1.1	Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 30,000,401	DAU
2	<b>Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</b>		
2.1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Rp 42,321,000	DAU
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 72,321,401</b>	

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua  
**Kepala Dinas Pertanian dan Pangan**  
  
ANDI AFANDI RAHMAN, ST, M.Si.  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP. : 19780424 199803 1 003

Pihak Pertama  
**Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian**  
  
Muhammad Yunus, SP, MP.  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP. : 19771116 200801 1 010

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA  
PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN DAN PANGAN  
PENJELASAN KINERJA  
TAHUN 2024**

**Penjelasan Kinerja 1**

**Uraian Sasaran**

Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah tercapainya produksi optimum dalam satuan lahan dan waktu tertentu dengan menggunakan sumber daya yang tersedia saat itu. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura.

**Indikator Kinerja**

Sasaran kinerja ini memiliki dua indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah jenis peta Prasarana Pertanian	Penyusunan peta prasarana pertanian dalam hal ini luas lahan baku sawah dapat memberikan data yang akurat dari perhitungan hasil produksi tanaman pangan dan hortikultura	Menghitung Jumlah Jenis Peta yang di susun dalam satu tahun  Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000	Bidang PSP Distanpan

**Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Kinerja Indikator	Target	Penjelasan
Jumlah jenis peta Prasarana Pertanian	1 jenis	Penetapan target berdasarkan luasan lahan baku sawah masing-masing kecamatan dan anggaran serta SDM yang tersedia

## **Penjelasan Kinerja 2**

### Uraian Sasaran

Meningkatnya Kualitas sarana dan prasarana pertanian yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah kondisi dimana terpenuhinya dan terpakainya seluruh sarana dan prasarana pertanian yang memadai untuk meningkatkan produksi. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman.

### Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki satu indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Luas panen tanaman pangan	Luas panen tanaman pangan menggambarkan bahwa kualitas sarana dan prasarana pertanian baik	Penyuluhan Pertanian Lapangan melakukan pencatatan luas panen tanaman pangan di Wilayah Kerja masing-masing	Hasil pendataan Petugas Lapang

### Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Kinerja Indikator	Target	Penjelasan
Luas panen tanaman pangan	94.960Ha	Penetapan target berdasarkan tren luas panen tanaman pangan selama empat tahun terakhir yaitu (2019 - 2023) dan capaian realisasi target tahun terakhir



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Jl. Mr. Muh. Yamin No. 177 Polewali, Kode Pos 91315

www.distanpan.polmankab.go.id

email : distanpan.polewalimandar@gmail.com

---

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Hj. DAHLIAH, SP.MP**  
Jabatan : Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

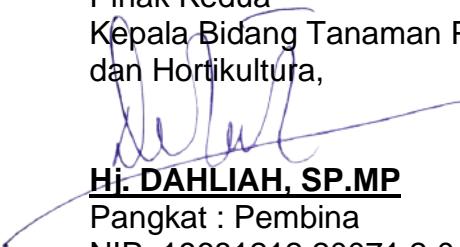
Nama : **ANDI AFANDI RAHMAN,ST,M.Si**  
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian dan Pangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua  
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan,  
  
**ANDI AFANDI RAHMAN,ST,M.Si**  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP. : 19780424 199803 1 003

Pihak Kedua  
Kepala Bidang Tanaman Pangan  
dan Hortikultura,  
  
**Hj. DAHLIAH, SP.MP**  
Pangkat : Pembina  
NIP. 19681212 200712 041

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	TARGET 2024
1	2	3	4	5
1	<b>Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pertanian</b>	Luas Panen Tanaman Pangan	89.862 Ha	94.960 Ha
2		Luas Panen Tanaman Perkebunan; Luas Panen Tanaman Hortikultura	82.171 Ha	82.271 Ha
2	<b>Meningkatnya kualitas pengendalian bencana pertanian</b>	Luas lahan bencana pertanian yang tertangani	64 Ha	65Ha

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	<b>Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</b>		
1.1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Rp 520,000,000	DAK FISIK
1.2	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Rp 31,999,791	DAU
2	<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</b>		
2.1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten / Kota	Rp 11,611,770	DAU
JUMLAH		<b>Rp 563,611,561</b>	

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua  
**Kepala Dinas Pertanian dan Pangan**



ANDI AFANDI RAHMAN, ST, M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP. 19780424 199803 1 003

Pihak Pertama  
**Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura;**

Hj. DAHLIAH, SP, MP

Pangkat : Pembina  
NIP. 19681212 200701 2 041

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA**  
**PERANGKAT DAERAH/BAGIAN/BIDANG/SUB BAGIAN/SEKSI HORTIKULTURA**  
**PENJELASAN KINERJA**  
**TAHUN 2024**

**Penjelasan Kinerja 1**

**Uraian Sasaran**

Meningkatnya Produksi Hortikultura Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah kondisi terpenuhinya produksi Hortikultura bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya produksi Hortikultura yang cukup, baik jumlah maupun mutunya. Aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Tujuan ke dua dalam pembangunan berkelanjutan (Meningkatnya Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman, Terlaksananya pengembangan Tanaman Hortikultura dan tersedianya laporan monev kegiatan)).

**Indikator Kinerja**

Sasaran kinerja ini memiliki Satuan indicator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	<i>Luas Panen Tanaman Hortikultura</i>	<i>Jumlah Luasan (Ha) yang ditanami tanaman Hortikultura</i>	<i>Jumlah Bibit/Benih yang dibutuhkan dengan luas areal pertanaman</i>	<i>Laporan SP</i>

**Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Kinerja Indikator	Target	Penjelasan
Luas Panen Tanaman Hortikultura	82.271 Ha	<i>Penetapan Target berdasarkan Dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun Anggaran 2024</i>

## Penjelasan Kinerja 2

### Uraian Sasaran

Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah kondisi terpenuhinya produksi Hortikultura bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya produksi Hortikultura yang cukup, baik jumlah maupun mutunya. Aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Tujuan ke dua dalam pembangunan berkelanjutan (Meningkatnya Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman, Terlaksananya pengembangan Tanaman Pangan dan tersedianya laporan monev kegiatan)).

### Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki Satuan indicator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	<i>Luas Panen Tanaman Pangan</i>	<i>Jumlah Luasan (Ha) yang ditanami tanaman Pangan</i>	<i>Jumlah Bibit/Benih yang dibutuhkan dengan luas areal pertanaman</i>	<i>Laporan SP</i>

## Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Kinerja Indikator	Target	Penjelasan
Luas Panen Tanaman Pangan	94.960 Ha	<i>Penetapan Target berdasarkan Dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun Anggaran 2024</i>

## **Penjelasan Kinerja 3**

### Uraian Sasaran

Meningkatnya Produksi Tanaman pangan dan Hortikultura Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah kondisi terpenuhinya produksi Tanaman pangan dan Hortikultura bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya produksi Hortikultura yang cukup, baik jumlah maupun mutunya. Aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Tujuan ke dua dalam pembangunan berkelanjutan (Meningkatnya Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman, Terlaksananya pengembangan Tanaman Hortikultura dan tersedianya laporan monev kegiatan)).

### Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki Satuan indicator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	<i>Luas lahan bencana pertanian yang tertangani</i>	<i>Jumlah Luasan (Ha) yang ditanami tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan</i>	<i>Jumlah luas serangan OPT tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang dikendalikan</i>	<i>Laporan SP</i>

#### Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Kinerja Indikator	Target	Penjelasan
<i>Luas lahan bencana pertanian yang tertangani</i>	<i>65 Ha</i>	<i>Penetapan Target berdasarkan Dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun Anggaran 2024</i>



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Jl. Mr. Muh. Yamin No. 177 Polewali, Kode Pos 91315

www.distanpan.polmankab.go.id

email : distanpan.polewalimandar@gmail.com

---

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Hj. DARWATI, S.Sos**  
Jabatan : Kasubag. Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **KAHARUDDIN, S.Pt, M.Si**  
Jabatan : Sekertaris Dinas Pertanian dan Pangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua

Sekertaris Dinas Pertanian dan  
Pangan

**KAHARUDDIN, S.Pt, M.Si**

Pangkat : Pembina

NIP. : 19681231 200212 1 069



Pihak Pertama

Kasubag. Umum dan  
Kepegawaian

**Hj. DARWATI, S.Sos**

Pangkat : Penata Tk. I

NIP. : 19661231 199011 2 014

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	TARGET 2024
1	2	3	4	5
1	<b>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan</b>	Presentase Administrasi Umum yang tersedia pada Kantor Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen
		Presentase Pengadaan baru Barang Milik Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen
		Presentase Tagihan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen
		Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen
		Presentase SPJ Fungsional	100 Persen	100 Persen

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 185,037,372	PAD
2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 19,863,450	PAD
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 1,960,130,843	PAD
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 128,953,280	PAD
5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 20,119,125,287	DAU
6	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 11,000,566	PAD
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 22,424,110,798</b>	

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua  
**Sekretaris,**



**KAHARUDDIN, S.Pt, M.Si**

Pangkat : Pembina

NIP . : 19681231 200212 1 069

Pihak Pertama  
**Kasubag Umum dan  
Kepegawaian**



**Hj. DARWATI, S.Sos**

Pangkat : Penata Tk 1 /III.d

NIP. 196612311990112014

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA  
PERANGKAT DAERAH SUB UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
PENJELASAN KINERJA  
TAHUN 2023**

**Penjelasan Kinerja 1**

**Uraian Sasaran**

Meningkatnya pelayanan administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah sebagai pelayanan Administrasi Kepegawaian dengan prinsip profesionalitas, efisiensi, akuntabilitas dan pelayanan publik. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang – Undang No. 5 Tahun 2014 tentang perwujudan pelayanan prima terkait dengan pengurusan administrasi kepegawaian (Absensi, Karis/Karsu, Karpeg, Cuti, SPTKG, Sumpah Janji) di lingkungan Pemerintah Daerah.

**Indikator Kinerja.**

Sasaran kinerja ini memiliki 4 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Umum yang merupakan salah satu peningkatan pemenuhan administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang tersusun dalam tahun berkenaan	Sekertariat Dinas Pertanian dan Pangan
2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah merupakan salah satu penunjang mobilitas segala urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	Sekertariat Dinas Pertanian dan Pangan
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah merupakan penyedia bahan pendukung dalam melaksanakan pelayanan di bidang Sekretariat sehingga pelayanan dapat dilakukan	Jumlah dokumen Pengiriman Surat Menyurat terfasilitasi, Jumlah dokumen jasa layanan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayarkan, dan Jumlah dokumen kontrak /SPK jasa Pelayanan umum Kantor	Sekertariat Dinas Pertanian dan Pangan

		sebagaimana mestinya.		
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah merupakan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Jabatan terpelihara	Sekertariat Dinas Pertanian dan Pangan

### Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Kinerja Indikator	Target	Penjelasan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Dokumen	Target 5 Dokumen yang menjadi target tahun 2023 berdasarkan dokumen yang harus disusun setiap tahunnya.
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	Target 100% Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Dinas Pertanian dan Pangan menjadi target 2023. Penentuan target dipengaruhi capaian pengelolaan keuangan Distanpan menunjukkan tren positif setiap tahunnya. Capaian 2021 (100%) serta 2022 (100%)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Dokumen	Target 3 Dokumen yang menjadi target tahun 2023 berdasarkan dokumen yang harus disusun setiap tahunnya.
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	Target 100% Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Dinas Pertanian dan Pangan menjadi target 2023.

### **Penjelasan Kinerja 2**

#### Uraian Sasaran

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah merupakan suatu konsep pemerintahan yang membangun serta menerapkan prinsip profesionalitas, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan pelayanan publik. Dasar hukum Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas pelaporan kinerja instansi pemerintah.

### Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki dua indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah merupakan salah satu penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun dalam tahun berkenaan	Sekertariat Dinas Pertanian dan Pangan
2	Persentase SPJ Fungsional	SPJ Fungsional merupakan salah satu dokumen pertanggungjawaban secara periodik yang merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan	Jumlah keseluruhan SPJ belanja-belanja pengeluaran berdasarkan kwitansi dan lampirannya pertanggung jawaban yang telah difungsionalkan terhadap keseluruhan SPJ yang difungsionalkan dan SPJ yang belum difungsionalkan kali 100	Sekertariat Dinas Pertanian dan Pangan

### Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Kinerja Indikator	Target	Penjelasan
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	Target 3 Dokumen yang menjadi target tahun 2023 berdasarkan dokumen yang harus disusun setiap tahunnya.
Persentase SPJ Fungsional	100 Persen	Target 100% SPJ Fungsional Dinas Pertanian dan Pangan

		menjadi target 2023. Penentuan target dipengaruhi capaian pengelolaan keuangan Distanpan menunjukkan tren positif setiap tahunnya. Capaian 2021 (100%) serta 2022 (100%)
--	--	--



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Jl. Mr. Muh. Yamin No. 177 Polewali, Kode Pos 91315

www.distanpan.polmankab.go.id

email : distanpan.polewalimandar@gmail.com

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ir. ANDI BASO, M.Si**  
Jabatan : Penyuluhan Pertanian Ahli Muda

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. ANDI ZAINAL, M.Adm.KP**  
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan SDM

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua  
Kepala Bidang Pengembangan SDM

Ir. ANDI ZAINAL, M.Adm.KP

Pangkat : Pembina

NIP. : 19670419 200604 1 009

Pihak Pertama  
Penyuluhan Pertanian Ahli Muda

Ir. ANDI BASO, M.Si

Pangkat : Pembina

NIP. : 19660815 200701 1 025

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**SUB KOORDINATOR PENINGKATAN SDM**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	TARGET 2024
1	2	3	4	5
1	<b>Meningkatnya Kompetensi Penyuluhan Pertanian</b>	Jumlah Penyuluhan Pertanian Ahli-Terampil	87 Orang	83 Orang
		Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan	16 Unit	16 Unit
		Jumlah Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kesejahteraannya (Pembayaran Insentif)	173 Orang	173 Orang

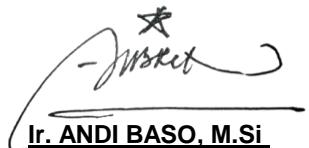
NO	KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>		
1.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Rp 40,000,123	DAU
JUMLAH		Rp 40,000,123	

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua  
**Kepala Bidang Pengembangan SDM**

  
**Ira Andi Zainal, M.Adm., KP**  
 Pangkat : Pembina  
 NIP. : 196704192006041009

Pihak Pertama  
**Penyuluhan Pertanian Ahli Muda**

  
**Ir. ANDI BASO, M.Si**  
 Pangkat : Pembina  
 NIP. : 19660815 200701 1 025

**PERJANJIAN KINERJA**  
**PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN**  
**DI KECAMATAN DAN DESA**  
**PENJELASAN KINERJA**  
**TAHUN 2024**

**Penjelasan Kinerja 1**

**Uraian Kinerja**

Meningkatnya Kapasitas Sumber daya manusia Penyuluhan Pertanian yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah kondisi terjadinya peningkatan Kapasitas Sumber daya manusia Penyuluhan Pertanian melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, sertifikasi profesi dan diklat lainnya berupa diklat fungsional khusus. Kunci keberhasilan pencapaian kinerja adalah peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pertanian yang terdapat dalam suatu organisasi. Peningkatan kapasitas tersebut diarahkan pada peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk membentuk keperibadian yang mandiri bagi SDM pertanian khususnya penyuluhan pertanian. Pengembangan SDM tersebut ditujukan untuk memberikan motivasi dan penghargaan agar mampu meningkatkan kinerjanya dan menunjang tugas pokok yaitu melakukan kegiatan persiapan dan pelaksanaan penyuluhan.

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja antara lain Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K) yang dalam hal ini mengatur tentang sistem penyuluhan secara holistik dan komprehensif dalam suatu pengaturan yang terpadu, serasi antara penyuluhan yang diselenggarakan oleh kelembagaan penyuluhan pemerintah, kelembagaan penyuluhan swasta dan kelembagaan swadaya kepada pelaku utama dan Pelaku usaha.

**Indikator Kinerja**

Sasaran kinerja ini memiliki tiga indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah Penyuluhan Ahli – Terampil	Jumlah Penyuluhan Pertanian Yang Telah Mengikuti Diklat Dasar Fungsional Terampil Dan Diklat Dasar Ahli	Dalam Mengukur Peningkatan Sumber Daya manusia Penyuluhan Pertanian Menggunakan Skala Metric Seperti responsivitas, responsibilitas dan kualitas pelayanan	Bagian Kepegawaian dan bidang pengembangan sdm Dinas Pertanian Dan Pangan Kab. Polman
2	Jumlah Kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah Penyuluhan yang mengikuti diklat teknis dan Penyusunan Programa bagi aparatur yang tersebar di 16 Kecamatan(BPP)	Dalam Mengukur kapasitas penyuluhan pertanian menggunakan skala metric seperti frekuensi pelatihan dan kemampuan dalam mengaplikasikan teknologi	Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Dan Bidang Pengembangan SDM Dinas Pertanian Dan pangan Kab. Polman

3	Jumlah Penyuluhan Pertanian Di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kesejahteraannya (Pembayaran Insentif)	Jumlah Penyuluhan PTT yang dibayarkan insentifnya yang tersebar di 16 Kecamatan (BPP)	Dalam Mengukur kinerja penyuluhan pertanian yaitu dengan melihat produktivitas kinerja	Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan dan Bidang Pengembangan SDM Dinas pertanian dan pangan Kab. Polman
---	--	---	--	---

#### Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Kinerja Indikator	Target	Penjelasan
Jumlah Penyuluhan Ahli – Terampil	- 54 orang Penyuluhan Ahli - 29 orang Penyuluhan Terampil	Penetapan target berdasarkan kondisi jumlah penyuluhan yang aktif, tidak termasuk yang telah memasuki purnabakti / meninggal Dunia.
Jumlah Kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	- 50 Orang Penyusunan Programa Tingkat Kabupaten (DAU)  - Penyusunan Programa Tingkat Kecamatan, 28 Orang x 16 BPP = 448 Orang (DAU)	Penetapan target berdasarkan jumlah anggaran yang disediakan dan jenis pelatihan/ Penyusunan Programa dipadukan dengan aspirasi petani dengan pemerintah.
Jumlah Penyuluhan Pertanian Di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kesejahteraannya (Pembayaran Insentif)	Jumlah Penyuluhan PTT yang dibayarkan insentifnya yang tersebar di 16 Kecamatan (BPP)	Penetapan target berdasarkan jumlah anggaran yang disediakan ( DAU )



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Jl. Mr. Muh. Yamin No. 177 Polewali, Kode Pos 91315

www.distanpan.polmankab.go.id

email : distanpan.polewalimandar@gmail.com

---

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **CINDAR DEWI, S.Pt**  
Jabatan : Sub. Koordinator Kelembagaan Petani

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. ANDI ZAINAL, M.Adm.KP**  
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan SDM

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua  
Kepala Bidang Pengembangan SDM,

Pihak Pertama  
Sub. Koordinator Kelembagaan  
Petani

  
**Ir. ANDI ZAINAL, M.Adm.KP**

Pangkat : Pembina

NIP. : 19670419 200604 1 009

  
**CINDAR DEWI, S.Pt**

Pangkat : Penata Tk.I

NIP. : 19790923 200604 2 014

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**SUB KOORDINATOR PENINGKATAN SDM**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022	TARGET 2023
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kompetensi Penyuluhan Pertanian	Jumlah Penyuluhan Pertanian Ahli-Terampil  Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya  Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	92 Orang  9 Unit  1 Unit	120 Orang  9 Unit  2 Unit

NO	KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>		
1.1	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Rp 2,269,490,700	DAU, DAK FISIK
1.2	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/ Kota	Rp 1,648,681,600	DAU
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 3,918,172,300</b>	

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua  
**Kepala Bidang Pengembangan SDM**



Pangkat : Pembina  
NIP . : 19670419 200604 1 009

Pihak Pertama  
**Sub. Koordinator Kelembagaan Petani**

**CINDAR DEWI, S.Pt**

Pangkat : Penata Tk. I  
NIP. : 19790923 200604 2 014

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA  
PERANGKAT DAERAH SUB KOORDINATOR  
KELEMBAGAAN PETANI  
TAHUN 2024**

**Penjelasan Kinerja 1**

**Uraian Sasaran**

Meningkatnya Kompetensi Penyuluhan Pertanian melalui Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani serta Peningkatan Jumlah Badan Usaha Milik Petani. Dasar hukum dalam peningkatan kapasitas kelembagaan petani tertuang pada Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Nomor 90/Per/SM.820/J/12/12 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/RC.120/12/2017 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan atas peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik.

Sedangkan Dasar Hukum pada kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani tertulis pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 50/Permentan/OT.140/5/2013 Tentang Pedoman Sekolah Lapangan Pertanian dimana dalam pengembangan dan penerapan model pelatihan Sekolah Lapangan dilakukan secara sistematis, dan terukur.

**Indikator Kinerja**

Sasaran kinerja ini memiliki indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	<i>Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Petani</i>	<i>Melalui kegiatan pendampingan penyuluhan meningkatkan jumlah kapasitas kelembagaan petani</i>	<i>Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya sesuai dengan pemenuhan penilaian kriteria</i>	<i>Bidang Pengembangan SDM</i>

2	<p><i>Peningkatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani</i></p>	<p><i>Melalui kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani dapat meningkatkan SDM Petani</i></p>	<p><i>Jumlah Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani yang dilaksanakan pada Tahun Berjalan</i></p>	
---	--	---	---	--

#### Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

<b>Kinerja Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Penjelasan</b>
Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	9 Unit	<i>Penetapan target berdasarkan usulan yang telah disetujui dan Kementerian Pertanian Republik Indonesia</i>
Jumlah Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	2 Unit	<i>Penetapan target berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja setelah di Recofusing pada Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar</i>



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Jl. Mr. Muh. Yamin No. 177 Polewali, Kode Pos 91315

www.distanpan.polmankab.go.id

email : distanpan.polewalimandar@gmail.com

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Hj. DIANA. R, SP, MP**  
Jabatan : Sub. Koordinator Sarana dan Perizinan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. ANDI ZAINAL, M.Adm.KP**  
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan SDM

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua  
Kepala Bidang Pengembangan SDM,



Ir. ANDI ZAINAL, M.Adm.KP

Pangkat : Pembina

NIP. : 19670419 200604 1 009

Pihak Pertama  
Sub. Koordinator Sarana dan Perizinan,



Hj. DIANA. R, SP, MP

Pangkat : Pembina

NIP. : 19680418 200212 2 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**SUB KOORDINATOR SARANA DAN PERIZINAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	TARGET 2024
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kompetensi Penyuluhan Pertanian	Jumlah Penyuluhan Pertanian Ahli-Terampil  Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	120 Orang  9 Paket	71;38 Orang  2 Paket

NO	KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		
1.1	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Rp 180,004,368	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum
	JUMLAH	Rp 180,004,368	

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua  
**KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SDM**



Ir. ANDI ZAINAL, M.Adm.KP

Pangkat : Pembina

NIP . : 19670419 200604 1 009

Pihak Pertama  
**SUB. KOORDINATOR SARANA DAN PERIZINAN,**

Hi. DIANA. R, SP, MP

Pangkat : Pembina

NIP. : 19680418 200212 2 003

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA  
PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN DAN PANGAN  
SUB KOORDINATOR SARANA DAN PERIZINAN  
PENJELASAN KINERJA  
TAHUN 2024**

**Penjelasan Kinerja 1**

**Uraian Sasaran**

Terlaksananya Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana Penyuluhan Pertanian yang dimaksud adalah Diharapkan dengan adanya Sarana Penunjang dan Fasilitas Sarana BPP akan meningkatkan dan menunjang kinerja dari Penyuluhan dalam hal pelayanan publik dan dapat Memenuhi kebutuhan minimal sarana penyuluhan pertanian yang ada di BPP serta dapat memperlancar Program Kegiatan yang ada di Kabupaten, Provinsi dan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pengutan Fungsi Penyuluhan Pertanian;

**Indikator Kinerja**

Sasaran kinerja ini memiliki satu indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Relevansi</b>	<b>Formulasi</b>	<b>Sumber Data</b>
1.	Terlaksananya Pengadaan Sarana Penyuluhan Pertanian	1. Memenuhi kebutuhan minimal Sarana Penyuluhan Pertanian yang ada di BPP; 2. Mengoptimalkan Pemanfaatan sarana penyuluhan pertanian;	Menghitung Jumlah Jenis Sarana Penyuluhan Pertanian dalam (satu) Tahun	Bidang Pengembangan SDM

### Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

<b>Kinerja Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Penjelasan</b>
Jumlah Jenis Sarana Penyuluhan Pertanian	2 Jenis	Penetapan target berdasarkan kebutuhan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian yang ada di BPP



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Jl. Mr. Muh. Yamin No. 177 Polewali, Kode Pos 91315

www.distanpan.polmankab.go.id

email : distanpan.polewalimandar@gmail.com

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YUNAEDI, SP**  
Jabatan : Kepala UPTD Balai Benih Padi dan Palawija

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ANDI AFANDI RAHMAN, ST, M.Si**  
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian dan Pangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua  
Kepala Dinas Pertanian  
Dan Pangan,


**ANDI AFANDI RAHMAN, ST, M.Si**  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP. : 19780424 199803 1 003

Pihak Pertama  
Kepala UPTD Balai Benih Padi  
Dan Palawija,


**YUNAEDI, SP**  
Pangkat : Penata  
NIP. : 19750616 200701 1 029

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**UPTD BALAI BENIH PADI DAN PALAWIJA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target 2024
1	Meningkatnya Izin Usaha Pertanian	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan  Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	3 Kelompok Tani Penangkar Mandiri Benih	80 Dokumen  1 Laporan

NO	KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota		
1.1	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Rp 40,000,256	DAU
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 40,000,256</b>	

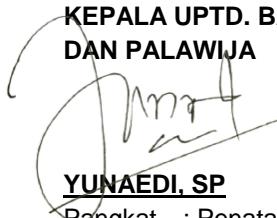
Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua  
**Kepala Dinas Pertanian dan Pangan**



**ANDI AFANDI RAHMAN, ST.,M. Si**  
Pangkat : Pembina Tk. I/IV b  
NIP. 19780424 199803 1 003

Pihak Pertama,  
**KEPALA UPTD. BALAI BENIH PADI  
DAN PALAWIJA**



**YUNAEDI, SP**  
Pangkat : Penata  
NIP : 19750616 200701 1 029

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA**  
**PERANGKAT DAERAH UPTD BALAI BENIH PADI DAN PALAWIJA**  
**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**  
**PENJELASAN KINERJA**  
**TAHUN 2024**

**Penjelasan Kinerja 1**

Uraian Sasaran

Meningkatnya izin usaha pertanian yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah kondisi dimana terbinanya kelompok pelaku usaha pertanian. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Pertanian.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki dua indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan	Izin Usaha Pertanian merupakan syarat kegiatan usaha Pertanian	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan dalam 1 periode	Admin Pengelola Rekomendasi
2	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang dibina dan diawasi	Persentase Kelompok Usaha Tani yang memiliki Izin Usaha Pertanian	Jumlah Pembinaan Kelompok Usaha Pertanian	Hasil Pembinaan Kelompok

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Kinerja Indikator	Target	Penjelasan
Jumlah rekomendasi Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan	70 Dokumen	Penetapan target berdasarkan DPA tahun 2024
Jumlah Izin Usaha Pertanian yang dibina dan diawasi	1 Laporan	Penetapan target berdasarkan data dan hasil pembinaan kelompok pelaku usaha pertanian yang dikembangkan selama lima tahun terakhir yaitu (2018 -2022)



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**

Jl. Mr. Muh. Yamin No. 177 Polewali, Kode Pos 91315  
www.distanpan.polmankab.go.id  
email : distanpan.polewalimandar@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANDI WIRAWATI PIRZAN, S.Pt, M.Si**  
Jabatan : Kasubag. TU UPTD Balai Pembibitan dan Hortikultura

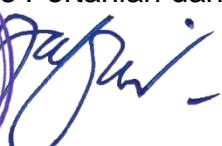
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ANDI AFANDI RAHMAN, ST, M.Si**  
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian dan Pangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua  
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan,  
  
**ANDI AFANDI RAHMAN, ST, M.Si**  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP. : 19780424 199803 1 003

Pihak Pertama  
Kasubag. TU UPTD Balai Pembibitan  
dan Hortikultura  
  
**ANDI WIRAWATI PIRZAN, S.Pt, M.Si**  
Pangkat : Penata  
NIP. : 19830320 200604 2 020

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**UPTD BALAI PEMBIBITAN DAN HORTIKULTURA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	TARGET 2024
1	2	3	4	5
	<b>Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pertanian</b>	Luas Panen Tanaman Perkebunan; Luas Panen Tanaman Hortikultura  Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	82.171 Ha  3 VUB	82.271 Ha  3 Laporan

NO	KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota</b>		
1.1	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/ Tanaman	Rp 30,049,580	DAU
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 30,049,580</b>	

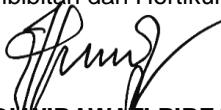
Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua  
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan



ANDI AFANDI RAHMAN, ST, M.Si  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP. 19780424 199803 1 003

Pihak Pertama  
Kasubag. TU UPTD Balai Pembibitan  
Pembibitan dan Hortikultura,

  
ANDINI WIRAWATI PIRZAN, S.Pt, M.Si  
 Pangkat : Penata  
 NIP. : 19830320 200604 2 020

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA**  
**PERANGKAT DAERAH UPTD BALAI PEMBIBITAN DAN HORTIKULTURA**  
**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**  
**PENJELASAN KINERJA**  
**TAHUN 2024**

**Penjelasan Kinerja 1**

Uraian Sasaran

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pertanian yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah kondisi dimana tercapainya produksi bibit tanaman buah-buahan yang dikembangkan dengan meningkatkan mutu tanaman tersebut. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman, Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 42/Kpts/SR.130/D/10/2019 dan tujuan kedua dalam pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals - SDGs).

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki dua indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Luas Panen Tanaman Perkebunan; Luas Panen Tanaman Hortikultura	Luas panen dan produksi yang dipanen habis/dibongkar selama satu bulan, triwulan dan satu tahun	Jumlah luas panen habis (LPH) ditambah luas panen belum habis (LPBH) periode (triwulan/bulan)	Hasil pendataan Petugas Lapang
2	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	Nilai persentase produksi bibit tanaman yang dikembangkan menunjukkan produksi bibit tanaman	Jumlah hasil perbanyak tanaman buah-buahan	Hasil perbanyak tanaman oleh petugas

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Kinerja Indikator	Target	Penjelasan
Luas Panen Tanaman Perkebunan; Luas Panen Tanaman Hortikultura	82.171 HA	Penetapan target berdasarkan tren produksi tanaman perkebunan dan tanaman hortikultura selama lima tahun terakhir yaitu (2019 -2023) dan capaian realisasi target tahun terakhir
Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	3 Laporan	Penetapan target berdasarkan tren tanaman yang dikembangkan selama lima tahun terakhir yaitu (2019 -2023)



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**

Jl. Mr. Muh. Yamin No. 177 Polewali, KodePos 91315  
www.distanpan.polmankab.go.id  
email : distanpan.polewalimandar@gmail.com

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Ir. IRDAWATI RAKHIM**  
Jabatan : Kepala UPTD Inseminasi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ANDI AFANDI RAHMAN, ST,M.Si**  
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian dan Pangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan



ANDI AFANDI RAHMAN, ST, M.Si  
Pangkat : Pembina Tk.I  
NIP. : 19780424 199803 1 003

Pihak Pertama

Kepala UPTD Inseminasi



**Ir. IRDAWATI RAKHIM**

Pangkat : Penata Tk. I  
NIP. : 19670923 200003 2 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**UPTD INSEMINASI**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	TARGET 2024
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pertanian	Jumlah Kelahiran hasil Inseminasi Buatan  Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1031 ekor  1 Laporan	1.886 Ekor  1 Laporan

NO	KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota		
1.1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Rp 57,320,181	DAU
JUMLAH		Rp 57,320,181	

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua

**Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan**



**ANDI AFANDI RAHMAN, ST, M.Si**

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19780424 199803 1 003

Pihak Pertama

**Kepala UPTD Inseminasi**

**Ir. IRDAWATI RAKHIM**

Pangkat : Penata Tk.I

NIP. : 196470923 200003 2 004

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA  
UPTD INSEMINASI  
PENJELASAN KINERJA  
TAHUN 2024**

**Penjelasan Kinerja**

**Uraian Sasaran**

Yang dimaksud dengan Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pertanian adalah : Meningkatnya Populasi dan Mutu Genetik ternak khususnya ternak Sapi sesuai tugas pokok UPTD Inseminasi, Dengan Teknologi IB selain dapat meningkatkan populasi/angka kelahiran ternak. terutama untuk meningkatkan kualitas/mutu genetik antara lain, jenis yang lebih unggul dan Postur tubuh/ Berat Badan (BB) yang lebih besar dari ternak lokal, sehingga menghasilkan jumlah daging yang lebih besar pula. Dengan demikian dapat lebih meningkatkan kesejahteraan peternak dan ketersediaan protein hewani, sebagaimana tujuan dari Pembangunan Peternakan di Indonesia yaitu ditujukan kepada upaya peningkatan Produksi Peternakan yang sekaligus untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak, memenuhi kebutuhan pangan dan gizi, menciptakan kesempatan kerja, mendorong pengembangan agroindustri dan agrobisnis. .

**Indikator Kinerja**

Sasaran kinerja ini memiliki 2 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah Kelahiran IB	Nilai jumlah kelahiran IB menunjukkan capaian jumlah pertambahan populasi dengan adanya kelahiran IB	Jumlah kelahiran yang dihasilkan oleh pelaksanaan Inseminasi Buatan/tahun	Laporan Kelahiran IB inseminator selama tahun 2023
2	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman Skala Kecil (Jumlah Layanan IB)	Nilai jumlah Pelaksanaan IB,menunjukkan capaian jumlah Layanan Inseminasi Buatan yang dilaksanakan oleh inseminator	Jumlah layanan IB yang dilaksanakan pada Akseptor (sapi induk siap IB) yang mengalami Berahi.	Laporan Pelayanan IB Inseminator selama tahun 2023

## **Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

<b>Kinerja Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Penjelasan</b>
Jumlah Kelahiran Hasil IB	1.886 ekor	<i>Penetapan target berdasarkan peluang jumlah kelahiran dari jumlah pelaksanaan IB tahun 2023 yaitu sebanyak 3.766 ekor, dan berdasarkan tren capaian kelahiran th. 2022 yaitu 1595 ekor dan th.2023 yaitu 1031 ekor</i>
Jumlah Layanan IB	4200	<i>Penetapan target berdasarkan peluang pelaksanaan IB dari jumlah target akseptor tahun 2024 yaitu 5795 ekor, dan berdasarkan tren capaian Jumlah pelaksanaan IB th. 2022 yaitu 4602 dosis dan tahun 2023 yaitu 3.766 dosis</i>



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Jl. Mr. Muh. Yamin No. 177 Polewali, KodePos 91315

www.distanpan.polmankab.go.id

email : distanpan.polewalimandar@gmail.com

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **MUH NUR SAID,SP,M.Si**

Jabatan : Kepala UPTD RPH DAN PASAR HEWAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ANDI AFANDI RAHMAN, ST,M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Pertaniand dan Pangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 23 Februari 2024



Pihak Kedua  
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan  
**ANDI AFANDI RAHMAN, ST, M.Si**  
Pangkat : Pembina Tk.I  
NIP. : 19780424 199803 1 003

Pihak Pertama  
Kepala UPTD RPH dan Pasar Hewan

  
**MUH NUR SAID,SP,M.Si**  
Pangkat : Pembina  
NIP. : 19740704 200212 1 009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**UPTD RUMAH POTONG HEWAN DAN PASAR HEWAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	TARGET 2024
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha Pertanian dan Peternakan	Jumlah Pengusaha Pertanian yang di Awasi  Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yan di Awasi	1 Jenis  1 Jenis	5 Pengusaaha  1 Laporan

NO	KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan,Rumah Potong Hewan		
1.1	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Rp 20,000,182	DAU
JUMLAH		Rp 20,000,182	

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua  
**Kepala Dinas Pertanian dan Pangan**



**ANDI AFANDI RAHMAN, ST, M.Si**

Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP. : 19780424 199803 1 003

Pihak Pertama  
**Kepala UPTD RPH dan Pasar Hewan**

**MUH NUR SAID,SP,M.Si**

Pangkat : Pembina  
NIP. : 19740704 200212 1 009

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA  
PERANGKAT DAERAH UPTD KESEHATAN HEWAN  
PENJELASAN KINERJA  
TAHUN 2024**

**Penjelasan Kinerja 1**

**Uraian Sasaran**

Meningkatnya produksi peternakan yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah meningkatkan Jumlah izin usaha rumah potong hewan yang diawasi pemotongannya secara ASUH (Aman Sehat Utuh dan Halal) di kabupaten Polewali Mandar. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

**Indikator Kinerja**

Sasaran kinerja ini memiliki indikator kinerja yang akan menggambarkan secalangsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	<i>Persentase Peningkatan Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi</i>	<i>Nilai Persentase Jumlah Izin usaha Rumah Potong Hewan yang Diawsi menunjukkan Kapasitas layanan terhadap izin usaha RPH yang diawasi Tersebut</i>	<i>Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawsi Tahun Berjalan dibagi tahun lalu kali seratus Persen</i>	<i>UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan</i>

### Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Kinerja Indikator	Target	Penjelasan
<i>Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi</i>	<i>1 Laporan</i>	Penetapan target berdasarkan trend penurunan kasus selama lima tahun terakhir yaitu (2018 -2023) dan capaian realisasi target tahun terakhir
<i>Terawasinya jumlah hewan (sapi/kerbau) yang dipotong dan beredar di masyarakat veteriner</i>	<i>1 jenis</i>	Penetapan target berdasarkan trend penurunan kasus selama lima tahun terakhir yaitu (2018 -2023) dan capaian realisasi target tahun terakhir



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Jl. Mr. Muh. Yamin No. 177 Polewali, Kode Pos 91315

www.distanpan.polmankab.go.id

email : distanpan.polewalimandar@gmail.com

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AHMAD SY, SP**  
Jabatan : Kepala UPTD Breeding Centre

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ANDI AFANDI RAHMAN, ST, M.Si**  
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian dan Pangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

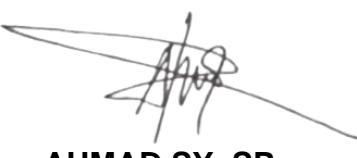
Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua  
Kepala Dinas Pertanian dan  
Pangan,

  
**ANDI AFANDI RAHMAN, ST, M.Si**  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP. : 19780424 199803 1 003

Pihak Pertama  
Kepala UPTD Breeding Centre,

  
**AHMAD SY, SP**  
Pangkat : Penata, TK. I, III/d  
NIP : 197401032007011020

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**UPTD BREEDING CENTRE**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	TARGET 2024
1	<b>Meningkatnya Produksi Peternakan</b>	Jumlah unit usaha hewan yang memenuhi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	1 Dokumen	1 Dokumen
		Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan	1 Laporan

NO	KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	<b>Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehataan Masyarakat Veteriner</b>		
1.1	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumput/ Galur Ternak	Rp 30,000,805	DAU
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 30,000,805</b>	

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua  
**Kepala Dinas Pertanian dan Pangan**  
  
Andi Afandi Rahman, ST, M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP. 19780424 199803 1 003

Pihak Pertama  
**Kepala UPTD Breeding Centre,**



**AHMAD SY, SP**  
Pangkat : Penata, TK. I, III/d  
NIP : 197401032007011020

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA  
PERANGKAT DAERAH UPTD BREEDING CENTRE  
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN  
PENJELASAN KINERJA  
TAHUN 2023**

**Penjelasan Kinerja 1**

Uraian Sasaran

Meningkatnya Produksi Peternakan yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah kondisi dimana tercapainya produksi Bibit ternak sapi yang dikembangkan untuk mendukung peningkatan produksi peternakan. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman/Hewan , Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 42/Kpts/SR.130/D/10/2019 dan tujuan kedua dalam pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals - SDGs).

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki dua indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah populasi dan kelahiran dan peningkatan kesehatan dan veretener	Jumlah kelahiran dan pertambahan populasi ternak dan teknis kesehatan vertenar	Jumlah ternak yang dikembangkan dan cara mengambangannya	Hasil laporan recorder Breeding Centre
2	Jumlah Unit Usaha SDG Hewan dan Produk Hewan yang dikembangkan	Nilai persentase produksi bibit Ternak yang dikembangkan menunjukkan hasil populasi ternak	Jumlah hasil Kelahiran ternak	Hasil laporan recorder Breeding Centre

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Kinerja Indikator	Target	Penjelasan
Jumlah unit usaha hewan yang memenuhi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	1 Dokumen	Penetapan target berdasarkan tren produksi Ternak berdasarkan kebuntingan lima tahun terakhir yaitu (2018 -2022) dan capaian realisasi target tahun terakhir
Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan	Penetapan target berdasarkan tren Ternak yang dikembangkan selama lima tahun terakhir yaitu (2018 -2022)



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Jl. Mr. Muh. Yamin No. 177 Polewali, Kode Pos 91315

www.distanpan.polmankab.go.id

email : distanpan.polewalimandar@gmail.com

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drh. ISNANIAH BAGENDA  
Jabatan : Kepala UPTD Kesehatan Hewan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ANDI AFANDI RAHMAN,ST,M.SI  
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian Dan Pangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua  
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan

Pihak Pertama  
Kepala UPTD Kesehatan Hewan,



ANDI AFANDI RAHMAN,ST,M.SI  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP. : 19780424 199803 1 003

Drh.ISNANIAH BAGENDA  
Pangkat : Pembina  
NIP. : 19790515 200604 2 019

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**UPTD KESEHATAN HEWAN**  
**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**  
**KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	TARGET 2024
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Produksi Peternakan	Jumlah jenis kasus penyakit hewan yang ditangani  Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan	14 jenis  1 Laporan	14 jenis  1 Laporan

NO	SUB. KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		
1.1	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Rp 14,274,293	APBD
JUMLAH		<b>Rp 14,274,293</b>	

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua  
**Kepala Dinas Pertanian dan Pangan**  
  
Andi Afandi Nahman, ST, M.Si  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP. : 19780424 199803 1 003

Pihak Pertama  
**Kepala UPTD Kesehatan Hewan**  
  
Drh. Isnaniah Bagenda  
Pangkat : Pembina  
NIP. : 19790515 200604 2 019

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA  
PERANGKAT DAERAH UPTD KESEHATAN HEWAN  
PENJELASAN KINERJA  
TAHUN 2024**

**Penjelasan Kinerja 1**

**Uraian Sasaran**

Meningkatnya produksi peternakan yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah meningkatkan produksi ternak dengan meningkatkan status kesehatan hewan melalui layanan kesehatan hewan sehingga mampu mendorong pertambahan populasi ternak. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

**Indikator Kinerja**

Sasaran kinerja ini memiliki indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	<i>Jumlah jenis kasus penyakit hewan yang ditangani</i>	<i>Jumlah kasus penyakit hewan yang ditangani dalam satu tahun berhubungan dengan jumlah ternak yang ditingkatkan status kesehatannya</i>	<i>14 Jenis penyakit hewan diperoleh dari hasil surveilans dan investigasi penyakit hewan menular dan layanan kesehatan hewan</i>	<i>UPTD Kesehatan Hewan</i>

## Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Kinerja Indikator	Target	Penjelasan
Jumlah jenis kasus penyakit hewan yang ditangani Jumlah jenis kasus penyakit hewan yang ditangani	<i>14 Jenis Penyakit Hewan</i>	Penetapan target berdasarkan trend penurunan kasus selama lima tahun terakhir yaitu (2019 -2024) dan capaian realisasi target tahun terakhir



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**

Jl. Mr. Muh. Yamin No. 177 Polewali, Kode Pos 91315  
www.distanpan.polmankab.go.id  
email : distanpan.polewalimandar@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ABD. JAMAL, SP, M.AdM, KP**  
Jabatan : Kepala UPTD Pengolahan Hasil Perkebunan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ANDI AFANDI RAHMAN, ST,**  
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian dan Pangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Pihak Kedua  
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan



**ANDI AFANDI RAHMAN, ST, M.Si**  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP. : 19780424 199803 1 003

Polewali, 23 Februari 2024  
Pihak Pertama  
Kepala UPTD Pengolahan Hasil Perkebunan

  
**ABD. JAMAL, SP, M.AdM, KP**  
Pangkat : Pembina  
NIP. : 19680614 200701 1

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**UPTD BALAI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target 2024
1	<b>Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan</b>	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan	13 Dokumen	70 Dokumen
		Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen
		Jumlah Pelatihan Pengolahan Hasil Kelompok Usaha Perkebunan	1 Poktan	1 Poktan

NO	KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	<b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		
1.1	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Perkebunan	Rp 14,200,000	DAU
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 14,200,000</b>	

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua  
**Kepala Dinas Pertanian dan Pangan**  
  
ANDI AFANDI RAHMAN,ST, M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP. : 19780424 199803 1 003

Pihak Pertama,  
**KEPALA UPTD. BALAI PENGOLAHAN HASIL**

  
ABD JAMAL, SP, M.Adm.KP

Pangkat : Pembina  
NIP : 19680614 200701 1 032

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA**  
**PERANGKAT DAERAH UPTD BALAI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN**  
**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**  
**PENJELASAN KINERJA**  
**TAHUN 2024**

**Penjelasan Kinerja 1**

**Uraian Sasaran**

Kinerja UPTD Balai Pengolahan Hasil Perkebunan dalam memberikan penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian sudah cukup baik, karena karakteristik good governance seperti rule of law (kerangka hukum) dapat dilaksanakan secara adil tanpa pandang bulu, dan memiliki payung hukum yang jelas. Transparancy untuk keterbukaan informasi sudah sesuai standart operasional pekerjaan, artinya semua informasi yang menyangkut pemberian penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian telah diinformasikan kepada masyarakat dengan cara melaksanakan bimbingan teknis kepada masyarakat khususnya kelompok tani yang bergerak dalam bidang pengolahan hasil perkebunan. Responsiveness terhadap kebutuhan dan kondisi dalam memberikan pelayanan sudah terlaksana ketika ada keluhan maupun tanggapan masyarakat tentang pelayanan aparat. *Effectiveness* dan *Efficiency* dengan menggunakan sumber daya yang tersedia sebaik mungkin walaupun ada beberapa sarana dan prasarana yang masih kurang dalam menjalankan pekerjaan. Dan Accountability atau setiap keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan bisa dipertanggung jawabkan kepada masyarakat

**Indikator Kinerja**

Sasaran kinerja ini memiliki satu indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian.	Persentase konsultasi masyarakat terhadap pengajuan permohonan perizinan Usaha Pertanian	$\frac{\sum \text{Konsultasi masyarakat yang terlayani}}{\sum \text{Permohonan konsultasi yang diterima}} \times 100\%$	UPTD Balai Pengolahan Hasil Perkebunan

**Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Kinerja Indikator	Target	Penjelasan
Jumlah Jenis Laporan	1 Laporan	Penetapan target berdasarkan target selama satu tahun yaitu 2024

**RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2024**  
**SKPD DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**

**Sub Kegiatan : Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan**

No	Tahapan Kegiatan	Output	Bulan											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PERSIAPAN - Pengusulan Enumerator Petugas Harga Pangan ke Provinsi	SK Enumerator												
2	PELAKSANAAN - Pembuatan format wawancara responden harga pangan - Pendataaan harga pangan, pengiriman data, pengolahan dan analisis data - Kegiatan Distribusi Pangan bersama Bulog	Format Harga Pangan Data Harga Pangan Distribusi Pangan												
3	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN - Monitoring dan Pengawasan Harga Pangan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Laporan Harga Pangan - Pembuatan Laporan Harga Pangan	Hasil Monitoring Hasil Evaluasi Laporan												

Mengetahui :

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan



ANDI AFANDI RAHMAN, ST. M.Si.

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19780424 199803 1 003

Polewali, 12 Februari 2024

Kepala Bidang Ketahanan Pangan

FITRIANI, SP. MP.

Pangkat : Pembina

NIP. : 19700610 200701 2 039

**RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2024**  
**SKPD DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**

**Sub Kegiatan : Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota**

No	Tahapan Kegiatan	Output	Bulan											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PERSIAPAN													
	- Pembuatan Surat yang Ditujukan ke Bulog Cabang Polewali Mandar	Surat Permintaan Cadangan Beras Pemerintah (CPP)												
2	PELAKSANAAN													
	- Pembelian Beras di Bulog	Beras												
	- Pembuatan PJB (Perjanjian Jual Beli Beras)	PJB (Perjanjian Jual Beli Beras)												
	- Penitipan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) di Gudang Bulog	Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)												
3	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN													
	- Pembuatan Laporan	Laporan												

Mengetahui :

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan



ANDI AFANDI RAHMAN, ST. M.Si.

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19780424 199803 1 003

Polewali, 12 Februari 2024

Kepala Bidang Ketahanan Pangan

FITRIANI, SP. MP.

Pangkat : Pembina

NIP. : 19700610 200701 2 039

**RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2024**  
**SKPD DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**

**Sub Kegiatan : Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun**

No	Tahapan Kegiatan	Output	Bulan											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PERSIAPAN													
	- Penyusunan SK Pengambil Data	SK Pengambil Data												
	- Penyusunan SK Pengelola Data	SK Pengolah Data												
2	PELAKSANAAN													
	- Pelatihan Petugas Survey	Laporan												
	- Pelaksanaan Survey Konsumsi Pangan Masyarakat	Data Survey												
	- Pengumpulan Data Hasil Survey	Data Survey												
	- Pengolahan Data Hasil Survey	Data Olahan												
	- Reviu Hasil Survey	Laporan												
	- Penginputan Data Hasil Survey	Aplikasi												
	- Menganalisi Hasil Survey	Laporan												
3	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN													
	- Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	Laporan Monev												

Mengetahui :

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan



ANDI AFANDI RAHMAN, ST. M.Si.

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19780424 199803 1 003

Polewali, 12 Februari 2024

Kepala Bidang Ketahanan Pangan

FITRIANI, SP. MP.

Pangkat : Pembina

NIP. : 19700610 200701 2 039

**RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2024**  
**SKPD DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**

**Sub Kegiatan : Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota**

No	Tahapan Kegiatan	Output	Bulan											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PERSIAPAN - Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM)	Perlengkapan Kegiatan GPM												
2	PELAKSANAAN - Pembuatan Surat Kerjasama yang Ditujukan Ke Bulog - Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM)	Surat Dokumentasi Kegiatan												
3	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN - Pembuatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM)	Laporan												

Mengetahui :

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan



ANDI AFANDI RAHMAN, ST. M.Si.

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19780424 199803 1 003

Polewali, 12 Februari 2024

Kepala Bidang Ketahanan Pangan

FITRIANI, SP. MP.

Pangkat : Pembina

NIP. : 19700610 200701 2 039

**RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2024**  
**SKPD DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**

**Sub Kegiatan : Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan**

No	Tahapan Kegiatan	Output	Bulan											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PERSIAPAN - Pembuatan surat permintaan data SKPD terkait	Surat												
2	PELAKSANAAN - Pengambilan/pengumpulan data terkait indikator - Validasi data - Analisis data indikator peta FSVA - Pembuatan peta ketahanan dan kerentanan pangan (FSVA)	Data Indikator Data yang telah divalidasi Data yang telah dianalisis Peta FSVA												
3	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN - Penyusunan laporan FSVA - Pencetakan buku FSVA	Laporan Buku FSVA												

Mengetahui :



Kepala Dinas Pertanian dan Pangan

ANDI AFANDI RAHMAN, ST. M.Si.

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19780424 199803 1 003

Polewali, 12 Februari 2024

Kepala Bidang Ketahanan Pangan

FITRIANI, SP. MP.

Pangkat : Pembina

NIP. : 19700610 200701 2 039

## **RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2024 BIDANG PETERNAKAN**

## Kegiatan : Penjamianan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota

**Sub Kegiatan : Pemberatan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	BULAN											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	e. Melakukan kegiatan Pemeriksaan pangan asal hewan menjelang perayaan Idul fitri 2024	Dokumen												
	f. Melakukan kegiatan Pemeriksaan pangan asal hewan menjelang perayaan Idul Adha 2024	Notulen Rapat												
III	<b>MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN</b>													
	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan a. Pelayanan Keswan (vaksinasi, pengobatan) dan lalu Lintas Ternak	Laporan Hasil Monev												
	b. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Kesmavet Idul Fitri dan Idul Adha)	Laporan												

Polewali, 12 Februari 2024

Mengetahui,  
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan



ANDI AFANDI RAHMAN, ST.,M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19780424 199803 1 003

PPTK

SAMIO, SP.,M.Si

Pangkat : Penata Tk. I

NIP. : 19721111 200701 2 022

**RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2024**  
**SKPD : DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**

**Sub Kegiatan : Peningkatan Kualitas SDG Hewan / Tanaman**

No	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	BULAN											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I</b>	<b>Persiapan</b>													
1	Pembuatan SK (SK Bupati & SK Dinas)	SK Tim Pelaksana												
2	Pembuatan CPCL (Calon Petani Calon Lahan)	Data CPCL Petani Sawit												
3	Pembuatan Juknis kegiatan	Juknis Kegiatan												
4	Penyiapan bahan kelengkapan Bimtek	Daftar bahan kebutuhan Bimtek												
5	Rapat persiapan pelaksanaan Bimtek													
<b>II</b>	<b>Pelaksanaan</b>													
1	Sosialisasi STD-B	Jumlah peserta sosialisasi STDB												
2	Pendataan Luas Lahan Sawit di 5 Kecamatan	Jumlah petani sawit yang terdata												
3	Pemetaan	Data Polygon petani sawit												
4	Verifikasi	Jumlah petani sawit yang memenuhi syarat administrasi dan lokasi												
5	Penerbitan STD-B	STDB Sawit												
<b>III</b>	<b>Monitoring, Evaluasi Pelaporan</b>													
1	Monitoring dan Evaluasi	Pengawasan kegiatan												
2	Pelaporan	Laporan Kegiatan												

Polewali, 12 Februari 2024

Kepala Bidang Perkebunan



**Namri Izzuddin, SP, MM**

Pangkat : Penata Tk. I

NIP : 19771021 200801 2 009

Mengetahui

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan



**Andi Afandi Rahman, ST, M.Si**

Pangkat : Penata Tk. 1

NIP : 19780424 199803 1 003



## RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2024

### Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

**Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**

**Sub Kegiatan : Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian**

NO	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	BULAN											
			Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nop	Des
<b>1</b>	<b>Persiapan</b>	SK Dokumen												
<b>2</b>	<b>Pelaksanaan</b>	Dokumen												
<b>3</b>	<b>Monitoring</b>	16 Kecamatan Dokumen												

Polewali, 12 Februari 2024

Mengetahui

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan



ANDI AFANDI RAHMAN, ST, M.Si

Pangkat : Penata Tk. 1

NIP : 19780424 199803 1 003

Kepala Bidang PSP,

MUHAMMAD YUNUS, SP, MP.

Pangkat : Pembina

NIP : 19771116 200801 1 010

**RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2024**  
**Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian**

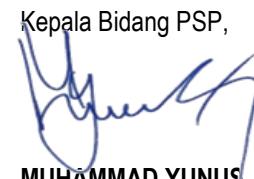
**Kegiatan : Pengembangan Prasarana Pertanian**

**Sub Kegiatan : Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota**

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	BULAN											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	<b>PERSIAPAN</b>													
1	<b>Penyusunan Peta Lahan Sawah</b>													
	a. Penyusunan SK Tim penyusunan peta	SK Tim												
	b. Rapat tim penyusun peta	Notulen Rapat												
II	<b>PELAKSANAAN</b>													
1	<b>Penyusunan Peta Lahan</b>													
	a. Pengambilan data geografis di lapangan	Data geografis												
	b. Penyusunan hasil peta	Peta Lahan Sawah												
III	<b>MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN</b>													
	a. Monitoring dan evaluasi kegiatan	Laporan monev												
	b. Penyusunan Laporan Bulanan	Laporan												
	c. Penyusunan Laporan Triwulan	Laporan												
	d. Penyusunan Laporan Tahunan	Laporan												

Polewali, 12 Februari 2024

Mengetahui  
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan  
  
ANDI AFANDI RAHMAN, ST, M.Si  
Pangkat : Penata Tk. 1  
NIP : 19780424 199803 1 003

Kepala Bidang PSP,  
  
MUHAMMAD YUNUS, SP, MP.  
Pangkat : Pembina  
NIP : 19771116 200801 1 010

**RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2024**  
**SUB KOORDINATOR PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA**

**Sub Kegiatan : Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan**

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	BULAN											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	<b>PERSIAPAN</b>													
1	a. Penentuan Lokasi	Laporan												
	b. Pengusulan CPCL	Dokumen												
	c. Identifikasi cpcl	Dokumen												
	d. Penyusun SK TIM Verifikasi CPCL	SK												
	e. Penyusun SK Penetapan CPCL	SK												
II	<b>PELAKSANAAN</b>													
	a. Melakukan survey Sarana Pengendalian OPT Tanaman Pangan, Hortikultura	Laporan												
	b. Mempersiapkan Dokumen Pendukung Sarana Pengendalian OPT Tanaman Pangan, Hortikultura	Dokumen												
	c. Melaksanakan Kegiatan Sarana Pengendalian OPT Tanaman Pangan, Hortikultura	Dokumen												
III	<b>MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN</b>													
	a. Monitoring dan evaluasi Kegiatan	Laporan Hasil Monev												
	b. Menyusun Laporan Hasil	Laporan												

Polewali, 12 Februari 2024

Mengetahui,

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan



ANDI AFANDI RAHMAN, ST, M.Si

Pangkat : Penata Tk. 1

NIP : 19780424 199803 1 003

Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura,

Hj. DAHLIAH, SP, MP

Pangkat : Pembina

NIP. 19681212 200701 2 041

**RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2024**  
**SUB KOORDINATOR HORTIKULTURA**

**Sub Kegiatan : Pemanfaatan SDG Hewan/Tumbuhan**

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	BULAN											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	<b>PERSIAPAN</b>													
1	a. Penentuan Lokasi	Laporan												
	b. Pengusulan CPCL	Dokumen												
	c. Identifikasi cpcl	Dokumen												
	d. Penyusun SK TIM Verifikasi CPCL	SK												
	e. Penyusun SK Penetapan CPCL	SK												
II	<b>PELAKSANAAN</b>													
	a. Melakukan survey Sarana Pengendalian OPT Tanaman Pangan, Hortikultura	Laporan												
	b. Mempersiapkan Dokumen Pendukung Sarana Pengendalian OPT Tanaman Pangan, Hortikultura	Dokumen												
	c. Melaksanakan Kegiatan Sarana Pengendalian OPT Tanaman Pangan, Hortikultura	Dokumen												
III	<b>MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN</b>													
	a. Monitoring dan evaluasi Kegiatan	Laporan Hasil Monev												
	b. Menyusun Laporan Hasil	Laporan												

Polewali, 12 Februari 2024

Mengetahui,

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan



**ANDRA FANDI RAHMAN, ST, M.Si**

Pangkat : Perwira Tk. 1

NIP : 19780424 199803 1 003

Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura,

**HJ. DAHLIAH, SP, MP**

Pangkat : Pembina

NIP. 19681212 200701 2 041

**RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2024**  
**SUB KOORDINATOR TANAMAN PANGAN**

**Sub Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi**

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	BULAN											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	<b>PERSIAPAN</b>													
1	a. Penentuan Lokasi	Laporan												
	b. Pengusulan CPCL	Dokumen												
	c. Identifikasi cpcl	Dokumen												
	d. Penyusun SK TIM Verifikasi CPCL	SK												
	e. Penyusun SK Penetapan CPCL	SK												
II	<b>PELAKSANAAN</b>													
	a. Melakukan survey Sarana Pengendalian OPT Tanaman Pangan, Hortikultura	Laporan												
	b. Mempersiapkan Dokumen Pendukung Sarana Pengendalian OPT Tanaman Pangan, Hortikultura	Dokumen												
	c. Melaksanakan Kegiatan Sarana Pengendalian OPT Tanaman Pangan, Hortikultura	Dokumen												
III	<b>MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN</b>													
	a. Monitoring dan evaluasi Kegiatan	Laporan Hasil Monev												
	b. Menyusun Laporan Hasil	Laporan												

Polewali, 12 Februari 2024

Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura,

**HJ. DAHLIAH, SP, MP**

Pangkat : Pembina

NIP. 19681212 200701 2 041

Mengetahui,  
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan  
  
**ANDI AFANDI FARMAN, ST, M.Si**  
Pangkat : Pembina Tk. 1  
NIP : 19780424 199803 1 003

**RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2024**  
**SKPD DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**

**Sub Kegiatan** : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

NO	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU PELAKSANAAN											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
I	Persiapan													
	Menyusun Rencana Pemakaian Barang Pakai Habis	Rencana Pemakaian Barang Pakai Habis												
	Menyusun SPK Pengadaan Peralatan/Barang													
II	Pelaksanaan													
	Melaksanakan Pengadaan ATK dan Peralatan Kantor	Tersedianya ATK dan Peralatan Kantor												
	Menyusun Berita Acara Pemeriksaan Barang	Berita Acara Pemeriksaan Barang												
	Menyusun Berita Acara Serah Terima Barang	Berita Acara Serah Terima Barang												
III	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan													
	Memantau dan Mencatat perkembangan dan permasalahan Objek kerja	Bahan Evaluasi												
	Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan	Bahan Laporan												



**KAHARUDDIN, S.Pt, M.Si**

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19681231 200212 1 069

Polewali, 12 Februari 2024

Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



**DARWATI, S.Sos**

Pangkat : Penata Tk.I

NIP : 19661231 199011 2 014

**RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2024**  
**SKPD DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**

**Sub Kegiatan** : Penyediaan Bahan Logistik Kantor

NO	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU PELAKSANAAN											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
I	<b>Persiapan</b>													
	Menyusun Rencana Kebutuhan Makan dan Minum untuk Rapat dan Tamu	Rencana Kebutuhan Makan dan Minum untuk Rapat dan Tamu												
II	<b>Pelaksanaan</b>													
	Menyusun Nota Pesanan Barang	Nota Pesanan Barang												
	Menyiapkan Makan Minum Tamu dan Peserta Rapat	Kelancaran Konsolidasi dan Koordinasi PNS Lingkup Distannak												
III	<b>Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan</b>													
	Memantau dan Mencatat perkembangan dan permasalahan Objek kerja	Bahan Evaluasi												
	Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan	Bahan Laporan												



Polewali, 12 Februari 2024  
Kia. Sub Bagian Umum dan Kepegawaiuan

DARWATI, S.Sos

Pangkat : Penata Tk.I  
NIP : 19661231 199011 2 014

**RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2024**  
**SKPD DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**

**Sub Kegiatan** : Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

NO	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU PELAKSANAAN											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
I	<b>PERSIAPAN</b>													
	Menyusun Rencana Kebutuhan Cetak dan Penggandaan	Rencana Kebutuhan Cetak dan Penggandaan												
II	<b>PELAKSANAAN</b>													
	Melaksanakan cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan cetak dan Penggandaan												
	Menyusun Berita Acara Pemeriksaan Barang	Berita Acara Pemeriksaan Barang												
	Menyusun Berita Acara Serah Terima Barang	Berita Acara Serah Terima Barang												
III	<b>MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN</b>													
	Memantau dan Mencatat perkembangan dan permasalahan Objek kerja	Bahan Evaluasi												
	Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan	Bahan Laporan												

  
 Sekretaris  
**KAHARUDDIN, S.Pt, M.Si**  
 Pangkat : Pembina Tk. I  
 NIP : 19681231 200212 1 069

Polewali, 12 Februari 2024  
 Ma. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  
  
**DARWATI, S.Sos**  
 Pangkat : Penata Tk.I  
 NIP : 19661231 199011 2 014

**RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2024**  
**SKPD DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**

**Sub Kegiatan** : Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

NO	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU PELAKSANAAN											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
I	<b>PERSIAPAN</b>													
	Menyusun Rencana Kebutuhan bahan bacaan	Rencana Kebutuhan bahan bacaan												
II	<b>PELAKSANAAN</b>													
	Melaksanakan Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan												
	Menyusun Berita Acara Pemeriksaan Barang	Berita Acara Pemeriksaan Barang												
	Menyusun Berita Acara Serah Terima Barang	Berita Acara Serah Terima Barang												
III	<b>MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN</b>													
	Memantau dan Mencatat perkembangan dan permasalahan Objek kerja	Bahan Evaluasi												
	Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan	Bahan Laporan												



KAHARUDDIN, S.Pt, M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19681231 200212 1 069

Polewali, 12 Februari 2024

Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

DARWATI, S.Sos

Pangkat : Penata Tk.I

NIP : 19661231 199011 2 014

**RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2024**  
**SKPD DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**

**Sub Kegiatan** : Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Kosultasi SKPD

NO	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU PELAKSANAAN											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
I	<b>PERSIAPAN</b>													
	Menyusun Rencana Perjalanan Dinas	Surat Tugas												
II	<b>PELAKSANAAN</b>													
	Mempersiapkan SPPD dan Surat Tugas	Buku SPPD dan Surat Keluar												
	Melaporkan Hasil Perjalanan Dinas	Laporan												
III	<b>MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN</b>													
	Memantau dan Mencatat perkembangan dan permasalahan Objek kerja	Bahan Evaluasi												
	Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan	Bahan Laporan												



KAHARUDDIN, S.Pt, M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19681231 200212 1 069

Polewali, 12 Februari 2024

Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

DARWATI, S.Sos

Pangkat : Penata Tk.I

NIP : 19661231 199011 2 014

**RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2024**  
**SKPD DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**

**Sub Kegiatan** : Pengadaan Mebel

NO	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU PELAKSANAAN											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
I	<b>Persiapan</b>													
	Menyusun SPK Pengadaan Mebel	SPK Pengadaan Mebel												
II	<b>Pelaksanaan</b>													
	Melaksanakan Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel												
	Menyusun Berita Acara Pemeriksaan Barang	Berita Acara Pemeriksaan Barang												
	Menyusun Berita Acara Serah Terima Barang	Berita Acara Serah Terima Barang												
III	<b>Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan</b>													
	Memantau dan Mencatat perkembangan dan permasalahan Objek kerja	Bahan Evaluasi												
	Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan	Bahan Laporan												



KAHARUDDIN, S.Pt, M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19681231 200212 1 069

Polewali, 12 Februari 2024

Ka. Sub Bagian Umum dan Kepgawain

DARWATI, S.Sos

Pangkat : Penata Tk.I

NIP : 19661231 199011 2 014

**RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2024**  
**SKPD DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**

**Sub Kegiatan** : Penyediaan Jasa Surat Menyurat

NO	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU PELAKSANAAN											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
I	<b>PERSIAPAN</b>													
	Menyusun SK Petugas Surat Menyurat	SK Kepala Dinas												
II	<b>PELAKSANAAN</b>													
	Mengagenda surat Masuk dan keluar	Buku Agenda Surat Masuk dan Keluar												
	Mengarsipkan surat Masuk dan keluar	Arsip Surat Keluar												
	Mendistribusikan Surat Keluar Sesuai dengan alamat tujuan	Buku Ekspedisi Surat Keluar												
III	<b>MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN</b>													
	Memantau dan Mencatat perkembangan dan permasalahan Objek kerja	Bahan Evaluasi												
	Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan	Bahan Laporan												



KAHARUDDIN, S.Pt, M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19681231 200212 1 069

Polewali, 12 Februari 2024

Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

DARWATI, S.Sos

Pangkat : Penata Tk.I

NIP : 19661231 199011 2 014

**RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2024**  
**SKPD DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**

**Sub Kegiatan** : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

NO	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU PELAKSANAAN											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
I	<b>PERSIAPAN</b>													
	Melaksanakan pendataan rekening yang akan dibayar	Daftar Rekening, air, telepon dan Listrik yang												
II	<b>PELAKSANAAN</b>													
	Melaksanakan Pelayanan Pembayaran Rekening Listrik, air dan telepon	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
III	<b>MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN</b>													
	Memantau dan Mencatat perkembangan dan permasalahan Objek kerja	Bahan Evaluasi												
	Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan	Bahan Laporan												

  
 Sekretaris,  
**KAHARUDDIN, S.Pt, M.Si**  
 Pangkat : Pembina Tk. I  
 NIP : 19681231 200212 1 069

Polewali, 12 Februari 2024  
 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaiuan

  
**LURWATI, S.Sos**  
 Pangkat : Penata Tk.I  
 NIP : 19661231 199011 2 014

**RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2024**  
**SKPD DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**

**Sub Kegiatan** : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

NO	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU PELAKSANAAN											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
I	<b>Persiapan</b>													
	Menyusun SK Petugas Cleaning Service	SK Kepala Dinas												
	Rapat Internal	Program Tetap Cleaning Service												
II	<b>Pelaksanaan</b>													
	Membersihkan Ruangan	Ruangan Bersih												
	Membersihkan Kamar Mandi	Kamar Mandi Bersih												
	Membersihkan Peralatan Gedung	Peralatan Gedung Bersih												
	Membersihkan Halaman	Halaman Bersih												
	Membuang Sampah	Tidak terjadi penumpukan Sampah												
III	<b>Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan</b>													
	Memantau dan Mencatat perkembangan dan permasalahan Objek kerja	Bahan Evaluasi												
	Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan	Bahan Laporan												



KAHARUDDIN, S.Pt, M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19681231 200212 1 069

Polewali, 12 Februari 2024

Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

DARMAWATI, S.Sos

Pangkat : Penata Tk.I

NIP : 19661231 199011 2 014

**RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2024**  
**SKPD DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**

**Sub Kegiatan**

: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

NO	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU PELAKSANAAN											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
I	<b>Persiapan</b>													
	Mendata Kendaraan dinas yang rusak, serta Mendata Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Daftar Kendaraan Dinas												
II	<b>Pelaksanaan</b>													
	Melaksanakan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas operasional												
	Menyusun Surat Keterangan dan Kuasa Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Operasional	Surat Keterangan dan Kuasa Perpanjangan STNK												
	Melaksanakan Pelayanan administrasi Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas	Meningkatnya manajemen perizinan Kendaraan Dinas												
III	<b>Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan</b>													
	Memantau dan Mencatat perkembangan dan permasalahan Objek kerja	Bahan Evaluasi												
	Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan	Bahan Laporan												



**KAHARUDDIN, S.Pt, M.Si**

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19681231 200212 1 069

Polewali, 12 Februari 2024

Ka. Sub Bagian Umum dan Kepgawain

**DARWATI, S.Sos**

Pangkat : Penata Tk.I

NIP : 19661231 199011 2 014

**RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2024**  
**SKPD DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**

**Sub Kegiatan** : Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

NO	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU PELAKSANAAN											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
I	<b>PERSIAPAN</b>													
	Menginventarisir Peralatan kantor yang Rusak	Daftar Peralatan Kantor yang Rusak												
II	<b>PELAKSANAAN</b>													
	Melaksanakan Pemeliharaan peralatan Kantor yang Rusak	Peralatan Kantor terpelihara												
III	<b>MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN</b>													
	Memantau dan Mencatat perkembangan dan permasalahan Objek kerja	Bahan Evaluasi												
	Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan	Bahan Laporan												



**KAHARUDDIN, S.Pt, M.Si**

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19681231 200212 1 069

Polewali, 12 Februari 2024  
 Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

**DARWATI, S.Sos**

Pangkat : Penata Tk.I

NIP : 19661231 199011 2 014

**RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2024**  
**SKPD DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**

**Sub Kegiatan** : Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

NO	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU PELAKSANAAN											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
I	<b>PERSIAPAN</b>													
	Mendata ruangan atau gedung kantor yang perlu perbaikan	Daftar Ruangan atau Gedung yang akan diperbaiki												
II	<b>PELAKSANAAN</b>													
	Melaksanakan Pemeliharaan Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor												
III	<b>MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN</b>													
	Memantau dan Mencatat perkembangan dan permasalahan Objek kerja	Bahan Evaluasi												
	Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan	Bahan Laporan												



**KAHARUDDIN, S.Pt, M.Si**

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19681231 200212 1 069

Polewali, 12 Februari 2024  
 Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



**SITTI WAHIDA, SP. MP**

Pangkat : Penata

NIP : 19820406 200604 2 019

**RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2024**  
**SKPD DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**

**Sub Kegiatan** : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

NO	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU PELAKSANAAN											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
I	<b>PERSIAPAN</b>													
	Menyusun KGB, SK Naik Pangkat dan SK Penerima Tunjangan	SK Bupati/Kepala Dinas	■■■■■■■■■■■■■■											
II	<b>PELAKSANAAN</b>													
	Membuat Ampra Gaji, Kekurangan	Daftar Ampra Gaji	■■■■■■■■■■■■■■											
	Membuat ampra tunjangan PNS	Daftar Ampra Tunjangan	■■■■■■■■■■■■■■											
	Mencairkan Gaji, Kekurangan dan Tunjangan	Buku rekening PNS	■■■■■■■■■■■■■■											
III	<b>MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN</b>													
	Memantau dan Mencatat perkembangan dan permasalahan Objek kerja	Bahan Evaluasi	■■■■■■■■■■■■■■						■■■■■■■■■■■■■■					■■■■■■■■■■■■■■
	Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan	Bahan Laporan	■■■■■■■■■■■■■■											



KAHARUDIN, S.Pt, M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19681231 200212 1 069

Polewali, 12 Februari 2024

Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

DARWATI, S.Sos

Pangkat : Penata Tk.I

NIP : 19661231 199011 2 014

# **RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2024**

## **SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PELAPORAN**

#### **Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	BULAN											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	b. Penyusunan Rancangan Awal Renja	Ranwal Renja												
	c. Penyempurnaan Rancangan Awal Renja dan Penyusunan Rancangan Renja	Rancangan Renja												
	d. Pemimpinan Rancangan Renja kepada Balitbangren	Tanda Terima												
	e. Penginputan data informasi perencanaan pada aplikasi SIPD	Pemenuhan data pada aplikasi												
	f. Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja	Rancangan Akhir Renja												
<hr/>														
<b>III</b>	<b>MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN</b>													
	a. Monitoring dan evaluasi penginputan data	Laporan Hasil Monev												
	b. Penyusuan Laporan Renstra	Renstra												
	c. Penyusuan Laporan Renja	Renja												

Polewali, 12 Februari 2024

Mengetahui,  
Sekretaris Dinas  
  
KAHARUDIN, S.Pt, M.Si

Pangkat : Pembina  
NIP : 19681231 200212 1 069

Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  
  
DARWATI, S.Sos  
Pangkat : Penata Tk.I  
NIP : 19661231 199011 2 014

**RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2024**  
**SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PELAPORAN**

*Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	BULAN											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	<b>PERSIAPAN</b>													
	a. Penyampaian pagu indikatif masing-masing bidang	Pagu indikatif bidang												
	b. Rapat Koordinasi penyusunan Pra RKA	Draft pra RKA												
II	<b>PELAKSANAAN</b>													
	a. Penyusunan Rancangan Awal Tahapan RKPD	Draft rancangan awal RKPD												
	b. Penyusunan Rancangan Akhir Tahapan RKPD	Draft rancangan akhir RKPD												
	c. Penetapan RKPD	Dokumen penetapan RKPD												
	d. Rancangan awal KUA-PPAS	Draft KUA PPAS												
	e. Penetapan KUA-PPAS	Dokumen KUA-PPAS												
	f. Rancangan APBD	Draft RAPBD												
	g. Penetapan APBD	DPA 2023												
III	<b>MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN</b>													
	Monitoring penginputan data pada aplikasi	Laporan Hasil Monev												

Polewali, 12 Februari 2024

Mengetahui,  
 Sekretaris Dinas  
  
KAHARUDDIN, S.Pt, M.Si  
 Pangkat : Pembina  
 NIP : 19681231 200212 1 069

Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  
  
DARWATI, S.Sos  
 Pangkat : Penata Tk.I  
 NIP : 19661231 199011 2 014

# RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2024

## SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PELAPORAN

## **Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	BULAN											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	d. Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja	Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja												
III	<b>MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN</b>													
	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja	Laporan Hasil Monev												

Polewali, 12 Februari 2024

Mengetahui,

Sekretaris Dinas



KAHARUDDIN, S.Pt, M.Si

Pangkat : Pembina

NIP : 19681231 200212 1 069

Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

**DARWATI, S.Sos**

Pangkat : Penata Tk.I

NIP : 19661231 199011 2 014

**RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2024**  
**SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PELAPORAN**

*Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD*

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	BULAN											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	<b>PERSIAPAN</b>								7					
	a. Identifikasi Sub. Kegiatan yang akan dilakukan perubahan	Usulan Perubahan dari Bidang							7					
	b. Verifikasi oleh bagian perencanaan	Hasil reviu dari perencanaan							8					
	c. Pengajuan Usulan Perubahan DPA 2023 ke Badan Keuangan	Surat Usulan Rencana Perubahan Tahun 2023												
II	<b>PELAKSANAAN</b>									9				
	a. Penginputan ke aplikasi SIPD 2023	Rencana Perubahan DPA 2023								9				
	b. Validasi hasil penginputan	Validasi DPA Perubahan 2023								9				
	c. Cetak DPA Perubahan	Draft DPA Perubahan									10			
	d. Pengajuan untuk pengesahan DPA Perubahan ke Badan Keuangan	RKA Perubahan 2022												
	e. DPA Perubahan 2023	Dokumen DPA Perubahan 2023												
III	<b>MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN</b>											10		
	Monitoring pelaksanaan DPA perubahan	Laporan Hasil Monev												

Polewali, 12 Februari 2024

Mengetahui:

Sekretaris Dinas



**KAHARUDDIN, S.Pd, M.Si**

Pangkat : Pembina

NIP : 19681231 200212 1 069

Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

**DARWATI, S.Sos**

Pangkat : Penata Tk.I

NIP : 19661231 199011 2 014

**RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2024**  
**SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PELAPORAN**

**Sub Kegiatan : Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	BULAN											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	<b>PERSIAPAN</b>													
	Pembuatan SK Pengelola Kegiatan	SK Pengelola												
	Pembuatan SPJ Uang Persediaan (UP)	Tersedianya UP												
II	<b>PELAKSANAAN</b>													
	Penyusunan Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SPJUP/GU/LS	Laporan SPJ Kegiatan												
III	<b>MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN</b>													
	Penyusunan Laporan SPM, SP2D, BKU dan Fungsional	Laporan Realisasi Kegiatan												
	Rekonsiliasi Laporan Keuangan 4 (empat) Triwulan	Laporan Realisasi Kegiatan												
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan Keuangan Akhir Tahun												

Mengetahui:

Sekretaris Dinas



KANARUDDIN, S.Pt, M.Si

Pangkat : Pembina

NIP : 19681231 200212 1 069

Polewali, 12 Februari 2024

Kia. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

DARWATI, S.Sos

Pangkat : Penata Tk.I

NIP : 19661231 199011 2 014

**RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2024**  
**SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PELAPORAN**

**Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semesteran SKPD**

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	BULAN											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	<b>PERSIAPAN</b>													
	Pembuatan SK Pengelola Kegiatan	SK Pengelola												
	Pembuatan SPJ Uang Persediaan (UP)	Tersedianya UP												
II	<b>PELAKSANAAN</b>													
	Penyusunan Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SPJUP/GU/LS	Laporan SPJ Kegiatan												
III	<b>MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN</b>													
	Penyusunan Laporan SPM, SP2D, BKU dan Fungsional	Laporan Realisasi Kegiatan												
	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan	Laporan Keuangan Fungsional												
	Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan	Laporan Keuangan Triwulan												
	Rekonsiliasi Laporan Keuangan 4 (empat) Triwulan	Laporan Realisasi Kegiatan												
	Penyusunan Laporan Keuangan Smesteran	Laporan Keuangan Semesteran												

Mengetahui,  
 Sekretaris Dinas



KAHARUDDIN, S.Pt, M.Si

Pangkat : Pembina  
 NIP : 19681231 200212 1 069

Polewali, 12 Februari 2024

Ka. Sub Bagian Umum dan Kepengawainan



DARWATI, S.Sos

Pangkat : Penata Tk.I  
 NIP : 19661231 199011 2 014

# RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2024

## PENYULUH PERTANIAN AHLI MUDA

#### **Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa**

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	BULAN											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II	<b>PELAKSANAAN</b>													
	a. Penyusunan Programa Tingkat Kecamatan	Dokumen												
	b. Penyusunan Programa Tingkat Kabupaten	Dokumen												
	c. Melaksanakan Penyusunan dan Penginputan Data	Dokumen												
	d. Perjanjian Kontrak Kerja Bagi Penyuluh PTT Kontrak/Honorer	Dokumen												
	e. Pelaksanaan Pertemuan Rutin Tingkat BPP	Notulen Rapat												
	f. Melakukan Pembayaran Jasa Tenaga Penyuluh Non ASN / PTT-Kontrak Kerja	Dokumen												
	g. Melakukan Pembayaran Jasa Tenaga Operator Komputer	Dokumen												
III	<b>MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN</b>													
	a. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan Rutin Tingkat BPP	Laporan Hasil Monev												
	b. Mengarsipkan Data / Bukti Pembayaran	Arsip												
	c. Membuat Laporan Kegiatan Penyuluh Pertanian Ahli Muda ( Sub.Koordinator Peningkatan SDM )	Laporan												

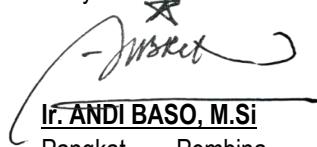
Polewali, 12 Februari 2024

Mengetahui,

Kepala Bidang SDM

  
Ir. ANDI ZAINAL, M.Adm.,KP  
Pangkat : Pembina  
NIP : 196704192006041009

Penyuluh Pertanian Ahli Muda

  
Ir. ANDI BASO, M.Si  
Pangkat : Pembina  
NIP : 19660815 200701 1 025

## **RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2024 BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA**

## **Sub Kegiatan : Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota**

















NO.	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	BULAN											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	e. Penyusunan dan Penetapan SK Peserta Pelatihan	SK												
	Penyusunan Usulan Petugas Regu Pengendali OPT Perkebunan	Surat Keluar (Usulan)												
	f. Penetapan Narasumber Pelatihan	Surat Keluar												
	g. Penyiapan Bahan Pelatihan	Bahan Pelatihan (Obat-Obatan)												
	h. Penyiapan Perlengkapan Peserta	Perlengkapan Peserta (Seminar Kit, Sertifikat, ID Card)												
	i. Penyusunan Materi Pelatihan	Materi Pelatihan												
	j. Penetapan Lokasi dan Jadwal Pelatihan	Jadwal Pelatihan												
II	<b>PELAKSANAAN</b>													
	a. Pelaksanaan Pelatihan	Jumlah Peserta Pelatihan												
	b. Penyerahan dan Penandatangan BAST Bahan Pelatihan Kepada Peserta	BAST												
	c. Pengendalian OPT Perkebunan bersama dengan Regu Pengendali OPT Perkebunan	BAST												
III	<b>MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN</b>													
	a. Monitoring dan evaluasi kegiatan	Laporan Hasil Monev												
	b. Penyusunan Laporan Triwulan	Laporan												
	c. Penyusunan Laporan Tahunan	Laporan												
<b>15. Pelatihan Penggunaan dan Pemanfaatan Cultivator</b>														
I	<b>PERSIAPAN</b>													
	a. Pendataan CPCL Penerima Bantuan	Dokumen												
	b. Penyusunan SK Penerima	Dokumen												
	c. Penyusunan Juknis Pengadaan	Dokumen												
	d. Pedoman Pelatihan	Dokumen												
II	<b>PELAKSANAAN</b>													
	a. Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian	Dokumen												
	b. Pelatihan Alat dan Mesin Pertanian	Dokumen												
III	<b>MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN</b>													

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	BULAN											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	a. Monitoring dan evaluasi kegiatan	16 Kecamatan												
	b. Penyusunan Laporan Bulanan	Laporan												
	c. Penyusunan Laporan Triwulan	Laporan												
	d. Penyusunan Laporan Tahunan	Laporan												
<b>16. Pelatihan Penggunaan dan Pemanfaatan Traktor Roda 2</b>														
I	<b>PERSIAPAN</b>													
	a. Pendataan CPCL Penerima Bantuan	Dokumen												
	b. Penyusunan SK Penerima	Dokumen												
	c. Penyusunan Juknis Pengadaan	Dokumen												
	d. Pedoman Pelatihan	Dokumen												
II	<b>PELAKSANAAN</b>													
	a. Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian	Dokumen												
	b. Pelatihan Alat dan Mesin Pertanian	Dokumen												
III	<b>MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN</b>													
	a. Monitoring dan evaluasi kegiatan	16 Kecamatan												
	b. Penyusunan Laporan Bulanan	Laporan												
	c. Penyusunan Laporan Triwulan	Laporan												
	d. Penyusunan Laporan Tahunan	Laporan												

Polewali, 12 Februari 2024

Mengetahui,  
Kepala Bidang Pengembangan SDM,

  
**Ir. ANDI ZAINAL, M.Adm.KP**

Pangkat : Pembina  
NIP : 19670419 200604 1 009

Sub. Koordinator Kelembagaan Petani



**CINDAR DEWI, S.Pt**  
Pangkat : Penata Tk.I  
NIP : 19790923 200604 2 014

**RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2024**  
**SUB KOORDINATOR SARANA DAN PERIZINAN**

Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Sub Kegiatan : Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	BULAN											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I. PERSIAPAN</b>														
a.	Melakukan penginputan RUP pada aplikasi SIRUP	Dokumen RUP												
b.	Menyusun Kelengkapan Dokumen Kegiatan Tahun 2024	DPA Tahun 2024 dan Dokumen Pengadaan												
c.	Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	Notulen Rapat												
d.	Survey Lokasi Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	Laporan Hasil Survey												
<b>II. PELAKSANAAN</b>														
a.	Pelaksanaan Kegiatan Penghasil PAD	Sarana Pendukung BPP												
b.	Pelaksanaan Penyediaan ATK untuk 16 BPP dan Fungsional Kabupaten	Barang (ATK)												
b.	Pelaksanaan Pembebasan Tanah/Lahan BPP Anreapi	Dokumen/Sertifikat												
<b>III. MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN</b>														
a.	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Laporan monev												

Polewali, 12 Februari 2024

Mengetahui:  
 Kepala Bidang Pengembangan SDM



Ir. ANDI ZAINAL, M.Adm.KP  
 Pangkat : Pembina  
 NIP : 19670419 200604 1 009

Sub Koordinator Sarana dan Perizinan

  
H. DIANA. R, SP, MP  
 Pangkat : Pembina  
 NIP : 19680418 200212 2 003

**RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2024**  
**KEPALA UPTD BALAI BENIH PADI DAN PALAWIJA**

Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	BULAN											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	<b>PERSIAPAN</b>													
	- Rapat Tim Kerja	SK Pelaksanaan kegiatan												
	Pembuatan SK Pelaksanaan Kegiatan	dan SK Penetapan												
	- Survey Lokasi Penangkaran	Lokasi Penangkaran												
	- Penetapan Lokasi Penangkaran Benih Padi	Benih Padi												
II	<b>PELAKSANAAN</b>													
	- Pemeriksaan Lapangan Lokasi Penangkaran Benih Padi	Hasil Pemeriksaan												
	- Belanja Calon Benih Padi	Calon Benih Padi												
	- Proses Pengeringan Calon Benih Padi	Calon Benih Padi												
	- Prosesing Calon Benih Padi	Benih Padi												
	- Pengemasan Benih Padi	Benih Padi												
	- Agribisnis Benih Padi	Hasil Penjualan dikelolah												
		UPTD Balai Benih Padi dan Palawija												
III	<b>MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN</b>													
	- Pembinaan dan evaluasi kelompok tani penangkar benih padi	Laporan												
	- Monitoring keadaan benih padi yang ada digudang	Laporan												
	- Monitoring dan evaluasi daya tumbuh benih yang sudah tersalur ke petani	Laporan												
	- Pembuat laporan penjualan / Penyaluran benih padi	Laporan												
	- Membuat laporan stok benih padi	Laporan												

Polewali, 12 Februari 2024

Mengelolahi:  
Kepala Dinas,

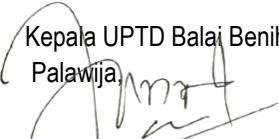


**ANDI AFANDI RAHMAN, ST, M. Si**

Pangkat : Pembina Tk.I/IV.b

NIP : 19780424 199803 1 003

Kepala UPTD Balai Benih Padi dan  
Palawija



**YUNAEDI, SP, M. Si**

Penata : Penata

NIP : 19750616 200701 1 029

## **RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2024 UPTD BALAI PEMBITITAN DAN HORTIKULTURA**

**Sub Kegiatan : Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/ Tanaman**

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	BULAN											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III	<b>MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN</b>													
a.	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Laporan Hasil Monev												
b.	Penyusunan Laporan Bulanan	Laporan												
c.	Penyusunan Laporan Triwulan	Laporan												
d.	Penyusunan Laporan Tahunan	Laporan												

Mengetahui,  
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan,

  
**ANDI AFANDI RAHMAN, ST, M.Si**  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP : 19780424 199803 1 003

Polewali, 12 Februari 2024  
Kasubag. TU UPTD Balai Pembibitan  
dan Hortikultura,

  
**ANDI WIRAWATI PIRZAN, S.Pt, M.Si**  
Pangkat : Penata  
NIP : 19830320 200604 2 020

**RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2024**  
**UPTD INSEMINASI**

**Sub Kegiatan : Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak , Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil**

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	BULAN											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	<b>PERSIAPAN</b>													
	a. Penyusunan SK Petugas Lapangan, Rekorder dan Handling Semen Beku.	SK Petugas												
	b. Penetapan Wilayah Kerja Inseminator	Daftar Wilayah Kerja												
	c. Penyediaan ATK	ATK												
	d. Penyediaan Alat dan Bahan IB	Alat dan Bahan IB												
II	<b>PELAKSANAAN</b>													
	a. Distribusi Semen Beku dan N2cair	Kegiatan Distribusi												
	b. Pelaksanaan Kegiatan IB	Kegiatan IB												
	b. Pelaksanaan Pemeriksaan Kebuntingan	Kegiatan PKB												
	c. Pelaksanaan Pertolongan Kelahiran	Kelahiran ternak												
III	<b>MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN</b>													
	a. Monitoring Kegiatan Bulanan	Laporan												
	a. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	Laporan Hasil Monev												
	b. Penyusunan Laporan Kegiatan	Laporan Bulanan												
	c. Penyusunan Laporan Tahunan	Laporan Tahunan												

Polewali, 12 Februari 2024

Mengetahui,

**Kepala Dinas Pertanian dan Pangan**



*[Signature]*

Andi Afandi Rahmat, ST, M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19780424 199803 1 003

**Kepala UPTD Inseminasi**



Ir. Irdawati Rakhim

Pangkat : Penata Tk. I

NIP : 19670923 200003 2 004

## **RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2024 UPTD RPH DAN PASAR HEWAN**

#### ***Sub Kegiatan : Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan***

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	BULAN											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III	MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN													
	a. Monitoring dan evaluasi	Laporan Hasil Monev				■				■				■
	b. Penyusuan Laporan	Laporan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Polewali, 12 Februari 2024

Mengetahui,  
Kepala Dinas



ANDI AFANDI RAHMAM ST, M.Si  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP : 19780424 199803 1 003

Kepala UPTD RPH dan Pasar Hewan,

MUHAMMAD NURSAID, SP, MS.i  
Pangkat : Pembina  
NIP : 19740704 200212 1 009

**RENCANA KINERJA TAHUN 2024**  
**KEPALA UPTD BREEDING CENTRE**

**Sub Kegiatan : Pelastarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumput/ Galur Ternak**

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	BULAN											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	<b>PERSIAPAN</b>													
	<i>Pembuatan SK Petugas</i>													
II	<b>PELAKSANAAN</b>													
	<i>Belanja Upah (Perawatan Ternak)</i>	Laporan												
	<i>Pembelian Bahan Logistik</i>	Laporan												
III	<b>MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN</b>													
	a. Monitoring dan Evaluasi	Laporan												
	b. Penyusunan Laporan Hasil	Laporan												

Polewali, 12 Februari 2024

Mengetahui,  
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan



ANDI AFANDI RAHMAN, ST, M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19780424199803100 :

Kepala UPTD Breeding Centre,

AHMAD SY, SP, MM

Pangkat : Pembina, IV/a

NIP : 19740103 200701 1 020

## **RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2024** **KEPALA UPTD KESEHATAN HEWAN**

**Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**  
**Sub Kegiatan : Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner**

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	BULAN											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	c. Pemeriksaan dan investigasi penyebab kematian ternak di lokasi	Rekam Medik dan Alkes												
	d. Pengambilan sampel ternak	Alkes dan APD												
	e. Pemberian tindakan medis ternak/hewan sakit sekawan dan beresiko	Alkes dan Obat Hewan												
	f. Handling dan Pengiriman sampel ke laboratorium UPTD Kesehatan Hewan dan Bbvet Maros	Sampel Ternak												
III	MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN													
	a. Monitoring dan evaluasi kegiatan	Laporan monev												
	b. Penyusunan Laporan kegiatan per bulan	Laporan												
	c. Penyusunan Laporan kegiatan tri wulan	Laporan												
	d. Penyusunan Laporan Tahunan	Laporan												

Polewali, 12 Februari 2024

KEPALA UPTD KESEHATAN HEWAN

**Drh. ISNANIAH BAGENDA**

Pangkat : Pembina

NIP : 19790515 200604 2 019

Mengetahui,

KEPALA DINAS

**ANDI AFANDI RAHMAN, ST, M.Si**

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19780424 199803 1 003

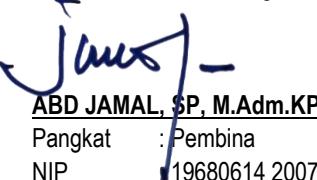
**RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2024**  
**KEPALA UPTD BALAI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN**

**Sub Kegiatan : Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian**

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	BULAN											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	<b>PERSIAPAN</b>													
1	<b>Sosialisasi Pelaksanaan BIMTEK Pengolahan Kelapa</b>													
	a. Survey Lokasi Pelaksanaan Bimtek	Laporan												
	b. Inventarisasi Kelompok Calon Peserta Bimtek	Laporan												
	c Rapat Pemantapan Pelaksanaan Kegiatan	Notulen Rapat												
2	<b>Administrasi</b>													
	a. Penyusunan SK Panitia Bimtek	SK Panitia												
	b. Penyusunan SK Kelompok Peserta Bimtek	SK Peserta												
	c Penyusunan SK Narasumber	SK Narasumber												
II	<b>PELAKSANAAN</b>													
1	<b>Pelaksanaan BIMTEK Pengolahan Kelapa (Pembuatan Minyak Kelapa)</b>													
III	<b>MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN</b>													
	a. Monitoring dan evaluasi kegiatan	Laporan monev												
	b. Penyusunan Laporan Bulanan	Laporan												
	c. Penilaian Kelayakan Pertimbangan Teknis Usaha Pertanian	Laporan												
	d. Penyusunan Laporan Tahunan	Laporan												

Polewali, 12 Februari 2024

Kepala UPTD Balai Pengolahan Hasil Perkebunan

  
ABD JAMAL, SP, M.Adm.KP  
Pangkat : Pembina  
NIP 19680614 200701 1 0032

Mengetahui,  
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan

  
ANDI AFANDI RAHMAN, ST, M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19780424 199803 1 003

# Pengukuran Kinerja Tahun 2024

## Dinas Pertanian Dan Pangan

Pengukuran Kinerja

Pengukuran Anggaran

Kendala dan Solusi

0 - 24.99%

25 - 49.99%

50 - 74.99%

75 - 94.99%

95 - 100%

Pejabat	Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)												Realisasi(%)	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>Kepala Dinas Pertanian Dan Pangan</b>																
	Program :															
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan Masyarakat	48,227,445						18,968,471						29,258,974	48,227,445	100.00
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	4,965,802												4,965,802	4,965,802	100.00
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	2,140,409,331						328,902,384			199,064,436			982,392,511	1,510,359,331	70.56
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	134,316,725						10,131,405			3,984,890			120,200,430	134,316,725	100.00
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	31,552,834									20,032,950			11,519,884	31,552,834	100.00

Pejabat	Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)												Realisasi(%)	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	8,121,726												8,121,726	8,121,726	<b>100.00</b>
	Program Perizinan Usaha Pertanian	21,430,242												21,430,242	21,430,242	<b>100.00</b>
	Program Penyuluhan Pertanian	7,532,807,830									6,776,280,940			756,526,890	7,532,807,830	<b>100.00</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18,001,680,182		3,121,222,350		5,880,195,212					4,534,934,762			4,465,327,858	18,001,680,182	<b>100.00</b>

# Pengukuran Kinerja Tahun 2024

## Dinas Pertanian Dan Pangan

Pengukuran Kinerja

Pengukuran Anggaran

Kendala dan Solusi

Tidak Ada Target	0 - 49.99%	50 - 64.99%	65 - 74.99%	75 - 89.99%	90 - 99.99%	Tercapai 100%	Melebihi Target >100%
------------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-----------------------

Pejabat	Sasaran Renstra	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target												Kinerja(%)				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Jumlah				
<b>Kepala Dinas Pertanian Dan Pangan</b>																					
Sasaran Renstra :																					
Meningkatnya Ketahanan Pangan																					
		Indeks Ketahanan Pangan	angka	75.87						30					45.87	75.87	<b>100.00</b>				
		Meningkatnya kapasitas produksi sektor pertanian																			
		Percentase petumbuhan produksi padi	persen	0.1											-1	-1	<b>-1000.00</b>				
		Percentase petumbuhan Populasi Kambing	persen	1					0.35						0.35	0.69	<b>69.00</b>				
		Percentase petumbuhan Populasi Unggas		1					0.04						0.04	0.08	<b>8.00</b>				
		Percentase petumbuhan produksi jagung	persen	0.1					-21						-21	-42	<b>-42000.00</b>				
		Percentase petumbuhan Produksi kedelai	persen	0.1					898.5						898.5	1,797	<b>1797000.00</b>				
		Percentase petumbuhan Produksi Buah-Buahan	persen	0.1					1.5						1.5	3	<b>3000.00</b>				
		Percentase petumbuhan Produksi Sayuran	persen	50					-18						-18	-36	<b>-72.00</b>				
		Percentase petumbuhan produksi Kakao	persen	1.5					-0.02						-0.02	-0.04	<b>-2.67</b>				

Pejabat	Sasaran Renstra	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target												Kinerja(%)	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Jumlah	
		Persentase petumbuhan produksi Kelapa	persen	1						0.06						0.06	0.12	<b>12.00</b>
		Persentase petumbuhan Produksi Kopi	persen	3						1.65						1.65	3.29	<b>109.67</b>
		Persentase petumbuhan Populasi Sapi	persen	0,1						0.2						0.3	0.5	<b>Infinity</b>
Meningkatnya Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Dinas																		
		Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Dinas	predikat	Sangat Baik							Sangat Baik					Sangat Baik	100	<b>100</b>

# POHON KINERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

**Visi:**  
**Polewali Mandar Maju Rakyat Sejahtera**

## MISI

Mewujudkan Taraf Hidup Masyarakat Yang Lebih Baik dan SDM Yang Berkualitas dan Religius

Mempekuat Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Wilayah

Mengembangkan Infrastruktur Berkualitas dan Terintegrasi serta Berwawasan Lingkungan

Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Modern

### Tujuan RPJMD: Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat

Indikator : Angka Kemiskinan

2019	2020	2021	2022	2023
15,60%	15,26	14,81	14,36	13,91

### Tujuan RPJMD: Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Indikator : Indeks Pembangunan Manusia

2019	2020	2021	2022	2023
63,74	63,84	64,42	65,19	65,96

### Tujuan RPJMD: Meningkatnya Perekonomian Daerah Berbasis Sektor Unggulan

Indikator : Pertumbuhan ekonomi

2019	2020	2021	2022	2023
6,17	-1,56	4,50	5,00	5,50

### Tujuan RPJMD: Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih Akuntabel dan Modern

Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi

2019	2020	2021	2022	2023
62	66	71	75	81

### Sasaran RPJMD: Meningkatnya Ketahanan Pangan

Indikator : Indeks Ketahanan Pangan

2019	2020	2021	2022	2023
73,11	73,27	74,47	75,67	76,87

### Sasaran RPJMD: Meningkatnya Peran Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

### Indikator : Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB

2019	2020	2021	2022	2023
6,27%	0,84%	5%	6	7

### Sasaran RPJMD: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat

2019	2020	2021	2022	2023
Baik	Baik	S.Baik	S.Baik	S.Baik

### Sasaran Program Meningkatnya kualitas diversifikasi pangan masyarakat

### Sasaran Program Menurunnya daerah rentan rawan pangan

### Sasaran Program : Meningkatnya produksi sektor pertanian

Indikator :  
- Jumlah Produksi Padi  
- Jumlah Produksi Jagung  
- Jumlah Produksi Kedelai

Indikator :  
- Jumlah Produksi Buah-buahan  
- Jumlah Produksi Sayuran

Indikator :  
- Jumlah Produksi Kakao  
- Jumlah Produksi Kelapa  
- Jumlah Produksi Kopi

Indikator :  
- Jumlah Populasi Sapi  
- Jumlah Populasi Kambing  
- Jumlah Populasi Unggas

Indikator :  
- Skor PPH Konsumsi  
- Skor PPH Ketersediaan

Indikator :  
Persentase daerah rentan rawan pangan

2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Indikator :  
Persentase daerah rentan rawan pangan

2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Indikator :  
Persentase daerah rentan rawan pangan

2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Indikator :  
Persentase daerah rentan rawan pangan

2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Indikator :  
Persentase daerah rentan rawan pangan

2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Indikator :  
Persentase daerah rentan rawan pangan

2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Indikator :  
Persentase daerah rentan rawan pangan

2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Indikator :  
Persentase daerah rentan rawan pangan

2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Indikator :  
Persentase daerah rentan rawan pangan

2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Indikator :  
Persentase daerah rentan rawan pangan

2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Indikator :  
Persentase daerah rentan rawan pangan

2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Indikator :  
Persentase daerah rentan rawan pangan

2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Indikator :  
Persentase daerah rentan rawan pangan

2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Indikator :  
Persentase daerah rentan rawan pangan

2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Indikator :  
Persentase daerah rentan rawan pangan

2019	2020	2021	2022	2023</

# POHON KINERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

**Visi:**  
**Polewali Mandar Maju Rakyat Sejahtera**

## MISI

Mewujudkan Taraf Hidup Masyarakat Yang Lebih Baik dan SDM Yang Berkualitas dan Religius

Mempekuat Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Wilayah

Mengembangkan Infrastruktur Berkualitas dan Terintegrasi serta Berwawasan Lingkungan

Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Modern

### Tujuan RPJMD: Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat

Indikator : Angka Kemiskinan

2019	2020	2021	2022	2023
15,60%	15,26	14,81	14,36	13,91

### Tujuan RPJMD: Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Indikator : Indeks Pembangunan Manusia

2019	2020	2021	2022	2023
63,74	63,84	64,42	65,19	65,96

### Tujuan RPJMD: Meningkatnya Perekonomian Daerah Berbasis Sektor Unggulan

Indikator : Pertumbuhan ekonomi

2019	2020	2021	2022	2023
6,17	-1,56	4,50	5,00	5,50

### Tujuan RPJMD: Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih Akuntabel dan Modern

Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi

2019	2020	2021	2022	2023
62	66	71	75	81

### Sasaran RPJMD: Meningkatnya Ketahanan Pangan

Indikator : Indeks Ketahanan Pangan

### Sasaran RPJMD: Meningkatnya Peran Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

### Indikator : Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB

2019	2020	2021	2022	2023
6,27%	0,84%	5%	6	7

### Sasaran Program Meningkatnya ketersediaan prasarana pertanian

Indikator :  
Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian

2019	2020	2021	2022	2023
4	10	12	14	16

### Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

### Sasaran Program Menurunnya kasus penyakit hewan menular

Indikator :  
Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular

2019	2020	2021	2022	2023
10	11,28	12	13	14

### Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

### Sasaran Program Meningkatnya kualitas pengendalian bencana pertanian

Indikator :  
Persentase Fasilitasi Penanggulangan Bencana Pertanian

2019	2020	2021	2022	2023
100	100	100	100	100

### Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

### Sasaran Program Meningkatnya kualitas layanan izin usaha pertanian

Indikator :  
Persentase Penerbitan Izin Usaha Pertanian

2019	2020	2021	2022	2023
100	91,5	92	93	94

### Program Perizinan Usaha Pertanian

### Sasaran Program Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia Penyuluhan Pertanian dan kelompok tani

Indikator :  

- Persentase Penyuluhan Pertanian yang mengikuti Pelatihan Tematik
- Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani

2019	2020	2021	2022	2023
0	50	60	65	70

2019	2020	2021	2022	2023
3	3	4	5	6

### Program Penyuluhan Pertanian

Sasaran Program Meningkatnya kualitas diversifikasi pangan masyarakat					
Indikator : - Skor PPH Konsumsi - Skor PPH Ketersediaan					
2019	2020	2021	2022	2023	
86	87	88	89	90	
69	96	97	98	99	

**Program**  
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan  
Masyarakat

Sasaran Program Menurunnya daerah rentan rawan pangan					
Indikator : Persentase daerah rentan rawan pangan					
2019	2020	2021	2022	2023	
27	27	26	25	24	

**Program**  
Program Penanganan Kerawanan Pangan

Unit  
Es. II

Sasaran Kegiatan Meningkatnya ketersediaan dan distribusi Pangan Pokok					Sasaran Kegiatan Meningkatnya Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi					Sasaran Kegiatan Meningkatnya ketahanan kerawanan pangan					Sasaran Kegiatan Meningkatnya akurasi peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan				
Indikator : Jumlah Pangan Pokok yang tersedia dan terdistribusi (Ton)					Indikator : Jumlah Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun					Indikator : Jumlah daerah rawan pangan yang tertangani (Desa)					Indikator : Jumlah dokumen peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan (Dokumen)				
2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
50	51	52	53	54	.14	.5	.5	.5	.5			1	2	3					
<b>Kegiatan</b> Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan																			
<b>Kegiatan</b> Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi																			

Unit  
Es. III

Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan					Sasaran Sub Kegiatan Tersusunnya kebijakan penanganan kerawanan pangan					Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya data Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun					Sasaran Sub Kegiatan Meningkatnya ketahanan Masyarakat dalam keanekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal					Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan					
Indikator : Jumlah Publikasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan (Bulan)					Indikator : Jumlah kebijakan penanganan kerawanan pangan (Kali)					Indikator : Jumlah dokumen data konsumsi pangan per kapita per tahun (Dokumen)					Indikator : Jumlah kelompok tani yang mengembangkan tanaman pekarangan (Kelompok)					Indikator : Jumlah dokumen peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan (Dokumen)					
2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
12	12	12	12	12	1	1	1	1	1		1	1	1	1		4	4	8	8	8		1	1	1	1
<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan																									
<b>Sub Kegiatan</b> Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota																									
<b>Sub Kegiatan</b> Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun																									
<b>Sub Kegiatan</b> Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengantekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																									
<b>Sub Kegiatan</b> Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan																									

Unit  
Es. IVSeksi  
Distribusi dan Harga PanganSeksi  
Konsumsi dan Keamanan PanganSeksi  
Ketersediaan dan kerawanan Pangan

Sasaran Program : Meningkatnya produksi sektor pertanian																									
Indikator :					Indikator :					Indikator :					Indikator :					Sasaran Program					
- Jumlah Produksi Padi					- Jumlah Produksi Buah-buahan					- Jumlah Produksi Kakao					- Jumlah Populasi Sapi					Meningkatnya kualitas pengendalian bencana pertanian					
- Jumlah Produksi Jagung					- Jumlah Produksi Sayuran					- Jumlah Produksi Kelapa					- Jumlah Populasi Kambing										
- Jumlah Produksi Kedelai										- Jumlah Produksi Kopi					- Jumlah Populasi Unggas										
2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Indikator :					
297. 196	309. 839	322. 483	335. 125	347. 769	1.04 6,9	49.3 17	54.3 33	58.8 21	68.8 53	33.4 36	33.4 75	33.4 33	33.4 42	33.4 50	13.1 83	35.4 04	37.0 80	45.0 07	52.9 35	Percentase Fasilitasi Penanggulangan Bencana Pertanian					
110. 258	40.8 83	44.9 71	49.0 60	53.1 48	2.95 4,04	1.45 3,4	2.14 6	2.23 2	2.31 9	19.9 88	20.0 27	20.4 14	20.7 35	21.0 57	94.1 81	94.8 38	95.2 87	95.7 76	96.2 65	2019	2020	2021	2022	2023	
3.94 1	3.35 6	4.70 1	5.06 5	5.43 0	-	-	-	-	-	818	823	917	1.03 8	1.15 9	3.20 5.08 7	3.27 5.50 1	3.42 1.33 7	3.54 4.76 2	3.66 8.18 7	100	100	100	100	100	
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian																									
Program Pengembangan Sarana Pertanian																									
Program Pengembangan Sarana Pertanian																									
Program Pengembangan Sarana Pertanian																									
Program Pengembangan Sarana Pertanian																									
Program Pengembangan Sarana Pertanian																									
Program Pengembangan Sarana Pertanian																									
Program Pengembangan Sarana Pertanian																									
Program Pengembangan Sarana Pertanian																									
Program Pengembangan Sarana Pertanian																									
Program Pengembangan Sarana Pertanian																									
Program Pengembangan Sarana Pertanian																									
Program Pengembangan Sarana Pertanian																									
Program Pengembangan Sarana Pertanian																									
Program Pengembangan Sarana Pertanian																									
Program Pengembangan Sarana Pertanian																									
Program Pengembangan Sarana Pertanian																									
Program Pengembangan Sarana Pertanian																									
Program Pengembangan Sarana Pertanian																									
Program Pengembangan Sarana Pertanian																									
Program Pengembangan Sarana Pertanian																									
Program Pengembangan Sarana Pertanian																									
Program Pengembangan Sarana Pertanian																									
Program Pengembangan Sarana Pertanian																									
Program Pengembangan Sarana Pertanian																									
Program Pengembangan Sarana Pertanian																									
Program Pengembangan Sarana Pertanian																									
Program Pengembangan Sarana Pertanian																									
Program Pengembangan Sarana Pertanian																									
Program Pengembangan Sarana Pertanian																									
Program Pengembangan Sarana Pertanian																									
Program Pengembangan Sarana Pertanian																									
Program Pengembangan Sarana Pertanian																									
Program Pengembangan Sarana Pertanian																									
Program Pengembangan Sarana Pertanian																									
Program Pengembangan Sarana Pertanian																									
Program Pengembangan Sarana Pertanian																									

Sasaran Program Meningkatnya kualitas pengendalian bencana pertanian				
Indikator : Percentase Fasilitasi Penanggulangan Bencana Pertanian				
2019	2020	2021	2022	2023
100	100	100	100	100
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian				

Sasaran Program Meningkatnya kualitas layanan izin usaha pertanian				
Indikator : Percentase Penerbitan Izin Usaha Pertanian				
2019	2020	2021	2022	2023
100	91,5	92	93	94
Program Perizinan Usaha Pertanian				

Sasaran Kegiatan Optimalnya tanggap bencana pertanian				
Indikator : Luas lahan bencana pertanian yang tertangani (Ha)				
2019	2020	2021	2022	2023
61	62	63	64	65
Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota				

Sasaran Kegiatan Meningkatnya izin usaha pertanian				
Indikator : Jumlah rekomendasi Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan				
2019	2020	2021	2022	2023
60	40	50	60	70
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				

Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya sarana Perlindungan Tanaman Perkebunan				
Indikator : Jumlah Pengadaan Pestisida (Jenis)				
2019	2020	2021	2022	2023
3	0	2	3	4
Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				
Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan				

Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Bibit Tanaman perkebunan				
Indikator : Jumlah Bibit Tanaman Perkebunan				
2019	2020	2021	2022	2023
2000	0	3000	6927	6000
Sub Kegiatan Pencegahan, Penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan				
Seksi Peningkatan Produksi				

Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya sarana teknologi hasil perkebunan				
Indikator : Jumlah jenis sarana teknologi hasil perkebunan				
2019	2020	2021	2022	2023
2	0	2	3	4
Sub Kegiatan Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan				
Seksi Pengembangan Usaha dan Pasca Panen				

Sasaran Sub Kegiatan Meningkatnya keterampilan kelompok tani perkebunan				
Indikator : Jumlah Kelompok tani perkebunan yang terlatih				
2019	2020	2021	2022	2023
2	0	2	2	2
Sub Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian				

Unit  
Es. IIUnit  
Es. IIIUnit  
Es. IV

Sasaran Program Menurunnya kasus penyakit hewan menular					
Indikator : Percentase Penurunan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular					
2019	2020	2021	2022	2023	
10	11,28	12	13	14	
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner					

Sasaran Kegiatan Meningkatnya kesehatan hewan					
Indikator : Jumlah ternak yang dilayani kesehatannya (Ekor)					
2019	2020	2021	2022	2023	
			4.000		
Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota					

Sasaran Kegiatan Meningkatnya kesejahteraan hewan					
Indikator : Jumlah populasi hewan yang sejahtera (Ekor)					
2019	2020	2021	2022	2023	
			10		
Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan					

Sasaran Kegiatan Meningkatnya kesehatan masyarakat veteriner					
Indikator : Jumlah unit usaha hewan yang memenuhi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner (Unit)					
2019	2020	2021	2022	2023	
1	1	1	1	1	
Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner					

Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Sarana kesehatan hewan					
Indikator : Jumlah Jenis Sarana Kesehatan Hewan (Jenis)					
2019	2020	2021	2022	2023	
2	2	2	2	2	
Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis					

Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya semen Beku dan N2 Cair					
Indikator : Jumlah Semen beku dan N2 Cair					
2019	2020	2021	2022	2023	
Sub Kegiatan Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					

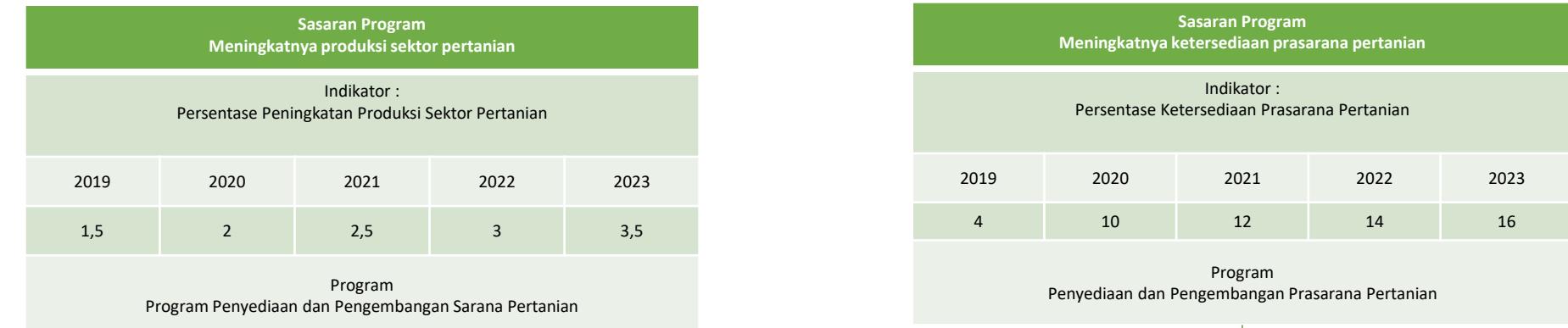
Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Pakan Ternak					
Indikator : Jumlah Jenis Pakan Ternak					
2019	2020	2021	2022	2023	
Sub Kegiatan Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan					

Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya bibit Ternak					
Indikator : Jumlah ternak Sapi dan Kambing					
2019	2020	2021	2022	2023	
Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan					

Seksi  
Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner

Seksi  
Peningkatan Produksi dan Teknologi Peternakan

Seksi  
Penyebaran dan Pengembangan Ternak



Sasaran Program Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia Penyuluhan Pertanian dan kelompok tani					
Indikator :					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase Penyuluhan Pertanian yang mengikuti Pelatihan Tematik</li> <li>- Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani</li> </ul>					
2019	2020	2021	2022	2023	
0	50	60	65	70	
3	3	4	5	6	
Program Penyuluhan Pertanian					

Sasaran Program Meningkatnya ketersediaan prasarana pertanian					
Indikator :					
Percentase Ketersediaan Prasarana Pertanian					
2019	2020	2021	2022	2023	
4	10	12	14	16	
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian					

Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Penyuluhan Pertanian					
Indikator :					
Jumlah Penyuluhan Pertanian Ahli dan Terampil					
2019	2020	2021	2022	2023	
85,35	69,36	68,37	69,36	71,38	
Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian					

Sasaran Kegiatan Meningkatnya kemanfaatan prasarana pertanian					
Indikator :					
Jumlah prasarana pertanian yang terbangun/terehabilitasi					
2019	2020	2021	2022	2023	
12	72				
Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian					

Sasaran Sub Kegiatan Terlatihnya penyuluhan pertanian Terbayarkannya honor penyuluhan					Sasaran Sub Kegiatan Tersusunnya data Kelas Kelompok Tani					Sasaran Sub Kegiatan Tertembukunya Korporasi Petani					Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Sarana Penyuluhan					Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya bangunan Balai Penyuluhan di Kecamatan serta sarana pendukungnya				
Indikator :					Indikator :					Indikator :					Indikator :					Indikator :				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Penyuluhan pertanian yang terlatih</li> <li>- Jumlah Penyuluhan yang dibayarkan honornya (Orang)</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah kelompok tani yang telah dinilai</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Korporasi Petani yang dibentuk</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Jenis sarana penyuluhan</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah balai penyuluhan di kecamatan yang terbangun/terehabilitasi</li> </ul>				
2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
40	0	50	60	80	2.350	2.349	2.345	2.350	2.360	0	0	1	2	3	1	1	2	3	3	0	0	15	3	2
167	167	150	155	160	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa					Sub Kegiatan Pembentukan Badan Usaha Milik Petani					Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian					Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluhan di Kecamatan serta sarana pendukungnya				
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa																								

Unit Es. II

Unit Es. III

Unit Es. IV

MATRIKS CASCADING KINERJA TAHUN 2024  
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

TUJUAN RPJMD		SASARAN RPJMD		TUJUAN RENSTRA		SASARAN RENSTRA		PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN		
Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Sasaran Program	Indikator	Program	Sasaran Kegiatan	Indikator	Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Sub Kegiatan
<b>VISI : POLEWALI MANDAR MAJU RAKYAT SEJAHTERA</b>																
<b>MISI 1 : MEWUJUDKAN TARAF HIDUP MASYARAKAT YANG LEBIH BAIK DAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN RELIGIUS</b>																
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan															
		Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan													
			Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan												
				Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan											
						Meningkatnya ketersediaan cadangan pangan masyarakat		Percentase cadangan pangan masyarakat	Program Pengelolaan Sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan							
											Meningkatnya akurasi data Prasarana Pertanian	Jumlah jenis peta Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian			
														Tersusunnya peta lahan baku sawah	Jumlah Kecamatan yang memiliki peta lahan baku sawah	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B
														Tersusunnya peta Jaringan Daerah Irigasi	Jumlah Peta jaringan Daerah Irigasi	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya
						Meningkatnya kualitas diversifikasi pangan masyarakat		Skor PPH Konsumsi	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan Masyarakat							
								Skor PPH Ketersediaan								
											Meningkatnya ketersediaan dan distribusi Pangan Pokok	Jumlah Pangan Pokok yang tersedia dan terdistribusi	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			
														Tersedianya Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan yang	Jumlah Publikasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan yang	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
														Terkendaliannya stok, pasokan dan harga pangan	Jumlah stok, pasokan dan Harga Pangan yang terkendali	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
											Meningkatnya Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah	Jumlah cadangan pangan pemerintah yang tersedia	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota			
														Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten	Jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
											Meningkatnya Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			



TUJUAN RPJMD		SASARAN RPJMD		TUJUAN RENSTRA		SASARAN RENSTRA		PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Sasaran Program	Indikator	Program	Sasaran Kegiatan	Indikator	Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Sub Kegiatan	
								Meningkatnya produksi sektor pertanian	Jumlah Produksi Sayuran Jumlah produksi Kakao Jumlah produksi Kelapa Jumlah Produksi Kopi Jumlah Populasi Sapi Jumlah Populasi Kambing Jumlah Populasi Unggas	Pengembangan Sarana Pertanian							
											Meningkatnya panen tanaman pangan	Luas Panen Tanaman Pangan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				
													Tersedianya sarana pertanian	Jumlah alat dan mesin pertanian		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
													Optimalnya penerimaan benih tanaman pangan	Jumlah benih padi, jagung dan kedelai yang didistribusikan		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
											Meningkatnya panen Tanaman Perkebunan dan Hortikultura	Luas Panen Tanaman Perkebunan Luas Panen Tanaman Hortikultura	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota				
													Tersedianya Bibit Tanaman perkebunan	Jumlah Bibit Tanaman Perkebunan		Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	
													Tersedianya Bibit Buah-bahan hasil okulasi	Jumlah bibit tanaman buah-bahan yang diokulasi		Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	
													Tersedianya bibit hortikultura	Jumlah jenis bibit hortikultura		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	
											Meningkatnya Kelahiran hasil Inseminasi Buatan	Jumlah Kelahiran hasil Inseminasi Buatan	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota				
													Optimalnya Inseminasi Buatan pada Ternak sapi	Jumlah inseminasi buatan		Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/ Pakan/ Tanaman Skala Kecil	
											Meningkatnya Populasi Ternak Besar dan Ternak Kecil	Jumlah Populasi Ternak Besar dan Ternak Kecil	Penyediaan Benih/Bibit dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota Lain				
													Tersedianya bibit Ternak	Jumlah ternak Sapi dan Kambing		Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
													Tersedianya Pakan Ternak	Jumlah Pakan Ternak yg tersedia		Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
								Meningkatnya ketersediaan prasarana pertanian	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian							
											Meningkatnya akurasi data Prasarana Pertanian	Jumlah jenis peta Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian				

TUJUAN RPJMD		SASARAN RPJMD		TUJUAN RENSTRA		SASARAN RENSTRA		PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN		
Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Sasaran Program	Indikator	Program	Sasaran Kegiatan	Indikator	Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Sub Kegiatan
														Tersusunnya peta lahan baku sawah	Jumlah Kecamatan yang memiliki peta lahan baku sawah	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelaanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelaanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelaanjutan/ LCP2B
														Tersusunnya peta Jaringan Daerah Irigasi	Jumlah Peta jaringan Daerah Irigasi	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya
											Meningkatnya kemanfaatan prasarana pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang terbangun/terehabilitasi	Pembangunan Prasarana Pertanian			
														Tersedianya bangunan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang terbangun	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
														Tersedianya bangunan embung Pertanian	Jumlah embung yang terbangun	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
														Tersedianya bangunan Jalan Usaha Tani	Jumlah jalan usaha tani yang terbangun	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
														Tersedianya bangunan DAM PARIT	Jumlah DAM Parit yang terbangun	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM PARIT
														Tersedianya bangunan Long Storage	Jumlah Long Storage yang terbangun	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage
														Tersedianya bangunan Pintu Air	Jumlah pintu air yang terbangun	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air
														Tersedianya bangunan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang terbangun	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan
														Tersedianya bangunan Balai Penyuluhan di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah balai penyuluhan di kecamatan yang terbangun/terehabilitasi	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluhan di Kecamatan serta sarana pendukungnya
														Tersedianya bangunan Prasarana Pertanian, perkebunan dan peternakan	Jumlah bangunan Prasarana Pertanian, perkebunan dan peternakan	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
						Menurunnya kasus penyakit hewan menular	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			Meningkatnya kesehatan hewan	Jumlah ternak yang dilayani kesehatannya	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota			

TUJUAN RPJMD		SASARAN RPJMD		TUJUAN RENSTRA		SASARAN RENSTRA		PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN		
Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Sasaran Program	Indikator	Program	Sasaran Kegiatan	Indikator	Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Sub Kegiatan
														Tersedianya Sarana kesehatan hewan	Jumlah Jenis Sarana Kesehatan Hewan	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
										Meningkatnya Kualitas Pelayanan jasa Medik Veteriner	Jumlah kasus penyakit hewan yang ditangani	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota				
										Meningkatnya kesehatan masyarakat veteriner	Jumlah unit usaha hewan yang memenuhi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner			Penyediaan Layanan Jasa Medik Veteriner	
										Meningkatnya kesejahteraan hewan	Jumlah populasi hewan yang sejahtera	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan				
										Optimalnya tanggap bencana pertanian	Luas lahan bencana pertanian yang tertangani	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota				
													Tersedianya Sarana Pengendalian Organisme Penganggu Tumbuhan	Jumlah Perangkap Babi	Pengendalian Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
													Tersedianya sarana Perlindungan Tanaman Perkebunan	Jumlah Pestisida yang tersedia	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
													Tersedianya bibit tanaman kakao hasil sambung pucuk	Jumlah bibit tanaman kakao yang disambung pucuk	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	
								Meningkatnya kualitas layanan izin usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan sesuai standar dan prosedur	Program Perizinan Usaha Pertanian						
										Meningkatnya Izin Usaha Pertanian	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
													Meningkatnya keterampilan kelompok tani perkebunan	Jumlah Kelompok tani perkebunan yang terlatih	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	
													Meningkatnya keterampilan kelompok usaha kakao	Jumlah Kelompok usaha kakao yang terlatih	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	
													Meningkatnya keterampilan kelompok Penangkar benih padi	Jumlah Kelompok Penangkar Benih Padi yang terbina	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	

TUJUAN RPJMD		SASARAN RPJMD		TUJUAN RENSTRA		SASARAN RENSTRA		PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN		
Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Sasaran Program	Indikator	Program	Sasaran Kegiatan	Indikator	Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Sub Kegiatan
								Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia Penyuluh Pertanian dan kelompok tani	Persentase Penyuluh Pertanian yang memiliki kompetensi Tematik	Program Penyuluhan Pertanian						
									Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani							
											Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Penyuluh Pertanian	Jumlah Penyuluh Pertanian Ahli dan Terampil	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			
														Optimalnya kinerja penyuluh pertanian	Jumlah Penyuluh pertanian yang terlatih	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
															Jumlah Penyuluh yang dibayarkan honornya	
														Tersusunnya data Kelas Kelompok Tani	Jumlah kelompok tani yang telah dinilai	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
														Tersedianya Sarana Penyuluhan	Jumlah Jenis sarana penyuluhan	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
														Terbentuknya Korporasi Petani	Jumlah Korporasi Petani yang dibentuk	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN  
RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN IV TAHUN 2024**

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan(Tahun 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan IV Tahun 2024								Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024	Ket					
				I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+6+7+8)		10 = 9/4 x 100%	11								
1	PROGRAM	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH Konsumsi; Skor PPH Ketersediaan	91;100	Skor	78,508,899	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kinerja	% Kinerja	% Rp		
1.1	Kegiatan	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Pangan Pokok yang tersedia dan terdistribusi	5.5	Ton	38,516,541		-		18,968,471		-		29,258,974		48,227,445	0	61	
1.1.1	Sub. Kegiatan	Stabilisasi Pasokan dan harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	1	Laporan	33,000,141		-	0.5	15,736,071	0.50		0.5	17,264,070	2	33,000,141	150	100	
1.1.2	Sub. Kegiatan	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	12	Laporan	5,516,400	3	-	3	3,232,400	3		3	2,095,836	12	5,328,236	100	97	
2.2	Kegiatan	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan cadangan pangan pemerintah	7	Ton	29,992,200		-							-	-	-	-	-
2.2.1	Sub. Kegiatan	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	3.8	Ton	29,992,200		-							-	-	-	-	-
2.3	Kegiatan	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun	396,572.5	g/kapita/hari	10,000,158		-						9,899,068		9,899,068		99	
2.3.1	Sub. Kegiatan	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1.00	Dokumen	10,000,158	0.3	-	0.3		0.3		0.1	9,899,068	0.95	9,899,068	95	99	
2	PROGRAM	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah desa/kelurahan rawan pangan	20	Desa/Kel	5,000,342		-						4,965,802	-	4,965,802	0	99	
2.1	Kegiatan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah dokumen peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan	1	Dokumen	5,000,342		-						4,965,802	-	4,965,802	-	99	
2.1.1	Sub. Kegiatan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1	Dokumen	5,000,342	0.3	-	0.3		0.3		0.1	4,965,802	1.00	4,965,802	100	99	
3	PROGRAM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu - Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100 100	Per센	18,269,672,637		3,121,222,350		5,880,195,212		4,534,934,762		4,465,327,858		18,001,680,182	0	99	
3.1	Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Dokumen	10,000,456		-				7,000,648		2,999,808	-	10,000,456	-	100	
3.1.1	Sub. Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	2,720,277	0.3	-	0.3		0.3	2,720,277	0.1		1.0	2,720,277	100	100	
3.1.2	Sub. Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	4,280,371	0.3	-	0.3		0.3	4,280,371	0.1		1.0	4,280,371	100	100	

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan(Tahun 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan IV Tahun 2024								Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024	Ket					
				I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = (5+6+7+8)		10 = 9/4 x 100%		11			
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kinerja	% Kinerja	% Rp	% Kinerja	% Rp			
3.1.3	Sub. Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1,999,565				0.5		1	1,999,565	1	1,999,565	100	100		
3.1.4	Sub. Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	1,000,243						1	1,000,243	1	1,000,243	100	100		
3.2	Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase SPJ Fungsional	3	Dokumen	16,019,121,601	2,953,139,100	5,358,935,120	3,823,131,706	3,669,474,593	-		15,804,680,519	-	-	99			
3.2.1	Sub. Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	241	Orang/bulan	16,014,157,642	60	2,953,139,100	60	5,358,935,120	60	3,818,167,747	60	3,669,474,593	240	15,799,716,560	100	99	
3.2.2	Sub. Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	2,237,333						2,237,333	1		1	2,237,333	100	100	
3.2.3	Sub. Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2	Laporan	2,726,626		1				2,726,626	1		2	2,726,626	100	100	
3.3	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Umum yang tersedia pada Kantor Perngkat Daerah	100	Persen	165,715,927			28,942,310		48,892,008		77,899,859	-	155,734,177	-	94		
3.3.1	Sub. Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.00	Paket	27,750,573				0.5	11,397,258	1	6,371,733	1	17,768,991	100	64		
3.3.2	Sub. Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12.00	Paket	13,515,000				6	6,000,000	6	7,515,000	12	13,515,000	100	100		
3.3.3	Sub. Kegiatan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1.00	Paket	7,817,754				0.5	4,953,680	0.5	2,863,906	1	7,817,586	100	100		
3.3.4	Sub. Kegiatan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	1,440,000	4		360,000	4	360,000	4	720,000	12	1,440,000	100	100		
3.3.5	Sub. Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	115,192,600	3		28,582,310	4	26,181,070	2	60,429,220	12	115,192,600	100	100		
4.4	Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pengadaan baru Barang Milik Perangkat Daerah	25	Persen	-			-		-		-	-	-	-	-		
4.4.1	Sub. Kegiatan	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	Unit									-	-	-	-		
4.4.2	Sub. Kegiatan	Pengadaan Peralatan dan MesinLainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14	Unit												-		
4.5	Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Tagihan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	Persen	1,957,381,373	168,083,250	478,160,000	635,095,660	642,960,400	-		1,924,299,310	-	-	98			
4.5.1	Sub. Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	126,975,713	3	15,633,250	3	20,810,000	3	24,290,000	3	33,160,400	12	93,893,650	100	74	

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan(Tahun 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan IV Tahun 2024								Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024	Ket				
				I		II		III		IV								
				5		6		7		8		9 = (5+6+7+8)		10 = 9/4 x 100%				
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kinerja		% Kinerja	% Rp	11		
4.5.2	Sub. Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	1,830,405,660	3	152,450,000	3	457,350,000	3	610,805,660	3	609,800,000	12	1,830,405,660	100	100
4.6	Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah	100	Persen	117,453,280	-	-	14,157,782	-	20,814,740	-	71,993,198	-	106,965,720	-	91	
4.6.1	Sub. Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	146	Unit	100,647,000			37	14,157,782	20	9,164,740	90	66,836,918	146	90,159,440	100	90
4.6.2	Sub. Kegiatan	Pemeliharaan Peralatan dan MesinLainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	Unit	11,650,000					3	11,650,000			3	11,650,000	100	100
4.6.3	Sub. Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	5,156,280							1	5,156,280	1	5,156,280	100	100
4	PROGRAM	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Padi; Jagung; Kedelai; Durian; Rambutan; Langsat; Pisang; Bawang Merah; Cabe; Wortel;Kentang	340	Ton	2,556,211,452	-	-	328,902,384	-	199,064,436	-	982,392,511	-	2,140,409,331	0	84	
4.1	Kegiatan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	- Jumlah rekomendasi Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan - Luas lahan bencana pertanian yang tertangani, - Luas Panen Tanaman Pangan	80 65 94.960	Dokumen Ha	1,121,531,800		-	-	-	196,280,000		924,924,500	-	1,121,204,500	0	100	
4.1.1	Sub. Kegiatan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1	Laporan	1,113,015,000		0.5		1	196,280,000		916,542,100	1	1,112,822,100	100	100	
4.1.2	Sub. Kegiatan	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1	Laporan	8,516,800		0.5					1	8,382,400	1	8,382,400	100	98
4.2	Kegiatan	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Luas Panen Tanaman Perkebunan; Luas Panen Tanaman Hortikultura	82,271	Ha	748,057,611		-	328,902,384	-	2,784,436	-	2,576,858	-	334,263,678	-	45	
4.2.1	Sub. Kegiatan	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1	Dokumen	700,965,000		0.5	307,500,000			1		1.0	307,500,000	100	44	
4.2.2	Sub. Kegiatan	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1	Dokumen	21,565,791						1	2,576,858	1	2,576,858	100	12	
4.2.3	Sub. Kegiatan	Penjaminan Kemurian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	3	Laporan	25,526,820	1	1.0	21,402,384	1	2,784,436			3	24,186,820	100	95	
4.3	Kegiatan	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelahiran hasil Inseminasi Buatan	1,886	Ekor	56,572,041		-	-	-	-		54,891,153	-	54,891,153	-	97	
4.3.1	Sub. Kegiatan	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1	Laporan	56,572,041		0.5				1	54,891,153	1	54,891,153	100	97	
4.4	Kegiatan	Penyediaan Bibit Ternakd Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Kelahiran hasil Inseminasi Buatan	1,886	Ekor	630,050,000		-	-	-	-		630,050,000	-	630,050,000	-	100	

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan(Tahun 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan IV Tahun 2024								Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024	Ket				
				I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = (5+6+7+8)		10 = 9/4 x 100%		11		
			Kinerja	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Kinerja		% Kinerja	% Rp			
4.4.1	Sub. Kegiatan	Pengadaan bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain		1 Laporan	630,050,000		0.5				1	630,050,000	1	630,050,000	100	100		
5	PROGRAM	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian	18 Persen	134,325,006		-	3	10,131,405		3,984,890		120,200,430	3	134,316,725	16.7	100	
5.1	Kegiatan	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah jenis peta Prasarana Pertanian	6 Jenis	34,324,201		-		-		-		34,315,920	-	34,315,920	-	100	
5.1.1	Sub. Kegiatan	Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	1 Unit	10,850,000		0.5						10,850,000	1	10,850,000	100	100	
5.1.2	Sub. Kegiatan	Penyusunan Peta Kawasan, Lahandan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan diKabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	1 Dokumen	23,474,201		0.5						23,465,920	1	23,465,920	100	100	
5.2	Kegiatan	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian	1 Unit	70,000,000		-				-		70,000,000	-	70,000,000	-	100	
5.2.1	Sub. Kegiatan	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1 Unit	70,000,000		1						70,000,000	1	70,000,000	100	100	
5.3	Kegiatan	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalamDaerah Kabupaten/ Kota	Jumlah unit usaha hewan yang memenuhi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	1 Dokumen	30,000,805		-		10,131,405		3,984,890		15,884,510	-	30,000,805	-	100	
5.3.1	Sub. Kegiatan	Pelestarian dan PemanfaatanWilayah Sumber Bibit Ternak danRumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	1 Laporan	30,000,805		0.5	10,131,405		3,984,890	1	15,884,510	1	30,000,805	100	100		
6	PROGRAM	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	15 Persen	32,791,196		-				20,032,950		11,519,884	-	31,552,834	0	96	

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan(Tahun 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan IV Tahun 2024								Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024	Ket				
				I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+6+7+8)		10 = 9/4 x 100%		11						
Kegiatan	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ternak yang dilayani kesehatannya	4500	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kinerja	% Kinerja	% Rp				
6.1	Kegiatan	Pemberantasan Penyakit HewanMenular dan Zoonosis dalam 1 (satu)Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu)Daerah Kabupaten/kot	1	Laporan	18,516,903		0.5		1	2,633,703	-	18,516,903	-	100			
6.1.1	Sub. Kegiatan	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis kasus penyakit hewan yang ditangani	14	jenis	14,274,293		6		8	4,149,750		8,886,181	14	13,035,931	100	91	
6.2.1	Sub. Kegiatan	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1	Laporan	14,274,293		0.5		1	8,886,181	1	13,035,931	100	91			
7	PROGRAM	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Fasilitasi Penanggulangan Bencana Pertanian	100 %	100 %	10,611,770						8,121,726	-	8,121,726	0	77		
7.1	Kegiatan	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas lahan bencana pertanian yang tertangani	65	Ha	10,611,770						8,121,726	-	8,121,726	-	77		
7.1.1	Sub. Kegiatan	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	20	Ha	10,611,770				20		8,121,726	20	8,121,726	100	77		
8	PROGAM	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Penerbitan Izin Usaha Pertanian	95	Persen	21,680,008						21,430,242	-	21,430,242	0	99		
8.1	Kegiatan	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan	80	Dokumen	6,781,256						6,541,610	-	6,541,610	-	96		
8.1.3	Sub. Kegiatan	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	1	Laporan	6,781,256		0.5		1	6,541,610	1	6,541,610	100	96			
8.2	Kegiatan	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Pengusaha Pertanian yang diawasi	5	Pengusaha	14,898,752					5	14,888,632	5	14,888,632	100	100		
8.2.1	Sub. Kegiatan	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi	1	Laporan	14,898,752		0.5		1	14,888,632	1	14,888,632	100	100			
9	PROGAM	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	* Persentase Penyuluhan Pertanian yang mengikuti Pelatihan Tematik *Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani	75	Persen	9,970,809,591					6,776,280,940		756,526,890	-	7,532,807,830	0	76	
9.1	Kegiatan	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Penyuluhan Pertanian Ahli dan Terampil	71; 38	Orang	9,970,809,591					6,776,280,940	71	756,526,890	71	7,532,807,830	100	76	
9.1.1	Sub. Kegiatan	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	16	Unit	36,004,123				16		26,142,040	16	26,142,040	100	73		
9.1.2	Sub. Kegiatan	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1	Dokumen	245,174,450		1				245,174,450	1	245,174,450	100	100		
9.1.3	Sub. Kegiatan	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	2	Unit	391,749,018		1		1		271,643,880	2	271,643,880	100	69		

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan(Tahun 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan IV Tahun 2024								Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024	Ket				
				I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kinerja	% Kinerja	% Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8							9 = (5+6+7+8)	10 = 9/4 x 100%		11	
9.1.4	Sub. Kegiatan	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	16	Unit	9,297,882,000		3		16	6,776,280,940		213,566,520	19	6,989,847,460	120	75	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)			550.80	31,079,610,901	78	3,121,222,350	133	6,238,197,472		11,534,297,978		6,399,744,317	656	27,923,512,117	119.17	89.85		
Predikat Kinerja																		

Faktor pendorong keberhasilan kinerja OPD :

- 1 Sumber Daya Manusia yang handal dalam pelaksanaan TUPOKSI setiap unit kerja.
- 2 Terbangunnya komitmen yang kuat perangkat Daerah dalam Pencapaian target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja

Faktor penghambat pencapaian kinerja OPD :

- 1 ss



Keterangan :

1. Diisi sesuai dengan maksud yang tertulis pada kolom dan baris.
2. Kolom 2 diisi dengan nama Program, nama kegiatan dan nama sub Kegiatan sesuai dengan yang tertuang dalam program, kegiatan, sub kegiatan pada Renja perangkat Daerah tahun 2022
3. Kolom 3 diisi dengan nama Indikator Kinerja Outcome Program, Kinerja Output Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan yang tertuang Indikator Kinerja pada Renja perangkat Daerah tahun 2022
4. Kolom 4 diisi dengan Target Kinerja dan Anggaran (Rp) Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021), atau yang tertuang dalam DPA Perangkat Daerah Tahun 2022
5. Kolom 5 s.d 8 diisi dengan Realisasi Kinerja dan Rupiah-Anggaran (output, outcome dan Keuangan) sebagaimana yang tertuang dalam DPPA Perangkat Daerah 2022, secara lengkap untuk semua triwulan
6. Kolom 9= (5+6+7+8), isian kolom Kinerja dan kolom Rupiah dengan menjumlahkan Realisasi capaian kinerja dan Rupiah kolom 8, 9, 10 dan 11
7. Kolom 11=(9/4 x 100) isian kolom 9 didibagi hasil kolom 4 dikali 100